

Sejarah Pergerakan Nasional

Penulis:

Hasnani Siri

Editor:

Saidin Hamzah

Penerbit IAIN Parepare Nusantara Press



2022

Sejarah Pergerakan Nasional

Penulis

Hasnani Siri

Editor

Saidin Hamzah

Desain Sampul

Endi

Penata Letak

Endi

Copyright IPN Press,
ISBN : 978-623-8092-23-9
196 hlm 14.8 cm x 21 cm
Cetakan I, Desember 2022

Diterbitkan oleh:
IAIN Parepare Nusantara Press
(Anggota IKAPI sejak 2022)
Jalan Amal Bakti No. 08 Soreang
Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91132

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan
apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Dicetak oleh IAIN Parepare Nusantara Press, Parepare.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pujisyukur kehadiran Allah, Tuhan yang Maha Pencipta yang telah mengajarkan manusia dengan perantaraan *qalam*, dan mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Dengan segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan pertolongannya sehingga kami bisa menyelesaikan penulisan buku yang berjudul “*Sejarah Pergerakan Nasional*” sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada Rosulullah Muhammad saw sebagai pelopor penggerak perubahan yang sepatutnya kita jadikan suri teladan dalam kehidupan sehari-hari.

Buku Sejarah Pergerakan Nasional ini hadir untuk membuka cakrawala berpikir atau cara pandang generasi muda ataupun masyarakat pada umumnya supaya sadar akan pentingnya sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah, karena merdekanya Bangsa Indonesia bukan lahir dengan sendirinya melainkan dengan semangat perjuangan dan tumpah darah, dari perang diponegoro, paderi, aceh Makassar sampai perang Maluku. Hingga lahirnya organisasi-organisasi

Budi Utomo, Sarikat Dagang Islam, Emansipasi Wanita, Muhammadiyah dan juga NU menjadi basic atau wadah perlawanan terhadap bangsa asing

Akhir kata, penulis perlu banyak berterima kasih kepada Dosen dan Mahasiswa yang telah banyak membantu dalam proses penyusunan buku ini, mulai dari proses pengeditan hingga pencetakan. Penulis sangat menyadari bahwa dalam urain buku ini tentunya masih sangat banyak kekurangan dan kekeliruan di dalamnya, dengan demikian saran dan kritik yang membangun dari para pembaca yang Budiman sangat kami harapkan demi perbaikan kedepan Akhirul Kalam, semoga buku ini dapat bermanfaat dan bernilai pahala disisinya akhirnya kepada Allah jualah kita berserah diri.

Parepare, 16 Desember 2022



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
BAB I	9
PERANG DIPONEGORO.....	9
A. Latar Belakang Perang Diponegoro	9
B. Prose Perang Diponegoro	14
C. Jalannya Peperang Diponegoro	16
D. Idealisme Keagamaan Diponegoro dan Komunitas Santri	30
E. Dampak dari Perang Diponegoro	33
BAB II.....	39
PERANG PADERI.....	39
A. Latar Belakang Perang Paderi	39
B. Kronologis terjadinya Perang Paderi.....	43
C. Perjanjian dalam Perang Paderi	48
D. Tokoh Perang Paderi	52
E. Peperangan jilid kedua.....	71
F. Berakhirnya Perang Paderi	81
PERANG ACEH.....	82
A. Latar Belakang Perang Aceh.....	82
B. Kondisi Sosial dan Politik masyarakat aceh.....	84
C. Kegagalan Belanda Pada Invasi Pertama.....	85
BAB III.....	93

PERANG MAKASSAR DAN PERANG MALUKU	93
A. Latar Belakang Masalah.....	93
B. Proses Kejadian Perang Makassar.....	95
C. Eksistensi Umat Islam Pasca Perang Makassar	108
D. Faktor Perlawanan Masyarakat	115
PERANG MALUKU.....	122
A. Latar Belakang Masalah.....	122
B. Prose Terjadinya Peperangan	126
C. Perlawanan Rakyat Maluku.....	128
D. Dampak Akibat Peperangan.....	135
BAB IV.....	137
PENAKLUKAN KALIMANTAN.....	137
A. Latar Belakang Masalah.....	137
B. Sejarah Berdirinya Kerajaan Banjar.....	140
C. Sebab Terjadinya Perang Banjar	145
BAB V	151
GERAKAN SOSIAL KEAGAMAAN.....	151
A. Latar Belakang Masalah.....	151
B. Pengertian Agama.....	153
C. Gerakan Sosial.....	157
BAB VI.....	169
EMANSIPASI WANITA.....	169
A. Latar Belakang Masalah.....	169
B. Riwayat Hidup Kartini	173
C. Pemikiran R.A. Kartini Terhadap Wanita dari Aspek Kesetaraan Gender.	183
D. Karya-karya Tulis R.A. Kartini.....	186

BAB VII.....	193
PERGERAKAN KEBANGSAAN DAN POLITIK KEMERDEKAAN	193
A. Latar Belakang Masalah.....	193
B. Penyebab Munculnya Pergerakan Nasional.....	198
C. Politik Kemerdekaan	204
BAB VIII.....	211
SAREKAT DAGANG ISLAM.....	211
A. Latar Belakang Munculnya Sarekat Dagang Islam	211
B. Sejarah berdirinya Sarekat Dagang Islam	214
C. Cabang-Cabang Sarekat Islam di Indonesia.	225
D. Timbulnya Konflik Dalam Tubuh SI.....	228
BAB XI.....	233
BUDI UTOMO	233
A. Latar Belakang Lahirnya Budi Utomo	233
B. Lahirnya Budi Utomo	245
C. Perkembangan Budi Utomo	249
D. Tujuan Berdirinya Budi Utomo.....	252
E. Reaksi Belanda terhadap berdirinya Budi Utomo	253
F. berakhirnya Organisasi Budi Utomo	257
BAB IX.....	261
GERAKAN MUHAMMADIYAH.....	261
A. Latar Belakang Berdirinya Muhammadiyah.....	261
B. Zaman Kolonial Belanda.....	262
C. Zaman Kolonial Jepang	265
D. Sejarah Terbentuknya Muhammadiyah.....	268
E. Muhammadiyah Sebagai Organisasi Pergerakan.....	272
F. Muhammadiyah Sebagai Gerakan Pendidikan.....	277

BAB X	285
GERAKAN NAHDLATUL ULAMA	285
A. Latar belakang berdirinya NU	285
B. Pemahaman keagamaan NU	290
C. Dasar dan Peran Nahdlatul Ulama dalam Mewujudkan Kemerdekaan	293
BAB XII.....	297
PIAGAM JAKARTA.....	297
A. Sejarah Piagam Jakarta.....	297
B. Perumusan dan Penetapan isi Piagam Jakarta.....	302
C. Proses Perubahan Piagam Jakarta	311
D. Hubungan Piagam Jakarta dan UUD 1945	318
E. Perbedaan Piagam Jakarta dan Pancasila.....	319
BAB XIII.....	321
PEMBERONTAKAN PKI	321
A. Berdirinya Partai Komunis Indonesia (PKI)	321
B. Pemberontakan Pki Muso Di Madiun	327
C. Timbulnya Reaksi Terhadap Pemberontakan PKI.....	336
D. Gerakan Operasi Militer Terhadap PKI Musso	345
BAB XIV.....	347
PENUTUP	347
A. Kesimpulan	347
B. Implikasi	348
DAFTAR PUSTAKA.....	349



BAB I

PERANG DIPONEGORO

A. Latar Belakang Perang Diponegoro

Pada saat Indonesia masih dijajah oleh pihak asing, terjadi banyak peperangan di bumi Indonesia. Sebagian besar dari peperangan yang terjadi tersebut dilakukan agar Indonesia bisa lepas dari cengkeraman para penjajah. sekian banyak perang yang pernah terjadi salah satunya adalah perang Diponegoro. Perang Diponegoro adalah sebuah perang besar yang pernah terjadi di Pulau Jawa. Pihak-pihak yang berseteru dalam perang ini adalah Pangeran Diponegoro beserta pasukannya dan pasukan kolonial Belanda. Perang ini terjadi pada tahun 1825 hingga 1830. Dalam bahasa asing, perang ini dikenal dengan sebutan “The Java War” atau “De Java Oorlog”.¹

Perang besar ini semula melibatkan rakyat dalam melawan penjajahan. Masuknya Belanda kedalam pemerintah dalam hal ini keraton, telah memberikan pengaruh dalam tata kehidupan yang semula ketat dengan tradisi masyarakat setempat berubah mengikuti tradisi barat sehingga menjadi pemicu lahirnya perlawanan² perang ini banyak melibatkan berbagai kekuatan yang dimiliki secara tradisional melawan

kekuatan Belanda dengan persenjataan modern seperti Meriam, senjata laras panjang, pistol serta penggunaan strategi pertahanan Benteng Stelsel, dengan keterbatasan yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan Kondisi yang demikian Belanda telah membawa pengaruh negatif yang merubah tatanan budaya dalam lingkungan kehidupan keraton.³

Namun cara Daendels memerintah dianggap tidak berbudaya dan melanggar tata krama yang menimbulkan kemarahan dari keraton. Daendels sering meminta akses pengelolaan sumber daya alam dan perbudakan rakyat Jawa dengan tekanan kekuatan militernya. Daendels bahkan memaksa para penduduk Jawa membangun jalur transportasi dari Anyer hingga Panarukan. Terlebih lagi setelah kematian Sri Sultan Hamengkubuwana I menjadi peluang bagi kolonial Hindia Belanda memperkuat pengaruhnya di tanah Jawa khususnya di kalangan Kerajaan Jawa.⁴ awalnya Pangeran Diponegoro tidak berniat campur tangan dalam urusan keraton. Dirinya lebih memilih hidup terpisah karena posisi ibunya yang bukan seorang permaisuri. Pangeran Diponegoro lebih tertarik pada masalah keagamaan dan hidup sebagai rakyat biasa. Pangeran Diponegoro baru menaruh perhatian kepada keraton saat Belanda mulai banyak mencampuri urusan internal keraton, masalah pungutan pajak yang tinggi kepada para petani. Kemudian, puncak kemarahan terjadi saat makam leluhurnya dibongkar untuk dijadikan jalan oleh pihak belanda.

Ciri khas Perang Jawa adalah berbagai bentuk dukungan yang diterima oleh Diponegoro dari berbagai lapisan masyarakat Jawa. Pengikut inti Sang Pangeran terdiri dari berbagai kerabatnya dari keraton Yogyakarta, juga sejumlah besar priyayi, yang merupakan pejabat tinggi di kesultanan Yogya.⁵ Kedua kelompok ini membawa anggota keluarga dan bawahan masing-masing. Tentu saja, di berbagai daerah pinggiran, keturunan-keturunan keluarga keraton Yogyakarta dan para priyayi ini diberi banyak kebebasan untuk bergerak oleh Diponegoro. Maka dari itu, Perang Jawa memiliki suatu ciri yang khas yaitu serentetan pemberontakan kedaerahan yang secara longgar dikoordinasi dan dikendalikan oleh sang pangeran dan para penasihatnya, yang tinggal terutama di daerah Mataram di Jawa tengah bagian selatan.⁶

Namun, selain para pemimpin berdarah biru dan priyayi, ketika berlangsungnya peperangan pangeran Diponegoro juga dibantu oleh masyarakat pedesaan seperti Para petani Jawa yang merupakan bagian dari elite pedesaan pemilik tanah. Para wong sikĕp (petani yang membayar pajak) ini memegang peranan penting dalam membayar pajak dan menyediakan teruna untuk pasukan Diponegoro. Demikian halnya juga dengan perempuan-perempuan yang biasa berjualan di pasar dan para pedagang, juga buruh yang tidak memiliki tanah (numpang; bujang), yang menyambung nyawa sebagai kuli pengangkut barang di pinggir jalan, dan mengangkut persediaan perang milik diponegoro.⁷ Yang juga

menonjol adalah komunitas agamawi pinggiran di pedesaan Jawa, banyak dari mereka yang muncul sebagai pemimpin-pemimpin yang berpengaruh di daerah setempat. Mereka yang datang dari keraton Yogya dan daerah Mataram sekitarnya mengabdikan sebagai pasukan elite pengawal pribadi Diponegoro, yang sebagian besar berasal dari kaum santri.⁸

Dalam beberapa uraian yang disebutkan bahwa sekitar dua ratus pria dan wanita, yang mayoritas merupakan orang Jawa, namun juga terdaftar beberapa orang Arab dan peranakan (darah campuran keturunan Tionghoa-Indonesia), yang memiliki hubungan dengan komunitas agamawi di pedesaan dan keraton yang membantu Diponegoro dalam beberapa kesempatan pada waktu Perang Jawa. Sebagian besar orang-orang ini berasal dari kaum (masyarakat keagamaan) di Yogya, masyarakat santri keraton dan pradikan (desa bebas pajak) dan sekolah keagamaan (pondok pesantren) di daerah Mataram.⁹ Sebuah kelompok besar lainnya dibawa oleh penasihat agama utama Pangeran Diponegoro, Kiai Mojo, ketika dia bergabung dengan sang pangeran di awal Perang Jawa. Di antaranya terdapat anggota keluarga besar Kiai Mojo dan murid-muridnya (santri) yang berguru di pesantrennya yang terkenal di Mojo, yang terletak disebelah utara Delanggu di daerah Pajang. Beberapa orang yang gelarnya bisa diidentifikasi dengan mudah adalah 88 kiai. 36 haji (peziarah ke Mekkah), 11 Seh (Syekh), 18 pejabat agama (Kiai Pèngulu; Kètib; Modin; Amad Dalèm atau jurukunci, juru kunci makam dan

tempat suci), 15 guru keagamaan (Kiai guru) dan kepala pesantren dari Bagelen, Kedu, Mataram, Pajang and Madiun, and three nyai (anggota perempuan di komunitas keagamaan dan istri Kiai terkemuka) Posisi pendukung keagamaan ini pun meningkat pesat karena sifat perjuangan Diponegoro melawan Belanda dan sekutu Jawanya, yang sering kali disebut dalam sumber-sumber Jawa sebagai kafir murtad (orang kafir yang murtad).

Semua ini membuat citra sebuah perang sabil (perang suci) melawan orang Eropa yang 'kafir' dan orang Jawa yang 'murtad'.¹⁰ Seperti yang dikatakan oleh Menteri Penjajahan Belanda, C.Th. Elout (1767- 1841; menjabat, 1824-1829) dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Raja Belanda, William I (bertakhta 1813-1840), pada bulan Maret 1827, salah satu tujuan utama Diponegoro tampaknya adalah untuk 'memurnikan kembali' agama Islam (agami Islam) di Jawa dari 'hal-hal kecil' yang diterapkan oleh para penguasa Jawa dan pemerintahan penjajahan Eropa.

Elout menekankan bahwa pengaruh keagamaan memiliki peran penting selama terjadinya pertempuran. hampir setiap pertempuran, menurut sang menteri, kelompok-kelompok ulama (orang terpelajar dalam bidang keagamaan), mengenakan jubah khusus berwarna hijau atau putih dan surban (sĕrban), memegang peranan penting, di mana khotbah mereka menguatkan semangat tempur pasukan Diponegoro. Sampai-sampai para pemimpin lapangan Belanda merasa sangat

khawatir akan peran yang dijalankan para ulama ini sehingga mereka pun memutuskan untuk menambahkan kaum ulama dalam pasukan gerak cepat mereka untuk memimpin pembacaan dzikir (zikir) sebelum pasukan mereka maju perang.¹¹ Mereka juga membawa tokoh agama terkemuka, seringkali seorang sayyid dari Arab (keturunan Sang Nabi), Dan memang, karena ciri keagamaan yang jelas terlihat dalam perang ini, Elout menolak usulan yang diajukan oleh beberapa pejabat Belanda senior agar Diponegoro diakui sebagai seorang Pangeran yang merdeka (Pangeran Adipati) di Jawa tengah bagian selatan seperti yang terjadi sebelumnya dengan Raden Mas Said (Mangkunegoro I, 1726-1795)

B. Prose Perang Diponegoro

Dalam pencatatan sejarah Perang Diponegoro relatif berlangsung singkat, yaitu dalam kurung waktu 1825-1830, akan tetapi memiliki makna yang luas dan dalam. Secara politik peperangan Diponegoro manifestasi dari sikap pertentangan dari kekuatan lokal terhadap kekuasaan Barat yang datang dari luar dan bersifat raksasa (massive), internasional, terorganisir rapi dan lebih maju. Kehadiran kekuasaan Barat di kawasan Nusantara dan Asia Tenggara pada umumnya, dapat dipandang sebagai kekuatan eksogen dan arus besar (mainstrams) yang mengancam eksistensi kemerdekaan dan kedaulatan politik negara tradisional di daerah-daerah Indonesia. Ancaman kekuasaan politik Barat semacam ini telah disadari oleh Sultan

Agung pada abad ke-17. Akibat kekuasaan dari Barat memang telah terbukti membawa proses disintegrasi bagi kekuatan-kekuatan politik, sosial, dan kultural masyarakat di lingkungan kerajaan Jawa. Karena itu Perang Diponegoro pada dasarnya merupakan pencerminan reaksi terhadap kekuasaan eksogen yang bersifat destruktif dan disintegrative.¹²

Pemicu terjadinya perang Diponegoro (1825-1830) adalah penancangan tonggak-tonggak pembuatan jalan rel kereta api. Pada masa itu, Belanda tengah giat-giatnya membangun rel kereta api yang melewati daerah Tegalrejo di Jawa Tengah. Rupanya di salah satu sektor, rel kereta api yang dibangun akan tepat melintasi makam dari leluhur Pangeran Diponegoro. Hal inilah yang membuat kemarahan Pangeran Diponegoro, dan memutuskan untuk mengangkat senjata melawan Belanda. Namun, penyebab perang tersebut sebenarnya merupakan akumulasi semua permasalahan yang ada, seperti pajak yang tinggi, campur tangan Belanda dalam urusan istana Yogyakarta, hingga permasalahan ketidakpuasan di kalangan istana itu sendiri.

Dalam peperangan ini, metode-metode yang ada dalam perang moderen dipakai dan diterapkan. Metode-metode tersebut adalah perang terbuka (open war fare) dan perang gerilya (guerrilla war fare). Perang ini juga dilengkapi dengan taktik urat syaraf (psy-war) yang dilakukan melalui insinuasi dan tekanan-tekanan serta profokasi terhadap pihak lawan taktik ini dipakai oleh pihak kolonial Belanda terhadap kaum

pribumi yang terlibat dalam pertempuran. Selain itu, dalam perang ini juga diterapkan taktik spionase, yaitu sebuah taktik untuk mencari kelemahan lawan (memata-matai lawan). Pangeran Diponegoro bergerak dan bergerilya. Untuk mengantisipasi reaksi dari Belanda sehingga Belanda gagal menangkap Pangeran Diponegoro di Tegalrejo meski akhirnya kediamannya dibakar. Pangeran Diponegoro dan pasukannya bergerak ke arah selatan dan membangun basis militer di Goa Selarong yang terletak lima kilometer dari arah Kota Bantul. Strategi gerilya yang diterapkan Pangeran Diponegoro berhasil mengecoh Belanda dan membuatnya licin sulit tertangkap.

C. Jalannya Peperang Diponegoro

Perang ini menjadi garis pemisah dalam sejarah Pulau Jawa dan bahkan seluruh Indonesia. Untuk pertama kalinya pemerintah kolonial menghadapi usaha pemberontakan sosial, yang mencakup suatu bagian yang besar di pulau tersebut. Hampir 200.000 orang Jawa tewas dalam peperangan dan seperempat dari luas tanah di pulau tersebut mengalami kerusakan yang hebat. Selain itu, pihak Belanda juga mendapatkan penderitaan sebagai akibat dari peperangan yaitu 8.000 orang pasukan Eropa serta 7000 orang pasukan Indonesia terbunuh, serta Belanda menghabiskan dana sekitar 20 juta gulden untuk membiayai seluruh pengeluaran dalam Perang Jawa. Jadi, pada dasarnya antara kedua belah pihak juga mengalami kerugian material maupun non material.

Sejarah meletusnya Perang Jawa tidak dapat dilepaskan dengan sejarah pemerintahan Kesultanan Yogyakarta. Kesultanan ini berdiri sejak tahun 1755 sebagai hasil dari penaklukan militer. Terdapat pembagian wilayah yaitu antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta wilayah kekuasaan Kesultanan Yogyakarta dengan Kesultanan Surakarta. Sudah lama kesultanan ini melakukan relasi dengan Kompeni Hindia Timur Belanda, bahkan Mangkubumi sebagai sultan pertama mengetahui kelemahan Belanda yang baru saja tumbuh tersebut. Akan tetapi, menurutnya dari pada menantang mereka, justru melakukan permainan yang cerdas dengan penuh kesabaran untuk menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan kompeni tersebut. Ketika Mangkubumi meninggal dunia pada tahun 1792, Yogyakarta sudah mapan sebagai sebuah negara makmur yang mampu meredupkan saingannya yaitu Kesultanan Surakarta.

Namun, sayang sekali setelah sepeninggal Mangkubumi dan digantikan oleh anaknya, Sultan Hamengkubowono II ini mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan yang telah dibuat oleh ayahnya. Bahkan dalam jangka waktu satu dekade saja (1792-1800) kebanyakan para penasehat Mangkubumi telah diberhentikan dan digantikan dengan penasehat yang lebih muda namun tidak berpengalaman. Semakin lama banyak terjadi persengkokolan di dalam keraton dan berkembang menjadi kondisi yang semakin membahayakan. Selain itu, Sultan II ini juga menerapkan gaya

pemerintahan yang kejam, seperti, pemasukan melalui pajak dilipatgandakan sebesar enam kali dan untuk mendapatkan pajak tersebut dilakukan dengan cara pemerasan, bersifat acuh tak acuh terhadap residen Belanda karena ia mengetahui kelemahan yang dimiliki oleh Kompeni Hindia Timur Belanda tersebut, hal ini kemudian menimbulkan kritik dari para residen Belanda. Kesultanan Yogyakarta merupakan negara yang sangat luas dan kaya dengan batas-batas wilayahnya dengan negara di sekitarnya yang sangat jelas. Akan tetapi, pada abad ke-19, perbatasan tersebut mengalami perubahan yang sangat drastis. Ini dikarenakan Sultan Hamengkubuwono II tidak mampu menghadapi tekanan Daendels dan terpaksa menyerahkan beberapa daerahnya. Beberapa wilayah yang diserahkan termasuk wilayah nagara agung yang strategis dan kaya akan kayu jati, seperti Grobogan, Wirosari, Selo, Warung, Jipang dan Japan.

Sejak R. M. Sundoro diangkat sebagai Sultan Hamengkubuwono II, suasana tenang yang sebelumnya telah diciptakan pada masa pemerintahan ayahnya berubah dengan begitu cepat. Ia memiliki karakter yang sangat bertolak belakang dengan ayahnya. Pada masa pemerintahannya banyak sekali konflik yang terjadi dengan pihak kompeni maupun konflik internal keraton. Di dalam keraton, intrik dilakukan oleh Ratu Kencono Wulan (salah seorang istri Sultan) dan pangeran Notokusumo (adik Sultan) yang membenci putra mahkota. Mereka menuduh putra mahkota sebagai orang yang taat

terhadap kompeni. Di waktu yang hampir bersamaan, Sultan pun memecat Patih Danurejo II. Karena banyaknya tindakan persengkokolan dan penyalahgunaan jabatan, Daendels kemudian menggantikan Sultan Hamengkubuwono II dengan putra mahkota pada tahun 1810 dan mengangkat kembali Patih Danurejo II Setelah memperoleh kemenangan atas Kesultanan Yogyakarta, pada Mei 1811 Daendels digantikan oleh Janssens.

Janssens kemudian memindahkan markas komandonya ke Semarang dan meninggalkan garis pertahanan yang dibangun Daendels di sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Pada 18 September 1811, Janssens menyerah kepada Inggris dan menandatangani Naskah Kapitulasi Tuntang. Beberapa hari setelah Kapitulasi Tuntang, pihak Inggris mengirim Robison ke Yogyakarta untuk menegaskan semua perjanjian yang dibuat oleh Gubernur Jenderal Daendels dan menyatakan tetap berlaku. Hal ini dimanfaatkan oleh Sultan Hamengkubuwono II untuk mengambil alih kembali kekuasaan dari putra mahkota anaknya sendiri, Konflik-konflik internal dan eksternal seperti ini terus terjadi sampai kekuasaan VOC di Pulau Jawa. Awalnya kedatangan VOC disambut baik oleh para pejabat keraton, akan tetapi semakin lama VOC justru menusukkan duri dari belakang. VOC mulai berani mencampuri urusan dalam keraton sehingga menambah keruh konflik internal Kesultanan Yogyakarta. Para punggawa keraton mulai kehilangan tradisi, adat istiadat Jawa mereka karena mereka justru cenderung mengikuti kebijakan norma-norma Barat yang dibawa oleh

Belanda. Hal ini menimbulkan kekhawatiran pada diri Pangeran Diponegoro. Sebagai pembawa gagasan revolusi Perancis, Daendels melakukan reorganisasi dengan memasukkan elit Jawa ke dalam sistem administrasi kolonial dan meletakkan landasan pemerintahan yang lebih modern. Perubahan-perubahan besar yang menyebabkan terguncangnya tatanan Jawa membuat Pangeran Diponegoro merasa prihatin melihat keadaan negaranya. Salah satu tuntutan yang diberikan Pangeran Diponegoro adalah kembalinya tatanan Jawa seperti sebelum adanya reformasi yang dilakukan Daendels pada tahun 1808.

Dalam pandangan masyarakat Jawa pada abad ke-19, Pangeran Diponegoro dianggap sebagai Ratu Adil. Aspek Sultan Agung sebagai seorang raja yang arif bijaksana sejarah Jawa juga mempunyai makna yang sangat besar bagi Pangeran Diponegoro. Memang banyak tingkah laku sang pangeran sebagai seorang pemimpin selama berlangsungnya Perang Jawa, yang memiliki persamaan dan ideal dengan sifat seorang raja yang arif dan bijaksana yang dimiliki oleh orang Jawa. Di dalam istilah Jawa tradisional, raja ideal itu adalah raja yang akan selalu mencari petunjuk dan tuntutan batin dari Tuhan. Ia akan bermeditasi dan merenungkan keinginan-keinginan pribadinya kepada Roh Yang Maha Suci. Sebagai seorang yang dianggap Ratu Adil, Pangeran Diponegoro berhasil menyatukan berbagai elemen sosial berbeda dibawah naungan cita-citanya yang Islam Jawa. Karena pengaruh Barat yang semakin merajalela dan

pemimpin keraton yang kehilangan pegangan, membuat rakyat kehilangan pemimpin yang bisa mengayomi mereka. Hal ini menyebabkan rakyat berpaling ke Pangeran Diponegoro yang justru mengerti dan lebih memerhatikan keadaan dan kebutuhan rakyat.

Masyarakat melihat bahwa Pangeran Diponegoro adalah sosok yang bisa memandu mereka melewati masa transisi yang sulit ini menuju masa kejayaan. Pesona yang dimiliki Pangeran Diponegoro mampu memposisikan diri ditengah-tengah masyarakat yang saat itu mengalami penderitaan dan kehilangan sosok pemimpin yang mampu mengayomi ditengah pengaruh penetrasi Barat yang semakin masuk kedalam kehidupan mereka. Keadaan seperti ini terjadi sejak masa pemerintahan residen Daendels. Sejak Daendels berkuasa, maka wilayah kekuasaan raja-raja Jawa, terutama Yogyakarta dan Surakarta, makin dipersempit. Hal ini disebabkan karena banyak daerah yang diberikan kepada Belanda sebagai imbalan atas bantuannya. Adapun daerah yang diinginkan Belanda adalah daerah pantai utara Jawa. Karena itu daerah-daerah tersebut berangsur-angsur diambil-alih oleh Belanda. Daerah Kerawang dan Semarang dikuasai oleh Belanda pada tahun 1677, dan pada tahun 1743 daerah Cirebon, Rembang, Jepara, Surabaya, Pasuruan dan Madura. Dengan hilangnya daerah-daerah pesisir, kerajaan Mataram makin melepaskan kegiatan pelayaran dan perdagangannya, dan memusatkan kegiatannya pada bidang pertanian.

Perpecahan di kalangan keluarga kerajaan di Mataram tidak saja melemahkan kerajaan, tetapi juga menyebabkan pengaruh Belanda makin menjadi kuat. Setiap pertentangan antar keluarga bangsawan di kraton akan mengundang campur tangan pihak Belanda, yang pada akhirnya merugikan kerajaan itu sendiri sebagai keseluruhan. Pada masa Daendels terdapat usaha mencampuri urusan tatacara di istana. Misalnya, Daendels menghendaki persamaan derajat dengan Sultan pada waktu upacara kunjungan resmi diadakan di kraton. Dalam upacara tersebut pembesar Belanda supaya diijinkan duduk sejajar dengan raja, dan sajian sirih supaya dihapuskan. Raffles juga meneruskan usaha yang sama terhadap kehidupan kraton. Kondisi seperti itu menimbulkan rasa kekecewaan dan ketidaksenangan di antara beberapa golongan bangsawan.

Peristiwa terdekat sebelum meletusnya Perang Jawa adalah konflik antara Pangeran Diponegoro dengan Smissaert, konflik politik ini mencapai puncaknya dengan penutupan jalan ke Tegalrejo, yaitu tempat kediaman Pangeran Diponegoro. Kemudian para pengikut Pangeran Diponegoro mencabut pancang-pancang yang digunakan untuk menutup jalan tersebut. Insiden pancang dan penutupan jalan menjadi konflik terbuka antara Smissaert-Danurejo melawan Pangeran Diponegoro, yang melibatkan kekuatan bersenjata. Pangeran Diponegoro mendapat simpati dari berbagai golongan masyarakat. Mereka berkumpul di Tegalrejo untuk membantu

Pangeran Diponegoro melawan kolonial Belanda dan orang Cina dalam perang sabil.

Mengetahui hal ini, Residen Smissaert menuduh Pangeran Diponegoro bahwa kedatangan rakyat dan berkumpul di Tegalrejo adalah upaya yang dilakukan Diponegoro untuk mendapatkan simpati dari rakyat. Pangeran Diponegoro menolah tuduhan tersebut, menurutnya, rakyat berkumpul atas kemauannya sendiri dan tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya. Kemudian Dalem Tegalrejo dihancurkan dan dibakar. Namun sebelumnya Pangeran Diponegoro sudah berhasil melarikan diri ke Selarong yang merupakan tempat yang secara diam-diam sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya sebagai tempat persembunyiannya. Pada akhir Juli 1825, di Selarong telah berkumpul beberapa orang bangawan Yogyakarta. Kemudian mereka bersama-sama menyusun strategi dan langkah-langkah taktis untuk memastikan sasaran yang akan diserang

Struktur pimpinan perlawanan Diponegoro meliputi dari yang tertinggi Pramudeng Prang (Sultan Ngabdulkamid Herucokro Kabirul Mukminim Sayidin Panotogomo Senopati ing Ngalogo Sabilullah, yaitu Pangeran Diponegoro sendiri). Panglima Tentara adalah Alibasah Ngabdul Mustapa Sentot Prawirodirjo. Komandan untuk kewilayahan perang (mandala) Pajang, Yogyakarta, dan Bagelen, berturut-turut Alibasah Kasan Besari, Alibasah Sumonegoro, dan Pangeran Diponegoro. pada awal Perang Jawa tidak stabil karena semakin berat beban yang

harus ditanggung oleh rakyat karena semakin meluasnya pengaruh Belanda pada kehidupan rakyat. Tanam paksa semakin memberatkan rakyat ditambah dengan beban pajak tanah yang harus dibayarkan, sementara para pejabat pribumi hanya memperkaya diri sendiri dan menghamburkan kekayaan mereka dengan pergi ke tempat pelacuran dan menghisap candu tanpa memikirkan penderitaan yang dialami rakyatnya. Kondisi seperti ini menimbulkan kesenjangan sosial antara rakyat dengan para pemimpin mereka.

Banyak kesulitan yang harus dihadapi oleh Belanda pada awal masa perang Jawa (1825-1827). Mulai dari jumlah pasukan yang hanya 3 resimen (satu resimen infanteri, satu resimen huzar, dan satu resimen artileri), ditambah legion Mangkunagoro yang jumlahnya sekitar 1.800 orang. Pasukannya tersebut juga tidak mengenal medan (terrain) dengan baik. Tidak ada peta yang lengkap dan hampir semua peta yang tersedia berada dalam kondisi buruk dan cacat. Padahal sebagian besar wilayah Kesultanan Yogyakarta berbukit-bukit. Pasukan yang sebagian besar tidak mengenal medan menjadi faktor penghambat mobilitas. Kondisi cuaca juga tidak menguntungkan karena musim kemarau dan hujan berganti tidak menentu. Selain itu, karakter pemberontak yang mereka hadapi terkenal pemberani dan fanatik. Mereka sangat membenci orang Eropa dan Cina.

Secara garis besar, strategi Diponegoro adalah merebut wilayah kesultanan, lalu mengusir Belanda dan orang Cina

keluar dari wilayah Keraton Kesultanan Yogyakarta. Ia bercita-cita untuk mengembalikan tatanan dan norma-norma Jawa yang ada di dalam keraton dan masyarakat Jawa. Serbuan pasukan Diponegoro mengejutkan tentara Hindia Belanda dan membuat panik para pembesar kesultanan dan pemerintah Hindia. Residen Smissaert segera melaporkan kepada Jenderal de Kock karena kekuatan yang sangat tidak seimbang. Dalam penyerbuan itu, pasukan Diponegoro juga menjarah gudang-gudang logistik dan mengangkutnya ke luar kota. Penjarahan mengakibatkan sebagian besar penduduk Yogyakarta mengalami kekurangan bahan pangan. Sultan Hamengkubuwono V berhasil diamankan, sedangkan Keraton Yogyakarta berhasil dipertahankan oleh pasukan pengawal keraton tanpa menimbulkan kerusakan yang berarti. Pasukan Diponegoro berhasil menduduki Yogyakarta selama tujuh hari.

Kemudian de Kock ditugaskan sebagai Komisaris Pemerintah untuk Kesultanan Yogyakarta, ia diberi kekuasaan penuh atas kedua daerah tersebut untuk menumpas pemberontakan. De Kock sadar bahwa ia harus bekerja keras mengatasi berbagai kesulitan. Ia mengumpulkan semua pasukannya yang berada di berbagai wilayah di Nusantara untuk berkumpul di Jawa. Selanjutnya Jenderal de Kock merencanakan operasi besar-besaran untuk merebut kembali Yogyakarta dan menghancurkan markas besar Pangeran Diponegoro di Selarong, dengan persiapan yang matang dan cermat. De Kock mengirimkan surat kepada Pangeran

Diponegoro di Selarong, dan kemudian pihak Diponegoro pun mengirimkan balasan. Setelah menerima balasan surat dari Pangeran Diponegoro, de Kock segera memerintahkan pasukannya untuk menyerang Selarong. Akan tetapi, ternyata Selarong sudah kosong, Pangeran Diponegoro beserta pasukannya sudah melarikan diri dari Selarong. Hal ini membuat peperangan semakin berlarut-larut .

Operasi pengejaran selama dua tahun yang dipimpin oleh Jenderal de Kock, secara militer tidak mengalami kemajuan. Operasi itu ternyata memberi pengalaman kepada prajurit NOIL untuk mengenal medan karena selama hampir Sembilan tahun sejak 1816 Pulau Jawa selalu dalam keadaan aman dan tenteram. Memang ada beberapa pangeran pemimpin pasukan Diponegoro yang berhasil ditawan atau menyerah, namun peristiwa itu sangat langka. Hingga 1826, para pejabat sipil menilai bahwa operasi-operasi militer tidak mengalami kemajuan, bahkan tidak menyelesaikan masalah. Sebagian besar wilayah Kesultanan Yogyakarta tetap berada di tangan Pangeran Diponegoro. Kekalahan Diponegoro pada tahun 1830 membuka jalan bagi pengenalan 'Cultivation System' yang digulirkan oleh Johannes van den Bosch (1830-1877), dimana produk Jawa dibeli oleh negara kolonial Belanda dengan harga tetap yang rendah dan kemudian dijual di pasar dunia sesuai dengan harga internasional, sebuah sistem yang memberikan penghasilan bersih kepada Belanda sebesar 832.000.000 gulden (setara dengan USD75 miliar uang hari ini) sehingga

meringankan beban transisi negara tersebut menuju ke ekonomi industri modern. Perkembangan pasca-Perang Jawa semakin membenarkan keprihatinan Diponegoro atas ketidakadilan perdagangan antara Jawa dan kekuasaan kolonial Belanda.

Mengatakan bahwa setelah berakhirnya perang, Belanda secara tak terbantahkan menguasai pulau Jawa dan sebuah fase baru pemerintah kolonial Belanda dimulai dengan diberlakukannya “sistem tanam paksa” (cultuur stelsel) pada tahun 1830-1870 oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch (menjabat antara 1830-1834). Hal ini menjadi tanda bahwa benar-benar dimulainya penjajahan Belanda yang sesungguhnya di tanah Jawa. Keadaan rakyat semakin tertindas, ditambah dengan pengasingan terhadap Pangeran Diponegoro. Pada tahun 1830, selain Pangeran Diponegoro, juga Susuhunan Surakarta, Pakubuwono VI, diasingkan oleh Belanda ke luar Jawa yaitu ke Ambon dan sampai meninggal pada tahun 1849. Sedangkan Pangeran Diponegoro diasingkan ke Batavia kemudian dipindahkan ke Manado pada 7 Mei dan tiba di Ambon pada 12 Juni 1830. Enam tahun setelah wafatnya Susuhunan Pakubuwono VI, Pangeran Diponegoro menyusulnya pada 8 Januari 1855 di Makassar. Pengasingan yang dilakukan terhadap Sunan Pakubuwono VI atas dasar meskipun ketika Perang Jawa berlangsung, Keraton Surakarta resmi menjadi bagian Belanda, tetapi Sunan Pakubuwono VI dicurigai mendukung Pangeran Diponegoro. Selain itu ia juga menunjukkan dengan jelas sikap ketidaksenangannya terhadap

Belanda. Beberapa hal inilah yang kemudian memicu pengasingan terhadap Sunan Surakarta tersebut.

Dengan demikian, perang ini menandai berakhirnya sebuah proses yang memang sejak periode Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (1808-1811). Termasuk perubahan sejak dari era Serikat Perusahaan Hindia Timur atau Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1602-1799, ketika kontak antara Batavia dan kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian selatan telah terjalin diantara para pejabat setingkat duta besar sebagaimana layaknya terjadi di antara negara-negara berdaulat, menuju periode “puncak kolonial” ketika para raja akhirnya menduduki posisi. Kegiatan perlawanan militer Diponegoro adalah dalam rangka penegakan Balad al Islam (negara Islam). Dalam pandangan Diponegoro dan pasukannya, perang yang mereka lakukan melawan Belanda dan sekutunya adalah sebuah jihad, yaitu berperang melawan kaum kafir yang telah melakukan penyerangan, pengusiran, dan perampasan terhadap umat Islam, dan juga berperang melawan orang-orang murtad, yaitu orang Islam yang membantu orang kafir dalam memusuhi dan melakukan agresi terhadap umat Islam. Dalam masa itu, kata sabil dan sabilillah yang mempunyai makna spesifik, digunakan untuk menggantikan kata jihad. Kata sabil maupun sabilillah merupakan sebutan ringkas dari kata jihad fi sabilillah yang secara khusus kata ini bermakna melakukan peperangan melawan orang kafir. Dalam kurun waktu lima tahun ini, Pangeran Diponegoro dan Belanda merupakan pihak

utama yang terlibat secara langsung dalam proses peperangan. Di antara keduanya sama-sama mempertahankan kepentingan masing-masing. Belanda dengan pasukan elitnya lambat laun berhasil memukul mundur pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Berbagai strategi jitu pun juga telah diterapkan oleh Pangeran Diponegoro bersama pasukannya.

Perlawanan yang dilakukan Diponegoro yang disebut dengan Perang Jawa (1825-1830) merupakan perlawanan terbesar terhadap pemerintah kolonial di Jawa pada awal abad 19. Sejarahwan Peter Carey menyebut perlawanan Diponegoro merupakan penanda diakhirnya tatanan lama di Jawa dan dimulainya jaman modern. Dalam pengertian ini Perang Jawa dapat dikatakan sebagai bagian dari perubahan besar yang melanda dunia di akhir abad 18 dan awal abad 19. Perang yang berlangsung selama hampir lima tahun secara resmi berakhir melalui tipu daya, bukan melalui pertempuran yang menentukan. Nilai-nilai yang dianggap luhur oleh orang Jawa, yang juga dimiliki oleh Diponegoro dimanfaatkan de Kock sebagai kelemahannya lalu digunakan untuk menjatuhkan mereka, dan strategi de Kock benar-benar tepat sasaran. Bagi rakyat Kesultanan Yogyakarta, perang menimbulkan penderitaan lahir dan batin. Perubahan pascaperang yang paling penting adalah perubahan batas wilayah antara Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta. Pada 25-27 September 1830 di Klaten, diadakan perjanjian perubahan batas wilayah.

Pertemuan itu dihadiri Sultan Hamengkubuwono V, van Sevenhoven (Komisaris untuk Keraton), J.F.W. van Nes (Residen Yogyakarta), Patih Danurejo dan Susuhunan Pakubuwono VI yang didampingi oleh Panembahan Buminoto, Panembahan Mangkurat dan Sosrodiningrat. Perubahan penting lainnya adalah Gubernur Jenderal van den Bosch, berdasarkan Resolusinya pada 18 Desember 1830, melarang Sunan dan Sultan menyelenggarakan gerbang pajak di wilayah dua kerajaan. Ia juga mencabut keputusan Gubernur Jenderal pendahulunya yang dimulai pada 1 Januari 1831. Akhir peperangan itu memberikan Belanda sebuah kemenangan sehingga ia memiliki kekuasaan tanpa batas atas Pulau Jawa dan dengan berakhirnya perang tersebut menandakan bahwa kolonialisme secara resmi berlaku di Pulau Jawa. Untuk mengawali penjajahannya di Pulau Jawa, Belanda menerapkan sistem Tanam Paksa atau *cultuur stelsel* dibawah pemerintahan Johannes van den Bosch (1830-1848). Perang Jawa juga memberikan daya dorong untuk sebuah proses yang masih akan bergulir sendiri dalam Indonesia modern.

D. Idealisme Keagamaan Diponegoro dan Komunitas Santri

Rujukan tentang tuntutan keagamaan Diponegoro dan cita-citanya ditemukan di sumber-sumber Jawa. Salah satu sumber yang paling tua bisa ditemukan dalam sepucuk surat yang ditulis oleh kiai Mojo untuk seorang Pengulu di Surakarta,

Kamalodiningrat, di penghujung bulan Agustus tahun 1825, tidak lama setelah sang pangeran menyanggah gelar Sultan Ngabdulkamid Erucokro (sang 'Ratu Adil') Kabirul Mukminin (Nomor Satu Di antara orang yang Percaya) Sayidin (Penguasa Iman) Panatagama Jawa (Penguasa Agama Islam di Jawa) Kalifat Rasulullah (Kalifah Nabi Allah) di Sĕlarong. Dalam surat ini, Diponegoro disebut sebagai "Yang ditugaskan untuk menaikkan keluhuran agama Islam di Jawa" (ingkang amumpuni luhuré Agami Islam ing Tanah Jawa kabèh). Frase ini juga sering ditemukan dalam surat-surat korespondensi antara Diponegoro dan para pemimpin senior pasukannya. Maka, dalam sepucuk surat yang ditulis oleh sang pangeran dan pamannya, Pangeran Mangkubumi (sekitar 1781-1850) kepada Jenderal Hendrik Merkus de Kock (1779-1845) pada bulan yang sama, yaitu bulan Agustus 1825, Mengkubumi menyebut harapan keponakannya untuk "dengan tegas menegakkan agama sang Nabi Muhammad" (ingkang dados karsané Ki Arya Diponegoro botĕn lintang namung tĕtĕpé agamané Kangjĕng Nabi Muhammad s.a.w.).¹³

Salah satu ulama senior, yang menyerah bersama Kiai Mojo pada bulan November 1928, kemudian memberikan penjelasan tentang isi hati Diponegoro mengenai cita-citanya "dengan tegas menegakkan agama sang Nabi Muhammad" "Perilaku Diponegoro ini disebabkan karena kealpaan kedua pangeran (yaitu Sunan Surakarta dan Sultan Yogyakarta) untuk melindungi agama Islam. Begitu banyak muslimin dan

muslimat (Jawa) yang tidak bisa membaca shahadat (syahadat) dan lupa untuk salat lima waktu. Mereka tidak berpuasa dan tidak mengeluarkan ke pada kaum santri kewajiban dari pendapatan mereka. zakat Selain itu, mereka juga tidak naik haji ke Mekkah. Selain lima rukun Islam ini, sebagian orang muslim Jawa juga menenggak minuman keras dan berhubungan dengan wanita di luar nikah. Kedua pemimpin Jawa (tengah bagian selatan) ini menghiraukan semua ini dan tidak mengeluhkan kekurangan-kekurangan tersebut.¹⁴

Pernyataan yang ‘ortodoks’ tentang cita-cita keagamaan Diponegoro ini dikemudian hari ditekankan kembali oleh sang pangeran itu sendiri dalam perundingannya dengan para perwira Belanda yang mengatur penyerahan dirinya pada tahun 1830. “Kalau saya terus menuntut permintaan yang sudah saya utarakan,” kata Diponegoro pada Mayor François de Stuers (1792-1881) pada bulan April 1830, “ini disebabkan oleh keyakinan saya bahwa orang-orang di keraton tidak mengikuti adat mereka seketat dulu dan terlebih lagi mereka telah menelantarkan agama. Dia kemudian mengatakan pada perwira tersebut kalau dia telah dengan sengaja membentuk dirinya serupa dengan penguasa Mataram abad 17 yang agung, Sultan Agung (bertahta 1613-1646), yang menurut Diponegoro “adalah seorang spiritual yang berkelana seperti yang saya lakukan untuk melakukan ziarah keagamaan, dan seorang penguasa Islam yang mendirikan kelima rukun Islam.”¹⁵ Dalam beberapa kesempatan lainnya, ia merujuk pada para wali (penyebar

agama Islam di Jawa) yang dianggapnya sebagai manusia-manusia spiritual yang dikasihi Allah dan pelaksana hukum islam dengan kekuasaan yang fana.¹⁶

Khususnya, dia tampaknya ingin memiliki kekuasaan yang fana seperti yang disebut-sebut dimiliki para raja-imam di Giri pada abad ke tujuh belas dan delapan belas. Sekilas peran raja-imam atau wali zaman kekinian pada masa itu yang mungkin diangan-angankan Diponegoro bisa ditemukan dalam sepucuk surat yang ditulis oleh komandan pasukannya yang berasal dari Bagelen, Basah Kerto Pengalasan (sekitar 1790-pasca-1865), yang ditujukan untuk Kolonel Jan Baptist Cleerens (1785-1850) pada bulan Desember 1829.¹⁷

E. Dampak dari Perang Diponegoro

Kekalahan Diponegoro pada tahun 1830 membuka jalan bagi pengenalan 'Cultivation System' yang digulirkan oleh Johannes van den Bosch (1830-1877), dimana produk Jawa dibeli oleh negara kolonial Belanda dengan harga tetap yang rendah dan kemudian dijual di pasar dunia sesuai dengan harga internasional, sebuah sistem yang memberikan penghasilan bersih kepada Belanda sebesar 832.000.000 gulden (setara dengan USD75 miliar uang hari ini) sehingga meringankan beban transisi negara tersebut menuju ke ekonomi industri modern. Perkembangan pasca Perang Jawa semakin membenarkan keprihatinan Diponegoro atas ketidakadilan perdagangan antara Jawa dan kekuasaan kolonial Belanda.¹⁸

Dengan demikian, perang ini menandai berakhirnya sebuah proses yang matang sejak periode Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (1808-1811). Termasuk perubahan sejak dari era Serikat Perusahaan Hindia Timur atau Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1602-1799, ketika kontak-kontak antara Batavia dan kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian selatan telah terjalin diantara para pejabat setingkat duta besar sebagaimana layaknya terjadi di antara negara-negara berdaulat, menuju periode “puncak kolonial” ketika para raja akhirnya menduduki posisi sebagai bawahan atau subordinat terhadap kekuasaan kolonial Eropa.¹⁹ Kegiatan perlawanan militer Diponegoro adalah dalam rangka penegakan Balad al Islam (negara Islam). Dalam pandangan Diponegoro dan pasukannya, perang yang mereka lakukan melawan Belanda dan sekutunya adalah sebuah jihad, yaitu berperang melawan kaum kafir yang telah melakukan penyerangan, pengusiran, dan perampasan terhadap umat Islam, dan juga berperang melawan orang-orang murtad, yaitu orang Islam yang membantu orang kafir dalam memusuhi dan melakukan agresi terhadap umat Islam. Dalam masa itu, kata sabil dan sabilillah yang mempunyai makna spesifik, digunakan untuk menggantikan kata jihad. Kata sabil maupun sabilillah merupakan sebutan ringkas dari kata jihad fi sabilillah yang secara khusus kata ini bermakna melakukan peperangan melawan orang kafir.²⁰

Perang yang berlangsung selama hampir lima tahun secara resmi berakhir melalui tipu daya, bukan melalui

pertempuran yang menentukan. Nilai-nilai yang dianggap luhur oleh orang Jawa, yang juga dimiliki oleh Diponegoro dimanfaatkan de Kock sebagai kelemahannya lalu digunakan untuk menjatuhkan mereka, dan strategi de Kock benar-benar tepat sasaran. Bagi rakyat Kesultanan Yogyakarta, perang menimbulkan penderitaan lahir dan batin. Perubahan pascaperang yang paling penting adalah perubahan batas wilayah antara Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta. Pada 25-27 September 1830 di Klaten, diadakan perjanjian perubahan batas wilayah. Pertemuan itu dihadiri Sultan Hamengkubuwono V, van Sevenhoven (Komisaris untuk Keraton), J.F.W. van Nes (Residen Yogyakarta), Patih Danurejo dan Susuhunan Pakubuwono VI yang didampingi oleh Panembahan Buminoto, Panembahan Mangkurat dan Sosrodiningrat. Perubahan penting lainnya adalah Gubernur Jenderal van den Bosch, berdasarkan Resolusinya pada 18 Desember 1830, melarang Sunan dan Sultan menyelenggarakan gerbang pajak di wilayah dua kerajaan. Ia juga mencabut keputusan Gubernur Jenderal pendahulunya yang dimulai pada 1 Januari 1831.²¹

Perang Jawa juga memberikan daya dorong untuk sebuah proses yang masih akan bergulir sendiri dalam Indonesia modern, yaitu intergrasi nilai-nilai Islam ke dalam identitas Indonesia masa kini. Jawa kehilangan pegangan karena pemimpin mereka justru lebih memihak ke bangsa Eropa. Rakyat semakin sengsara karena norma-norma kehidupan Jawa

mulai ditinggalkan oleh punggawa keraton, sehingga rakyat semakin tidak memperoleh perhatian dari pemerintah keraton. Melihat hal ini Pangeran Diponegoro menjadi tergerak hatinya, sehingga muncullah gerakan-gerakan seperti gerakan Ratu Adil. Pangeran Diponegoro dipercaya menjadi bisa menjadi pemimpin rakyat dan bisa mengayomi mereka. Kemudian disusunlah berbagai rencana dan strategi yang matang sebelum terjun ke medan perang untuk menyerang pasukan Belanda yang semakin bertindak kurang ajar.

Kegagalan yang diderita oleh Diponegoro dan pasukannya, bukan karena tujuan dan metodenya yang salah, tetapi karena kekuatan yang tidak seimbang. Tipu muslihat yang licik dan keji, yang hanyabisa dilakukan oleh orang-orang yang bermoral rendah dan jahat, ternyata telah menjadi watak kepribadian penguasa kolonial Barat di Indonesia. Setelah berakhirnya Peran Jawa, Pulau Jawa secara resmi menjadi wilayah kedudukan kolonial Belanda. pangeran Diponegoro diasingkan. Rakyat semakin menderita karena kebijakan yang dikeluarkan Belanda semakin tidak memperhatikan peri kemanusiaan. Namun rakyat Jawa juga tidak tinggal diam, setelah berakhirnya Perang Jawa kemudian muncul pemberontakan-pemberontakan nasionalisme lainnya di tanah Jawa.

Perang Jawa merupakan perang yang sangat besar. Perang ini menjadi titik awal kebangkitan masyarakat Jawa dalam melawan kedudukan Belanda dan bangsa Eropa lainnya

di tanah mereka. Perang Jawa merupakan sebuah bukti nyata akan sifat nasionalisme dan patriotisme yang tertanam dalam diri Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro tidak rela melihat tanah kelahirannya menjadi porak poranda karena moral Jawa yang selama ini diagung-agungkan justru ditinggalkan begitu saja karena pengaruh yang kuat dari bangsa Barat. Sebuah negara yang kuat tentunya juga ada pemimpin yang kuat. Sebelum meletusnya Perang Jawa, masyarakat Jawa kehilangan pegangan karena pemimpin mereka justru lebih memihak ke bangsa Eropa. Rakyat semakin sengsara karena norma-norma kehidupan Jawa mulai ditinggalkan oleh punggawa keraton, sehingga rakyat semakin tidak memperoleh perhatian dari pemerintah keraton. Melihat hal ini Pangeran Diponegoro menjadi tergerak hatinya, sehingga muncullah gerakan-gerakan seperti gerakan Ratu Adil. Pangeran Diponegoro dipercaya menjadi bisa menjadi pemimpin rakyat dan bisa mengayomi mereka. Kemudian disusunlah berbagai rencana dan strategi yang matang sebelum terjun ke medan perang untuk menyerang pasukan Belanda yang semakin bertindak kurang ajar. Kegagalan yang diderita oleh Diponegoro dan pasukannya, bukan karena tujuan dan metodenyayang salah, tetapi karena kekuatan yang tidak seimbang. Tipu muslihat yang licik dan keji, yang hanyabisa dilakukan oleh orang-orang yang bermoralrendah dan jahat, ternyata telah menjadi watakkepribadian penguasa kolonial Barat di Indonesia. Setelah berakhirnya Peran Jawa, Pulau Jawa

secara resmi menjadi wilayah kedudukan kolonial Belanda. pangeran Diponegoro diasingkan. Rakyat semakin menderita karena kebijakan yang dikeluarkan Belanda semakin tidak memperhatikan peri kemanusiaan. Namun rakyat Jawa juga tidak tinggal diam, setelah berakhirnya Perang Jawa kemudian muncul pemberontakan-pemberontakan nasionalisme lainnya di tanah Jawa.



BAB II

PERANG PADERI

A. Latar Belakang Perang Paderi

Sumatera Barat adalah salah satu dari sedikit daerah administratif setingkat provinsi di Indonesia yang teritorialnya hampir identik dengan sebuah daerah budaya, Daerah budaya yang dimaksud adalah Minangkabau, cikal-bakal administratif Sumatera Barat sudah terbentuk dan terjadi di zaman Pemerintahan colonial belanda. Daerah Minangkabau merupakan kelompok etnik pribumi nusantara yang menghuni dataran tinggi Minangkabau, Sumatera Barat, Indonesia. Secara geografis, persebaran etnik Minangkabau meliputi seluruh daratan Sumatra Barat, separuh daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, pantai barat Sumatra utara, barat daya aceh dan negeri Sembilan di Malaysia.²² Minangkabau merujuk pada entitas kultural dan geografis yang ditandai dengan penggunaan bahasa, adat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal dan identitas agama Islam. Dalam percakapan awam, orang Minang sering kali disamakan sebagai orang Padang. Hal ini merujuk pada nama ibu kota provinsi Sumatra Barat, yaitu Kota Padang. Namun, mereka biasanya akan menyebut kelompoknya dengan

sebutan *urang awak*. *Awak* itu sendiri berarti saya, aku atau kita dalam percakapan keseharian orang Minang.²³ Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *urang awak* itu adalah orang Minang itu sendiri.²⁴

Menurut A.A. Navis, Minangkabau lebih merujuk kepada kultur etnis dari suatu rumpun Melayu yang tumbuh dan besar karena sistem monarki²⁵ serta menganut sistem adat yang dicirikan dengan sistem kekeluargaan melalui jalur perempuan atau matrilineal,²⁶ walaupun budayanya sangat kuat diwarnai ajaran agama Islam. Thomas Stamford Raffles, setelah melakukan ekspedisi ke pedalaman Minangkabau tepatnya di kedudukan kerajaan pagaruyung, menyatakan bahwa Minangkabau ialah sumber kekuatan dan asal bangsa Melayu, yang kelak penduduknya tersebar luas di Kepulauan Timur.²⁷ Masyarakat Minang bertahan sebagai penganut matrilineal terbesar di dunia.²⁸ Selain itu, etnis ini telah menerapkan sistem proto-demokrasi sejak masa pra-Hindu dengan adanya kerapatan adat untuk menentukan hal-hal penting dan permasalahan hukum. Prinsip adat Minangkabau tertuang dalam pernyataan *Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* (Adat bersendikan hukum, hukum bersendikan Alquran) yang berarti adat berlandaskan ajaran Islam.²⁹ Minangkabau adalah masyarakatnya menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pedoman hidup atau patokan dalam bertingkah laku, bersikap, berbicara, bergaul, dan berpakaian. Hal ini dilatarbelakangi ketika pada abad ke-19 banyaknya

pemuda-pemuda Minangkabau yang pergi ke Mesir dan Mekah untuk memperdalam Ilmu agama, sehingga sepulangnya dari sana mereka menjadi ulama-ulama yang mempunyai misi untuk mengembangkan ajaran Islam.³⁰

Sumatera Barat indetik dengan alam Minangkabau. Posisi Minangkabau tergolong krusial, sehingga Minangkabau layak disebut sebagai etnis yang paling berpengaruh di Indonesia. Kontribusi orang Minangkabau dalam pembangunan semangat kebangsaan Indonesia dan kepemimpinan semasa kemerdekaan Indonesia cukup penting. Beberapa orang yang berasal dari Minangkabau menjadi pemimpin sejak kemerdekaan Indonesia,³¹ kontribusi tersebut dilatarbelakangi oleh pengetahuan intelektual dan juga kesadaran sosial. taktik politik Divide et Impera yang diterapkan Belanda di wilayah Indonesia, mengalami kegagalan di Sumatera Barat yaitu di Minangkabau, hal tersebut menjadi salah satu bukti perlawanan masyarakat Minangkabau terhadap penjajah.³²

Ada beberapa persepsi atau keyakinan yang timbul dalam benak masyarakat mengenai perang Paderi. Yang *Pertama* mereka berpandangan bahwa perang paderi merupakan puncak dari pertikaian kaum agama dan kaum adat sebenarnya padangan ini tidak seluruhnya tepat. Pendapat itu sebenarnya adalah propaganda yang dilancarkan kolonial belanda agar persatuan di kalangan orang Minangkabau terpecah belah. Yang menjadi sasaran Paderi hanya perbaikan akhlak masyarakat,

yang sebelum tahun kedatangan Haji Miskin tahun 1803, sudah sangat jauh dari ajaran Islam Kekalahan kaum Paderi pada 1838 dari Kompeni tidak lantas diratapi oleh para simpatisan Paderi.³³ Sebaliknya, muncul gelora baru di kalangan para pelajar agama untuk menuntut ilmu agama, bahkan sampai ke kiblat dunia Islam, yakni Mekkah. Jika kemudian sekolah Raja didirikan Belanda adalah untuk keturunan bangsawan Minangkabau, maka keturunan ulama dan pejuang Paderi, atau orang yang tidak langsung terlibat dalam gerakan Paderi, memilih untuk menyekolahkan anaknya ke Mekkah.³⁴

Pandangan yang *Ke dua* bahwa Perang Padri adalah perang saudara yang pernah terjadi di Minangkabau, tepatnya di wilayah Kerajaan Pagaruyung yang kini termasuk Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Latar belakang sejarah Perang Padri berawal dari masalah agama (Islam) dan adat, sebelum penjajah Belanda ikut campur tangan. Pertikaian antara sesama orang Minang ini berlangsung pada awal abad ke-19 Masehi, tepatnya dari tahun 1803 hingga 1838. Ada beberapa golongan yang terlibat, yakni kaum Paderi (kelompok agamis), kaum adat, serta Belanda yang kemudian menerapkan taktik licik untuk memecah-belah rakyat Minangkabau. Pada akhirnya, peperangan ini menjadi ajang perlawanan rakyat Minangkabau melawan penjajah Belanda yang dimotori oleh beberapa tokoh terkemuka, seperti Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Tambusai, Tuanku Nan Renceh, dan lain-lain.³⁵

B. Kronologis terjadinya Perang Paderi

Sejarah atau latar belakang Perang Paderi dimulai pada 1803 ketika tiga orang Minangkabau pulang dari Makkah usai menjalankan ibadah haji di tanah suci. Mereka dikenal dengan nama Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang. Tulisan Azyumardi Azra dalam *The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia: Networks of Malay-Indonesian and Middle Eastern 'Ulama' in the Seventeenth and Eighteenth Centuries* (2004), menyebutkan, ketiga haji ini awalnya berniat memperbaiki syariat Islam di Minangkabau yang belum sepenuhnya dijalankan. Seorang ulama bernama Tuanku Nan Renceh tertarik untuk ikut andil dan mendukung niat ketiga haji yang baru saja pulang dari tanah suci itu. Akhirnya, Tuanku Nan Renceh bergabung dan mengajak orang-orang lain untuk turut serta dan Mereka tergabung dalam kelompok bernama Harimau nan Salapan.³⁶

Harimau nan Salapan meminta pemimpin Kesultanan Pagaruyung (Pagaruyung), Sultan Arifin Muningsyah, dan kerabat kerajaan bernama Tuanku Lintau, untuk bergabung dan meninggalkan kebiasaan adat yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang Dipertuan Pagaruyung tampaknya kurang sepakat. Sultan Arifin Muningsyah masih tidak ingin meninggalkan tradisi atau kebiasaan yang telah dijalankan secara adat sejak dulu di Minangkabau. Dalam kebiasaan masyarakat Sumatera Barat, ada beberapa kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti sabung ayam, judi, serta minum minuman keras,

pada hal masyarakat adat saat itu sudah banyak yang memeluk agama Islam. Kebiasaan ini sebenarnya tidak sesuai dengan mayoritas masyarakat Kaum Adat yang beragama Islam. Menanggapi hal ini, kaum Paderi atau kelompok agamais terpaksa menggunakan cara keras untuk bisa mengubah kebiasaan itu sekaligus dengan misi melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar.³⁷

Perang Paderi yang terjadi pada medio pertama abad 19, merupakan titik kulminasi dari desakan orang Minang manghapuskan kuasa Belanda. Perang ini dimotori oleh orang-orang Paderi. Istilah "Paderi" sendiri berasal dari kata Portugis yang merujuk pada sosok ahli agama yang mengenakan busana putih. Orang-orang yang tergabung dalam perang ini mengenakan pakaian serba putih sebagai simbolisasi bahwa perang tersebut adalah perang di jalan Allah dan untuk membela agama Islam. Kelompok Paderi ini mengambil warna putih sebagai antitesa terhadap kelompok adat yang mengenakan busana hitam.³⁸ Jika dilihat dari seragam saja, sudah terasa bahwa ada perbedaan cara pandang yang besar akan penghayatan Islam di tengah orang Minangkabau. Sebagai catatan kelompok adat itupun juga sebagian besar beragama Islam, hanya saja mereka lebih mengedepankan aturan adat dalam menyelesaikan masalah mereka, ketimbang menggunakan ajaran-ajaran muamalah dalam Islam.

Peperangan antar saudara di tanah Minangkabau pun tak terelakkan. Pada 1803, seorang tokoh ulama bernama Tuanku

Pasaman memimpin serangan kaum Paderi ke Kerajaan Pagaruyang. Perang ini menyebabkan Sultan Arifin Muningsyah melarikan diri dari istana. Tahun 1815, golongan Paderi yang digalang Harimau nan Salapan berhasil menyudutkan kaum Adat. Beberapa tokoh terkemuka dari Harimau nan Salapan di antaranya adalah Tuanku Nan Receh, Tuanku Pasaman, Tuanku Rao, Tuanku Tambusai, Tuanku Lintau, Tuanku Mansiangan, Tuanku Pandai Sikek, dan Tuanku Barumun.³⁹ Lantaran semakin terdesak, orang-orang dari golongan Adat kemudian meminta bantuan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda yang saat itu menjajah wilayah Nusantara, termasuk Minangkabau. Tanggal 4 Maret 1822, pasukan dari Hindia Belanda yang dipimpin Letnan Kolonel Raff berhasil mengusir kaum Paderi dari Kerajaan Pagaruyung. Di Batu Sangkar, Raff membangun benteng pertahanan yang bernama Fort Van der Capellen. Tepat 10 Juni 1822, pasukan Raff yang bergerak dihadap oleh laskar kaum Paderi, namun Belanda berhasil melanjutkan perjalanannya ke Luhak Agam. Pertempuran di daerah Baso terjadi pada 14 Agustus 1822. Kapten Goffinet dari pihak Belanda mengalami luka berat dan akhirnya wafat pada 5 September 1822.

Perlawanan orang-orang Minangkabau dari kelompok Paderi membuat Belanda terdesak hingga akhirnya memutuskan kembali ke Batu Sangkar. Pada 13 April tahun berikutnya, Raff kembali menyerang ke daerah Lintau, markas pertahanan kaum Paderi. Pertempuran ini terjadi amat sengit

hingga menyebabkan Belanda mundur pada 16 April 1823. Raff kemudian meminta Sultan Arifin Muningsyah untuk datang ke Kerajaan Pagaruyung. Akan tetapi, pada 1825, sang sultan wafat. Tanggal November 1825, Belanda mengajukan gencatan senjata sembari meracik strategi licik berupa Perjanjian Masang. Belanda saat itu sedang kewalahan dan kehilangan banyak sumber daya untuk membiayai beberapa perang lain, termasuk perang melawan Pangeran Diponegoro di Jawa. Saat masa gencatan senjata inilah Tuanku Imam Bonjol yang notabene adalah salah satu pemimpin Kaum Paderi mencoba mengajak kaum Adat untuk bersatu karena lawan yang sesungguhnya adalah penjajah Belanda. Buku Muslim Non Muslim Marriage: Political and Cultural Contestations in Southeast Asia (2009) yang disusun oleh Gavin W. Jones dan kawan-kawan, menuliskan, perdamaian dan kesepakatan untuk bersatu antara kaum Paderi dan kaum Adat akhirnya tercapai. Kesepakatan damai yang diadakan di Bukit Marapalam, Kabupaten Tanah Datar, ini dikenal dengan nama "Plakat Puncak Pato". Hasilnya adalah perwujudan konsensus bersama yakni Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, yang artinya adat Minangkabau berlandaskan kepada agama Islam, sedangkan agama Islam berlandaskan kepada Al-Qur'an.⁴⁰

Sebab terdesak dalam peperangan dan keberadaan Yang Dipertuan Pagaruyung yang tidak pasti, maka Kaum Hukum budaya yang dipimpin oleh Sultan tanggal dunia bagagar berkeinginan bantuan kepada belanda pada tanggal 21

Februari 1821, walaupun sebetulnya Sultan Tangkal Dunia Bagagar waktu itu dianggap tidak berhak membuat akad dengan mengatasnamakan Kerajaan Pagaruyung. Akhir suatu peristiwa dari akad ini, Belanda menjadikannya sebagai tanda penyerahan Kerajaan Pagaruyung kepada pemerintah Hindia Belanda, yang belakang sekali mengangkat Sultan Tangkal Dunia Bagagar sebagai *Regent Tanah Datar*.

Keterlibatan Belanda dalam peperangan sebab diundang oleh kaum Adat, dan campur tangan Belanda dalam perang itu ditandai dengan

penyerangan Simawang dan Sulit Cairan oleh pasukan Kapten Goffinet dan Kapten Dienema pada bulan April 1821 atas perintah Residen James du Puy di Padang. Yang belakang sekali pada 8 Desember 1821 datang tambahan pasukan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Raaff bagi memperkuat posisi pada daerah yang telah dikuasai tersebut.

Pada tanggal 4 Maret 1822, pasukan Belanda dibawah pimpinan Letnan Kolonel Raaff sukses memukul mundur Kaum Paderi keluar dari Pengaruyung. Yang belakangan sekali belanda membangun benteng pertahanan di Batusangkar dengan nama Fort Van Der Capellen, sedangkan kaum Paderi menyusun daya dan bertahan di Lintau. Pada tanggal 10 Juli 1822 pergerakan pasukan Raaff di Tanjung Dunia dihalangi oleh Kaum Paderi, namun pasukan Belanda dapat terus melaju ke Luhak Agan. Pada tanggal 14 Agustus 1822 dalam pertempuran di Baso, Kapten Goffiet menderita luka berat pada 5 september

1822. Pada bulan September 1822 pasukan Belanda terpaksa kembali ke Batusangkar sebab terus tertekan oleh serangan Kaum Paderi yang dipimpin oleh Tuanku Nan Renceh.⁴¹

Setelah mendapat tambahan pasukan pada 13 April 1823, Raaff mencoba kembali menyerang Lintau, namun Kaum Paderi dengan gigih melakukan perlawanan, sehingga pada tanggal 16 April 1823 Belanda terpaksa kembali ke Batusangkar. Sementara pada tahun 1824 Yang Dipertuan Pagaruyung Sultan Arifin Muningsyah kembali ke Pagaruyung atas permintaan Letnan Kolonel Raaff, namun pada tahun 1825 Sultan Arifin Muningsyah raja terakhir Minangkabau ini wafat dan yang belakang sekali dimakamkan di Pagaruyung. Sedangkan Raaff sendiri meninggal dunia secara mendadak di Padang pada tanggal 17 April 1824 setelah sebelumnya mengalami demam tinggi. Sementara pada bulan September 1824, pasukan Belanda di bawah pimpinan Mayor Frans Laemlin telah sukses menguasai beberapa daerah di Luhak Agam di selangnya Koto Tuo dan Ampang Gadang. Yang belakang sekali mereka juga telah mendiami Biaro dan Kapau, namun sebab luka-luka yang dideritanya di bulan Desember 1824, Laemlin meninggal dunia di Padang.

C. Perjanjian dalam Perang Paderi

Pada tahun 1821 antara kaum adat (penghulu) menandatangani perjanjian dengan pihak kolonial Belanda

sebagai bentuk kerjasama melawan kaum Paderi. Serangan pertama Belanda terhadap kaum Paderi dilancarkan sesudah itu, dan meletuslah apa yang dinamakan sebagai Perang Paderi yang berlangsung selama 16 tahun.⁴² Sejak itulah awal dari pengaruh kekuasaan Kolonial Belanda di daratan tinggi Minangkabau (Padangsche Bovenlanden), yang sebelumnya hanya menguasai pesisir pantai barat Minangkabau (Padangsche Benendenlanden). Satu persatu wilayah yang telah dikuasai oleh kaum Paderi kemudian ditaklukkan oleh Belanda seperti Agam, Tanah Datar, dan Limapuluh Kota. Kaum Paderi juga mendapat bantuan dari rakyat Aceh, akan tetapi dengan strategi perang Belanda yang menutup pintu masuk ke Minangkabau yakni pesisir barat dan timur Sumatera membuat kaum Paderi terkepung dan tidak bisa mendapat bantuan dari luar. Daerah terakhir kekuasaan kaum Paderi yakni Bonjol, setelah dikepung selama dua tahun akhirnya jatuh ketangan Belanda pada bulan Agustus 1837. Pemimpinkaum Paderi Tuanku Imam Bonjol tertangkap kemudian diasingkan ke Priangan, Ambon, dan terakhir ke Menado hingga wafat pada tahun 1864.⁴³

Setelah peperangan selama hampir 16 tahun, akhirnya Belanda berhasil mematahkan perlawanan Kaum Paderi dengan dikuasainya daerah Bonjol (benteng pertahanan terakhir kaum Paderi di daerah Pasaman), dan tertangkapnya Imam Bonjol menandakan kemenangan bagi pihak Belanda. Kemenangan itu juga berarti kemenangan bagi kaum adat, sehingga antara kaum

adat dan kolonial Belanda melakukan perjanjian atas kekuasaan mereka di daratan tinggi Minangkabau. Sejak itu untuk pertama kalinya Minangkabau benar-benar mulai merasakan apa artinya menjadi bagian dari imperium Hindia Belanda. Akan tetapi perlawanan kaum Paderi setelah tahun 1837 masih terjadi, yang paling serius pernah Meletus di daerah Batipuh (Tanah Datar) pada tahun 1841, Pauh tahun 1844, dan serangan-serangan kecil di luar kontrol Pemerintah Belanda terus berlanjut hingga ditaklukkannya daerah Sungai Pagu (bagian selatan) yang relatif otonom selama sebelumnya.⁴⁴

Hingga akhir abad ke-19 Belanda memerintah Minangkabau sesuai dengan perjanjian Plakat Panjang tahun 1833. Perjanjian ini juga disebut dengan Deklarasi Van Den Bosch yang disampaikan oleh Van Sevenhoven Komisaris Belanda di Sumatera Barat, dikeluarkan pada bulan Oktober 1833. Pada dasarnya berisikan maklumat Pemerintah Kolonial Belanda untuk tidak ikut campur tangan dalam urusan-urusan lembaga Sumatra's Westkust yang mencakup pesisir dan pedalaman Minangkabau, dan pada saat itulah muncul cikal bakal nama Sumatra Barat Berdasarkan perjanjian Plakat Panjang, salah satu isinya adalah janji Belanda kepada para pemimpin anti-Paderi untuk tidak adat setempat, dan tidak memberlakukan sistem pajak langsung kepada rakyat. Maklumat ini adalah dokumen resmi berisikan janji khidmat yang pertama pemerintah Belanda pada rakyat Minangkabau.⁴⁵ Namun, satu persatu pasal yang terdapat di dalam janji tersebut

dipreteli oleh pihak Belanda sendiri. Di sisi lain, dikeluarkannya Plakat Panjang adalah strategi Belanda untuk menakhlukkan Minangkabau bagian darat yakni daerah Bonjol dan sekitarnya. Melalui maklumat itu terkesan Belanda ingin berdamai dengan kaum Paderi dengan ketentuan tertentu mempersilahkan Belanda masuk ke daratan Minangkabau. Oleh sebab itu, para pemimpin Paderi menerima usaha perdamaian tersebut dengan alasan keamanan, akan tetapi setelah beberapa tahun kemudian meletuslah peperangan antara rakyat dengan Belanda yang ingin menguasai Minangkabau secara utuh. Dengan ingkar janji tersebut kemudian membawa rakyat Minangkabau ke zaman duka nestapa, tidak banyak bedanya yang dialami di pulau Jawa selama Cultuurstelsel, berupa tanam paksa kopi hingga awal abad ke-20.⁴⁶

Perlawanan yang dilakukan oleh Kaum Padri cukup tangguh sehingga paling menyulitkan Belanda bagi menundukkannya. Oleh sebab itu Belanda menempuh residennya di Padang mengajak pemimpin Kaum Padri yang waktu itu telah dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol bagi berdamai dengan maklumat "Akad Masang" pada tanggal 15 November 1825. Hal ini dimaklumi sebab disaat bersamaan Pemerintah Hindia-Belanda juga kehabisan dana dalam menghadapi peperangan lain di Eropa dan Jawa seperti Perang Diponegoro. Selama periode gencatan senjata, Tuanku Imam Bonjol mencoba memulihkan daya dan juga mencoba merangkul kembali Kaum Hukum budaya. Sehingga

penghabisannya muncul suatu kompromi yang dikenali dengan nama "Plakat Puncak Pato" di Bukit Marapalam, Kabupaten Tanah Datar yang mewujudkan konsensus bersama hukum budaya bersandikan syarak, syarak bersandikan kitabullah yang manfaatnya hukum budaya minangkabau berdasarkan kepada agama Islam, sedangkan agama islam berdasarkan kepada al-Qur'an.

D. Tokoh Perang Paderi

1. Tuangku Koto Tua

Koto Tuo adalah nama daerah di Cangkiang, Agam sekaligus nama perguruan yang didirikan Tuanku Koto Tuo. Jika ada ulama di sebuah nagari maka julukan Tuanku sebagai pemimpin agama tertinggi disandingkan dengan nama tempat tinggalnya. Muridnya ribuan. Pada masa itu, perguruan yang dipimpinya sangat terkenal. Dari perguruan itu, lahir ulama atau pemimpin gerakan. Tak ada catatan mengenai tanggal lahirnya atau nama kecilnya. Namun, dialah yang pertama mengajarkan pembaruan. Awalnya, Tuanku Koto Tuo mengikuti ajaran gurunya, Syekh Burhanuddin Ulakan. Ia bisa duduk dalam surau berjam-jam lamanya dalam posisi yang sama. Hatinya bertanya-tanya tentang permasalahan agama. Pemisahan dari hiruk-pikuk itu sedemikian rupa sehingga ada yang mengatakan jiwanya berziarah ke Makkah.⁴⁷

Tuanku Koto Tuo melihat terjadi perubahan besar pada masyarakat. Adat yang selama ini bersandar pada

agama tak lagi berjalan. Harta pusaka banyak habis untuk sabung ayam atau balam. Perampokan merajalela baik terhadap petani maupun pedagang. Di pasar sering terjadi keributan. Perkelahian tiap sebentar berlangsung, kadang sampai terjadi pembunuhan. Tak ada yang bisa menyelesaikan, termasuk para penghulu atau datuk. Dari ranji-nya, Tuanku Koto Tuo berguru kepada Tuanku di Kamang, Tuanku di Sumani, Tuanku di Kota Gadang, serta Tuanku Mensiangan nan Tua. Guru-gurunya merupakan murid langsung dari pelanjut ajaran Syekh Burhanuddin di Ulakan, Pariaman. Hal itu pula yang menjadi sebab lain munculnya pembaruan. Pada masa itu para tuanku lebih sering menyepikan diri. Bersuluk namanya. Artinya, jalan menuju Allah. Caranya dengan berzikir. Bisa 5.000 hingga 10.000 kali sehari. Tempatnya tertutup dan tak boleh diganggu. Cara itu dianggap Tuanku Koto Tuo tak efektif. Dia beranggapan kondisi masyarakat mesti diperbaiki. Akibatnya, ia berseberangan dengan ajaran Ulakan.

Bersama muridnya, Jalaluddin (Faqih Sagir atau Tuanku Samik), ia menggerakkan murid-muridnya. Nagari-nagari yang dirampok dilindungi. Sabung ayam ditutup. Tempat perjudian, candu, dan tuak dihancurkan. Cara itu langsung mendapat tantangan. Namun, Tuanku Koto Tuo telah mempersiapkan segala sesuatunya. Murid-muridnya adalah pesilat tangguh. Sesekali mengalami kekalahan, tetapi sikapnya banyak mendapat pujian. Ia bahkan dijuluki "Pelindung Para Pedagang". Kekerasan terjadi akibat jihad "lidah" tak mendapat

tempat. Itu hanyalah tindakan terakhir. Nasihat-menasihati lebih didahulukan. Namun, dengan cara ini pun tak semuanya setuju. Yang paling keras menolak adalah muridnya sendiri, Tuanku Nan Renceh. Nan Tuo bergeming. Dia berpendapat, jika ada satu orang Islam dalam satu nagari, tempat itu tak layak dihancurkan. Itu sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad saw. Dia menolak dijadikan pemimpin agar bisa menindak langsung tempat-tempat yang tidak mau menerima pembaruan. Sikap itu mengecewakan Nan Renceh. Oleh pemimpin agama yang sejalan dengan Nan Renceh, Nan Tuo dijuluki "Rahib Tua".⁴⁸

Nan Tuo bahkan bekerja sama dengan Belanda. Tujuannya adalah agar ketenteraman nagari lebih cepat berlangsung. Tindakan tersebut membuat ulama Padri makin marah. Perguruannya diserang. Anaknya tewas. Akan tetapi, dia tetap bersikukuh, kekerasan bukan jalan yang akan ditempuhnya. Sampai dia meninggal pada 1824, pendirian itu tetap dipegang dan diwariskan kepada murid-muridnya di Perguruan Koto Tuo. Menjelang meninggal, ia berwasiat kepada Jalaluddin alias Fakih Sagir agar mendirikan agama Allah dan sunnah Rasulullah dengan sebenarnya. Dia bahkan mencegah terjadinya balas dendam atas kematian anaknya.

2. *Fakir Sagir*

Ketika kecil dia bernama Jalaluddin, ketika besar diberi nama Fakih Sagir (atau Fakih Saghir). Jika seseorang diberi gelar fakih berarti dia sudah menguasai ilmu fikih. Ilmu

fikh adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia baik kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya. Di ujung hidupnya, ia diberi gelar Tuanku Samik. Dalam tulisannya Surat Keterangan Syeikh Jalaluddin, ia menyebut namanya dengan Fakih Saghir `Alamiyat Tuanku Samiang Syekh Jalaluddin Ahmad Kota Tuho. Biografi yang ditulisnya merupakan satu dari dua fakta mengenai Gerakan Padri yang ditulis oleh pribumi. Satunya lagi adalah Naskah Tuanku Imam, catatan harian Tuanku Imam Bonjol sampai dia dibuang ke Manado, Sulawesi Utara. Data lain ditulis Belanda.⁴⁹

Fakir Sagir adalah menantu Tuanku Koto Tuo dan teman seperguruan Nan Renceh. Dalam tulisan itu, Fakih dan Nan Renceh sama-sama belajar ilmu fikh di Masjid Kota Hambalau di Nagari Candung, Kota Lawas. Keduanya sepakat untuk menegakkan ajaran Islam. Namun, dari berdampingan, keduanya berhadapan muka. Saking kesalnya, Nan Renceh pernah mengatakan teman selapik-seketiduran itu “telah keluar dari Islam” Fakih memilih mendirikan madrasah di Kubu Sanang, Sungai Pua, Agam. Dari hanya empat jemaah, dia kemudian memiliki puluhan jemaah. Namun, madrasah itu dibakar karena fitnah. Dalam tulisan itu, ia menceritakan bagaimana Gerakan Padri bermula, pergolakannya, sampai kematian Tuanku Koto Tuo.

3. *Tiga Haji*

Di penghujung abad ke-18, Makkah bergolak. Pangkalnya adalah Muhammad Abdul Ibnu Wahab. Ulama itu ingin umat Islam kembali ke ajaran Tauhid dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengikutnya kemudian disebut Wahabi. Beliau menentang pemujaan orang keramat dalam kehidupan sehari-hari. Hukumnya disamakan dengan menyembah berhala. Wahabi menentang minum khamar, memakai pakaian dari sutra, dan memakai perhiasan emas. Perubahan itu diperhatikan tiga pemuda yang waktu itu sedang berada di sana. Ketiganya datang dari luak (daerah asal) yang berbeda. Mereka adalah Haji Miskin dari Pandai Sikek (Luak Agam), Haji Abdur Rahman dari Piobang (Luak Limopuluah), serta Haji Muhammad Arif dari Sumani (Luak Tanah Datar). Dalam perjalanan pulang, ketiganya sudah ingin mengadakan perubahan di Minangkabau. Haji Miskin, sebelum ke Makkah, bahkan sudah berdampingan dengan Tuanku Koto Tuo memberantas kemungkaran. Makin padatlah hati ketiganya untuk memurnikan ajaran Islam. Setelah berada di kampung masing-masing, perubahan itu dimulai.⁵⁰

Memang, yang paling terkenal di antara ketiganya adalah Haji Miskin. Beliau lahir pada 1778. Setelah berdiam di Batu Taba beberapa saat, hatinya terpanggil untuk pergi ke daerah pegunungan di Pandai Sikek. Di sana, ia mendapat teman seorang penghulu. Namanya Kunciir Datuk Batuah. Ini bukti bahwa tidak semua Kaum Adat menentang

Paderi. Haji Miskin giat menerapkan ajaran Wahabi. Namun, hanya penolakan yang didapat. Karena tak bisa menahan hati, Haji Miskin membakar balai adat megah yang baru didirikan. Dia lari ke Koto Lawas. Di sana bermukim Tuanku Mensiangan (Nan Tua). Kegagalan di Pandai Sikek membuat Haji Miskin berpikir. Beliau berpendapat, kegagalan itu terutama karena kurangnya guru agama yang menonjol. Mensiangan menjadi pelindung Haji Miskin sesudah menerima ajaran Wahabi. Tak lama kemudian Haji Miskin mendapat pengikut, terutama dari keluargakeluarga pengikut Fakih Sagir yang sebelumnya juga menyebarkan agama. Fakih berpindah ke sini setelah madrasahnyanya di Sungai Pua dibakar. Perlawanan tumbuh setelah nagari terpecah menjadi dua. Pengikut Haji Miskin dapat dikalahkan, sedangkan Tuanku Mensiangan dibiarkan oleh Kaum Adat tetap mengajar di surau. Gengsinya masih tinggi di sana. Haji Miskin dapat melarikan diri ke utara. Di Bukit Kamang, Haji Miskin tinggal bersama Tuanku Nan Renceh di Surau Bansa (1807--1811). Keduanya mulai mengatur rencana pembaruan secara menyeluruh untuk menerapkan hukum perdagangan Islam dalam melengkapi hukum adat Minangkabau. Dari perbincangan itu, lahirlah Harimau Nan Salapan.

Haji Miskin melanjutkan usaha pembaruan di Luak Lima Puluh. Di sana, dia menggugah ulama muda, Malin Putih di Aia Tabik, untuk melakukan pembaruan. Fakih Sagir datang ke daerah ini membantu Malin Putih yang kemudian

bergelar Tuanku Nan Pahit. Mereka mendirikan sebuah benteng di Bukit Kawi. Haji Miskin pindah ke Masjid Sungai Lundi di Nagari Aia Tabik. Pembaruan yang dilancarkan Haji Miskin di Aia Tabik bergema ke Halaban. Seorang ulama yang mengikuti ajaran baru itu ialah Tuanku Luak di Halaban. Haji Miskin dianggap penyebar cita-cita dan ide pembaruan masyarakat Minangkabau. Dia dianggap seorang penebar benih pembaruan masyarakat Minangkabau. Hukum Islam yang diajarkan melengkap adat Minangkabau, seperti jual beli, harta pencarian, dan hukum waris. Nan Tuo datang membantu. Namun, penduduk Aia Tabik menolak. Haji Miskin sempat menghilang. Suasana makin meruncing. Dalam suasana ribut itulah Haji Miskin mati terbunuh dan dikuburkan di atas Bukit Kawi (1811). Namun, di Pandai Sikek sekarang ada kuburan Haji Miskin. Ini misterinya. Kapan dan bagaimana kuburan itu berpindah tidak diketahui. Dua haji lainnya tidak jelas catatan sejarahnya. Sumanik hanya nagari kecil. Masjid satu, balairung (tempat rapat adat) juga satu. Penduduk di sana semuanya bertalian darah baik suku maupun pertalian perkawinan. Sumanik adalah tempat bertahtanya Tuan Makhudum, salah satu menteri Kerajaan Pagaruyung yang terkenal dengan sebutan Basa Ampek Balai (Empat Menteri Besar). Tak mungkin Haji Sumanik berkonfrontasi dengan Makhudum karena mereka disinyalir juga bertalian darah. Dalam catatan Fakhir Sagir, Haji Sumani hanya pernah melatih penduduk membuat mesiu.

Mengenai Haji Piobang, lebih sedikit catatan mengenainya. Sebabnya, di Piobang orang-orang menerima ajarannya. Namun, ketiganya tetap mendapat tempat meskipun tak semua orang menerima tindakan mereka pada masa dahulu. Nama Haji Miskin terpatri pada sebuah pondok pesantren di daerah yang justru balai adatnya dibakar, Pandai Sikek. Sebuah bank rakyat (BPR) juga memakai namanya. Di Piobang dan Sumanik, nama Abdur Rahman dan Muhammad Arif tak lekang dalam ingatan. Akan tetapi, keduanya akan diingat sebagai dua dari “Tiga Orang Haji” atau “Tiga Tuanku Haji” yang mula-mula menyulut api perubahan ajaran Islam di Minangkabau. Nama itu kemudian menggegerkan Minangkabau. Julukan tersebut menimbulkan kepatuhan sekaligus ketakutan. Pelopornya memang Tuanku Nan Renceh. Meski tak melihat ajaran Wahabi di Makkah, ia menerima petuah dari Haji Miskin. Dari sebuah perbincangan di Surau Bansa itulah Nan Renceh berketetapan hati mengadakan pembaruan di Minangkabau.

4. Harimau Nan Salapan

Tujuh ulama lainnya diajak. Mereka adalah Tuanku Kubu Sanang dari Ampek Angkek, Tuanku Ladang Laweh dari Banuhampu, Tuanku Padang Lua juga dari Banuhampu, Tuanku Galuang dari Sungaipua, Tuanku Koto Ambalau dari Canduang Koto Laweh, Tuanku Lubuk Aua dari Batu Balantai, Canduang, dan Tuanku Biaro dari Biaro Ampek Angkek. Awalnya, Tuanku Koto Tuo membantu gerakan Nan

Renceh bahkan ikut membantu penyerbuan di Padang Lua, tetapi ia gagal. Begitu juga dengan nagarinagari lain. Hal itu mengesalkan Nan Renceh. Dia ingin secepatnya setiap tempat berubah. Setelah pertempuran nagari-nagari berkobar hebat, Tuanku Koto Tuo mulai tak menyukai gerakan Nan Renceh. Harimau Nan Salapan mencoba membujuk Nan Tuo (karena semuanya pernah belajar di Perguruan Cangkiang). Pesta pun diadakan agar Nan Tuo berpihak kepada mereka. Nan Tuo tak terbujuk. Sebaliknya, Harimau Nan Salapan malah kalah debat. Cara lain ditempuh. Imam baru ditunjuk, yaitu Tuanku Mensiangan (Nan Mudo). Tuanku Koto Tuo tak bisa melarang lagi karena terikat aturan guru-murid dengan Tuanku Mensiangan Nan Tuo.

Harimau Nan Salapan menancapkan kukunya di mana-mana. Di Bansa, Nan Renceh mengumumkan tata tertib ekstrem yang sejak saat itu harus dipatuhi. Adu jago, perjudian, dan penggunaan tembakau, candu, sirih, dan minuman keras dilarang. Penduduk diwajibkan memakai pakaian putih. Wanita menutup wajah, pria membiarkan janggut tumbuh. Perhiasan emas dan pakaian sutra mesti dijauhi. Usai salat, Laskar Wahabi bergerak. Batu tapian mandi diperiksa. Kalau tak basah, seisi rumah akan diingatkan. Sekali dua tak mempan, ketiga kali mereka mendapat hukuman. Perilaku bidah dihapuskan, apalagi yang haram. Tindakan paling spektakuler dilakukan Nan Renceh, yaitu membunuh amai (bibi) kandungnya karena mengunyah sirih. Namun, dramawan Wisran Hadi menolak

anggapan itu. Dari penelitiannya, ia berpendapat bahwa pembunuhan yang dilakukan Nan Renceh lebih daripada sekadar mengunyah sirih. Bibinya menolak lamaran Nan Renceh kepada putrinya karena adat melarang, sedangkan Nan Renceh bersikeras bahwa agama membolehkannya.

Adat tersebut kemudian menjadi soal lain. Penghulu dan datuk sudah menjadi sistem yang tertanam kuat dalam budaya Minangkabau serta sudah sulit untuk diubah. Akan tetapi, bagi Harimau Nan Salapan, "jihad hati dan lidah" sudah selesai. Mereka memaksa memasukkan tuan kadi yang setingkat dengan dewan desa. Fungsinya, apabila ada upacara dan kewajiban dalam Islam, dialah yang menentukan. Begitu juga dengan urusan perdagangan yang sering berada di luar jangkauan dewan desa. Selain itu, seorang imam juga diangkat. Tujuannya adalah untuk menjelaskan ayatayat Alquran secara terperinci. Sampai 1821, selain Cangkiang, seluruh Pegunungan Agam sudah memihak Padri. Gerakan ini juga sampai di Danau Maninjau, Matur, dan sekitarnya. Meski begitu, rakyat tahu siapa "imam" sebenarnya dari pergerakan itu. Nan Renceh bernama asli Abdilah. Kurang jelas kapan tanggal lahirnya. Namun, sebagian sejarawan menerka bahwa dia lahir pada sekitar 1770-an. Memang tidak banyak keterangan tentang kehidupannya. Namun, Nan Renceh diakui sebagai ulama cerdas. Sesuai dengan namanya, posturnya renceh atau rinceh. Artinya, kecil dan kurus. Namun, ia digambarkan "memiliki mata berapi-api luar biasa". Pada saat melawan Kompeni, dia

membangun benteng yang kuat di Kapau, yang baru jebol setelah berkali-kali dikepung Belanda. Dia tewas ditembak Belanda dalam pertempuran di Kamang, 19 Juni 1833. Dia dikuburkan di kampung halamannya, Kamang. Tempat kuburnya sudah menjadi situs cagar budaya.

Sementara itu, tujuh "harimau" lainnya tidak begitu tercatat. Namun, bisa ditegaskan, apa yang 36 diserukan Nan Renceh akan diikuti. Hal itu terbukti dengan luasnya pengaruh gerakan itu di sekitar Agam. Perdebatan seru antara Tuanku Koto Tuo dan Harimau Nan Salapan disaksikan banyak orang, termasuk di antaranya Datuk Bandaro (atau Bandaharo, artinya 'bendahara') dan muridnya, Muhammad Shahab. Datuk Bandaro lebih setuju dengan sikap Nan Renceh. Ia ingin membawa pembaruan ke kampungnya, Alahan Panjang, Pasaman. Di daerahnya bercokol Datuk Sati, penghulu kaum. Seperti daerah lain, Alahan Panjang berhadapan dengan situasi yang sama. Namun, Datuk Bandaro memilih pindah karena kalah dalam pertarungan dengan Datuk Sati. Ia memilih meneroka sebuah tempat bernama Bonjol. Hanya enam keluarga berdiam di sana. Dari taratak (dusun), Bonjol berubah menjadi nagari yang makmur. Akan tetapi, Bandaro tak sempat menyaksikan karena ia lebih dahulu meninggal. Gelar datuk diserahkan kepada kemenakannya yang kemudian bergelar sama dengan dirinya, sedangkan pimpinan Bonjol diserahkan kepada Muhammad Shahab bin Tuanku Raja Nuruddin.

5. *Barampek Selo Bonjol*

Pilihan Bandaro tak salah. Muhammad Shahab ditakdirkan menjadi pimpinan besar Gerakan Padri dengan nama Tuanku Imam Bonjol. Ditilik dari namanya, Tuanku Imam Bonjol hanyalah sinonim dari Pemimpin Bonjol. Setiap tuanku yang berada di Bonjol disebut Tuanku Imam Bonjol. Namun, karena Peto Syarif yang tinggal nanti memimpin Bonjol, gelar itu disematkan pada dirinya. Apalagi pada masa bagian ketiga dan keempat Gerakan Padri beliau, dalam "kesepakatan tak tertulis", diangkat menjadi Imam Masjid dan Perang Setelah agak besar, dia diberi nama Peto Syarif. Peto berasal dari kata pandito. Artinya, orang yang menguasai agama. Kemudian ia diberi gelar Malin Basa (Mualim Besar). Setelah Bonjol berkembang dan memiliki pasukan, ia diberi gelar Tuanku Mudo, sebuah jabatan panglima perang di Bonjol. Tuanku Imam tak hanya dibawa Bandaro ke Koto Tuo, tetapi juga ke Bansa. Di sana, dia juga menyaksikan diskusi antara Haji Miskin dan Nan Renceh.

Pendidikan manual itu mengasah jiwa Tuanku Imam. Karakter terpelajar dan tegas terbentuk. Sebagai 39 pimpinan, strategi perangnya amat jitu. Itu terbukti dengan berhasilnya Bonjol menjadi benteng Gerakan Padri terakhir dan terbesar. Pada awalnya, ia harus membereskan kelakuan dan perangai Kaum Adat yang masih jahiliah. Datuk Sati tidak hanya berhasil disadarkan, tetapi juga menjadi teman seperjuangan sampai akhir hayat. Setelah itu, bersama Tuanku Rao dan

Tuanku Tambusai, dia menyebarkan ajaran Islam ke arah utara, seperti Natal dan Mandailing. Bonjol ternyata daerah yang subur. Kopi dan akasia melimpah ruah. Belum lagi di bawah tanahnya banyak terpendam emas. Tuanku Imam juga membuka jaringan ekonomi sampai ke Selat Malaka. Perdagangan garam, yang merupakan primadona waktu itu, berada di bawah kekuasaan Bonjol. Tak sampai dua dekade, Bonjol menjadi daerah termakmur di seantero Minangkabau. Ini seiring dengan merosotnya ekonomi di daerah lain akibat perang. Dalam bidang militer pun Bonjol sangat kuat. Pada satu masa, Bonjol mempunyai lima ribu prajurit siap tempur. Tuanku Imam langsung turun tangan melatih. 40 Tak hanya dalam keahlian senjata tetapi juga silat. Sampai sekarang Perguruan Silat Torpedo Bonjol masih memakai aliran silat yang diciptakan Tuanku Imam, Kitab Tinju Sambuik Sapuluah. Tuanku Imam dibantu oleh tiga rekannya: Tuanku Gapuak, Tuanku Keluat, dan Tuanku Hitam. Mereka disebut Barampek Selo Bonjol ('Empat Pemimpin Bonjol').

Perpecahan mulai muncul saat Nan Renceh mengunjungi Bonjol. Tuanku Imam goyah, apakah mempertahankan kemakmuran Bonjol atau membantu sesama muslim? Dalam keragu-raguan itu, Tuanku Gapuak dan Tuanku Keluat tewas dalam peperangan. Tak lama kemudian, menyusul Tuanku Hitam. Barampek Selo berubah menjadi Rajo Tigo Selo ('Raja yang Bertiga'): Tuanku Imam, Datuk Sati, dan Datuk Bandaro (yang muda). Namun, situasi makin kritis. Hanya

dalam beberapa tahun (1825—1831), akibat perang, ekonomi Bonjol anjlok. Rakyat Bonjol jatuh miskin, semiskin-miskinya. Saat itu pilihannya adalah menyerah atau melawan. Dua datuk bersitegang. Datuk Sati memilih melawan. Dua kubu pecah. Tuanku Imam tak tahan melihat ini. Dia melarikan diri ke Lubuk Sikaping. Belanda melenggang ke dalam benteng. Tuanku Imam kembali ke Bonjol tak lama kemudian. Dia ditempatkan di dalam surau tua oleh Kolonel Elout sebagai simbol. Namun, sebuah percobaan pembunuhan terhadap Tuanku Imam mengubah sejarah. Rakyat bangkit. Banyak orang Eropa tewas. Pemberontakan itu mengilhami seluruh daratan Minangkabau. Belanda menggempur habis-habisan Benteng Bonjol.

Tuanku Imam terus melanjutkan perjuangan dari hutan ke hutan. Dia dijebak di Benteng Fort de Kock kemudian dibuang ke Lotak, Manado, Sulawesi Utara. Di sana, dia terus mengobarkan semangat jihad melawan Belanda. Di sana pula dia meninggal dalam usia 92 tahun pada 8 November 1864. Menurut kabar, dia ditembak mati. Kuburan pertamanya tak diketahui orang. Namun, Sjafnir, salah seorang dari sepuluh penggali makamnya, menunjukkan tempat penguburannya satu dekade kemudian. Tepat di bawah sebuah pohon besar. Kuburan Tuanku Imam pun harus disembunyikan oleh Belanda. Mereka takut, justru kematiannya makin menginspirasi orang untuk melakukan perlawanan. Belanda tak mau mengulangi peristiwa di Bonjol. Tuanku Imam tak hanya meninggalkan nama sebagai pahlawan, tetapi juga sebagai penulis. Catatan

hariannya layak dicetak secara nasional agar generasi sekarang mengetahui bagaimana perjuangannya dahulu.

6. *Para Datuk*

Gerakan Padri tak pas disebut perselisihan antara Kaum Padri dengan Kaum Adat. Banyak datuk dan penghulu langsung menerima ajaran tersebut. Banyak ulama yang juga datuk atau penghulu bagi kaumnya. Begitu juga sebaliknya. Banyak tuanku yang juga memihak kejahiliahan, bahkan memihak Belanda. Seperti tersebut di atas, Datuk Batuah dari Pandai Sikek membantu Haji Miskin. Begitu juga Datuk Bandaro yang mendirikan Bonjol. Selain itu, 43 ada Datuk Sati yang semula lawan kemudian menjadi sekutu. Datuk Sati pernah mengepung Bonjol. Namun, sampai meninggalnya, ia terus meneriakkan perjuangan sampai titik darah penghabisan kepada Tuanku Imam. Masih di Bonjol, ada Datuk Bagindo dan Datuk Bagindo Arab. Awalnya, mereka sepakat bersama Datuk Bandaro membiarkan Belanda masuk karena rakyat sudah miskin. Namun, melihat kelakuan tentara Belanda, mereka tak tahan. Bahkan Datuk Bagindo Arab langsung menyerbu pos Belanda yang mengakibatkan kematiannya. Umumnya, para datuk berada dalam posisi menerima dan tidak. Namun, sewaktu “Nasionalisme Minangkabau” tercetus, semuanya serempak melawan Belanda. Misalnya, Datuk Gadang Batuah.

Bersama Tuanku Imam dan Raja Pagaruyung, dia secara diamdiam membuat kesepakatan melawan Belanda. Bahkan,

pertemuan mereka menghasilkan adagium yang dipakai orang Minangkabau sampai hari ini, *syara' mangato*, adat memakai ('hukum agama tertulis, adat yang melaksanakan'). Pakta integritas itu menjadi sumbu perlawanan masyarakat Minangkabau secara keseluruhan. 44 Tentu ada pula penghulu yang mau menjadi antek Belanda. Buya Hamka menyindir dengan istilah *Pangulu Nan Basurek* ('Penghulu yang ada surat pengangkatannya'). Biasanya seorang penghulu diangkat atas dasar mufakat, bukan atas stempel Belanda.

7. Tuanku Tabu Sai

Dalam sebuah kesempatan, Tuanku Imam mengirim beberapa orang ke Makkah. Tujuannya, antara lain, mengetahui perkembangan terakhir ajaran Wahabi. Ikut di dalam rombongan itu kemenakan Tuanku Imam, kemenakan Tuanku Rao, dan seorang pemuda dari Nagari Tambusai, daerah Rantau, Minangkabau. Muhammad Saleh namanya. Setelah tamat belajar ilmu fikih, orang memanggilnya Fakih Saleh. Sekembalinya dari Makkah namanya bertambah menjadi Tuanku Haji Muhammad Saleh. Karena berasal dari Tambusai, nama Tuanku Tambusai lebih dikenal dalam catatan sejarah. Namun, penduduk Tambusai lebih suka menyebutnya dengan hormat sebagai Beliau dari DaluDalu. Namun, ada juga yang menyebutnya sebagai Harimau Padri dari Rokan karena dia amat sulit dikalahkan dalam perang maupun diplomasi. Hal itu terlukis dalam dialog perundingan Tuanku Tambusai dengan

Letnan Kolonel Elout. Jawaban Tuanku Tambusai ketika dia diminta menyerah sungguh mengejutkan Elout. “Menurut pendapat saya, lebih baik Tuan Letnan Kolonel Elout dan tentaranya pulang saja ke tepi laut.

Karena jika mau tinggal di pesisir saja, tidak mau mencampuri urusan negeri orang lain, kami semua, termasuk saya, bersedia memulai perdagangan lagi dengan Belanda.” Elout menyahut dengan marah, “Tuanku harus tahu, di mana Kompeni masuk, di sana dia bikin dia punya kuburan. “Jika begitu siapkanlah bedil,” sahut Tuanku Tambusai sembari meninggalkan perundingan. Memang benar, Belanda tak berhasil menangkapnya walau Benteng Dalu-Dalu takluk pada 28 Desember 1838. Tuanku Tambusai terus melanjutkan perlawanan. Tak hanya kepada Belanda, tetapi juga kepada Raja Gadombang dan wakil Sentot, Tumenggung Kertorejo. Dalam sebuah pengejaran, Tuanku Tambusai naik perahu. Ia ditembaki di Rao. Orang kemudian hanya menemukan perahunya di hilir. Di dalamnya ditemukan Alquran, beberapa kitab berbahasa Arab, dan cincin stempel. Begitu data Belanda mencatat. Namun, sebuah buku terbit dengan judul Rokan: Tuanku Tambusai Berjuang. Buku itu ditulis Mahidin Said, keturunan langsung Tuanku Tambusai. Dalam buku itu jelas tertulis ibu kandungnya bernama Munah, orang asli Dalu-Dalu, Tambusai. Sang Ibu bersuku Kandang Kopuh. Dalam buku itu diceritakan, Tuanku Tambusai tidak meninggal di Batang Sosa, tetapi dia meneruskan perjuangan menyeruak rimba Mahato. Melalui

Labuhan Bilik, dia menyeberang ke Selat Malaka dan selanjutnya 56 menetap di Negeri Sembilan sampai meninggal dalam usia 98 tahun pada 12 November 1882. Pada 1995, oleh Pemerintah Indonesia, Tuanku Tambusai diberi gelar pahlawan karena menentang Belanda.

8. *Tuanku Imam Bonjol*

Tuanku Imam Bonjol adalah salah seorang pemimpin Perang Paderi, yang diilustrasikan oleh de Stuers pada tahun 1820. Tuanku Imam Bonjol yang bernama asli Muhammad Shahab muncul sbg pemimpin dalam Perang Paderi setelah sebelumnya ditunjuk oleh Tuanku Nan Renceh sebagai Imam di Bonjol.⁵¹ Yang belakang sekali menjadi pemimpin sekaligus panglima perang setelah Tuanku Nan Renceh meninggal dunia. Pada masa kepemimpinannya, beliau mulai menyesali beberapa tingkah laku yang dibuat kekerasan yang dilakukan oleh Kaum Padri terhadap saudara-saudaranya, sebagaimana yang terdapat dalam memorinya. Walau di sisi lain fanatisme tersebut juga melahirkan sikap kepahlawanan dan cinta tanah air. Dan punya misi besar untuk mengemangkan dan melakukan pemurnian terhadap Islam.⁵²

Nama-nama yang disebut sebelumnya hanyalah sebagian kecil yang ikut dalam Gerakan Padri yang begitu besar dan melewati masa yang lama. Mereka berasal baik dari kalangan ulama maupun adat. Ada nama lain yang patut dibentangkan, misalnya Tuanku Pariaman. Dia adalah nenek

moyang Buya Hamka. Tuanku Pariaman menjaga Pariaman dari serangan Belanda. Dia ditangkap setelah dengan susah payah dikalahkan oleh Belanda. Dia juga disebut Tuanku Nan Tuo dari Koto Tuo Ampat Angkat. Tak heran, Buya Hamka sempat geleng-geleng kepala karena buyutnya disamakan dengan Tuanku Koto Tuo di Cangkiang. Di pesisir Pariaman masih ada nama Tuanku Nan Cerdik. Dia berasal dari Nareh, Padangpariaman. Belanda susah payah menaklukkannya. 57 Ada juga Pito Magek. Dia merupakan bajak laut paling menakutkan di pesisir Pasaman sekaligus makelar dagang bagi Bonjol. Tak terhitung kapal Belanda yang ditenggelamkan olehnya. Ada juga keturunan dari Tuanku Imam, yaitu Naali Sutan Chaniago. Ia ikut ayahnya ke pengasingan, tetapi ia diancam. Naali balik ke Bonjol dan menjadi seorang regen.

Ada juga Tuanku Pasaman atau Tuanku Lintau yang dituduh membunuh keluarga kerajaan. Di Tanah Datar juga ada nama Tuanku Nan Salih, Tuanku Guguk, dan Tuanku Putih Gigi. Daftar akan makin panjang jika kita memasukkan nama Tuanku Talawi, Tuanku Keramat, Tuanku Bawah Tabiang, Tuanku Ujung, Datuk Pamuncak, Tuanku Laras Baitipuh, Tuanku Mudik Padang, Tuanku di Laut dari Saruaso, Tuanku Nan Garang, Tuanku (Haji) Ibrahim, Tuanku Haji Nan Garang, Pakih Kamang, Tuanku Tumenggung Sungai Pua, Tuanku Pakandangan, Tuanku Lebai, Tuanku Sabar, Tuanku Nan Gapau, Tuanku Nan Cedok, Haji Ismail, dan ratusan nama lainnya yang tidak tercatat sejarah. 58 Semua berjuang dengan

cara dan posisi masing-masing. Awalnya, perbaikan dalam akidah. Namun, semuanya kemudian bersatu mengusir penjajah dari Minangkabau.

E. Peperangan jilid kedua

Setelah habisnya perang diponegoro dan pulihnya daya belanda di jawa, Hal ini paling didasari oleh kehendak kuat bagi penguasaan penanaman kopi yang sedang meluas di daerah pedalaman Minangkabau (*darek*). Sampai zaman ke-19, komoditas perdagangan kopi merupakan salah satu produk andalan Belanda di Eropa. Christine Dobbin mengatakannya lebih kepada perang dagang, hal ini seiring dengan dinamika perubahan sosial masyarakat Minangkabau dalam liku-liku perdagangan di pedalaman dan pesisir pantai barat atau pantai timur. Sementara Belanda pada satu sisi bersedia mengambil alih atau monopoli. Yang belakang sekali bagi melemahkan daya lawan, Belanda melanggar akad yang telah dibuat sebelumnya dengan menyerang nagari Bijak Sikek yang merupakan salah satu daerah yang mampu memproduksi mesiu dan senjata api. Yang belakang sekali bagi memperkuat kedudukannya, Belanda membangun benteng di Bukittinggi yang dikenali dengan nama Fort de Kock. Pada awal bulan Agustus 1831 Lintau sukses ditaklukkan, menjadikan Luhak Tanah Datar berada dalam kemudi Belanda. Namun Tuanku Lintau sedang tetap melakukan perlawanan dari daerah Luhak Limo Puluah. Sementara ketika Letnan Kolonel

Elout melakukan bermacam serangan terhadap Kaum Padri selang tahun 1831–1832, beliau memperoleh tambahan daya dari pasukan Sentot Prawirodirdjo salah seorang panglima pasukan Pangeran Diponegoro yang telah membelot dan berdinan pada Pemerintah Hindia-Belanda setelah usai perang di Jawa. Namun yang belakang sekali Letnan Kolonel Elout berpendapat, kehadiran Sentot yang ditaruh di Lintau justru menimbulkan masalah baru. Beberapa dokumen-dokumen resmi Belanda membuktikan kesalahan Sentot yang telah melakukan persekongkolan dengan Kaum Padri sehingga yang belakang sekali Sentot dan legiunnya dikembalikan ke Pulau Jawa. Di Jawa, Sentot juga tidak sukses menghilangkan kecurigaan Belanda terhadap dirinya, dan Belanda pun juga tidak bersedia beliau tetap berada di Jawa dan mengirimnya kembali ke Sumatera. Namun di tengah perjalanan, Sentot diturunkan dan ditahan di Bengkulu, lalu ditinggal sampai mati sbg orang buangan. Sedangkan pasukannya dibubarkan yang belakang sekali direkrut kembali menjadi tentara Belanda.

Pada bulan Juli 1832, dari Jakarta dikirim pasukan infantri dalam jumlah akbar di bawah pimpinan Letnan Kolonel Ferdinand P. Vermeulen Krieger, bagi mempercepat penyelesaian peperangan. Dengan tambahan pasukan tersebut pada bulan Oktober 1832, Luhak Limo Puluah telah berada dalam kekuasaan Belanda bersamaan dengan meninggalnya Tuanku Lintau. Yang belakang sekali Kaum Padri terus melakukan konsolidasi dan berkubu di

Kamang, namun seluruh daya Kaum Padri di Luhak Agam juga dapat ditaklukkan Belanda setelah jatuhnya Kamang pada penghabisan tahun 1832, sehingga kembali Kaum Paderi terpaksa mundur dari daerah luhak dan bertahan di Bonjol.

Yang belakang sekali pasukan Belanda mulai melakukan penyisiran pada beberapa daerah yang sedang menjadi basis Kaum Paderi. Pada awal Januari 1833, pasukan Belanda membangun kubu pertahanan di Padang Mantinggi, namun sebelum mereka dapat memperkuat posisi, kubu pertahanan tersebut diserang oleh Kaum Padri dibawah pimpinan Tuanku Rao yang mengakibatkan jumlah korban di pihak Belanda. Namun dalam pertempuran di Cairan Bangis, pada tanggal 29 Januari 1833, Tuanku Rao menderita luka berat akhir suatu peristiwa dihujani peluru. Yang belakang sekali beliau ditingkatkan ke atas kapal bagi diasingkan. Belum lama berada di atas kapal, Tuanku Rao menemui ajalnya. Diduga jenazahnya yang belakang sekali dibuang kelaut oleh tentara Belanda. Sejak tahun 1833 mulai muncul kompromi selang Kaum Hukum budaya dan Kaum Padri.

Di ujung penyesalan muncul kesadaran, mengundang Belanda dalam konflik justru menyengsarakan masyarakat Minangkabau itu sendiri. Hampir selama 20 tahun pertama perang ini (1803–1823), dapatlah dituturkan sbg perang saudara melibatkan sesama etnik Minang dan Batak. Pada tanggal 11 Januari 1833 beberapa kubu pertahanan dari garnisun Belanda diserang secara mendadak membuaad keadaan

menjadi kacau. dituturkan mempunyai sekitar 139 orang tentara Eropa serta ratusan tentara pribumi terbunuh. Sultan Tangkal Dunia Bagagar yang sebelumnya ditunjuk oleh Belanda sbg *Regent Tanah Datar*, ditangkap oleh pasukan Letnan Kolonel Elout pada tanggal 2 mei 1833 di batu sangkar atas tuduhan penghianatan. Yang belakang sekali Belanda mengasingkannya ke Jakarta, walau dalam catatan Belanda Sultan Tangkal Dunia Bagagar menyangkal keterlibatannya dalam penyerangan beberapa pos Belanda, namun pemerintah Hindia Belanda juga tidak bersedia mengambil risiko bagi menolak laporan dari para perwiranya. Kedudukan *Regent Tanah Datar* yang belakang sekali diberikan kepada Tuan Gadang di Batipuh. Menyadari hal itu, kini Belanda bukan hanya menghadapi Kaum Paderi saja, tetapi secara keseluruhan masyarakat Minangkabau.

Maka Pemerintah Hindia-Belanda pada tahun 1833 mengeluarkan pengumuman yang dikata "Plakat Panjang" berisi sebuah pernyataan bahwa kedatangan Belanda ke Minangkabau tidaklah bermaksud menguasai negeri tersebut, mereka hanya datang berjual dan berdagang dan menjaga keamanan, masyarakat Minangkabau akan tetap diperintah oleh para penghulu mereka dan tidak pula diharuskan membayar pajak. Yang belakang sekali Belanda berdalih bahwa bagi menjaga keamanan, membuat jalan, membuka sekolah, dan sebagainya memerlukan biaya, maka masyarakat diwajibkan menanam kopi dan mesti menjualnya kepada Belanda.

Benteng Bonjol terletak di atas bukit yang hampir tegak lurus ke atas, dikenali dengan nama Bukit Tajadi. Tidak begitu jauh dari benteng ini mengalir Batang Alahan Panjang, sebuah sungai di tengah lembah dengan arus yang deras, berliku-liku dari utara ke selatan. Benteng ini berwujud bidang empat panjang, tiga sisinya dikelilingi oleh dinding pertahanan dua lapis setinggi kurang lebih 3 meter. Di selang kedua lapis dinding dibuat parit yang dalam dengan lebar 4 meter. Dinding luar terdiri dari batu-batu akbar dengan tehnik pembuatan hamper sama dengan benteng-benteng di eropa dan di atasnya ditanami bambu berduri panjang yang ditanam paling rapat sehingga Kaum Paderi dapat mengamati bahkan menembakkan meriam kepada pasukan Belanda. Melihat kokohnya Benteng Bonjol, pasukan Belanda mencoba melakukan blokade terhadap Bonjol dengan tujuan bagi melumpuhkan suplai bahan makanan dan senjata pasukan Paderi. Blokade yang dilakukan ini ternyata tidak efektif, sebab justru kubu-kubu pertahanan pasukan Belanda dan bahan perbekalannya yang jumlah diserang oleh pasukan Kaum Paderi secara gerilya. Di saat bersamaan seluruh pasukan Kaum Paderi mulai berdatangan dari daerah-daerah yang telah ditaklukkan pasukan Belanda, yaitu dari bermacam negeri di Minangkabau dan sekitarnya. Seluruh bertekad bulat bagi mempertahankan markas akbar Bonjol sampai titik darah penghabisan, hidup luhur atau mati syahid.

Usaha bagi melakukan serangan ofensif terhadap Bonjol baru dilakukan kembali setelah bala bantuan tentara yang terdiri dari pasukan Bugis datang, maka pada pertengahan Agustus 1835 penyerangan mulai dilakukan terhadap kubu-kubu pertahanan Kaum Paderi yang berada di Bukit Tajadi, dan pasukan Bugis ini berada pada anggota depan pasukan Belanda dalam merebut satu persatu kubu-kubu pertahanan strategis Kaum Paderi yang berada disekitar Bukit Tajadi. Namun sampai awal September 1835, pasukan Belanda belum sukses menguasai Bukit Tajadi, malah pada tanggal 5 September 1835, Kaum Paderi keluar dari kubu pertahanannya menyerbu ke luar benteng menghancurkan kubu-kubu pertahahan Belanda yang dibuat sekitar Bukit Tajadi. Setelah serangan tersebut, pasukan Kaum Paderi segera kembali masuk ke dalam Benteng Bonjol.

Pada tanggal 9 September 1835, pasukan Belanda mencoba menyerang dari arah Luhak Limo Puluah dan Padang Bubus, namun hasilnya gagal, bahkan jumlah menyebabkan kerugian pada pasukan Belanda. Letnan Kolonel Bauer, salah seorang komandan pasukan Belanda menderita sakit dan terpaksa dikirim ke Bukittinggi yang belakang sekali posisinya digantikan oleh Mayor Prager. Blokade yang berlarut-larut dan keberanian Kaum Padri, membangkitkan semangat keberanian rakyat sekitarnya bagi memberontak dan menyerang pasukan Belanda, sehingga pada tanggal 11 Desember 1835 rakyat simpan dan alahan siap mati mengangkat senjata dan menyerang kubu-

kubu pertahanan Belanda. Pasukan Belanda kewalahan mengatasi perlawanan ini. Namun setelah datang bantuan dari serdadu-serdadu Madura yang berdinasi pada pasukan Belanda, perlawanan ini dapat diatasi.

Hampir setahun mengepung Bonjol, pada tanggal 3 Desember 1836, pasukan Belanda kembali melakukan serangan besar-besaran terhadap Benteng Bonjol, sbg usaha terakhir bagi penaklukan Bonjol. Serangan dahsyat ini mampu menjebol sebagian Benteng Bonjol, sehingga pasukan Belanda dapat masuk menyerbu dan sukses membunuh beberapa keluarga Tuanku Imam Bonjol. Tetapi dengan kegigihan dan semangat juang yang tinggi Kaum Padri kembali sukses memporak-porandakan musuh sehingga Belanda terusir dan terpaksa kembali keluar dari benteng dengan meninggalkan jumlah sekali korban jiwa di masing-masing pihak. Kegagalan penaklukan ini benar-benar memukul kebijaksanaan Gubernur Jenderal Hindia-Belanda di Jakarta yang waktu itu telah dipegang oleh Dominique Jacques de Eerens, yang belakang sekali pada awal tahun 1837 mengirimkan seorang panglima perangnya bernama Mayor Jenderal Cochius bagi memimpin langsung serangan besar-besaran ke Benteng Bonjol bagi kesekian kalinya. Cochius merupakan seorang perwira tinggi Belanda yang memiliki keahlian dalam strategi perang *Benteng Stelsel*.

Yang belakang sekali Belanda dengan intensif mengepung Bonjol dari segala jurusan selama sekitar enam

bulan (16 Maret–17 Agustus 1837) dipimpin oleh jenderal dan beberapa perwira. Pasukan gabungan ini sebagian akbar terdiri dari bermacam suku, seperti Jawa, Madura, Bugis dan Ambon. Terdapat 148 perwira Eropa, 36 perwira pribumi, 1.103 tentara Eropa, 4.130 tentara pribumi, termasuk di dalamnya *Sumenapsche hulptroepen hieronder begrepen* (pasukan pembantu Sumenap alias Madura). Dalam daftar nama para perwira pasukan Belanda tersebut di selangnya yaitu Mayor Jendral Cochius, Letnan Kolonel Bauer, Mayor Sous, Mayor Prager, Kapten MacLean, Letnan Satu van der Tak, Pembantu Letnan Satu Steinmetz, dst-nya. Yang belakang sekali mempunyai juga nama *Inlandsche* (pribumi) seperti Kapitein Noto Prawiro, *Inlandsche* Luitenant Prawiro di Logo, Karto Wongso Wiro Redjo, Prawiro Sentiko, Prawiro Brotto, Merto Poero dan lainnya. Dari Jakarta didatangkan terus tambahan daya tentara Belanda, dimana pada tanggal 20 Juli 1837 tiba dengan Kapal Perle di Padang, sejumlah orang Eropa dan *Sepoys*, serdadu dari Afrika yang berdinasi dalam tentara Belanda, direkrut dari Ghana dan Mali, terdiri dari 1 sergeant, 4 korporals dan 112 flankeurs, serta dipimpin oleh Kapitein Sinninghe.

Serangan yang bergelombang serta berturut-turut dan hujan peluru dari pasukan artileri yang bersenjata Meriam-meriam akbar, yang terus berdatangan. Pada tanggal 3 Agustus 1837 di pasukan bekanda di pimpin oleh letnan kolonel Michiels sebagai komando lapangan terdepan mulai sedikit demi sedikit

menguasai keadaan, dan penghabisannya pada tanggal tanggal 15 Agustus 1837, Bukit Tajadi jatuh, dan pada tanggal 16 Agustus 1837 Benteng Bonjol secara semuanya dapat ditaklukkan. Namun Tuanku Imam Bonjol dapat mengundurkan diri keluar dari benteng dengan ditemani oleh beberapa pengikutnya terus menuju daerah Marapak. Dalam pelarian dan persembunyiannya, Tuanku Imam Bonjol terus mencoba mengadakan konsolidasi terhadap seluruh pasukannya yang telah bercerai-berai dan lemah, namun sebab telah lebih 3 tahun bertempur melawan Belanda secara terus menerus, ternyata hanya sedikit saja yang tinggal dan sedang siap bagi bertempur kembali.

Dalam kondisi seperti ini, tiba-tiba datang surat tawaran dari Residen Francis di Padang bagi mengajak berunding. Yang belakang sekali Tuanku Imam Bonjol menyatakan kesediaannya melakukan perundingan. Perundingan itu dituturkan tidak boleh lebih dari 14 hari lamanya. Selama 14 hari berkibar bendera putih dan gencatan senjata berlangsung. Tuanku Imam Bonjol dipersilakan bagi datang ke Palupuh, tempat perundingan, tanpa membawa senjata. Tapi hal itu cuma jebakan Belanda bagi menangkap Tuanku Imam Bonjol, peristiwa itu terjadi di bulan Oktober 1837 dan yang belakang sekali Tuanku Imam Bonjol dalam kondisi sakit langsung dibawa ke Bukittinggi yang belakang sekali terus dibawa ke Padang, bagi yang belakang sekali diasingkan. Namun pada tanggal 23 Januari 1838, beliau dipindahkan ke Cianjur, dan

pada penghabisan tahun 1838, beliau kembali dipindahkan ke Ambon. Yang belakang sekali pada tanggal 19 Januari 1839, Tuanku Imam Bonjol kembali dipindahkan ke Menado, dan di daerah inilah setelah menjalani masa pembuangan selama 27 tahun lamanya, pada tanggal 8 November 1864, Tuanku Imam Bonjol menghembuskan nafas terakhirnya.

Meskipun pada tahun 1837 Benteng Bonjol dapat dikuasai Belanda, dan Tuanku Imam Bonjol sukses ditipu dan ditangkap, tetapi peperangan ini sedang berlanjut sampai penghabisannya benteng terakhir Kaum Padri, di Dalu-Dalu (Rokan Hulu), yang waktu itu telah dipimpin oleh Tuanku Tambusai jatuh pada 28 Desember 1838. Jatuhnya benteng tersebut memaksa Tuanku Tambusai mundur, bersama sisa-sisa pengikutnya pindah ke Negeri Sembilan di Semenanjung Malaya, dan penghabisannya peperangan ini dianggap berakhir yang belakang sekali Kerajaan Pagaruyung dikuatkan menjadi anggota dari *Pax Neerlandica* dan wilayah *Padangse Bovenlanden* telah berada di bawah pengawasan Pemerintah Hindia-Belanda.

Pengaruh dari peperangan ini menumbuhkan sikap patriotisme kepahlawanan bagi masing-masing pihak yang terlibat. Selepas jatuhnya Benteng Bonjol, pemerintah Hindia-Belanda membangun sebuah monumen bagi mengenang tuturan peperangan ini. Yang belakang sekali sejak tahun 1913, beberapa lokasi tempat terjadi peperangan ini ditandai dengan tugu dan dimasukan sbg daerah wisata di

Minangkabau.^[31] Begitu juga selepas kemerdekaan Indonesia, pemerintah setempat juga membangun museum dan monumen di Bonjol dan dinamai dengan Museum dan Monumen Tuanku Imam Bonjol. Perjuangan beberapa tokoh dalam Perang Padri ini, mendorong pemerintah Indonesia yang belakang sekali menetapkan Tuanku Imam Bonjol dan Tuanku Tambusai sbg Pahlawan Nasional.

F. Berakhirnya Perang Paderi

Setelah Perang Jawa berakhir pada 1830 dan ditangkapnya Pangeran Diponegoro dengan siasat licik, Belanda kembali memusatkan fokus ke Minangkabau. Pasukan kolonial membangun benteng di Bukittinggi bernama Fort de Kock. Pada 11 Januari 1833, pertahanan Belanda diserang oleh pasukan gabungan kaum Padri dan kaum Adat. Menyadari hal tersebut, Belanda mengatur siasat kembali. Belanda berdalih bahwa kedatangan mereka hanya untuk berdagang dan menjaga keamanan dengan rakyat Minangkabau. Lagi-lagi, Belanda menerapkan siasat licik yang berujung pada penangkapan Tuanku Imam Bonjol pada 1837 yang kemudian diasingkan ke Cianjur, Ambon, lalu Minahasa hingga wafat di sana. Perang kembali berkobar. Kali ini Belanda lebih unggul dan pada 1838 berhasil menembus pertahanan terakhir rakyat Minangkabau di Dalu-Dalu yang dipimpin oleh Tuanku Tambusai. Tuanku Tambusai dan beberapa pengikutnya yang selamat pergi ke

Negeri Sembilan di Semenanjung Malaya. Kehilangan banyak tokoh pemimpin, kekuatan Minangkabau pun melemah dan Belanda pun berkuasa setelah memenangkan perang.

PERANG ACEH

A. Latar Belakang Perang Aceh

Pada abad ke-19 Aceh merupakan negara penting yang terletak di ujung utara Pulau Sumatera. Aceh mempunyai peranan besar karena terletak dijalur lalulintas perdagangan laut sehingga menjadi pusat perdagangan. Karena banyak menghasilkan lada dan tambang serta hasil alam yang melimpah ruah. Sehingga belanda sangat berambisi untuk mendudukinya. Sebaliknya masyarakat aceh tetap mempertahankan kedaulatannya.⁵³ Aceh mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer, berprinsip untuk tetap menentang imperialisme bangsa Eropa, memiliki sistem pemerintahan yang teratur, serta menjalin hubungan diplomasi dengan negara lain. Kepentingan menjaga hubungan diplomasi ini bertujuan untuk penyangga kekuasaan dalam menghadapi serangan musuh Mengingat tujuan penjajah ke Nusantara adalah merampas wilayah daerah jajahan beserta kekayaan alamnya, Belanda hanya membuat pemanis diawal sebagai jembatan menuju keberhasilan.⁵⁴

Dalam Penandatanganan Perjanjian London merupakan pintu yang sudah terbuka untuk masuk ke daerah Aceh yang

sejak lama menjadi impian Belanda. Awal perang Aceh dengan Belanda ditandai dengan perjanjian Traktat Sumatera yang ditandatangani oleh Belanda dengan Inggris pada tahun 1871, yang antara lain memberi kebebasan kepada Belanda untuk memperluas kekuasaannya di Pulau Sumatera. Sehingga tidak ada kewajiban lagi bagi Belanda untuk menghormati hak dan kedaulatan Aceh yang sebelumnya telah diakui, baik oleh Belanda maupun Inggris seperti yang tercantum di dalam Traktat London yang ditandatangani pada tahun 1824.⁵⁵

Belanda mengirimkan Mayor Jenderal Kohler dengan membawa pasukan sebesar 168 orang perwira dan 3198 orang serdadu, disamping itu juga pasukan angkatan laut. Pasukan ini sampai di Aceh pada 5 April 1873. Terjadilah kontak senjata antara pasukan Aceh dengan Pasukan Belanda di daerah pantai barat daya kota Pantai Ceureumen. Serangan juga dilakukan di Masjid Raya yang menjadi 56 sasaran utama terus dipertahankan oleh pasukan Aceh Suatu perang kolonial resmi telah dikibarkan oleh Belanda. Perang ini kemudian dikenal oleh masyarakat Aceh sebagai “Perang Belanda atau Perang Kaphe Ulanda” yang oleh Belanda dikenal dengan “Perang Aceh”. Pada tanggal 17 Maret 1824, sebuah persetujuan antara Inggris dan Belanda mengenai pembagian wilayah jajahan di Indonesia dan semenanjung Malaya di tandatangi. Isinya antara lain disebutkan, bahwa setelah memperoleh kembali jajahan yang selama perang direbut oleh Inggris, Belanda tidak dibenarkan mengganggu kemerdekaan negara Aceh.

Kesudahan suatu peristiwa dari Kontrak Siak 1858, Sultan Ismail menyerahkan wilayah Deli, Langkat, Asahan dan Serdang kepada Belanda, padahal daerah-daerah itu sejak Sultan Iskandar Muda, berada di bawah kekuasaan Aceh. Belanda telah melanggarkontak siak, maka berakhirlah kontrak London 1824. Inti kontrak London adalah Belanda dan Britania Raya membikin ketentuan tentang batas-batas kekuasaan kedua daerah di Asia Tenggara yaitu dengan garis lintang Singapura. Keduanya mengakui kedaulatan Aceh. Aceh menuduh Belanda tidak menepati akadnya, sehingga kapal-kapal Belanda yang lewat perairan Aceh ditenggelamkan oleh pasukan Aceh. Budi pekerti Aceh ini didukung Britania.

B. Kondisi Sosial dan Politik masyarakat aceh

Kerajaan aceh adalah kerajaan besar yang berdiri di Aceh hingga abad ke-19 kerjaan ini masih memiliki karisma dalam lingkup kehidupan masyarakat aceh. Ketuka kolonialisasi berlangsung di bumi nusantara kerajaan aceh masih belum terjamah oleh bangsa Eropa secara politik raja dan masyarakatnya masih hidup dalam kebebasan. Kerjaan aceh terbagi dalam tiga bagian yang pertama daerah inti, daerah pokok dan daerah takluk. Daerah ini mencakup wilayah tempat lokasi daerah berdirinya kerajaan yang kemudian menjadi ibu kota kerajaan.⁵⁶

Daerah ini terdiri dari wilayah-wilayah yang termasuk wilayah aceh besar sedangkan daerah pokok adalah wilayah yang

diduduki sejak berdirinya kerajaan aceh daerah ini pada perkembangannya menggabungkan diri dengan daerah inti sehingga membentuk kerajaan aceh yang lebih kokoh beberapa daerah ini antara lain seperti Pidie, Samudra, Pasai, Perlak, Tmiang, Gayo. Alas daerah barat, Singkel Teuremos dan Barus. Sedangkan yang dimaksud dengan daerah takluk adalah kerajaan kerajaan yang telah mengatakan ketundukannya dibawah perintah kerajaan aceh. Daerah-daerah itu tetap menjadi merdeka hanya saja dalam beberapa persoalan harus mengikuti perintah dari kerajaan aceh, misalnya dalam bidang ekonomi dan hubungan luar negeri.⁵⁷

Pola penyebaran penduduk aceh tidak jauh berbeda dengan yang ditemukan di wilayah Indonesia lainnya. Wilayah-wilayah yang mempunyai penduduk pada biasanya terletak didataran rendah yang bertanah subur. Orang-orang aceh lebih tertarik untuk mendiami Kawasan yang tidak jauh dari pantai. Bagian pedalaman aceh masih banyak yang berupa hutan rimba atau pegunungan yang masih jarang di tinggali orang kecuali beberapa wilayah saja seperti takengon, aceh tengah.

C. Kegagalan Belanda Pada Invasi Pertama

Di bawah kekuasaan Sultan Ibrahim, perjanjian yang pernah disepakati Aceh dengan Belanda tahun 1857 semakin terlihat hanya tipuan. Pengkhianatan Belanda atas perjanjian itu dilanggar dengan cara memperalat Siak. Nieuwsnhuijzen mengatur Perjanjian Siak yang ditandatangani pada tahun 1857

dengan menetapkan wilayah-wilayah selain hanya kerajaan. Beberapa cakupan wilayah yang disepakati dalam perjanjian tersebut menimbulkan permasalahan sehingga membuat sultan marah, karena Belanda dianggap tidak mengetahui daerah-daerah kekuasaan Aceh, sedangkan Asahan, wilayah yang telah dikuasai Belanda, tidak memiliki hubungan dengan Siak dan memang merupakan bagian dari kedaulatan Aceh. Selain itu, sultan Siak pernah mengatakan pada Jenderal Michiels sendiri ketika dia menjabat sebagai gubernur Belanda di Padang, jika yang termasuk rantau jajahan takluk Siak, hanyalah tanah Putih, Bangko, Kubu, Bilah dan Panai (dan Kota Pinang). Sama sekali tidak menyebutkan Asahan, Deli, apalagi langkat dan Tamiang.⁵⁸

Selama masa jabatan sultan Ibrahim, penyukilan wilayah milik Aceh oleh Belanda semakin luas. Nafsu Belanda ingin menguasai Aceh tetap berkobar, dengan melakukan serangan terhadap kerajaan-kerajaan kecil bawahan Aceh setidaknya dapat mengurangi sendi-sendi kekuatan Aceh. Di masa akhir pemerintahan sultan Ibrahim, meskipun upaya-upayanya masih dapat menghadapi tekanan kolonialisme, Meskipun Belanda adalah sebuah negeri kecil, namun semakin hari Belanda tampak memiliki keahlian dan vitalitas seperti bangsa-bangsa kulit putih lainnya dalam merampas wilayah bangsa berwarna manapun. Tepat ketika mengganasnya agresi kolonialisme terhadap bangsa lain, Eropa berhasil mendapat izin pemerintah Mesir untuk membuka Terusan Suez pada tahun 1869. Hal itu telah

dibayangkan berabad-abad lamanya sebelum Masehi. Setelah dibukanya terusan itu berbagai rintangan penjajahan menjadi hilang. Penemuan mesin uap semakin mempercepat dan memperlancar pelayaran bangsa Eropa menuju wilayah jajahannya untuk berebut keuntungan dari kemajuan itu. Perkembangan ini mendorong Belanda untuk bertindak cepat membangun kekuasaan di seluruh Nusantara. Setelah Belanda berhasil menaklukkan beberapa wilayah di Sumatera, Belanda menarik kesimpulan apabila lebih baik mencari titik temu antara kepentingan Belanda dan Inggris di Sumatera daripada meneruskan perasaan saling curiga mengenai tujuan satu sama lain.⁵⁹

Traktat Sumatera 1871 telah diinjak-injak oleh Belanda sebagai kode lampu hijau Belanda akan menyerang Aceh hingga bertekuk lutut. Bagaimanapun sikap Belanda sudah sangat jelas ingin segera mencaplok wilayah Aceh. Dalam pertemuan Miyer dan Ord secara rahasia disetujui keinginan Belanda supaya pembesar Inggris di semenanjung tidak lagi berhubungan dengan Aceh. Tanpa membuang waktu, panglima tertinggi militer Hindia Belanda di Batavia memerintahkan komandan militer di Padang, Kol. W. E. Kroesen, untuk mengadakan pengintaian di Aceh sekaligus blokade dan intimidasi. Jenderal Booms waktu itu memberikan laporan yang mengesankan mengenai pasukan Aceh dalam persiapan perang, apabila mereka memiliki persenjataan yang cukup dan pejuang yang membanjir. Bahkan yang memiliki keberanian artinya lebih jauh

besar dibanding benda yang tiada hidup. Disamping rencana Belanda yang berjalan lancar, pada tahun 1870, Netscher melapor kepada atasannya jika ternyata Raja Terumon telah menyediakan dirinya membantu Belanda untuk menyerang Aceh setelah diberikan sultan Aceh jabatan sebagai wazir mewakili sultan dalam segala hal di bagian pantai Barat Aceh.⁶⁰

Perang Aceh Pertama (1873-1874) dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Syah melawan Belanda yang dipimpin Köhler. Köhler dengan 3000 serdadunya dapat dipatahkan, dimana Köhler sendiri tewas pada tanggal 14 April 1873. Sepuluh hari belakang, perang berkecamuk di mana-mana. Yang paling akbar masa menduduki kembali Masjid Raya Baiturrahman, yang dibantu oleh beberapa kelompok pasukan. Mempunyai di Peukan Aceh, Lambhuk, Lampu'uk, Peukan Bada, sampai Lambada, Krueng Raya. Beberapa ribu orang juga berdatangan dari Teunom, Pidie, Peusangan, dan beberapa wilayah lain.

Perang Aceh Kedua (1874-1880). Pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten. Belanda berhasil menduduki Keraton Sultan, 26 Januari 1874, dan menjadi sebagai pusat pertahanan Belanda. Pada 31 Januari 1874 Jenderal Van Swieten mengumumkan bahwa semua Aceh berlaku bidang dari Kerajaan Belanda. Ketika Sultan Machmud Syah wafat 26 Januari 1874, ditukarkan oleh Tuanku Muhammad Dawood yang dinobatkan sebagai Sultan di masjid Indrapuri. Perang pertama dan kedua ini adalah perang

total dan frontal, dimana pemerintah sedang berlanjut mapan, meskipun ibu kota negara berpindah-pindah ke Keumala Dalam, Indrapuri, dan tempat-tempat lain.

Perang ketiga (1881-1896), perang dilanjutkan secara gerilya dan dikobarkan perang *fi sabilillah*. Dimana sistem perang gerilya ini dilangsungkan sampai tahun 1903. Dalam perang gerilya ini pasukan Aceh di bawah Teuku Umar bersama Panglima Polim dan Sultan. Pada tahun 1899 ketika terjadi serangan mendadak dari pihak Van der Dussen di Meulaboh, Teuku Umar gugur. Tetapi Cut Nyak Dhien istri Teuku Umar belakang tampil menjadi komandan perang gerilya. Perang keempat (1896-1910) adalah perang gerilya kelompok dan perorangan dengan perlawanan, penyerbuan, penghadangan dan pembunuhan tanpa komando dari pusat pemerintahan Kesultanan. Bagi mengalahkan pertahanan dan perlawan Aceh, Belanda memakai tenaga pandai Dr. Christiaan Snouck Hurgronje yang menyamar selama 2 tahun di pedalaman Aceh bagi meneliti kemasyarakatan dan ketatanegaraan Aceh. Hasil kerjanya itu dibukukan dengan judul *Rakyat Aceh (De Acehers)*. Dalam buku itu disebutkan strategi bagaimana bagi menaklukkan Aceh. Usulan strategi Snouck Hurgronje kepada Gubernur Militer Belanda Joannes Benedictus van Heutsz adalah, supaya kelompok Keumala (yaitu Sultan yang berkedudukan di Keumala) dengan pengikutnya dikesampingkan dahulu. Tetap menyerang terus dan menghantam terus kaum ulama. Jangan

bersedia berunding dengan pimpinan-pimpinan gerilya. Mendirikan pangkalan tetap di Aceh Raya. Menunjukkan niat adil Belanda kepada rakyat Aceh, dengan metode mendirikan langgar, masjid, memperbaiki jalan-jalan irigasi dan menolong pekerjaan sosial rakyat Aceh.

Ternyata siasat Dr Snouck Hurgronje diterima oleh Van Heutz yang menjadi Gubernur militer dan sipil di Aceh (1898-1904). Belakang Dr Snouck Hurgronje diangkat sebagai penasehatnya. Taktik perang gerilya Aceh ditiru oleh Van Heutz, dimana dibuat pasukan *maréchaussée* yang dipimpin oleh Hans Christoffel dengan pasukan Colone Macan yang telah mampu dan menduduki pegunungan-pegunungan, hutan-hutan rimba raya Aceh bagi mencari dan mengejar gerilyawan-gerilyawan Aceh. Taktik selanjutnya yang dimainkan Belanda adalah dengan metode penculikan anggota keluarga gerilyawan Aceh. Misalnya Christoffel menculik permaisuri Sultan dan Tengku Putroe (1902). Van der Maaten menawan putera Sultan Tuanku Ibrahim. Akibatnya, Sultan menyerah pada tanggal 5 Januari 1902 ke Sigli dan berbaik. Van der Maaten dengan diam-diam menyergap Tangse kembali, Panglima Polim dapat meloloskan diri, tetapi sebagai gantinya ditangkap putera Panglima Polim, Cut Po Radeu saudara perempuannya dan beberapa keluarga terdekatnya. Dampaknya Panglima Polim menaruh senjata dan menyerah ke Lhokseumawe pada Desember 1903. Setelah Panglima Polim menyerah, banyak penghulu-penghulu rakyat yang menyerah mengikuti jejak

Panglima Polim. Taktik selanjutnya, yang menggantikan Van Heutz. Seperti pembunuhan di Kuta Reh (14 Juni 1904) dimana 2.922 orang dibunuhnya, yang terdiri dari 1.773 laki-laki dan 1.149 perempuan.

Taktik terakhir menangkap Cut Nyak Dhien istri Teuku Umar yang sedang memainkan perlawanan secara gerilya, dimana yang belakang sekalnya Cut Nya Dien dapat ditangkap dan diasingkan ke Sumedang. Selama perang Aceh, Van Heutz telah membikin surat pendek (*korte verklaring*, Traktat Pendek) tentang penyerahan yang harus ditandatangani oleh para pemimpin Aceh yang telah tertangkap dan menyerah. Di mana inti dari surat pendek penyerahan diri itu berisikan, Raja (Sultan) mengakui daerahnya sebagai bidang dari daerah Hindia Belanda, Raja berjanji tidak akan mengadakan hubungan dengan kekuasaan di luar negeri, berjanji akan mematuhi semua perintah-perintah yang dipastikan Belanda. Kontrak pendek ini menggantikan perjanjian-perjanjian terdahulu yang berlilit dan panjang dengan para pemimpin setempat. Walau demikian, wilayah Aceh tetap tidak bisa diduduki Belanda keseluruhan, dikarenakan pada masa itu tetap saja terjadi perlawanan terhadap Belanda meskipun dimainkan oleh sekelompok orang (masyarakat). Hal ini berlanjut sampai Belanda enyah dari Nusantara dan diwakili kedatangan penjajah baru yakni Jepang (Nippon)





BAB III

PERANG MAKASSAR DAN PERANG MALUKU

A. Latar Belakang Masalah

Perang Makassar yang berlangsung 1666-1669 M. merupakan salah satu perang yang paling berat dihadapi VOC di Nusantara pada abad ke XVII M, merupakan refleksi dari kompetisi antara Kesultanan Makassar dengan VOC dalam dunia perdagangan. Adapun yang menjadi objek persaingan adalah rempah-rempah dari Kepulauan Maluku. Rempah-rempah pada saat itu, merupakan komoditi dagang yang paling laku dan sangat di butuhkan di Eropa. Banda sebagai pusat rempah-rempah di Kepulauan Maluku pada tahun 1607 M. mengizinkan Makassar membuka kantor perwakilan dagang di sana. Para pedagang Makassar juga punya strategi memikat hati penguasa Banda dengan menyediakan kebutuhan yang diperlukan oleh mereka. Kenyataan demikian membuat Makassar bisa memperoleh rempah-rempah dari Maluku dalam jumlah besar dan murah sehingga harga jual rempah-rempah di Makassar lebih murah dibandingkan di daerah asalnya di Maluku.⁶¹

Hal tersebut tentu saja, membuat Somba Opu sebagai bandar Makassar menjadi ramai dikunjungi oleh para pedagang Eropa yang membutuhkan rempah-rempah, seperti Portugis, Inggris, Spanyol dan lain-lain. Dengan demikian, Makassar menjadi pemasok rempah-rempah terhadap pasaran Eropa. Kenyataan tersebut membuat Kesultanan Makassar sebagai bandar niaga yang besar. Selain itu, yang tak kalah hebatnya adalah penguasa Makassar menganut sistem perdagangan bebas (*mare liberium*). Kebijakan tersebut sarat dengan nilai keislaman. Lautan merupakan salah satu tanda kebesaran Tuhan dan merupakan fasilitas yang dianugerahkan kepada anak cucu Adam (umat manusia) guna dimanfaatkan untuk kesejahteraan mereka, bukan untuk satu bangsa saja. Nikmat tersebut tentu harus disyukuri bukan sebaliknya bersifat rakus dengan melarang yang lainnya untuk mengambil manfaat dari nikmat tersebut.⁶²

Di sisi lain VOC juga berusaha semaksimal mungkin untuk menyediakan rempah-rempah bagi pasaran Eropa dengan jalan memonopoli pelayaran dan perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Keberhasilan Makassar tersebut, tentu saja membuat VOC Belanda merasa jengkel, karena ancaman bagi kepentingan monopoli ekonomi perdagangan rempah-rempahnya di Kepulauan Maluku. Begitupun sebaliknya, Makassar menganggap VOC sebagai ancaman atas kepentingan pelayaran dan perdagangannya di Kepulauan Maluku. Demikianlah persaingan kepentingan antara dua kubu tersebut

melahirkan konflik sosial yang dikenal dengan Perang Makassar. Perang tersebut berakhir dengan kekalahan kesultanan Makassar.

B. Proses Kejadian Perang Makassar

1. Awal Perang Makassar

Kenyataan-kenyataan sebelumnya merupakan faktor tidak langsung yang mengarah kepada konflik antara VOC dengan Kesultanan Makassar. Konflik tersebut merupakan konflik laten antara kedua pihak. Konflik laten tersebut menjadi konflik terbuka pada tahun 1615 M., ketika terjadi insiden penipuan terhadap beberapa bangsawan Makassar yang dikenal dengan peristiwa Enkhuisen. Peristiwa tersebut terjadi ketika datang kapal VOC bernama Enkhuisen berlabuh di pelabuhan Makassar. Kapten kapal dan Abraham Sterck dan De Vries (komisaris VOC di Makassar) mengundang beberapa pembesar kerajaan Gowa untuk beramah-tamah dan perkenalan di atas kapal. Tanpa ada rasa curiga bangsawan Makassar yang diundang datang dengan pengiringnya. Ketika pembesar dan pengikut-pengikutnya berada di atas kapal mereka diserang dan ditawan. Hal demikian menimbulkan kebencian dan permusuhan dari orang Makassar terhadap Belanda, dan peristiwa tersebut dianggap pernyataan permusuhan Belanda terhadap Kesultanan Makassar.⁶³

Satu tahun setelah peristiwa Enkhuysen, sebuah kapal Belanda bernama De Endracht berlabuh di Makassar. Awak kapal De Endracht yang naik ke daratan diamuk oleh orang Makassar yang menyebabkan semua awak kapal tersebut tewas. Peristiwa pembunuhan awak kapal De Endracht tersebut oleh Gubernur Jenderal Belanda Jan Pieterszoon Coen dianggap sebagai pengumuman perang terbuka oleh Makassar terhadap Belanda. Menanggapi hal demikian, Makassar giat memperluas wilayah pengaruhnya ke daerah-daerah yang menjadi route pelayaran dan perdagangan ke Maluku, diantaranya penaklukan Kutai di Kalimantan Timur, penaklukan Bima dan sekitarnya pada tahun 1618 M. di Nusa Tenggara⁶⁴ dan pengiriman armada Makassar ke Kepulauan Maluku untuk membantu masyarakat setempat mengusir VOC. Upaya penaklukan Bima merupakan upaya kesultanan Makassar memperluas wilayah pengaruh dalam menghadapi ancaman penetrasi Belanda di Nusantara yang telah terang-terangan menyatakan konflik terbuka terhadap Makassar dengan adanya peristiwa Enkhuysen yang telah disebutkan sebelumnya. Upaya Makassar tersebut menimbulkan tersiarnya agama Islam di Bima dan sekitarnya Menurut cerita rakyat setempat (Bima) bahwa raja Bima yang mula Islam adalah Sultan Abdul Kahir. Pada masa pemerintahannya dua kali diserang oleh Makassar 1618 dan 1619 dan pada tahun 1621 raja Bima masuk Islam dan digelar Sultan Abdul Kahir.⁶⁵

Penaklukan dan pengsilaman Bima oleh Makassar tersebut kelak memberikan keuntungan bagi kesultanan Makassar karena ketika pecah Perang Makassar antara VOC Belanda dengan kesultanan Makassar, Bima dengan kekuatan penuh membantu Makassar. Jadi, sejak peristiwa Enkhuisen dan De Endracht maka, hubungan antara Makassar-VOC tidak menentu, kadang memanas yang mengakibatkan bentrokan dan kadang pula diadakan perjanjian perdamaian. Kondisi tersebut mengakibatkan perang besar antara keduanya yakni pada tahun 1660 M. masa Sultan Alauddin dan pada tahun 1666 M. pada masa Sultan Hasanuddin. Hasil dari peperangan pada tahun 1660 M. merupakan keberhasilan Belanda menduduki Benteng Pana'kukang dan ketercapaian perjanjian pada tanggal 19 Agustus 1660 M. Isi yang terpenting dari perjanjian tersebut sebagai berikut:

1. Orang Makassar selanjutnya tidak akan mencampuri lagi mengenai urusan-urusan Buton, Manado, dan Ambon.
2. Orang Makassar tidak boleh lagi mengadakan pelayaran ke Banda dan ke Ambon.
3. Orang Portugis harus meninggalkan Makassar untuk selama-lamanya.
4. Sultan harus membayar segala ongkos peperangan kepada Kompeni Belanda.
5. Selama Sultan belum menanda-tangani perjanjian ini dan melaksanakan segala apa yang tercantum dalam perjanjian ini, pasukan Belanda tetap menduduki

benteng Pana'kukang yang ia telah rebut sejak tanggal 12 Juni 1660 M.

Belanda terus mendesak agar Sultan Hasanuddin menjalankan isi perjanjian tersebut. Namun, Sultan Hasanuddin bersikeras tidak mau menuruti isi perjanjian tersebut terutama larangan pelayaran dan perdagangan bagi orang Makassar ke Banda dan Ambon dan pengusiran orang Portugis untuk selamanya dari Makassar. Pelarangan pelayaran dan perdagangan Makassar ke Maluku sama saja dengan mematikan pendapatan Makassar dan masyarakatnya yang mengandalkan perdagangan sebagai sumber kehidupannya. Pengusiran orang Portugis dari Makassar yang telah lama menetap merupakan tindakan pelanggaran perikemanusiaan. Akhirnya Sultan Hasanuddin menyatakan dengan tegas lebih baik berperang dengan Belanda dari pada memenuhi segala isi perjanjian yang disodorkan Belanda. Pernyataan tegas Sultan Hasanuddin untuk berperang dengan VOC tersebut diperparah dengan penyitaan isi kapal Belanda De Walvis yang kandas di dekat perairan Makassar pada tahun 1662. Kemudian menyusul penyitaan isi kapal Belanda De Leeuwin yang kandas di Pulau Doang-Doang berupa, meriam dan uang, serta pembunuhan komisaris VOC Cornelis Kuyff beserta Jadi, sejak peristiwa Enkhuisen dan De Endracht maka, hubungan antara Makassar-VOC tidak menentu, kadang memanas yang mengakibatkan bentrokan dan kadang pula diadakan perjanjian perdamaian.

Kondisi tersebut mengakibatkan perang besar antara keduanya yakni pada tahun 1660 M. masa Sultan Alauddin dan pada tahun 1666 M.

Bagi Gubernur Jenderal VOC di Batavia tindakan demikian dianggap sebagai kasus belli. Pada sisi lain, pada tahun 1664 Sultan Mandarsyah dari Ternate sebagai sekutu VOC menyerahkan Pulau Pantesiano (Muna) kepada Sultan Buton dengan tidak ada persetujuan Sultan Hasanuddin. Sedangkan sebenarnya pulau tersebut termasuk kedalam wilayah kekuasaan kesultanan Makassar. Dalam kasus tersebut Belanda yang memainkan peranan. Berhubungan dengan hal tersebut Sultan Hasanuddin mengirim utusan ke Batavia untuk menyampaikan protesnya tetapi tidak mendapatkan hasil.⁶⁶

Sebagai balasan dari tindakan Ternate atas pengaruh Belanda tersebut maka, Sultan Hasanuddin mengirim ekspedisi penyerangan ke kawasan timur Nusantara yang berhasil menduduki Sula kemudian dalam ekspedisi kedua berhasil merebut menduduki Buton sebagai sekutu VOC. Kasus-kasus tersebut menjadi sebab langsung peristiwa Perang Makassar pada tahun 1666-1669 M. Belanda menganggap Makassar telah melakukan pelanggaran serius terhadap Belanda sehubungan dengan penyitaan barang-barang dari dua kapal Belanda yang kandas di perairan Makassar beserta pembunuhan orang-orang Belanda yang memerikas bangkai kapal tersebut. Hal ini demikian sejalan dengan Lontarak Boné yang menyatakan sebagai berikut: Lima perihal sehingga diserang Makassar

hingga bobol [benteng] Sombaopu: pertama; pembunuhan atas pengawainya [VOC] di Doangdoangang, kedua; penyitaan hartanya [VOC] di Doang-doangang, ketiga; penyitaan meriamnya [VOC] di Suriwa, keempat; penyerangan atas Buton oleh Makassar dan pengambilan kota Belanda di Buton, kelima; penyerangan Makassar atas Sula.⁶⁷

Lima point demikian yang menjadi alasan utama VOC untuk melakukan peperangan dengan Makassar di Sulawesi yang kebesaran dan kekuatannya tak terdandingi di wilayah setempat. Point-point tersebut inilah yang menjadi sebab langsung pemicu Perang Makassar yang berlangsung \pm 5 tahun menurut perhitungan hijriyah atau \pm 3 tahun menurut perhitungan masehi. Naskah tersebut menyebutkan secara rinci kesalahan-kesalahan Makassar terhadap VOC dan sekutusekutunya. Pada sisi lain, Makassar memandang Belanda telah melakukan céka (kejahatan yang dapat menimbulkan peperangan) terhadap Makassar dengan memprovokasi Ternate dan Buton untuk berperang melawan Makassar sehingga Ternate atas pengaruh Belanda memprovokasi Makassar dengan menyerahkan Pulau Muna kepada Buton tanpa persetujuan pihak Makassar sebagai pemegang supremasi atas Muna. Selain itu Belanda juga melindungi para pelarian dari Makassar (Arung Palakka dan pegikutnya). Hal-hal demikian diatas dalam hukum tradisional Bugis-Makassar disebut céka. Adapun tindakan yang harus dilakukan sebagai balasan atas tindakan céka adalah perang. Hal tersebut disebutkan dalam

Lontarak Boné sebagai berikut: Enam macam (perbuatan) yang disebut oleh toriolo (leluhur) céka yang menjadi pengumuman perang oleh pemerintah. Pertama; mengubah adatistiadat yang lazim, kedua; melanggar perjanjian, ketiga; menyerang sekutu (pihak lain) tanpa pemberitahuan dan meskipun ada pemberitahuan tetapi tidak ada persetujuan, keempat; membunuh seseorang atau sahabat tanpa hak, kelima; melukai utusan, keenam; memfinah sesamanya tomaraja (pembesar negeri). Yang demikian salah satu dari keenam tersebut menjadi pemakluman perang oleh pemerintah. Berkata pula toriolo: sama saja satu céka yang besar dengan céka yang kecil tetapi banyak, menjadi aib bila tidak dimaklumkan perang atas hal tersebut.⁶⁸

Keberlangsungan Perang Makassar Dalam Perang Makassar VOC Belanda mengalami kesulitan. Kedahsyatan perang Makassar ini menurut Kruck sebagai perang yang paling berat dan sengit yang pernah dilakukan Kompeni Belanda, sehingga para serdadu Eropa barangkali tidak pernah mendengar adanya pertempuran sehebat ini di Eropa.⁶⁹ Namun, ujung dari peperangan dahsyat tersebut adalah keberhasilan VOC Belanda memaksa Kesultanan Makassar menerima dan mentaati Perjanjian Bongaya yang sangat merugikan pihak Makassar. Selain itu, peperangan tersebut juga mengakibatkan kehancuran Benteng Somba Opu, yang di dalamnya terdapat istana Maccini Sombala yang ditopang 120 tiang dengan pintu yang berlapis emas serta jendela yang berkaca kristal seketika

menjadi puing. Sultan Hasanuddin pun meninggalkan Somba Opu yang porak poranda dan bermukim di Benteng Kale Gowa, Tamalate. Sejak itu, berakhirlah kejayaan sebuah kesultanan Islam Makassar yang telah menjadi negara maritim yang kuat.⁷⁰

Peranannya kemudian digantikan oleh sebuah imperium dagang asing saingannya VOC Belanda, yang kebetulan beragama Kristen. Padahal, menurut Anthony Reid bahwa kebesaran perdagangan maritim Makassar adalah keberhasilan yang tiada bandingnya dalam sejarah Indonesia.⁷¹ Kedahsyatan Perang Makassar sebagai wujud perlawanan masyarakat Kesultanan Makassar dan Sulawesi Selatan lainnya dalam menghadapi bangsa asing (VOC Belanda) merupakan implementasi suasana masyarakat Makassar membangun pandangan hidup yang didasarkan pada ajaran Islam.⁷² Peristiwa tersebut, mewarnai sejarah perjalanan masyarakat Kesultanan Makassar dan masyarakat Sulawesi Selatan secara umum yang telah menerima agama Islam sekitar lima puluh tahun sebelumnya.

Kemunduran Perang Makassar dan Perjanjian Perdamaian Pada awalnya, perjanjian perdamaian antara Makassar-VOC hanya terdiri dari 26 pasal, namun karena Sultan Hasanuddin belum bisa melaksanakannya maka Speelman menambahi tiga pasal. Dengan dimasukkan ketiga pasal baru tersebut maka, pada akhirnya tercapailah persetujuan damai yang terdiri dari tiga puluh pasal yang dalam kepustakaan lokal disebut *Ceppaé ri Bungaé* (Bugis)/ *Cappaya ri Bungaya*

(Makassar) atau Het Bongaisch Verdrag dalam bahasa Belanda dan dalam bahasa Indonesia disebut dengan Perjanjian Bungaya.

Adapun point dari Perjanjian Bungaya tersebut kini menjadi 29 pasal, yakni: a. Menyetujui Perjanjian-perjanjian pada 19 Agustus dan 21 Desember 1660.

6. Semua pegawai-pegawai bangsa Eopa (Belanda) dan rakyat Belanda yang ada di Sombaopu yang menjadi tawanan atau lari menyeberang kepada kerajaan Gowa harus diserahkan kepada Kompeni Belanda.
7. Semua barang-barang yang telah disita oleh pemerintah kerajaan Gowa yang berasal dari kapal-kapal Belanda yang pernah atau telah kandas dan dirusakkan harus diserahkan kepada Kompeni Belanda.
8. Orang-orang yang bersalah karena telah melakukan pembunuhan atas orang diri Belanda dan mereka yang telah merusakkan kapal-kapal Belanda akan dihukum di hadapan residen Belanda di Jumpandang.
9. Orang-orang yang berutang kepada orang Kompeni harus membayar lunas segala utangnya dalam tempo satu tahun.
10. Orang-orang Portugis dan orang-orang Inggris harus meninggalkan Makassar sebelum akhir tahun. Sultan tidak boleh meluaskan bangsabangsa Eropa lain berdagang di dalam daerah kerajaannya, pu tidak boleh menerima duta-duta dari mereka itu.

11. Hanya kepada Kompeni saja diberikan hak untuk menjual di Jumpandang barang-barang impor yang penting. Pelanggar-pelanggar hukum akan dihukum dan barang-barang yang bersangkutan akan disita untuk kepentingan Kompeni. Kain-kain yang dibuat di daerah-daerah pesisir timur dari Jawa tidak termasuk dalam larangan itu.
12. Kompeni bebas dari semua bea dan kewajiban-kewajiban pada pemasukan dan pengeluaran barang-barang.
13. Orang-orang Makassar tidak boleh berlayar selain dari pada ke Bali, Jawa, Betawi, Bantam, Jambi, Palembang, Johor dan Borneo, untuk mana mereka harus mempunyai surat pas.
14. Benteng-benteng pertahanan Barombong, Pana'kukang, Garassi, Mariso dan lain-lainnya harus dirombak. Juga tidak boleh, dimana pun, didirikan benteng pertahanan baru. Hanya benteng Sombaopu yang besar itu akan tinggal untuk kerajaan Gowa.
15. Benteng Jumpandang bersama perkampungan dan tanah yang termasuk lingkungannya diserahkan kepada Kompeni. Loji Kompeni akan didirikan kembali.
16. Mata uang Belanda berlaku di Jumpandang.
17. Sultan akan membayar kepada Kompeni ongkos perang sebesar 250.000 ringgit, ditambah dengan denda yang terdiri dari 1000 orang budak lakilaki dan

perempuan yang muda, sehat dan dewasa atau uang sejumlah harga dari budak-budak tersebut.

18. Kerajaan Gowa harus menyerahkan Bima dan daerah-daerah taklukkannya kepada Kompeni.
19. Sultan akan berusaha menyerahkan raja Bima, raja Dompu, raja Tambora dan raja Sanggar yang semuanya telah mengadakan pembunuhan kepada orang-orang Belanda di Bima. Juga Karaéng Bontomarannu harus diserahkan kepada Kompeni.
20. Sultan harus melepaskan segala haknya atas Buton.
21. Sultan harus melepaskan segala haknya atas pulau-pulau Sula dan lain-lain pulau yang termasuk kekuasaan Ternate, seperti: Selayar, Muna dan seluruh daerah-daerah di pesisir timur Sulawesi, yaitu mulai dari Sanana sampai Manado, kepulauan Banggai, Gapi dan lain-lainnya yang terletak antara Mandar dan Manado, seperti Lambagi, Kaidipan, Buwol, Toli-Toli, Dampelas, Balaisang, Solengsak dan Kaili.
22. Pemerintah kerajaan Gowa harus melepaskan kekuasaannya atas kerajaan Boné dan kerajaan Luwu dan harus berjanji untuk memerdekakan Datu Soppéng dari pengasingannya.
23. Pemerintah kerajaan Gowa selanjutnya akan mengakui raja Laiya dan Bangkala bersama seluruh Turatéa dan Bajéng dan daerah taklukannya, yang kesemuanya sementara dalam peperangan telah datang kepada

Kompeni, sebagai raja-raja yang bebas tanpa penguasaan atas mereka.

24. Semua negeri yang dalam peperangan dikalahkan oleh Kompeni bersama sekutu-sekutunya, terhitung mulai Bulo-Bulo sampai Bungaya akan menjadi dan tetap sebagai negeri-negeri milik yang telah dimenangkan oleh Kompeni bersama sekutu-sekutunya menurut hukum perang, kemudian bilamana Arung Bakke dan Arung Appanang datang maka negeri-negeri tersebut akan diperlakukan sesuai dengan hak Kompeni atas daerah-daerah di sebelah utara Makassar.
25. Pemerintah Kerajaan Gowa menyatakan akan melapaskan haknya atas Wajo, Bulo-Bulo, dan Mandar yang kesemuanya dianggap durjana terhadap Kompeni dan sekutu-sekutunya dan negeri-negeri tersebut akan diperlakukan oleh Kompeni dan sekutu-sekutunya menurut kehendak Kompeni.
26. Pemerintah kerajaan Gowa akan menutup negerinya untuk bangsa-bangsa lain. Bilamana pemerintah kerajaan Gowa tidak mampu menolak mereka itu tinggal Jumandang, maka pemerintah kerajaan Gowa akan meminta bantuan Kompeni yang ia akui sebagai pelindungnya dengan kewajiban selanjutnya, bahwa ia akan membantu Kompeni terhadap musuh-musuh kompeni dan ia tidak mengadakan permusyawaratan dengan negara-negara yang berperang dengan belanda.

27. Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, maka dibuatlah oleh Sultan bersama pembesar-pembesar kerajaannya suatu perjanjian perdamaian, persahabatan dan persekutuan, di dalam mana termasuk raja-raja dari Ternate, Tidore, Bacan, Buton, Boné, Soppéng, Luwu, Turatéa, bersama daerah-daerah takluknya, begitupun Bima dengan tuan-tuan tanah dan raja-raja yang kemudian meminta masuk dalam persekutuan ini.
28. Kompeni akan mengambil keputusan di dalam perselisihan-perselisihan diantara anggota-anggota sekutu. Bilamana ada satu pihak tidak mau mengindahkan perantara yang diberikan Kompeni, maka semua anggota sekutu memberikan bantuan kepada yang lain.
29. Dua orang terkemuka dari majelis pemerintahan di Gowa akan berangkat bersama Speelman ke Betawi untuk meminta pengesahan dari Gubernur Jenderal atas perjanjian tersebut. Gubernur Jenderal juka dikehendaki akan disuruh tinggal di Betawi dua orang putera dari Sultan sebagai jaminan.
30. Untuk mewujudkan apa yang ditetapkan pada pasal 6, Kompeni akan angkut orang-orang Inggris bersma barang-barangnya ke Betawi.
31. Untuk mewujudkan apa yang ditetapkan pada Pasal 15, maka bilamana dalam tempo sepuluh hari raja Bima Karaéng Bontomarannu tidak terdapat dan diserahkan

Kompeni putera-putera mereka harus diserahkan kepada Kompeni.

32. Sultan berjanji akan membayar kepada Kompeni 250.000 ringgit sebagai pembayaran ongkos perang yang harus dilunasi dalam lima musim berturut-turut. 28. Perjanjian ini ditanda-tangani di atas sumpah pada hari Jumat tanggal 18 November 1667 di Bungaya.⁷³

C. Eksistensi Umat Islam Pasca Perang Makassar

1. Supremasi VOC Belanda di Sulawesi Selatan Setelah Kompeni Belanda memporak-porandakan dan meratakan dengan tanah Benteng Sombaopu sebagai benteng perlawanan terakhir Kesultanan Makassar. Maka, dikeluarkanlah kebijakan-kebijakan yang menjadi pendukung cengkeraman hegemoni Kompeni Belanda atas masyarakat dan kerajaan setempat. Hal tersebut diwujudkan melalui Perjanjian Bungaya yang menjadi alat legitimasi hegemoni Kompeni Belanda bagi masyarakat dan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan yang telah menerima Islam secara umum pada awal abad XVII M. Dengan demikian, melalui Perjanjian Bungaya, dasar kekuasaan Kompeni Belanda telah tertanam di kawasan timur Nusantara khususnya di Sulawesi Selatan.

Perjanjian Bungaya tersebut dimaksudkan untuk mengakhiri Perang Makassar yang telah banyak menelan korban jiwa dan materi. Bahkan, sampai menimbulkan tragedi kemanusiaan, yakni tragedi laut Liwuto dan pembuihangusan Sombaopu dan Tosora. Perang tersebut terjadi karena persaingan kepentingan antara keduanya (Makassar-VOC) yang sama-sama ingin menguasai jalur perdagangan rempah di kawasan timur Nusantara. Sebelum Perang Makassar, jalur perdagangan rempah-rempah berada dibawah kontrol kekuasaan Kesultanan Makassar yang berpusat di Sombaopu. Makassar yang menguasai jalur pelayaran dan perdagangan rempah-rempah di kawasan timur Nusantara sebagai pengaruh dari agama Islam yang dianutnya pada awal abad XVII M. menganut sistem pelayaran dan perdagangan bebas bagi semua bangsa (mare liberium). Dengan kebijakan tersebut, bandar Makassar tampil sebagai bandar yang banyak dikunjungi oleh berbagai bangsa di dunia untuk berdagang. Beramai-ramailah pedagang-pedagang Eropa (Portugis, Spanyol, Inggris, Denmark, dan lain-lain) Arab, Indian, China membuka kantor perwakilan dagang di Sombaopu. Kebijakan mare liberium tersebut tersebut berbanding terbalik dengan sistem yang dianut oleh VOC yang menerapkan sistem monopoli pelayaran dan perdagangan; hanya bangsa Belanda saja yang dapat melakukan pelayaran dan perdagangan. Hal tersebut menjadi sebuah pemicu konflik yang menimbulkan peperangan antara VOC yang kuat melawan Kesultanan Makassar yang tangguh yang berakhir dengan

Perjanjian Bungaya yang tentu saja sangat menguntungkan VOC dan sangat merugikan Makassar dan masyarakatnya. Melalui perjanjian tersebut VOC tampil menghegemoni ekonomi dan politik di Sulawesi Selatan.

2. Tarikat dan Perkembangan Mesianisme Demikianlah penetrasi kekuasaan Kompeni Belanda di Sulawesi Selatan pasca Perang Makassar semakin kuat. Dalam menghadapi pengaruh penetrasi Kompeni Belanda tersebut sebagian masyarakat Sulawesi Selatan mempunyai cara-cara untuk membuat reaksi sendiri sebagai respon atas kondisi tersebut. Respon tersebut tentu saja diharapkan mampu mengembalikan kondisi seperti semula atau memberikan ketenangan kepada mereka. Adapun jenis respon atas hal tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, gerakan sekte keagamaan yang memuat kegiatan-kegiatan yang bertujuan agar masyarakat lebih rajin menjalankan kewajiban agamanya (Islam). Mereka melepaskan diri dari ikatan-ikatan keduniaan yang berhubungan dengan kekuasaan dan Kompeni Belanda dengan memasuki dunia tarikat. Mereka mendiami daerah-daerah yang berada diluar jangkauan formal penguasa Kompeni Belanda dengan membentuk ikatan-ikatan persaudaraan spiritual dalam berbagai pengamalan tarikat. Hal tersebut menurut Mukhlis Paeni memupuk perkembangan berbagai tarikat di Sulawesi Selatan. Sehingga naskah-naskah

tarikat Naksabandiah, Halwatiyah, dan tarikat Syatariyah serta ajaran-ajaran wajudiah menyebar sampai ke pelosok-pelosok desa di pedalaman Makassar, di Sanroboné, Sorabaya, Laguruda, Galésong, Béba, Batang Kaluku, Patani, Garassi, Bontojé'né, Lanna, dan lain-lain.⁷⁴

Setelah Makassar secara khusus dan Sulawesi Selatan secara umum berada di bawah kendali politik penguasa Belanda yang senantiasa berusaha menempatkan Belanda sebagai pertuanan tunggal di Sulawesi Selatan karena kondisi masyarakat Sulawesi Selatan menjadi lemah. Hal demikian, membuat sebagian masyarakat yang memiliki kemampuan mobilitas, melakukan eksodus keluar daerah. Para ulama dan cendekiawan berusaha mencari tempat yang aman untuk melanjutkan dan mempertahankan kegiatannya. Ajaran-ajaran atau pengetahuan keagamaan Islam dilanjutkan di tempat yang aman atau terpencil. Pendidikan Agama Islam tersebut pada umumnya lebih bersifat pada aspek kebatinan atau tarekat yang banyak diminati oleh anak muda atau para bangsawan.⁷⁵ Pelarian mereka kepada pedalaman tarikat atau aliran kebatinan yang bersifat mistik di daerah-daerah pedalaman bisa dipahami sebagai respon umat Islam atas kemerosotan eksistensi mereka pasca Perang Makassar. Umat Islam Sulawesi Selatan ingin mendapatkan ketenangan melalui pendalaman tarekat atau mistisme Islam dari kondisi kemerosotan mereka dari dominasi politik Kompeni Belanda di Sulawesi Selatan.

3. Migrasi Keluar Daerah Kemenangan VOC atas Makassar menimbulkan arus pengungsi keluar daerah Sulawesi Selatan luar biasa banyak. Hal tersebut digambarkan oleh Leonard Y. Andaya sebagai berikut: Kelompok-kelompok yang melakukan migrasi ke seberang sering begitu banyak hingga armada mereka menyerupai kota terapung. Jumlah dan mobilitas pengungsi di Nusantara dilihat sebagai suatu unsur ketidakstabilan di wilayah ini.⁷⁶ hiruk pikuk yang berkaitan dengan politik. Hal tersebut bukan hal baru dalam sejarah umat Islam. Hal seperti demikian Setelah penghancuran Sombaopu pada tahun 1669 M. Kompeni Belanda Arung Pakakka juga melakukan penghancuran Tosora dan sekitarnya, pusat pemerintahan Kerajaan Wajo yang mengakibatkan Arung Matowa Wajo La Tenri Lai Tosengngeng gugur. Hal demikian tentu saja menambah pertumbuhan arus masyarakat Sulawesi Selatan keluar daerah ke berbagai wilayah di Nusantara.

Sehubungan dengan hal tersebut lontarak menyebutkan sebagai berikut: Demikianlah masyarakat Wajo keluar daerah menyebar meninggalkan kampung halamannya ke daerah yang jauh. Demikian pula permulaan ada masyarakat Wajo berpikiran membeli komoditi dagang di Wajo lalu dibawa ke Jawa, dan membeli komoditi dagang di Jawa lalu dibawa pulang ke Wajo asalkan ada yang bisa memberikan laba.⁷⁷ Meninggalkan negeri untuk mendapatkan kebebasan dari pemerintahan yang

menindas atau kurang memperhatikan kesejahteraan masyarakat adalah sesuatu yang lazim dalam masyarakat Sulawesi Selatan. Hal seperti demikian dalam masyarakat Sulawesi Selatan disebut dengan *mallékké dapureng*. Diantara para pengungsi tersebut yang bertekad untuk terus melakukan perlawanan terhadap VOC Belanda dan tidak mengakui Perjanjian Bungaya adalah kelompok yang dipimpin Karaéng Tallo; Sultan Abdul Rasyid, Karaéng Galésong; putera Sultan Hasanuddin, Karaéng Bontomarannu; *tumabbicara butta* Gowa.

Mereka meninggalkan Sulawesi guna membantu kesultanan Banten yang memiliki hubungan yang kurang baik dengan VOC Belanda. Namun, motivasi lain masyarakat Bugis-Makassar keluar daerah tentu saja dimotivasi juga oleh keinginan untuk memperbaiki nasib. Semangat untuk memperbaiki nasib diri dan negeri bagi masyarakat Sulawesi Selatan merupakan sebuah panggilan jiwa yang dalam budaya masyarakat setempat disebut *siri'*. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Abu Haif dalam penelitian disertainya bahwa; orang-orang Bugis-Makassar selalu berupaya mencari tempat yang dianggap layak bagi dirinya untuk didiami, bekerja, bermasyarakat, dan lain sebagainya. Motivasi migrasi yang dilakukan oleh masyarakat Sulawesi Selatan tersebut juga dimotivasi budaya *siri*; yang menjadi pandangan hidup mereka.⁷⁸ Tentu saja bukan hanya para tokoh tersebut di atas yang melakukan perantauan karena dorongan budaya *siri'* untuk memperbaiki nasib atau negeri mereka. Masih banyak

tokoh-tokoh lainnya, diantaranya keturunan Opu Tenri Borong Daéng Rilaka yang berjumlah lima orang, sehingga kelimanya lazim disebut Opu Lima Bersaudara. Kelima orang tersebut adalah, Opu Daéng Parani, Opu Daéng Manambong, Opu Daéng Maréwa, Opu Daéng Celak, dan Opu Daéng Kamasé. Kelima opu⁷⁹ tersebut datang mengadu nasib di sekitar perairan Selat Malaka, dan melibatkan diri dalam kemelut politik di wilayah setempat. Pada saat tersebut di Riau Lingga, Pahang, dan Johor sedang terjadi konflik perebutan tahta. Keempat negeri tersebut berada di bawah kekuasaan Sultan Sulaimān Badarul `Alam Syah dan kerjaaan tersebut merupakan kelanjutan kesultanan Malaka yang dihancurkan Portugis pada tahun 1511 M.

Dalam usaha mengadu nasib di perairan Selat Malaka tersebut, Daéng Manambong berhasil menggapai kesuksesan dengan pengangkatan dirinya sebagai sultan di kesultanan Mémpawah dengan mendapat gelar Pangeran Emas Suryanegara. Daéng Kamasé berhasil menjadi Raja Muda di Sambas dengan mandapatkan gelar Pangeran Mangkubumi. Daéng Parani wafat dalam usahanya memerangi Raja Kecil dari Minangkabau yang berambisi menjadi sultan Johor. Daéng Maréwa diangkat menjadi Yamtuan Muda di Riau dan setelah kewafatannya digantikan oleh adiknya, Daéng Tjelak sebagai Yamtuan Muda kesultanan Riau.⁸⁰

Sebagai kesimpulan bahwa Perang Makassar yang berlangsung pada tahun 1666-1669 M. Yang berakibat kekalahan

kesultanan Makassar oleh Kompeni Belanda, kelak sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan. Hal tersebut oleh sebagian masyarakat diterima sebagai sebuah kekalahan sebagai takdir dari Allah SWT sehingga mereka tetap tinggal di Makassar dengan mengikuti aturan Kompeni Belanda sebagai resiko dari kekalahan perang. Adapula kelompok yang merespon hal tersebut dengan melepaskan diri dari ikatan-ikatan keduniaan yang berhubungan dengan kekuasaan dan kompeni dengan memasuki dunia tarikat. Mereka mendiami daerah-daerah yang berada diluar jangkauan formal penguasa kompeni dengan membentuk ikatan-ikatan persaudaraan spiritual dalam berbagai pengamalan tarikat. Ada pula yang kelompok yang secara ekstrim keluar daerah Sulawesi Selatan, mereka melakukan eksodus ke berbagai daerah di Nusantara untuk melanjutkan perlawanan. Namun, ada juga yang keluar daerah dengan semangat ingin memperbaiki nasib mereka agar lebih baik.

D. Faktor Perlawanan Masyarakat

1. Faktor Ekonomi

Kemasyhuran kota Makassar tidak lepas dari setrategi Kerajaan Gowa, yang menempatkan Makassar sebagai pusat perdagangan. Gowa tampil sebagai kerajaan besar dibuktikan dengan adanya ekspansi kerajaan ini ke berbagai kerajaan lain di Sulawesi Selatan bahkan di Nusantara bagian timur. Pada masa pemerintahan Tumapa'risi Kallona Kerajaan Gowa mulai

mengadakan perluasan kekuasaan ke kerajaan Bugis. Hal itu bertujuan untuk membentuk jaringan perdagangan antara daerah pedalaman dengan pusat niaga. Kerajaan Gowa, mulai membuka hubungan dagang dengan bangsa Portugis melalui diizinkan mereka membuka perwakilan dagang di Makassar, meskipun kedatangan mereka disertai pula dengan penyebaran agama Nasrani. Para petinggi kerajaan bergaul, dan bahkan belajar bahasa Portugis pada mereka.

Letak kota Makassar pada jamannya demikian strategis dilihat dari sudut geo-politik. Ia diapit oleh dua buah sungai Tallo, dan Jeneberang, di sebelah selatan dan utara di sebelah timur oleh lembah pegunungan Bawakaraeng yang sangat luas, dan subur, dan disebelah barat oleh lautan dengan banyak pulau-pulau kecil, yang tersebar bagaikan benteng-benteng pertahanan yang menghadang di depan pantai Makassar. Perkembangan Makassar sebagai kota, Bandar niaga, dan pangkalan pertahanan kerajaan Makassar, sesungguhnya dalam pertengahan abad ke XVI itu didukung oleh dua faktor yang paling menentukan, yakni: *Pertama*; Faktor dari dalam, yaitu tumbuhnya Kerajaan Gowa-Tallo menjadi kerajaan yang menghimpun, dan melindungi wilayah orang Makassar di sepanjang pesisir selatan jazirah selatan Sulawesi. Pertumbuhan itu didorong pula oleh adanya ancaman dari arah daratan Sulawesi Selatan dengan berkembangnya beberapa kerajaan Bugis di pedalaman, seperti Soppeng, Wajo, dan Bone yang mulai menanam pengaruhnya di daerah pantai, atau pesisir

sebelah utara, dan sepanjang teluk Bone. Persaingan untuk memperebutkan pengaruh antara kerajaan Bugis dan Makassar itulah yang menyebabkan makin ditingkatkannya usaha oleh Kerajaan untuk mengadakan tempat konsolidasi kekuatan, dengan membangun benteng pertahanan, dan pangkalan militer untuk menyerang dan memperluas daerah pengaruh Kerajaan mereka.

Kedua; Faktor dari luar yaitu kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara untuk berniaga. Ditemukannya jalan menuju pulau rempah-rempah, dan timbulnya persaingan antara bangsa yang melakukan perniagaan itu. Karena keinginan mereka untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya maka, mereka pun memerlukan pangkalan niaga yang dapat dijadikan tempat, dan mata rantai dalam perjalanan pulang ke negeri asal mereka. Terjadilah penaklukan oleh Bangsa Barat itu, mulai di pantai India, Malaka pulau Jawa, Maluku, dan sebagainya. Karena ditaklukkannya Malaka oleh Portugis, maka perjalanan niaga bangsa Portugis ke pulau rempah-rempah lebih lancar tanpa gangguan Kerajaan Nusantara seperti Aceh di bagian barat, dan niagawan-niagawan Keling, dan juga Makassar yang memilik potensi dalam hal perniagaan pun tak luput dari minat bangsa Asing, sehingga menjadikan Kerajaan ini ramai dan banyak dikenal di Dunia.⁸¹

Kedatangan bangsa Portugis, dan setelah itu disusul oleh bangsa lain, seperti bangsa Belanda membuat pelabuhan

menjadi ramai, dan perhubungan dengan negeri-negeri pedalaman pun diperluas terutama dalam hal perdagangan.⁸² Kehadiran Makassar sebagai kota niaga diikuti pula oleh penyusunan sistem administrasi, dan birokrasi negara maritim Kerajaan Gowa yang kuat. Pada saat itu mulai ditempatkan seorang petugas Syahbandar untuk membantu Raja menangani pemerintahan Kerajaan Gowa. Kekuatan militer Kerajaan Gowa juga dibangun, dan dilengkapi, karena faktor keamanan bandar merupakan unsur vital dalam pengembangan. Dapat dikatakan, bahwa munculnya Gowa sebagai kerajaan maritim tidak dapat dipisahkan dari faktor ekonomi. Keahlian dalam pembuatan perahu seperti di Tanjung Bira yang menjadi andalan kapal perang kerajaan merupakan faktor penentu bagi pertumbuhan sebuah kerajaan maritim. Paruh pertama dari abad ke-17 Makassar dianggap sebagai pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Pada waktu itu Makassar memegang supremasi perdagangan sesudah Jawa Timur, yaitu tempat berkumpul barang dagangan, terutama rempah-rempah dari Maluku untuk selanjutnya dikirim ke barat melalui pedagang Melayu yang berpusat di Malaka.⁸³

2. *Faktor Politik*

Pada bulan Maret 1602, perseorangan dagang di negeri Belanda bergabung membentuk perserikata Maskapai Hindia Timur VOC Vereenigde Oost- Indische Compagnie. Salah satu alasan dari pembentukan organisasi ini adalah, untuk

memperkuat posisi Belanda dalam persaingan dagang melawan Spanyol, Inggris, Portugis. Alasan lainnya dalam pembentukan VOC adalah, untuk melakukan monopoli atas hasil perkebunan pada masa itu, contoh adalah beras dari Mataram, rempah-rempah, dan hasil-hasil perkebunan lainnya.⁸⁴ VOC di Asia sifatnya unik karena keberadaan mereka berdasarkan hak octrooi. Direktur-direktornya memutuskan untuk menempatkan pemimpin tertinggi di Asia bukan di negara aslinya yaitu Belanda. Maka VOC membentuk Gubernur Jenderal dan Raad van Indië, Dewan Hindia. Keduanya membentuk suatu pemerintahan yang dinamakan Hoge Regering (Pemerintahan Agung), lembaga ini menjadi pusat otoritas VOC di Asia, dan berkedudukan di Batavia. Anggota Dewan Hindia memiliki tugas membantu Gubernur Jenderal pada semua masalah seperti manajemen umum perdagangan, perang, pemerintahan, serta penegakkan keadilan di semua masalah publik dan kriminal. Anggota memiliki tanggung jawab masing-masing. dan harus melaporkan ke Pemerintahan Agung. Batavia yang menjadi kedudukan Pemerintahan Agung juga menjadi pusat administrasi, dan tempat bertemunya kapal-kapal yang datang dari Belanda. Sebagai pusat administrasi Batavia menerima banyak surat dari kantor-kantor VOC di Asia. Surat yang datang ke Batavia dilaporkan ke Tuan-Tuan XVII. Surat tersebut memuat informasi mengenai laporan kondisi di wilayah Asia, terutama masalah perang dan dagang.⁸⁵

Hubungan antara Kerajaan Gowa, dengan Belanda sudah terjalin sejak masa pemerintahan Sultan Alaudin. Belanda tiba di Indonesia untuk pertama kalinya pada tahun 1596, dan tempat yang mula-mula dikunjungi oleh orang Belanda adalah Banten. Belanda mengirim armada kapal dagangnya yang pertama ke Indonesia tahun 1595, terdiri dari empat kapal dibawah pimpinan Cornelis de Houtman. Menyusul kemudian angkatan kedua tahun 1598 dibawah pimpinan van Nede, van Heemskerck, dan van Warwijk. Selain dari Amsterdam juga datang beberapa kapal dari berbagai kota Belanda. Angkatan ketiga berangkat tahun 1599 dibawah pimpinan van der Hagen, dan angkatan keempat tahun 1600 dibawah pimpinan van Neck.⁸⁶ Melihat hasil yang diperoleh Perseroan Amsterdam itu banyak perseroan lain berdiri yang juga ingin berdagang, dan berlayar ke Indonesia. Pada bulan Maret 1602 perseroan-perseroan itu bergabung dan disahkan oleh Staten General Republik dengan satu piagam yang memberi hak khusus kepada perseroan gabungan tersebut untuk berdagang, berlayar, dan memegang kekuasaan di kawasan antara Tanjung Harapan, dan Kepulauan Solomon, termasuk kepulauan Nusantara. Perseroan itu bernama Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC)

Dalam perjalanan pertama mereka ke kepulauan Nusantara, orang-orang Belanda hanya menyinggahi Jawa (Banten, Tuban, dan Gresik), serta Maluku. Sulawesi bahkan tidak dalam rencana Belanda sama sekali, baru setelah beberapa

tahun kemudian sesudah mereka mempelajari arti penting Makassar sebagai tempat persinggahan bagi kapal, dan sebagai pusat perdagangan rempah-rempah barulah mereka tertarik dengan Makassar.⁸⁷ Perhatian orang Belanda ke Makassar untuk berdagang dimulai sejak ditandai oleh ketika orang Belanda mengirimkan sebuah surat kepada raja Gowa untuk berdagang di Makassar, permohonan ini dikabulkan tetapi dengan satu syarat, yakni hanya untuk berdagang, karena mereka mengetahui bahwa Belanda adalah musuh besar orang Portugis, dan mereka tidak menghendaki Makassar dijadikan sebagai tempat pertahanan kedua bangsa itu, Kemudian setelah itu orang asing yang datang ke Makassar dan mendirikan perwakilan dagangnya secara resmi adalah orang Inggris, Denmark, Cina, dan lain-lain.⁸⁸

Namun demikian setelah Belanda bisa berdagang di Makassar, mereka tidak menginginkan pedagang Eropa lainnya berkeliaran di Makassar. Bagi pedagang Belanda pedagang Eropa lainnya adalah saingan. Belanda yang menanamkan kekuasaannya di Maluku setelah mengusir orang Portugis dan Spanyol, menghalau perahu-perahu dagang Makassar di dekat perairan Ambon agar dapat memonopoli rempah-rempah. Penguasa Makassar melaporkan hal itu kepada perwakilan dagang VOC, namun tidak digubris. VOC mendesak Raja I Mangarrangi Daeng Manrabia Sultan Alauddin (1593-1639) agar tidak menjual beras lagi kepada orang Portugis di Malaka. Tuntutan itu dijawab oleh raja. "Negeri saya terbuka untuk

semua bangsa, dan tidak ada perlakuan istimewa untuk Tuan sebagaimana juga untuk orang Portugis." Jawaban ini tidak memuaskan Belanda sehingga pecah peristiwa Enckhuyzen pada 28 April 1615, dan peristiwa-peristiwa pertempuran Kerajaan Gowa melawan Belanda lainnya.

PERANG MALUKU

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah penamaan Maluku pada zaman bahari hanya terbatas pada pulau-pulau di kawasan utara Maluku, yaitu Ternate, Tidore, Makian, Moti dan Bacan. Antonio Galvao, yang menjabat sebagai Gubernur Portugis ke-7 di Maluku antara 1536-1540, menulis dalam *Historia das Moluccas*: Nama sebenarnya kepulauan Maluku terbatas pada pulau-pulau yang berada di bawah pemerintahan dan raja-raja Maluku, dan lebih khusus lagi adalah: Ternate, Tidore, Moti, Makian, Kayoa, Bacan, Labuha, yang sebelumnya bernama: Gapi, Duko, Moti, Makian (Mara), Maligo, Seki, dan Kasiruta.⁸⁹ Sementara P.H. van der Kemp⁹⁰ berpendapat bahwa Maluku yang sebenarnya meliputi Ternate, Tidore, Bacan dan Halmahera (Jailolo). Pendapat serupa juga dikemukakan Naidah, penulis *Hikayat Ternate*: "Maluku artinya Ternate, Tidore, Jailolo dan Bacan." Menurutnya, hal ini disebabkan "Maluku kie raha ma asal rimoi bato, ma-kabasaran se ma-istiadat rimoi bato." ("Empat gunung Maluku sesungguhnya punya satu asal-usul, punya kemegahan

dan budaya yang sama").⁹¹ Perubahan nama terjadi ketika datangnya seorang asing yang bernama Jafar Shadik. Dari perkawinannya dengan puteri lokal, Ia menurunkan empat orang putera yang kemudian menjadi raja-raja di empat kerajaan itu. Sejak saat itu empat kerajaan tersebut diberi label dengan istilah "Maloko Bacan, Maloko Jailolo, Maloko Tidore dan Maloko Ternate".⁹²

Sejak awal, kepulauan Maluku didiami oleh dua suku asli, yaitu suku Alune dan Suku Wemale. Dari dua suku asli tersebut, kemudian beranakpinak melahirkan sejumlah suku-suku lainnya, seperti suku Alifuru, Togitil, Furu Aru, Ternate, Seram, Buru, Takabu, Tobelo, Banda, Rana, dan Moa. Keragaman suku-suku itulah kemudian muncul istilah Maluku. Sedikitnya, pada waktu itu, terdapat 41 sub etnis yang mendiami kepulauan Maluku.⁹³ Maluku merupakan wilayah kerajaan yang dikenal dengan penghasil rempah-rempah terbesar di dunia seperti cengke dan pala. Sebagai daerah penghasil rempah terbesar, banyak pedagang-pedagang Eropa, Arab dan lainnya mulai berdatangan. Kehadiran pedagang-pedagang tersebut mulai mempengaruhi kehidupan pribumi seperti Ternate, Makian, Bacan, Moti, Tidore dan Jailolo baik dalam aspek ekonomi, sosial maupun budaya. Kedatangan orang-orang Eropa, awalnya di sambut dengan baik oleh pribumi. Namun praktek monopoli perdagangan Indonesia dan hubungan telah menimbulkan perlawanan seperti perlawanan Sultan Babullah, Sultan Nuku, dan Pattimura.⁹⁴ Di Indonesia, konflik dan

kekerasan sudah pernah terjadi sejak zaman kolonial, revolusi, Orde Lama dan Orde Baru. dan kekerasan juga pernah terjadi di Aceh, Sulawesi, Papua dan Maluku hingga Maluku Utara. Kekerasan sebenarnya berakar dari dalam tradisi politik kerajaan-kerajaan dan juga di dalam masyarakat Indonesia itu sendiri. Masalahnya adalah didalam cara bagaimana kekerasan itu di praktekkan dan untuk tujuan apa. Kekerasan yang terjadi di Maluku Utara adalah bagian dari pertarungan elit politik lokal dalam merebut kekuasaan.⁹⁵

Daya tarik rempah-rempah yang dihasilkan oleh dunia Timur itulah yang kemudian mengundang kedatangan bangsa Eropa ke nusantara untuk memperoleh rempah-rempah langsung dari tangan pertama. Hasrat ini kemudian telah mempengaruhi hubungan internasional antar bangsa dan menjadi faktor utama perjalanan sejarah dunia sekitar abad XV hingga XX.⁹⁶ Berlangsungnya kolonisasi di negara Asia dan Afrika yang dulunya terdiri dari kerajaan-kerajaan lokal menjadi salah satu buktinya. Dengan tujuan awal ekonomi, orang-orang Eropa hanya menempatkan wakil perdagangannya di wilayah-wilayah penghasil komoditi yang dibutuhkan. Akan tetapi, melihat keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan rempah-rempah yang besar maka penguasaan atas wilayah penghasil komoditi tersebut menjadi keharusan. Hal inilah yang menjadi faktor utama pembangunan benteng- benteng pertahanan di wilayah-wilayah yang dianggap penting. kepentingan Belanda yang melatari pembangunan sistem

pertahanan tersebut. Seperti telah diketahui bahwa kepentingan utama bangsa Kolonial datang ke wilayah ini diawali oleh kepentingan ekonomi.

Di dataran Eropa pada saat itu perdagangan rempah-rempah sangat ramai dan banyak diminati oleh orang-orang Eropa yang digunakan sebagai bahan untuk menambah rasa masakan dan sebagai bahan untuk membuat wewangian. Keuntungan yang diperoleh melalui perdagangan rempah-rempah sangatlah besar karena setiap berpindah tangan keuntungan yang diperoleh mencapai 100% sehingga setibanya di Eropa dapat mencapai seribu persen.⁹⁷ Demikianlah, maka negara-negara Eropa kemudian berlomba-lomba “menjemput emas” (dengan mendatangi sentra produksi rempah-rempah di dunia timur) untuk mendapat keuntungan yang berlipat. Pada awalnya, rempah-rempah diperkenalkan oleh pedagang-pedagang Cina dan Arab ke Eropa. Berbagai kegiatan arkeologis dan catatan sejarah menyebutkan bahwa pedagang-pedagang nusantara telah melibatkan diri dalam perdagangan internasional. Rute perdagangan dari Cina melalui kepulauan Nusantara ke India, Persia dan Mesir, Eropa dan sebaliknya. Berbagai komoditas yang dibawa ke India dimana telah menunggu saudagar-saudagar Asia Barat (orang Persia dan Arab, mula-mula juga orang Yunani dan Mesir) yang akan membawa ke pasaran Eropa.⁹⁸

Maluku sendiri menjadi salah satu wilayah penting dalam perdagangan internasional sejak jaman lampau, dimana

wilayah ini telah disinggahi oleh kapal-kapal dagang dari kerajaan Sriwijaya, kemudian kerajaan Majapahit, dan terus berlanjut pada masa Islam dan masa kedatangan bangsa Eropa.⁹⁹ Bahkan jauh sebelumnya, sumber-sumber Cina menyebutkan bahwa perdagangan rempah-rempah telah melibatkan pedagang-pedagang Nusantara yang berlayar antara Cina dan India sekitar abad ke-5 dan ke-6. Kemudian mulai abad ke-7, secara teratur pedagang Arab yang kebanyakan datang dari India berlayar ke Asia Tenggara. Perdagangan secara meluas tidak saja dilakukan di Nusantara bahkan mencapai belahan selatan Cina. Dan pada abad-abad selanjutnya pedagang-pedagang Arab kemudian datang dengan membawa dan menyebarkan agama Islam di Nusantara. Tergalur dengan keuntungan besar yang diperoleh dari perdagangan rempah-rempah dan semangat petualangan untuk menjelajahi dunia, bangsa Eropa kemudian datang ke Nusantara.

B. Prose Terjadinya Peperangan

Sejarah kedatangan orang-orang Eropa ke wilayah ini diawali oleh bangsa Portugis. Portugis pada abad ke-16 berhasil menguasai Malaka sebagai salah satu pusat perdagangan rempah-rempah yang kemudian berhasrat untuk mendatangi sentra produksi rempah-rempah di Maluku. Setelah keberhasilan pertama tersebut Portugis kemudian mencapai keberhasilan berikutnya yaitu menguasai sentra produksi rempah-rempah dengan melakukan kerjasama perdagangan dengan Ternate.

Pada awalnya, daerah pertama yang mereka datangi adalah Kepulauan Banda akan tetapi kemudian ditinggalkan dan menuju ke utara yaitu Ternate karena dianggap sebagai Kerajaan yang berpengaruh dan menguasai wilayah Maluku. Pada masa selanjutnya, negara-negara Eropa yang lain diantaranya Spanyol, Belanda, dan Inggris datang dengan tujuan yang sama. Kedatangan bangsa Eropa ini, pada akhirnya menimbulkan persaingan perdagangan yang ketat, sehingga terjadi perselisihan bahkan peperangan di antara mereka, dan kemudian mereka berusaha mencari/mendapatkan dukungan dari para penguasa wilayah setempat (Sultan, Raja, Tetua desa dan lainnya). Tidak hanya itu, persekutuan persekutuan dengan penguasa lokal menyebabkan perselisihan dan juga peperangan antara penduduk Maluku itu sendiri.¹⁰⁰ Melihat perselisihan diantara penguasa lokal, kemudian dimanfaatkan oleh Belanda untuk menguasai wilayah ini dengan menerapkan politik pecah belah.

Perebutan diantara negara-negara Eropa atas wilayah ini berlangsung cukup lama. Salah satu wilayah yang dianggap penting pada masa itu adalah Kepulauan Banda. Perebutan atas Banda Neira berlangsung cukup lama dimulai pada awal abad XVI sejak kedatangan bangsa Portugis hingga awal abad XIX yang ditandai dengan pendudukan tentara Inggris atas Benteng Belgica pada tahun 1810. Akan tetapi, dengan adanya perubahan politik di Eropa tentang perjanjian pembagian daerah jajahan maka Banda Neira berada kembali dibawa kendali pemerintah Belanda yang ditandai dengan kedatangan Gubernur Jenderal

Belanda bernama Baron van der Capellen pada tahun 1824.¹⁰¹ Selain persaingan diantara negara kolonial yang menyebabkan peperangan di Maluku, peperangan juga berlangsung dengan adanya perjuangan rakyat Maluku melawan bangsa Portugis dan Belanda.

C. Perlawanan Rakyat Maluku

1. *Melawan Portugis*

Perang Ternate dengan Portugis adalah peperangan antara Kesultanan Ternate dan Portugis yang dilancarkan oleh Sultan Baabullah untuk membalas pembunuhan Sultan Hairun dan mengusir Portugis dari Ternate. Portugis Untuk mencukupi kebutuhan di negaranya melakukan pelayaran ke timur dengan maksud untuk mencari rempah-rempah. Pada 15 Agustus 1511, mereka berhasil merebut malaka.¹⁰² dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke Maluku karena mereka telah mengetahui bahwa Maluku merupakan penghasil rempah-rempah besar. Setelah itu, mereka membangun kerja sama dengan kesultanan ternate ketika terjadi konflik internal dengan tidore. Bersamaan dengan itu, armada laut Spanyol datang ke maluku pada tahun 1512. Spanyol yang sedang bersaing dengan Portugis diterima di Tidore. Karena dianggap melanggar perjanjian Tordesillas, maka Armada Spanyol pergi dari Maluku dan menetap di Filipina. Ternate yang merupakan pusat utama perdagangan cengkeh memiliki ketergantungan

erat pada Portugis sejak mereka mendirikan benteng di sana pada tahun 1522. Pada awalnya, elit Ternate menganggap bahwa Portugis yang memegang kuasa atas bandar persinggahan di Melaka serta memiliki persenjataan yang relatif lebih unggul dapat dijadikan sebagai sekutu yang berguna. Namun, setelah beberapa waktu, perilaku para serdadu Portugis yang tidak disukai masyarakat setempat memicu penolakan. Hubungan antara Sultan Khairun dan kapten-kapten Portugis tidak begitu mulus, walaupun mereka tetap membantunya mengalahkan negeri-negeri lain di Maluku, seperti Kesultanan Tidore dan Jailolo.¹⁰³

Konflik antara Ternate dan Portugis pecah pada tahun 1560-an, ketika Muslim di Ambon meminta bantuan dari Sultan untuk mencegah orang-orang Eropa yang mencoba mengkristenkan daerah tersebut. Sultan Khairun pun mengirimkan sebuah armada di bawah pimpinan *Kaicili* Baab untuk mengepung desa Kristen Nusaniwi pada tahun 1563. Namun, pengepungan ini dibatalkan setelah tiga kapal Portugis datang.¹⁰⁴ Selama beberapa waktu setelah tahun 1564, orang-orang Portugis terpaksa meninggalkan Ambon secara keseluruhan, walaupun mereka kembali menetap di sana pada tahun 1569. Baab juga ikut andil dalam sebuah ekspedisi ke bagian utara Sulawesi pada 1563 untuk membawa wilayah tersebut ke dalam kuasa kesultanan pimpinan ayahnya. Petinggi Portugis memahami bahwa penaklukan semacam ini akan diikuti dengan penyebaran agama Islam yang dapat

menggoyahkan posisi mereka di Nusantara, sehingga mereka pun berusaha mendahuluinya dengan usaha pengkristenan penduduk Manado, Pulau Siau, Kaidipang, dan Toli-Toli, antara lain.¹⁰⁵

Selepas perselisihan mengenai kepemilikan Pulau Ambon, Khairun semakin meningkatkan kekuatan Ternate hari demi hari. Perkembangan ini membuat pemimpin-pemimpin Portugis khawatir. Wilayah pengaruh Portugis di Halmahera diserang oleh pasukan-pasukannya. Sebagai penguasa jalur laut, Khairun juga dapat menghentikan pengiriman suplai bahan pangan yang vital dari Moro di Halmahera ke pemukiman Portugis di Ternate.¹⁰⁶ Pada tahun 1570 Kapten Diogo Lopes de Mesquita (1566-1570) secara resmi melakukan rekonsiliasi dengan sang Sultan, tetapi hal ini tidak menurunkan ketegangan antar kedua pihak.¹⁰⁷

Kematian Sultan Khairun memicu kemurkaan orang-orang Ternate serta raja-raja Maluku lainnya. Dewan diraja Ternate, yang didukung oleh para *kaicili* dan *sangaji* (penguasa daerah), mengadakan musyawarah di Pulau Hiri dan menetapkan *Kaicili Baab* sebagai Sultan Ternate berikutnya, dengan gelar *Sultan Baabullah Datu Syah*. Menurut satu riwayat yang tercatat di kemudian hari, pada pertemuan itu mereka berikrar: "Apa yang mesti kita segani dari Portugis jika kita menyadari kekuatan kita sendiri? Apa yang mesti kita takuti, apa yang dapat membuat kita putus asa? Bangsa Portugis memuliakan orang yang merampok paling banyak, dan yang

bergelimang kejahatan serta dosa-dosa besar.¹⁰⁸ Negeri kita adalah tanggungan kita, dan begitu pula perlindungan akan orang tua, istri, anak-anak dan kemerdekaan kita. Sultan bermaksud untuk berperang demi menegakkan kembali agama Islam di Maluku, membawa Kesultanan Ternate menjadi kekuatan utama, dan mengusir orang-orang Portugis dari negerinya.¹⁰⁹

Di Ternate, terjadi pertempuran antara tentara Portugis melawan tentara Sultan Hairun dari tahun 1550. Pada tahun 1570, Sultan Hairun dibunuh oleh Portugis. Akibatnya, pengganti Sultan Hairun, yaitu Sultan Baabullah, bersumpah akan terus memusuhi Portugis sebagai balasan atas pembunuhan Khairun, Baabullah meminta agar Lopes de Mesquita dibawa ke hadapannya untuk diadili. Benteng-benteng Portugis di Ternate, yaitu Tolucco, Santa Lucia, dan Santo Pedro jatuh dalam waktu singkat, menyisakan São João Baptista (kediaman Mesquita) sebagai pertahanan terakhir. Di bawah komando Baabullah, pasukan Ternate mengepung São João Baptista dan memutuskan hubungan benteng tersebut dengan dunia luar; suplai makanan dari luar tidak diperbolehkan masuk kecuali sejumlah kecil sagu yang hampir-hampir tidak dapat membantu penduduk benteng bertahan hidup. Walaupun begitu, pasukan Ternate sesekali memperbolehkan pertemuan antara penduduk benteng yang dikepung dengan masyarakat pulau lainnya sebab banyak penduduk asli Ternate kala itu yang memiliki hubungan

kekerabatan dengan Portugis melalui pernikahan. Dalam kondisi tertekan seperti ini, orang-orang Portugis mengangkat Alvaro de Ataide sebagai kapten baru mereka menggantikan Lopes de Mesquita. Namun, pergantian kepemimpinan ini tidak menggoyahkan niat Baabullah untuk mengusir orang-orang Eropa^[11] Tersisa hanya 400 orang dengan keadaan mengenaskan. Portugis tidak dapat mengirim bala bantuan karena Malaka sedang dikepung oleh Kesultanan Aceh. Sultan Baabullah tidak membantai dan menyiksa para tawanan portugis, tetapi ia memberikan kesempatan selama 24 jam untuk pergi ke Malaka dan Ambon. Bila masih ada orang Portugis di Ternate, mereka akan dijadikan budak.¹¹⁰

Selagi pengepungan tersebut berlangsung, pasukannya menyerang wilayah-wilayah yang menjadi pusat misi Yesuit di Halmahera, dan memaksa penguasa Bacan yang sudah dibaptis untuk beralih kembali ke Islam pada sekitar tahun 1571. Pada tahun 1571 sebuah armada Ternate dengan enam *kora-kora* besar di bawah pimpinan Kapita Kalasinka menyerbu Ambon. Pasukan Ternate juga berhasil menaklukkan wilayah Hoamoal (di Seram), Ambelau, Manipa, Kelang dan Boano. Tentara Portugis yang dikomandoi Sancho de Vasconcellos berusaha dengan susah payah untuk mempertahankan benteng-benteng mereka, dan kehilangan kuasa mereka di laut atas perdagangan cengkeh. Pada tahun 1575 sebagian besar tanah Portugis di Maluku telah diambil alih oleh Ternate, dan suku-suku serta

negeri-negeri yang mendukung Portugis telah benar-benar tersudut. Hanya São João Baptista saja yang masih dalam pengepungan. Selama lima tahun sebelumnya orang Portugis beserta keluarga mereka mengalami kesulitan hidup di dalam benteng yang terputus dari dunia luar tersebut. Sultan Baabullah menuntut agar orang-orang Portugis di dalam benteng segera menyerahkan diri untuk meninggalkan Ternate, dan berjanji akan memberikan kapal serta suplai agar mereka dapat mencapai Ambon. Sementara itu penduduk benteng yang berasal dari Ternate diperbolehkan tinggal selama mereka mengakui pemerintahan kesultanan. Kapten Nuno Pereira de Lacerda menerima persyaratan tersebut.¹¹¹

2. *Melawan Belanda*

Seabad sesudah bangsa Portugis, bangsa Belanda sampai di Maluku juga. Apalagi ekspansi Portugal bersumber pada suatu komunikasi dari unsur-unsur agama, ekonomi dan politik, maka motif bangsa Belanda untuk mengarungi lautan berpangkal pada perdagangan dan keuntungan yang sebesar-besarnya yang diharapkan dari usaha pemiagaan. Secara keseluruhan, orientasi hidup orang Belanda lebih terarah pada kegiatan ekonomi daii pada kegiatan keagamaan. Dalam .tahun 1599, 1600 dan 1601 sebelum pimpinan Portugis Mendoza melaksanakan ekspedisi penakhikannya, kapal-kapal Belanda sudah tiba di Maluku di bawah pimpiariart Jacob Coinelis van Neck, Wybrant Worwyck, Jacob van Heembrek dan Steven der

Hogken. Kemudian datang pedagang-pedagang dari berbagai , kongsi dagang. Untuk mengatasi berbagai kesukaran di laut, maka pada tahun 1602 dibentuk suatu Vereenigde Oost-Indische Com, pagnie (VOC) yaitu gabungan pedagang yang berlayar ke Indonesia. voe inilah yang diberi kekuasaan penuh oleh pemerintah Belanda untuk mengurus semua kepentingan Belanda di bawah jajahan²). Dengan orang-orang Belanda dan organisasi mereka itu, rakyat Maluku akan terlibat dalam suatu proses nasional dan internasional : politis, ekonomi dan religius

Perlawanan rakyat Maluku mengusir bangsa Belanda karena adanya praktik monopoli dan sistem pelayaran Hongi yang membuat rakyat sengsara. Belanda melaksanakan sistem penyerahan wajib sebagian hasil bumi terutama rempah-rempah kepada VOC. Kompeni juga melangsungkan sistem pelayaran Hongi (hongitochten). Dengan cara itu, para birokrat Kompeni dapat menginspeksi satu per satu pulau-pulau di Maluku yang bertujuan menjaga keberlangsungan monopoli rempah-rempah. Kompeni juga punya hak ekstirpasi, yaitu hak memusnahkan pohon pala dan cengkeh jika harganya turun. Perlawanan rakyat Maluku muncul pada tahun 1635 di bawah pimpinan Kakiali, Kapitan Hitu. Saat Kakiali tewas terbunuh, perjuangannya dilanjutkan Kapitan Tulukabessy. Perlawanan ini baru dapat dipadamkan pada tahun 1646. Sampai akhir abad ke-18 tak terdengar lagi perlawanan pada VOC.

Baru kemudian muncul nama Sultan Jamaluddin, dan Sultan Nuku dari Tidore. Namun VOC dengan cepat bisa

memadamkan perlawanan itu. Lalu pada 1817 muncul tokoh dari di Pulau Saparua bernama Pattimura. Dalam aksi Pattimura itu, Benteng Duurstede berhasil dihancurkan oleh rakyat Maluku. Bahkan, Residen Belanda Van den Bergh terbunuh dalam peristiwa tersebut. Tak sampai di situ, Belanda terus membawa pasukan dari Ambon hingga Jawa demi mengalahkan rakyat Maluku. Peristiwa ini menjalar ke kota lainnya di Maluku, seperti Ambon, Seram, dan pulau lainnya agar rakyat Maluku mundur. Rakyat Maluku pun mundur karena kekurangan pasokan makanan. Demi menyelamatkan rakyat dari kelaparan, Thomas Mattulesia atau Patimurra menyerahkan diri dan dihukum mati.

D. Dampak Akibat Peperangan

Akibat dari permusuhan dan peperangan yang begitu hebat. antara rakyat maluku dengan bangsa Portugis ini membuka jalan bagi suatu kekuasaan baru untuk menguasai seluruh Matuku. Dan kekuatan baru yaitu orang-orang Belanda yang berhasil menguasai dan memanfaatkan keadaan dari peperangan tersebut. Selain itu peperangan ini juga telah menal banyak korban dan dari segi tertentu telah banyak mengadakan kontak dengan daerah lain seperti jawa kalimanta dan daerah lain.

Setelah perang itu VOC dapat menguasai Kepulauan Banda kemudian dinyatakan sebagai milik VOC. Tanah-tanah

pertanian rakyat yang kaya akan pala itu tidak dibiarkan oleh Belanda begitu saja. Tanah-tanah tersebut ditawarkan kepada siapa saja yang mau mengerjakan terutama kepada bekas tentara dan pegawai VOC. Akhirnya tanah-tanah itu menjadi milik orang-orang Belanda dan orang-orang Eropa lainnya yang disebut sebagai perken. Perken itu dikerjakan dengan tenaga para budak yang didatangkan dari berbagai tempat sebagai para tawanan. Selain itu orang-orang Cina yang terdampar di Banda juga menjadi pekerja perken. Sejak tahun 1623, Banda menjadi suatu masyarakat yang tersendiri dan terisolasi dari dunia luar. Dalam masa voe daerah ini diperintah oleh seorang pejabat yang disebut Gouverneur. Perlawanan penduduk Banda pada tahun 1621 - 1623 itu merupakan perlawanan pertama yang dilancarkan terhadap imperialisme Belanda di daerah Maluku yang kemudian meluas menjadi peperangan hebat lagi di daerah Maluku Tengah yaitu di pulau Ambon, Lease dan Seram. Bagi Belanda peperangan ini merupakan suatu batu ujian terhadap metode kekerasan yang ternyata sangat efektif bagi penegakan kekuasaan mereka di daerah kepulauan rempah-rempah. Sungguh suatu pelanggaran terhadap perikemanusiaan



BAB IV

PENAKLUKAN KALIMANTAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak kedatangan bangsa asing ke Indonesia terdapat berbagai perlawanan bersenjata terhadap penjajah. Pada awal kedatangannya, tujuan bangsa asing ke Indonesia adalah untuk melakukan perdagangan yang kemudian berubah menjadi monopoli perdagangan dengan mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya, hingga kemudian melakukan penjajahan. Di samping itu, mereka juga berusaha untuk menyebarkan agama yang mereka peluk. Seperti yang kita ketahui, bentuk-bentuk perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di Kalimantan Selatan. Perang Banjar, merupakan bentuk perlawanan yang dilakukan oleh para pejuang di Kalimantan Selatan pada khususnya bangsa Indonesia pada umumnya. Belanda datang ke Banjarmasin pada awal abad ke-17. Alasan kedatangan bangsa Belanda tersebut karena daerah ini banyak menghasilkan lada dan batubara. Sejak saat itu terjadi hubungan dagang antara orang Banjar dengan orang Belanda. Pada perkembangan selanjutnya, Belanda memonopoli perdagangan lada, bahkan

ingin menguasai wilayah kerajaan Banjar dengan Politik *divide et impera*.¹¹²

Pada tanggal 14 februari 1606 kapal dagang VOC Belanda datang di bawah pimpinan Gillis Michieszoom. Ia dikirim oleh J. W. Verschoor, penguasa VOC pada saat itu, untuk mengadakan relasi perdagangan. Setelah tiba di Banjarmasin anak buahnya melakukan perbuatan atau hal-hal yang menyinggu perasaan orang banjar, dan semua awak kapal yang naik kedarat di bunuh oleh orang banjar.¹¹³ Setelah kejadian tersebut, belanda segera mengirimkan armada perang menuju Banjarmasin. Dalam rangka pembalasan dendam dan memamerkan kekuatan (Show of Force) beberapa kapal belanda pada tahun 1612 tiba di pantai dan melakukan pembakaran kota, kapal-kapal yang berlabu di bandar dan keraton banjar yang tidak jauh dari sungai. Setelah peristiwa tersebut, rakyat banjar menjadi anti terhadap belanda. Akan tetapi belanda tetap melakukan campur tangan dalam beberapa urusan kerajaan baik ekonomi, social dan keagamaan. Pada tahun 1857 belanda menobatkan pangeran Tamjidillah sebagai sultan secara sepihak dengan mengabaikan surat wasiat sultan adam yang menghendaki pangeran Hidayatullah sebagai pengganti ayahnya Sultan Muda Abdurrahman¹¹⁴

W.A. van Rees dalam *De Bandjermasinsche Krijg* melukiskan sebagai berikut: *Volgens de adat, d.i. de aloede wettelijke instellingen, had de troonsopvolging in rechte lijn plaatst; niemand dan Hidayat kon dus tot troonsop in aanmerking komen. Tamjidillah*

hoewel voor Hidayat geboren, was een bastaard die nooit de sulthanwaardigheid kon bekleeden, zoolang er wettige afstammelingen waren. Behalve het onschendbare geboorterecht, scheen Hidayat door zijne natuurlijke hoedanigheid tot het bekleeden der hoogste waarddigheid geroepen. Aan een getrouwe neleving zijner godsdienstplichten, pnaarde hij een warme vederlandsliefde, groote hulpvaardigheid en midheid, waardoor hij zich ieders achting verwierf, ook die van Sultan Adam.¹¹⁵

Menurut adat yakni menurut norma-norma hukum yang umum dimana-mana pengganti raja berdasarkan garis keturunan yang lurus, tidak ada orang lain yang berhak dapat menjadi pengganti raja selain Hidayat. Tamjidillah walaupun anak yang lebih tua dari Hidayat, tetapi ia adalah darah campuran tidak tutus yang tidak akan mungkin memangku sebagai sultan selama masih ada turunan yang berhak menurut undang-undang. Selain dari hak turun temurun yang tidak dapat diganggu gugat, tampaknya Hidayat mendapat anugerah untuk menduduki kedudukan yang paling tinggi itu dari sifatnya yang wajar. Sejalan dengan kesetiaan taat bertakwa menjalankan ibadah agama, Hidayat adalah pencinta tanah air (patriot) yang bernyala-nyala, suka memberikan pertolongan dan seorang budiman, sehingga dihormati oleh tiap-tiap orang, juga oleh Sultan Adam.¹¹⁶ Pengangkatan Pangeran Tamjidillah menjadi Sultan menimbulkan kekecewaan dikalangan masyarakat dan para pembesar kerajaan. Sultan Tamjidillah

memiliki cacat dalam tingkah laku. Ia dikenal gemar bermabuk-mabukan dan berjudi, sehingga wajar apabila rakyat tidak menerimanya sebagai pemimpin. Kebencian rakyat kepada Sultan Tamjidillah dan terhadap pemerintah Belanda sangatlah besar, yang pada klimaksnya menimbulkan perang Banjar.¹¹⁷ Perang Banjar berlangsung antara tahun 1859 -1862. Konflik dengan Belanda sebenarnya sudah mulai sejak Belanda memperoleh hak monopoli dagang di Kesultanan Banjar. Dengan ikut campurnya Belanda dalam urusan kerajaan, kekalutan makin bertambah.

B. Sejarah Berdirinya Kerajaan Banjar

Dalam sejarah Banjar pada perkembangan Kerajaan Banjar secara garis besarnya ada tiga tahapan: Pertama, masa masuknya Islam, dimana Pangeran Samudera beserta seluruh kerabat Kraton dan penduduk Banjar menyatakan diri masuk Islam. Pangeran Samudera sendiri, setelah masuk Islam diberi nama Sultan Suriansyah, yang dinobatkan sebagai Sultan pertama Kerajaan Islam Banjar. Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 1526 M.¹¹⁸ Kedua, masa kejayaan wilayah Kerajaan Banjar meliputi seluruh daerah Kalimantan Selatan dan kota Waringin sampai ke pulau laut, terjadi sekitar abad ke-17 sampai akhir abad ke- 18. Ketiga, masa kemunduran yang terjadi pada abad ke-18 sampai abad ke-19.¹¹⁹ Sebelum Kerajaan Banjar mengalami masa kemunduran, Kerajaan Banjar berkembang sebagai negara merdeka dan kerajaan maritim utama sampai dengan akhir

abad ke-18.¹²⁰ Perekonomian Kalimantan Selatan mengalami kemajuan yang signifikan karena Banjarmasin dengan pelabuhan lautnya menjadi kota dagang tradisional, ini yang menjadi penyangga utama perekonomian Kerajaan Banjar.

Kalimantan Selatan memiliki perairan yang strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Perdagangan di Banjarmasin pada permulaan abad ke-17 dimonopoli golongan Tionghoa. Kuatnya penarikan lada dari mereka untuk perdagangan ke Tiongkok mengakibatkan penanaman lada di Banjarmasin mengalami kemajuan, dan lagi pada abad ke-17 dominasi politiknya berkembang ke Kalimantan Timur, kota Waringin di Kalimantan Tengah dan Sambas di Kalimantan Barat. Orientasi perdagangannya ditunjukkan ke Jawa Timur, Ujung Padang, Banten, Sumatera sampai dengan Aceh dan Siam.¹²¹ Perdagangan Banjar berkembang dengan sangat pesat setelah Bandar utama pantai Jawa Utara dikuasai Mataram dan banyak sekali pedagang Jawa yang pindah untuk bermukim ke Banjar. Dorongan utama datang dari ekspor Lada Banjar yang merubah perdagangan lokalnya menjadi perdagangan dunia, selain pedagang-pedagang Nusantara juga pedagang-pedagang Barat, seperti Belanda, Inggris, Perancis, Portugis datang dan memilih untuk bermukim di Banjar. Perdagangan dan segala macam monopolinya yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan tersebut, membawa kekayaan dan kekayaan-kekayaan baru, bahkan menimbulkan konsentrasi-konsentrasi kekuasaan yang baru.

Masuknya pengaruh-pengaruh asing dalam istana dipermudah akibat konflik-konflik kepentingan kelompok dalam istana ini dengan segala macam akibat yang ditimbulkannya,¹²² seperti yang terjadi pada abad ke-18 adanya pertentangan di kalangan para bangsawan mengenai kedudukan Sultan, yaitu antara Pangeran Nata dengan Pangeran Amir, untuk mempertahankan kedudukannya Pangeran Nata meminta bantuan kepada Belanda. Kesempatan baik ini tidak disia-siakan Belanda, dengan bantuan dari Belanda, akhirnya Pangeran Amir dapat ditangkap dan dibuang ke Ceylon. Akan tetapi Pangeran Nata sebagaimana disebutkan dalam perjanjian tanggal 13 Agustus 1787, harus menyerahkan sebagian wilayah kesultanan kepada Belanda seperti daerah Tanah Bumbu, Pegatan, Kutai, Bulongan, dan Kotawaringin. Sedangkan wilayah lain tetap dikuasai oleh Sultan tetapi sebagai wilayah pinjaman.¹²³ Abad ke-19 kedudukan Kerajaan Banjar semakin terdesak, tambang batu arang yang terdapat di tanah Kerajaan sangat diinginkan Belanda, untuk mendapatkan konsensi ini, agar seluruh tanah tambang tersebut bisa dikuasai Belanda, maka diangkatlah menjadi putera mahkota yang tidak disukai baik oleh rakyat, para ulama dan kaum bangsawan yaitu pangeran Tamjidillah.¹²⁴ Di kalangan rakyat sudah lama terpendam rasa tidak senang karena persoalan pajak dan kerja wajib yang memberatkan. Pajak yang semakin berat ini berhubungan dengan semakin kecilnya daerah kekuasaan kesultanan.

Penyempitan daerah Banjar dari waktu ke waktu berdasarkan perjanjian dengan Belanda, berpangkal pada adanya hasil tertentu di daerah kesultanan yang dapat diperdagangkan. Hasil tersebut yaitu lada, rotan, damar, emas, dan intan. Hasil-hasil inilah yang membuat orang asing seperti Belanda dan Inggris datang ke tempat ini. Rasa tidak senang dalam hal campurtangan Belanda dalam urusan intern dimulai tahun 1851, yaitu ketika Mangkubumi meninggal dunia. Timbul perbedaan pendapat mengenai penggantinya. Sultan Adam menginginkan Prabu Anom, ia adalah putranya yang ke-4, sebagai pengganti, sedangkan Belanda tidak menyetujui dan kemudian yang diangkat adalah Pangeran Tamjidillah selain karena Pangeran Tamjidillah, ia adalah putra dari kakak Prabu Anom, yaitu Raja Muda Abdurrakhman dengan Nyai Aminah, dan juga ia sangat menghina agama Islam. Pengangangkatan Pangeran Tamjidillah menjadi Sultan menimbulkan kekecewaan baik dikalangan bangsawan maupun dikalangan rakyat. Kekecewaan itu disebabkan Pangeran Tamjidillah adalah anak Sultan Muda, Pangeran Abdurrakhman dengan Nyai Aminah, turunan Cina. Ia amat dibenci baik oleh golongan kraton maupun rakyat. Kebiasaan mabuk menyebabkan ia dimusuhi oleh golongan agama. Sedangkan Pangeran Hidayat adalah seorang yang sebenarnya berhak atas tahta, karena sebelum ia lahir telah dijanjikan oleh Sultan Sulaiman dan Sultan Adam untuk naik tahta sesuai perjanjian antara Sultan berdua dengan

Mangkubumi Nata ayah Ratu Siti sebelum ibu Pangeran Hidayat kawin dengan Sultan Muda.

Menurut tradisi, hanya Sultan yang ibunya seorang turunan yang boleh naik tahta. Selain itu, Pangeran Hidayat mempunyai sifat yang baik, yaitu rendah hati, ramah tamah dan karena itu dia disenangi oleh rakyat dan yang terakhir adanya surat wasiat dari Sultan Adam bahwa dialah yang akan menggantikannya. Kekecewaan dikalangan rakyat di Batang Balangan memperoleh saluran setelah Penghulu Abdulgani dengan terang-terangan mengecam pengangkatan Pangeran Tamjidillah, suatu pengangkatan seseorang yang tidak berhak menjadi raja dipandang dari adat sebagai tanda kemerosotan Kerajaan. Mereka lebih menaruh simpati kepada Pangeran Hidayat. Sebaliknya Belanda memandang pengangkatan Pangeran Tamjidillah lah yang lebih menguntungkan bagi pihaknya. Kericuhan ini dijadikan Belanda untuk mencampuri urusan dalam Kerajaan Banjar. kemudian datanglah Kolonel Andresen, utusan pemerintah Belanda di Batavia, datang ke Banjarmasin untuk menyelidiki dari dekat apa sebab-sebab kericuhan. Andresen kemudian berkesimpulan bahwa Pangeran Tamjidillah yang tidak disenangi oleh rakyat adalah sumber dari kericuhan itu. Kemudian Sultan Tamjidillah diturunkan dari tahta dan kekuasaan Kerajaan Banjar diambil alih kekuasaan Kerajaan oleh pihak Belanda. Penentangan rakyat terhadap Sultan Tamjidillah kemudian beralih kepada pemerintah Belanda. Dalam situasi ini Pangeran Hidayat akhirnya condong

kepada rakyat untuk mengambil kembali kekuasaan Kerajaan Banjar. Politik inilah yang kemudian menyebabkan pecahnya perang Banjar dalam Kerajaan Banjar pada tahun 1859-1905 M.¹²⁵

C. Sebab Terjadinya Perang Banjar

1. Penyebab Perang banjar secara Umum

Rakyat tidak senang dengan merajalelanya Belanda yang mengusahakan perkebunan dan pertambangan di Kalimantan Selatan dan Belanda terlalu banyak campur tangan dalam urusan intern kesultanan. kemudian Belanda bermaksud menguasai daerah Kalimantan Selatan karena di daerah ini ditemukan pertambangan batubara, lebih tepatnya ditemukan batubara di kota Martapura. Belanda telah merencanakan untuk memindah ibukota kesultanan ke kota Negara, bekas ibu kota pada zaman Hindu.¹²⁶

2. Secara Khusus

Secara khusus Adapun yang menjadi sebab terjadinya perang banjar Rakyat tidak senang dengan merajalelanya Belanda yang mengusahakan perkebunan dan pertambangan di Kalimantan Selatan. Belanda terlalu banyak campur tangan dalam urusan intern kesultanan. Belanda bermaksud menguasai daerah Kalimantan Selatan karena di daerah ini ditemukan pertambangan batubara, lebih tepatnya ditemukan batubara di kota Martapura. Belanda telah merencanakan untuk memindah ibukota kesultanan ke kota Negara, bekas ibu kota

pada zaman Hindu. Selain itu penyebab perang Banjar karena Pangeran Hidayatullah yang seharusnya menjadi Sultan Banjar tidak disetujui oleh Belanda yang kemudian mengangkat Pengeran Tamjidillah sebagai sultan yang sebenarnya tidak berhak menjadi sultan. Kemudian setelah Belanda mencopot Tamjidillah dari kursi sultan, Belanda membubarkan Kesultanan Banjar. Dalam perang Banjar terdapat beberapa tokoh Banjar yang menjadi penglima melawan Belanda, salah satunya adalah Demang Lehman yang berasal dari Martapura. Ia merupakan Panakawan dari Pangeran Hidayatullah, oleh karena kesetiaan, kecakapan, dan jasa besarnya maka ia diangkat Pangeran Hidayatullah menjadi kepala Distrik di Riam Kanan.¹²⁷

Pada saat Perang Banjar meletus, Demang Lehman mendapat tugas dari Pangeran Antasari untuk memimpin perlawanan di daerah Martapura dan Tanah Laut bersama Kiai Langkang dan Penghulu Buyasin. Di mata Belanda, Demang Lehman termasuk pejuang Banjar yang sangat ditakuti dan berbahaya dalam menggerakkan kekuatan rakyat sebagai tangan kanan Pangeran Antasari dan Pengeran Hidayatullah. Pangeran Antasari merupakan pencetus Perang Banjar. Pengeran Antasari masih mempunyai ikatan darah dengan para raja-raja Banjar. Ia masih keturunan Sultan Tahmidillah yang memerintah Kerajaan Banjar pada tahun 1801-1825. Pangeran Antasari adalah tokoh perang Banjar yang memiliki kedudukan sebagai petinggi Panglima Pangeran Banjar. Pangeran Antasari memberikan

tugas kepada Demang Lehman untuk menjadi pemimpin perang di beberapa daerah. Demang Lehman beberapa kali berhasil mengalahkan Belanda dalam pertempuran.

Kepiawaian Demang Lehman dan pasukannya dalam menghadapi Belanda tidak dapat dianggap remeh. Belanda melakukan berbagai usaha untuk menangkap Demang Lehman, namun tetap gagal. Perlawanan Demang Lehman justru semakin kuat ketika dirinya menjadi orang yang paling dicari Belanda. Semangat dan dukungan rakyat terhadap dirinya mengalir terus-menerus. Setiap melakukan perlawanan di daerah-daerah, ia mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Demang Lehman menolak berunding dengan Belanda, damai bagi Demang Lehman berarti angkat kaki dari bumi Banjar. Sikap keras menjadi tekad Demang Lehman untuk mengusir penjajah Belanda, sampai titik darah penghabisan. Pada tanggal 06 Oktober 1861, ia dan pasukannya diminta Belanda datang ke Banjarmasin untuk berunding.¹²⁸ Belanda meminta supaya Demang Lehman mau tinggal di Banjarmasin, hal ini dilakukan Belanda untuk membuat Demang Lehman ikut bergabung dengan Belanda. Residen Belanda berusaha memikat Demang Lehman dengan janji memberi biaya tiap bulan kepada Demang Lehman apabila dapat membujuk Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari ke Banjarmasin. Belanda berjanji apabila Pangeran Hidayatullah kembali ke Banjarmasin akan membebaskan rakyat untuk tinggal dimana saja. Setelah Pangeran Hidayatullah ke Banjarmasin, Belanda mengingkari

janji. Pangeran Hidayatullah ternyata diasingkan Belanda ke Pulau Jawa, tepatnya Cianjur. Demang Lehman merasa kecewa dengan tipu muslihat Belanda dan berusaha mengatur kekuatan kembali di daerah Pangkal, Batulicin.¹²⁹ Akan tetapi, Belanda telah membuat rencana untuk melakukan penangkapan terhadapnya. Sehabis shalat subuh ia ditangkap dan pemerintah Belanda memutuskan hukuman gantung kepada Demang Lehman. Pada tanggal 27 Februari 1862 Demang Lehman dihukum gantung dan kepalanya dipenggal. Kepala Demang Lehman dibawa ke Belanda dan disimpan di Museum Leiden. Kerajaan Banjar adalah kelanjutan dari Negara Daha yang bercorak Hindu telah berdiri menjadi Kerajaan Islam Banjar pada tahun 1526 M di Banjarmasin. Wilayah Kerajaan Banjar adalah seluruh daerah Kalimantan Selatan dan Banjarmasin sebagai ibukota seluruh Kerajaan Banjar, yang sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat penyiaran agama Islam dan mata rantai baru menghadapi penetrasi dari negara luar di laut Jawa. Dan Sultan Suriansyah sebagai raja pertama Kerajaan Banjar sekaligus raja pertama yang memeluk agama Islam. Perlawanan rakyat Banjar terhadap Belanda mulai berkobar di daerah-daerah Kerajaan Banjar yang telah diambil alih kekuasaan oleh pihak Belanda. Perang ini berlangsung dari tahun 1859-1863 M. Kerajaan Banjar sendiri telah dihapuskan oleh pemerintahan Hindia-Belanda pada tanggal 11 Juni 1860 M. Sejak itu Kerajaan Banjar langsung diperintah oleh seorang residen Hindia Belanda. Tetapi

perlawanan rakyat tetap berlangsung meskipun terputus-putus dan berakhir pada tahun 1905 M dengan tewasnya Muhammad Seman dalam pertempuran itu. Berakhirnya perjuangan Muhammad Seman menandai berakhirnya rakyat Banjar untuk merebut kembali tanah Kerajaan Banjar.

Berakhirnya Perang Banjar mengakibatkan berbagai dampak bagi Kerajaan Banjar khususnya dalam bidang sosial-politik: Daerah Kalimantan Selatan dikuasai sepenuhnya oleh pemerintahan kolonial Belanda, dan dihapuskannya negara Kesultanan Banjar, kekuasaan beserta susunan ketatanegaraannya diambil alih oleh pemerintah Belanda, gugurnya para pejuang dan bangsawan telah menandai hilangnya harapan-harapan untuk mengembalikan kekuasaan Kerajaan Banjar, dan penghapusan tanah apanas. Dalam bidang pendidikan: sistem pendidikan tradisional masyarakat Banjar telah berubah menjadi sistem modern Belanda, dan didirikan sebuah sekolah khusus untuk anak-anak Eropa yaitu Europeesche Legere School (ELS). Dalam bidang sosial-ekonomi: dikuasainya tambang batubara dan perkebunan di daerah Kalimantan Selatan, bangsa Banjar yang sebelumnya adalah bangsa merdeka turun derajatnya menjadi bangsa jajahan dan hanya dikenal sebagai orang Banjar dari penduduk Hindia-Belanda, pedagang Banjar sebagai kelas menengah dengan perdagangan yang kuat kini kedudukannya merosot karena mereka adalah golongan yang diatur tata ekonominya oleh Belanda. Dalam bidang budaya: hilangnya kraton Banjar menyebabkan

berkurangnya perkembangan budaya asli (Kraton) dan kesenian klasiknya, budaya Banjar bertemu dengan budaya penguasa maka berlakulah hukum kekerasan, dan dengan cepat sekali merubah bentuk desa, kota, dan masyarakat tradisioL

BAB V

GERAKAN SOSIAL KEAGAMAAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia. Agama meliputi berbagai bidang kehidupan manusia seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Mengatur dari hal sederhana sampai pada hal yang kompleks. Agama menjadi filosofis hidup manusia dalam bertindak dalam kehidupannya. Agama yang mencakup berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat dapat menjadi dasar dalam suatu pergerakan yang muncul dalam masyarakat. Perubahan zaman yang semakin hari kian pesat dengan membawa berbagai dampak pada kehidupan yang mulai menjauh dari nilai-nilai agama memicu bermunculannya gerakan sosial dengan basis agama untuk melakukan pembaharuan. Fenomena kemunculan gerakan keagamaan yang ingin memisahkan diri dari agama-agama arus utama, menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi keberlangsungan agama itu sendiri. Bagi agama-agama arus utama kehadiran gerakan keagamaan justru menjadi ancaman bagi keberadaan mereka. Dari sini dapat dilihat bahwa eksistensi agama menjadi faktor penting kemunculan gerakan-gerakan keagamaan.¹³⁰ Gerakan-gerakan keagamaan seperti munculnya

aliran -aliran dan kelompok -kelompok keagamaan baru didalam kehidupan masyarakat memang bukan suatu hal yang baru secara umum dalam khasanah ilmu-ilmu agama dan secara khusus dalam studi tentang Gerakan-gerakan keagamaan.

Secara sosiologis gerakan keagamaan adalah bagian dari gerakan sosial. Artinya bahwa perilaku-perilaku kolektif keagamaan dapat dikelompokkan dan dianalisis dalam kerangka konseptual yang sama dengan semua perilaku social.¹³¹ sistem nilai-nilai baru dari suatu perilaku kolektif yang melahirkan sebuah gerakan sosial keagamaan. Sistem nilai yang dimaksud diantaranya adalah nilai-nilai, norma, ide, individu-individu, kegiatan-kegiatan dan organisasi yang terhubung satu dengan yang lain di dalam proses perilaku kolektif tersebut.¹³² Perilaku kolektif mendorong orang untuk melakukan tindakan sosial dalam bentuk aktifitas-aktifitas maupun dari berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan yang didasarkan pada nilai-nilai dan norma yang terkandung dari ajaran dan dogma dari agama tersebut. Smelser membagi dua tingkatan utama suatu gerakan sosial yaitu gerakan sosial yang berorientasi pada nilai dan gerakan sosial yang berorientasi pada norma.¹³³ Fenomena munculnya berbagai gerakan-gerakan yang berbasis agama bukan merupakan sesuatu yang baru secara umum dalam kehidupan sosial keagamaan Dalam kehidupan merupakan sesuatu yang menarik untuk dapat dikaji secara ilmiah.

Gerakan sosial keagamaan yang merupakan dinamika keagamaan masyarakat terorganisasi dalam rangka mencapai

tujuan kehidupan yang relevan dengan nilai-nilai agama Beragamnya agama dan aliran keagamaan dalam masyarakat menyebabkan beragam pula bentuk, strategi dan orientasi gerakan. Klaim kebenaran (truth claim) sangat menentukan dinamika gerakan sosial keagamaan. Gerakan sosial keagamaan bisa terjadi dalam konteks apa pun dalam masyarakat dan harus mampu berinovasi dan berkreasi dalam rangka adaptasi dengan situasi sosial masyarakat yang kompleks. Inovasi dan kreasi menjadikan sosial keagamaan bisa berlangsung dalam ruang sosial dan kelembagaan yang beragam.¹³⁴ penelitian syafi'i maarif berisi tentang analisis perjuangan umat Islam dalam berbagai organisasi sosial politik menuju kemerdekaan, sekalipun dalam penelitiannya tidak diuraikan secara detail, karena suasana heroik umat Islam masih dapat dikenang melalui berbagai tulisan sejarah, dan umat Islam telah terbukti melahirkan banyak gerakan nasional yang punya andil besar dalam meraih kemerdekaan. Dari sana dapat diketahui bahwa konsentrasi umat Islam belum mengarah ke pengembangan Intelektual.¹³⁵

B. Pengertian Agama

Agama adalah suatu ciri kehidupan sosial manusia yang universal dalam arti bahwa semua masyarakat mempunyai cara berfikir dan pola-pola perilaku yang memenuhi syarat untuk disebut agama. Yinger mengemukakan bahwa agama

merupakan suatu system kepercayaan dan praktik dimana suatu kelompok manusia berjuang menghadapi masalah-masalah akhir kehidupan manusia. Durkheim mengungkapkan bahwa karakteristik agama yang penting ialah bahwa agama diorientasikan kepada sesuatu yang dirumuskan oleh manusia sebagai suci atau sakti yakni objek referensi, yang dihargai dan malah dahsyat. Menurut Geertz agama merupakan sistem lambang yang berfungsi menegakan berbagai perasaan dan motivasi yang kuat, berjangkauan luas dan abadi pada manusia dengan merumuskan berbagai konsep mengenai keteraturan umum konsistensi dan dengan menyelubungi konsepsi-konsepsi ini dengan sejenis faktualitas sehingga perasaan-perasaan dan motifasi-motifasi itu secara unik tampak realistic. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Durkheim yang menekankan peribadatan kolektif meskipun membiarkan kemungkinan-kemungkinan lain tetap terbuka, definisi yang dikemukakanya berhasil menampilkan secara jelas berbagai kegiatan politik atau moral kedalam cakupan gejala keagamaan dimana peribadatan-peribadatan kolektif memainkan peranan penting dan para pelakunya. Konsep-konsep mereka mengenai keteraturan umum eksistensi menyebabkan perasaan dan motivasi mereka secara unik tampak realistik gerakan-gerakan nasionalis, komunis dan fasis dengan mudah dimasukan.

Nottingham berpendapat bahwa agama bukan suatu yang dipahami menurut definisi, melainkan melalui deskripsi (penggambaran), agama merupakan gejala yang begitu sering

terdapat dimana-mana dan agama berkaitan dengan usaha-usaha manusia untuk mengatur dalamnya makna dari keberadaan diri sendiri dan keberadaan alam semesta. Agama dapat membangkitkan kebahagiaan batin yang paling sempurna dan juga perasaan takut dan ngeri. Walaupun perhatian tertuju kepada adanya suatu dunia yang tak dapat dilihat (akhirat), namun agama melibatkan dirinya dalam masalah-masalah kehidupan sehari-hari di dunia. Dalam kajian sosiologis agama memiliki dua macam fungsi yaitu fungsi manifest dan fungsi laten, fungsi manifest adalah fungsi yang di sadari dan biasanya merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku ajaran agama sedangkan fungsi laten adalah fungsi yang tersembunyi dan kurang di sadari oleh pelaku ajaran agama. Terlepas dari fungsi agama tersebut yang jelas dalam setiap masyarakat dimanapun berada agama masih akan tetap memiliki fungsi tersendiri di dalam kehidupan masyarakat, agama sebagai panutan masyarakat terlihat masih berfungsi sebagai pedoman yang di jadikan sumber untuk mengatur norma-norma kehidupan antara lain:

1. Fungsi Penyelamat

Manusia selalu menginginkan dirinya untuk selamat dimanapun dia berada, keselamatan yang di berikan oleh agama adalah keselamatan yang meliputi dunia dan akhirat. Dalam mencapai keselamatan itu agama mengajarkan melalui

pengenalan kepada masalah sakral berupa keimanan kepada tuhan.

2. Fungsi Edukatif

Para penganut agama berpendapat bahwa ajaran agama yang mereka anut memberikan ajaran-ajaran yang harus dipatuhi. Ajaran agama secara yuridis berfungsi menyuruh dan melarang. Kedua unsur suruhan dan larangan ini mempunyai latar belakang mengarahkan bimbingan agar pribadi penganutnya menjadi baik dan terbiasa dengan yang baik menurut ajaran agama masing-masing.

3. Fungsi Social Control

Para penganut agama sesuai dengan agama yang dianutnya terikat batin kepada tuntunan ajaran tersebut, baik secara pribadi maupun cara kelompok. Ajaran agama oleh penganutnya dianggap sebagai norma, sehingga dalam hal ini agama dapat berfungsi sebagai pengawasan social secara individu maupun kelompok karena agama secara instansi merupakan norma bagi para pengikutnya dan agama secara dogmatis (ajaran) mempunyai fungsi kritis yang bersifat profetis (wahyu, kenabian).

4. Pemupuk Rasa Solidaritas Fungsi Sebagai

Para penganut agama yang sama secara psikologis akan merasa memiliki kesamaan dalam satu kesatuan iman dan kepercayaan. Rasa kesatuan ini akan membina rasa solidaritas

dalam kelompok maupun perorangan, bahkan kadang-kadang dapat membina rasa persaudaraan yang kokoh. Pada beberapa agama rasa persaudaraan itu bahkan dapat mengalahkan rasa kebangsaan. Agama dapat disimpulkan sebagai bentuk keyakinan manusia terhadap sesuatu yang bersifat adikodrati (supernatural) ternyata seakan menyertai manusia dalam ruang lingkup kehidupan yang luas. Agama memiliki nilai-nilai bagi kehidupan manusia sebagai orang per orang maupun dalam hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat. Selain itu agama juga memberi dampak bagi kehidupan sehari-hari. Dengan demikian secara psikologis agama dapat berfungsi motif intrinsic (dalam diri) dan motif ekstrinsik (luar diri). Motif yang didorong keyakinan agama dinilai memiliki kekuatan yang mengagumkan dan sulit ditandingi oleh keyakinan non agama, baik sulit didefinisikan secara tepat dan memuaskan.

C. Gerakan Sosial

Gerakan sosial atau social movement menurut Turner dan Killan (1972), secara formal gerakan sosial didefinisikan sebagai suatu kolektivitas yang melakukan kegiatan dengan kadar kesinambungan tertentu untuk menunjang atau menolak perubahan yang terjadi dalam masyarakat atau kelompok yang mencakup kolektivitas itu sendiri. Sedangkan Blumer (1974) menyatakan, sebuah gerakan sosial dapat dirumuskan sebagai sejumlah besar orang yang bertindak bersama atas nama sejumlah tujuan atau gagasan. Menurut Darmawan Triwibowo,

gerakan sosial diartikan sebagai bentuk aksi kolektif dengan orientasi konflikual yang jelas terhadap lawan sosial dan politik tertentu, dilakukan dalam konteks jejaring lintas kelembagaan yang erat oleh aktor-aktor yang diikat rasa solidaritas dan identitas kolektif yang kuat melebihi bentuk-bentuk ikatan dalam koalisi dan kampanye bersama Gerakan sosial dapat dibagi menjadi beberapa, diantaranya sebagai berikut:

1. *Old Social Movement*

Gerakan sosial yang memfokuskan pada isu-isu yang berkaitan dengan materi dan biasanya terkait dengan satu kelompok (misalnya, petani atau buruh).

2. *New Social Movement*

Gerakan sosial yang berkaitan dengan masalah ide atau nilai seperti gerakan feminisme atau lingkungan. Dengan demikian, bisa diidealkan bahwa gerakan sosial sesungguhnya berangkat dari kesadaran sekelompok orang atas kepentingannya. Menurut Mario Diani ada empat unsur utama gerakan sosial. Pertama, jaringan yang kuat tetapi interaksinya bersifat informal atau tidak terstruktur, dengan kata lain ada ikatan ide dan komitmen bersama. Kedua, ada sharing keyakinan dan solidaritas di antara mereka. Ketiga, ada aksi bersama dengan membawa isu yang bersifat konflikual. Ini berkaitan dengan penentangan atau desakan terhadap perubahan tertentu. Keempat Aksi tuntutan itu bersifat kontinyu. Ada bermacam jenis gerakan sosial. Meskipun semua

ini diklasifikasikan sebagai jenis gerakan yang berbeda jenis-jenis gerakan ini bisa tumpang tindih, dan sebuah gerakan tertentu mungkin mengandung elemen-elemen lebih dari satu jenis gerakan. Jenis-jenis gerakan diantaranya sebagai berikut :

a. Gerakan Protes

Gerakan protes adalah gerakan yang bertujuan mengubah atau menentang sejumlah kondisi sosial yang ada. Ini adalah jenis yang paling umum dari gerakan sosial di sebagian besar negara industri. Di Amerika Serikat, misalnya, gerakan ini diwakili oleh gerakan hak-hak sipil, gerakan feminis, dan gerakan perdamaian. Gerakan protes sendiri masih bisa diklasifikasikan menjadi dua, gerakan reformasi atau gerakan revolusioner. Sebagian besar gerakan protes adalah gerakan reformasi, karena tujuannya hanyalah untuk mencapai reformasi terbatas tertentu tidak untuk merombak ulang seluruh masyarakat. Gerakan reformasi merupakan upaya untuk memajukan masyarakat tanpa banyak mengubah struktur dasarnya. Gerakan ini misalnya, menuntut adanya kebijaksanaan baru di bidang lingkungan hidup, politik luar negeri, atau perlakuan terhadap kelompok etnis, ras, atau agama tertentu.

Sedangkan gerakan revolusioner adalah bertujuan merombak ulang seluruh masyarakat, dengan cara melenyapkan institusi-institusi lama dan mendirikan institusi yang baru. Gerakan revolusioner berkembang ketika sebuah

pemerintah berulang kali mengabaikan atau menolak keinginan sebagian besar warganegaraanya atau menggunakan apa yang oleh rakyat dipandang sebagai cara-cara ilegal untuk meredam perbedaan pendapat. Seringkali, gerakan revolusioner berkembang sesudah serangkaian gerakan reformasi yang terkait gagal mencapai tujuan yang diinginkan.

b. Gerakan Gerakan Regresif atau Resistensi

Gerakan Regresif ini adalah gerakan sosial yang bertujuan membalikkan perubahan sosial atau menentang sebuah gerakan protes. Misalnya, adalah gerakan antifeminis yang menentang perubahan dalam peran dan status perempuan. Contoh lain adalah gerakan moral, yang menentang tren ke arah kebebasan seksual yang lebih besar.

c. Gerakan Religius

Gerakan religius dapat dirumuskan sebagai gerakan sosial yang berkaitan dengan isu-isu spiritual atau hal-hal yang gaib (supernatural), yang menentang atau mengusulkan alternatif terhadap beberapa aspek dari agama atau tatanan kultural yang dominan.

d. Gerakan Komunal

Atau ada juga yang menyebut Gerakan Utopia. Gerakan komunal adalah gerakan sosial yang berusaha melakukan perubahan lewat contoh-contoh, dengan membangun sebuah masyarakat model di kalangan sebuah kelompok kecil. Mereka

tidak menantang masyarakat konvensional secara langsung, namun lebih berusaha membangun alternatif-alternatif terhadapnya. Ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Seperti: membangun rumah kolektif, yang secara populer dikenal sebagai komune (communes), di mana orang tinggal bersama, berbagi sumberdaya dan kerja secara merata, dan mendasarkan hidupnya pada prinsip kesamaan (equality).

e. Gerakan perpindahan

Orang yang kecewa mungkin saja melakukan perpindahan. Ketika banyak orang pindah ke suatu tempat pada waktu bersamaan, ini disebut gerakan perpindahan sosial (migratory social movement). Contohnya: migrasi orang Irlandia ke Amerika setelah terjadinya panen kentang, serta kembalinya orang Yahudi ke Israel, yang dikenal dengan istilah Gerakan Zionisme.

f. Gerakan ekspresif

Jika orang tak mampu pindah secara mudah dan mengubah keadaan secara mudah, mereka mungkin mengubah sikap. Melalui gerakan ekspresif, orang mengubah reaksi mereka terhadap realitas, bukannya berupaya mengubah realitas itu sendiri. Gerakan ekspresif dapat membantu orang untuk menerima kenyataan yang biasa muncul di kalangan orang tertindas. Meski demikian, cara ini juga mungkin menimbulkan perubahan tertentu. Banyak ragam gerakan ekspresif, mulai dari musik, busana, sampai bentuk yang serius,

semacam gerakan keagamaan dan aliran kepercayaan. Lagu-lagu protes pada tahun 1960-an dan awal 1970-an diperkirakan turut menunjang beberapa reformasi sosial di Amerika.

g. Kultus Personal

Kultus personal biasanya terjadi dalam kombinasi dengan jenis-jenis gerakan lain. Gerakan sosial jenis ini berpusat pada satu orang, biasanya adalah individu yang kharismatis, dan diperlakukan oleh anggota gerakan seperti dewa. Pemusatan pada individu ini berada dalam tingkatan yang sama seperti berpusat pada satu gagasan. Gerakan sosial adalah aktivitas atau tindakan sekelompok orang yang merupakan kelompok informal yang berbentuk organisasi, berjumlah besar atau individual yang secara spesifik berfokus pada isu-isu sosial atau politik dengan melaksanakan, menolak atau mengampanyekan perubahan sosial. Sebuah tindakan perlawanan dapat dikatakan sebagai gerakan sosial. Kemunculan agama-agama bisa jadi hasil dari sebuah gerakan sosial. Hemat penulis, agama pada hakikatnya adalah gerakan sosial, dalam konteks realitas sejarah dan realitas sosial. Terlepas agama sebagai wahyu Tuhan. Pun di samping memahami agama sebagai wahyu tuhan, tentu ketika wahyu tuhan ini turun ke bumi kepada Nabi dan masyarakat, maka di situ wahyu/agama sudah menjadi bagian dari aspek sosial masyarakat.

Berangkat dari itu, ketika agama sudah menjadi bagian dari aspek sosial, selanjutnya adalah bagaimana agama ini berperan dalam kehidupan masyarakat. Agama/wahyu, pada hakekatnya, selalu membawa serta prinsip-prinsip perubahan kepada arah yang lebih baik. Dalam perspektif mobilisasi sumber daya, kita akan menemukan bahwa agama berupaya melakukan perubahan dengan memobilisasi sumber daya di antaranya berupa; legitimasi (moral), pengetahuan umum dan tradisi (*culture*), skill, keahlian, pengalaman dan kepemimpinan (human/manusia), dan organisasi sosial. Akhir-akhir ini, agama sedang diuji dengan berbagai macam persoalan dan polemik, khususnya dalam bingkai organisasi sosial keagamaan yang di Indonesia sendiri tidak sedikit organisasi sosial keagamaan berkembang. Pada kesempatan kali ini penulis sendiri akan sedikit menelisik soal sejauh mana organisasi sosial ini berperan dan berkembang di dalam masyarakat beragama yang kompleks dengan perbedaan dalam menafsirkan wahyu Tuhan sebagai batu loncatan aktivitas sosial dalam masyarakat beragama.

Gerakan sosial, dalam banyak kasus, memiliki sumber daya yang bersifat moral yang berasal dari agama. Maka kemudian agama berperan sebagai pemberi legitimasi. Banyak gerakan-gerakan sosial keagamaan yang muncul dan berkembang memperoleh legitimasi dari agama. Yang selanjutnya oleh para pengusung gerakan sosial atau aktivis gerakan dijadikan rujukan atas teks-teks keagamaan sebagai legitimasi gerakan mereka. Gerakan sosial, khususnya sosial

keagamaan Islam, baik yang lahir sebelum kemerdekaan maupun pasca reformasi, semuanya memiliki kepedulian yang sama yaitu membangun masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban. Dalam memperjuangkan tujuan baik tersebut, tidak menutup kemungkinan gerakan-gerakan sosial ini tidak bisa steril dari aspek-aspek politik. Meskipun tidak dikaitkan langsung dengan aktivitas-aktivitas politik, karena gerakan sosial Islam bukanlah gerakan politik, pun agama yang dipahaminya bukan agama politik, akan tetapi peran-kiprahnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah memberikan warna politik, tanpa memperdebatkan modal dan kapasitas yang dimiliki untuk terlibat dalam proses politik nasional.

Sejarah mencatat, sejak kejatuhan Orde Baru gerakan-gerakan Islam muncul dengan berbagai tipologi dan model yang secara umum menampilkan pemahaman yang legal-formal. Pemahaman legal-formal seperti ini yang kemudian menampilkan Islam yang tekstual sebagaimana dituntunkan syari'at Islam; doktriner kecenderungan memahami dan mempraktikkan Islam secara mutlak dan kaku. Selanjutnya tidak menutup kemungkinan banyak bermunculan gerakan-gerakan Islam kaku, radikal dan bahkan golongan atau gerakan takfirisme-salafiyah yang banyak berafiliasi ke dalam organisasi sosial keagamaan maupun ke partai-partai politik. Sebab ketika mereka berafiliasi dengan organisasi sosial keagamaan maupun partai-partai politik, peluang mereka akan lebih besar dalam menstimulus kepentingan-kepentingan mereka: Islam legal-

formal atau yang lainnya. Ini yang kemudian disebut sebagai perubahan wajah organisasi sosial keagamaan yang lebih politis.

Sejauh ini jika kita perhatikan pola gerakan sosial agama yang banyak bermunculan dan berkembang di Indonesia ini akibat dari ketidakpuasan dan kesimpangsiuran terhadap negara, yang dinilai kurang bisa menangani dan menyelesaikan berbagai isu kenegaraan, mulai dari isu-isu korupsi, ketidakadilan, ekonomi, kemiskinan, ketimpangan sosial, bahkan juga isu-isu keagamaan. Dari hal-hal seperti ini, dengan legitimasi agama, mereka menawarkan solusi-solusi yang diajarkan oleh agama yang bersumber dari wahyu-wahyu tuhan, yang wujudnya berupa perda syari'ah dan lebih jelasnya sistem negara yang berdasarkan Islam. Dalam konteks ini Negara *Khilafah Islamiyah*. Oleh sebagian cendekiawan, pola-pola yang seperti ini disebut sebagai proses reproduksi gerakan Islam politik. Dapat kita perhatikan bahwa ini lebih bersifat kontestasi politik yang kemudian lahir seperti yang sudah penulis sebutkan di atas: gerakan *salafiyah*. Politik gerakan-gerakan ini yang kemudian hendak membangun imperium Islam dalam konteks politik modern. Sepintas ide-ide dan konsepnya dapat diterima dengan logika keyakinan dan histori sejarah yang dirujuk. Dalam pandangan kelompok ini, seluruh proyek modernitas dan globalisasi adalah sebuah jalan meju malapetaka kemanusiaan dan berpotensi menciptakan ketidakseimbangan dalam hidup. Perkembangan pemikiran Islam di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah

menunjukkan kekuatannya sebagai alternatif bagi pembelaan terhadap kepentingan Islam. Artinya Islam yang bersifat responsif dan antisipatif terhadap tuntutan perubahan tidak harus berwajah liberal dan atau sekular, melainkan pemikiran yang bersifat integratif (tidak anti sains) yang mampu memberikan solusi-solusi terbaik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita, yang heterogen dan sarat dengan kebudayaan, adat, suku, ras dan agama. Mengutip dari Hassan Hanafi, bahwa Islam adalah sistem keyakinan, sistem nilai yang berwujud pada budaya massa.

Islam membebaskan masyarakat untuk beraksi sesuai dengan pandangan dan motivasi mereka tentang dunia. Artinya, bagaimana kemudian budaya massa ini hadir sebagai ketenangan jiwa, spiritual dan ritual. Bukan kemudian menjadi budaya massa yang kaku dan berwajah mengerikan. Haidar Bagir dalam salah satu tulisannya menyatakan bahwa budaya adalah soal menjadi manusia. Manusia spiritual, manusia moral, manusia estetis dan manusia yang sadar dan berpikir.

Dari pernyataan beberapa tokoh di atas, bahwa wahyu Tuhan yang kemudian oleh sebagian kelompok, baik kelompok organisasi sosial keagamaan maupun partai politik harus dapat membawa wahyu/agama ini sebagai instrumen atau alat untuk *concern-concern* kemanusiaan dan aktivitas sosial-agama dan pembebasan terhadap isu-isu kemiskinan dan atau isu-isu ketidakadilan. Bukan malah menampilkan wajah yang kaku dan mengerikan dalam masyarakat beragama atau bahkan hanya

untuk kepentingan segelintir orang. Wahyu/Agama ini harus dapat dipahami dengan melihat kondisi zaman yang terus melaju setiap detiknya. Apa pun gerakannya dan apa pun latar belakangnya, semuanya harus dapat membangun iklim bernegara dan berbangsa yang harmonis dan berkemanusiaan. Bersama-sama membangun negara menuju arah yang lebih baik dengan tidak pongah terhadap agama maupun ilmu pengetahuan umum (sain). Dalam agama sendiri kita mengetahui tentang konsep *ishrof* (cukup/tidak berlebihan).





BAB VI

EMANSIPASI WANITA

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia tidak akan lepas dari kodrat, laki-laki dan perempuan memiliki kodrat yang berbeda, tetapi Kodrat perempuan sering dijadikan alasan untuk mereduksi berbagai peran perempuan di dalam keluarga maupun masyarakat, kaum laki-laki sering dianggap lebih dominan dalam memainkan berbagai peran, sementara perempuan memperoleh peran yang terbatas di sektor domestik. Kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat pun memandang bahwa perempuan sebagai makhluk yang lemah, emosional, halus dan pemalu sementara laki-laki makhluk yang kuat, rasional, kasar serta pemberani. Anehnya perbedaan-perbedaan ini kemudian diyakini sebagai kodrat, sudah tetap yang merupakan pemberian Tuhan. Barang siapa berusaha merubahnya dianggap menyalahi kodrat bahkan menentang ketetapan Tuhan. Secara teologis, perempuan dan laki-laki diciptakan Tuhan sederajat dengan mandat yang sama dengan laki-laki, meskipun fungsinya berbeda, sebagaimana ditulis dalam kitab Kejadian 1-2. Dengan demikian jelas bahwa tidak ada perbedaan derajat, tidak ada diskriminasi gender, karena

keduanya diciptakan menurut gambar Allah, atau menurut citra Ilahi. Menurut Institut Injil Indonesia, Tindakan diskriminasi terhadap kaum perempuan, secara teologis di hubungan dengan peristiwa di Taman Eden di mana dianggap Hawa-lah penyebab kejatuhan adam, suaminya dan dianggap penyebab dosa masuk menguasai seluruh umat manusia.¹³⁶ sikap diskriminasi terhadap perempuan. Perempuan mempunyai hak dan kewajiban menjalankan kehidupan yang di muliakan oleh agama islam. Oleh sebab itu untuk menghapus pendiskriminasi perempuan terdapat perjuangan kaum wanita dalam menegakkan keadilan untuk kaum perempuan. Gerakan ini disebut sebagai gerakan Emansipasi wanita dan juga gerakan yang bertujuan menyetarakan gender.¹³⁷

Selama lebih satu abad ini diskursus tentang emansipasi wanita, kesadaran nasional dan semangat kesetaraan gender dalam ruang lingkup perjalanan sejarah bangsa Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata begitu saja. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan wanita bagaimanapun memiliki peranan yang sangat penting di dalam usahanya turut serta membesarkan, membangun dan memajukan negeri ini. Dalam perjalanan sejarah Nasional Indonesia, membicarakan tentang emansipasi wanita, kesadaran nasional dan kesetaraan gender dalam hubungannya dengan kiprah atau peran kaum wanita Indonesia, bagi bangsa Indonesia, atau lebih khusus lagi bagi kaum wanita Indonesia ketiga hal tersebut dapat dipandang sebagai “ Tiga Tema Segitiga Emas” yang di

samping sangat penting untuk dikaji juga memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan di antara satu dengan yang lainnya.¹³⁸

Pertama, tentang emansipasi wanita. Kemunculan gerakan emansipasi wanita dalam kehidupan bangsa Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata, justru dengan kehadiran gerakan emansipasi wanita telah memberikan sebuah momentum kesadaran di kalangan kaum wanita untuk maju bersama kaum Adam mendobrak berbagai doktrin adat, tradisi dan budaya kolot yang di pandang sudah tidak kondusif. Dalam konteks ini, bahwa gerakan emansipasi wanita di Indonesia untuk yang pertama kali dalam taraf yang sederhana muncul pada awal abad XX melalui kepeloporan Kartini yang termanifestasi dalam bentuk perlunya pemberian pendidikan kepada kaum wanita yang sebelumnya hanya menjadi monopoli kaum laki laki-laki. Apa yang terjadi pada awal abad XX ini merupakan langkah revolusif, karena sebelumnya tidak ada perhatian terhadap keberadaan kaum wanita. Wanita hanya dipandang sebagai pelengkap di rumah dengan tugas mengurus anak dan melayani suami, tanpa diharuskan mendapat Pendidikan yang cukup yang akan membekali terhadap pendidikan anak-anaknya di masa depan.

Kedua, tentang hubungannya dengan kesadaran nasional di kalangan kaum wanita. Perlu diketahui bahwa sejak awal abad XX sampai dengan proklamasi kemerdekaan, pada periode ini dapat dikatakan sebagai periode kemunculan

pergerakan nasional di kalangan bangsa Indonesia. Seiring dengan berjalannya gerakan emansipasi di kalangan wanita Indonesia melalui pemberian pendidikan, ternyata kemunculan gerakan ini telah memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap keberadaan kaum wanita Indonesia. Pada periode ini keberadaan kaum wanita Indonesia selain mulai banyak yang telah mendapatkan pendidikan, di antara mereka mulai banyak yang berkiprah dalam kegiatan pergerakan kebangsaan dengan aktif memberikan kontribusi di dalam menanamkan kesadaran nasional akan pentingnya berbangsa dan bernegara dalam perjuangan mencita-citakan sebuah negara Indonesia yang merdeka, lepas dari penjajah. Di kalangan wanita Indonesia banyak yang memiliki kesadaran akan perlunya menanamkan wawasan kebangsaan terhadap anak didiknya tentang arti sebagai bangsa Indonesia. Pada periode ini telah mulai tampak keterlibatan para wanita Indonesia yang berpartisipasi dalam Lembaga pendidikan, organisasi sosial-politik dan religius dengan tujuan mencapai Indonesia Merdeka.

Ketiga, tentang kesetaraan gender. Sebenarnya diskursus tentang kesetaraan gender merupakan istilah yang mengemuka sebagai tuntutan dari fenomena setelah Indonesia merdeka. Walaupun semangat dari gerakan kesetaraan gender sebenarnya baru mengemuka akhir-akhir ini, namun sesuai dengan tuntutan yang berkembang di alam kemerdekaan di mana kegiatan pembangunan dalam mengisi kemerdekaan menuntut adanya keterlibatan semua pihak tanpa adanya

diferensiasi jenis kelamin maka munculnya partisipasi wanita yang menempati posisi dalam berbagai lini pembangunan sangat terbuka dan dapat dipandang sebagai sebuah kondisi sine qua non. Hal ini merupakan sebuah kewajaran dan dapat dipahami karena tanpa bermaksud mengurangi arti kodratnya sebagai wanita, kaum wanita pun memiliki potensi yang sama dengan kaum laki-laki. Dengan demikian wacana kesetaraan gender perlu mendapat apresiasi positif, terlebih keberadaan kaum wanita yang jumlahnya cukup signifikan.

Berdasarkan realitas tersebut tulisan ini bermaksud memaparkan tentang bagaimana dinamika perjalanan gerakan emansipasi wanita dalam kehidupan bangsa Indonesia serta hubungannya dengan kemunculan kesadaran nasional di kalangan mereka dan perlunya menanamkan semangat kesetaraan gender sebagai fenomena yang menjadi tuntutan aktual dewasa ini, dilihat dalam perspektif sejarah nasional Indonesia. Selama lebih dari satu abad ini, ketiga persoalan tersebut telah banyak mewarnai akan peran, dinamika dan keberadaan kaum wanita Indonesia.

B. Riwayat Hidup Kartini

R.A. Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 M / 28 Rabiul Akhir 1297 H di Mayong Jepara. Lahir dari pasangan Ario Sosroningrat dan Ibu Ngasirah¹³⁹ Dari keturunan Ayah, Kartini merupakan cucu Pangeran Ario Tjondronegoro, Bupati Demak. Dari keturunan Tjondronegoro nasab Kartini

bersambung dengan Raja-raja Jawa (Hamengku Buwono VI). Ibu kandung Kartini adalah putri dari pasangan Madirono dan Aminah.¹⁴⁰ Pada zaman kulturalisme, Madirono menjadi seorang guru ngaji di daerah Pelem Kerep, Mayong Jepara dan juga mempunyai profesi sebagai mandor pabrik gula milik pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan ibu tiri R.A. Kartini (R.A. Woerjan) masih keturunan raja Madura yang kental dengan dunia ke-Islaman.

Ayah R.A. Kartini (Ario Sosroningrat) mempunyai dua orang istri, hal itu dikarenakan untuk menjadi seorang Bupati ayah R.A. Kartini diwajibkan menikah dengan seorang bangsawan. Pada waktu menyandang jabatan sebagai Wedana ayah R.A. Kartini telah menikah dengan Ngasirah dari kalangan rakyat biasa yang masih berumur 14 tahun, namun pada akhirnya ayah R.A. Kartini harus menikah lagi dengan Raden Ayu Woerjan dan menggantikan kedudukan ayah kandung R.A. Woerjan (R.A.A. Tjitrowikromo) sebagai Bupati Jepara. Walaupun kedudukan Ngasirah sebagai istri yang sah dan resmi namun dalam kehidupan rumah tangga di Kabupaten Jepara, Ngasirah hanyalah sebagai selir.¹⁴¹

Ayah Kartini merupakan seorang Bupati yang beristri lebih dari satu, maka sudah maklum jika R.A. Kartini merupakan anak ke lima dari sepuluh bersaudara, yaitu terdiri dari sembilan saudara tiri dan satu saudara kandung.¹⁴² Saudara kandung R.A. Kartini bernama Dr. R.M. Sosrokartono, sedangkan saudara-saudara tirinya bernama R.M. Sosrorawito,

R.M. Sosromuljono, R.M. Sosroningrat, R.A. Tjokroadisosro, R.A. Soemantri (menjadi R.A. Sosrohadikusumo), R.A. Kartinah (menjadi Dirdjoprawiro), R.A. Kardinah (menjadi R.A. Reksonagoro) menjabat sebagai Bupati Tegal, R.A. Rukmini (menjadi R.A. Santoso) di Kudus dan Pangeran A. Sosrobusono yang menjadi Bupati di Ngawi. Perkembangan jiwa R.A. Kartini yaitu melalui beberapa tahap:

1. Masa Kecil

Pada masa kecil R.A. Kartini tidak hanya diasuh oleh ibu kandungnya Ngasirah dan diasuh juga oleh ibu tirinya Raden Ayu Woerjan, akan tetapi R.A. Kartini juga diasuh emban yang bernama Rami.¹⁴³ R.A. Kartini ipanggil “Nil” oleh ayahnya dikarenakan R.A. Kartini sangat lincah dan banyak akal.¹⁴⁴ R.A. Kartini juga tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat teliti terhadap berbagai adat kebiasaan yang ada pada masyarakat. Maka kasih sayang yang diberikan oleh R.M. Sosroningrat terhadap R.A. Kartini melebihi saudara-saudaranya yang lain.

Sama seperti anak-anak yang lain, R.A. Kartini juga mempunyai sebuah hobi. Dan tentu hobinya ini mempunyai beberapa batasan yang ketat dikarenakan beliau hidup di sekitar lingkungan Kadipaten dan Keningratan yang selalu terbayang-bayang oleh adat feodalisme, lebih lagi R.A. Kartini adalah seorang perempuan. Hobi R.A. Kartini yaitu meliputi melukis, mendengarkan musik (gamelan dan gending Jawa), mandi di pantai, dan membaca buku-buku sastra maupun non-

sastra.¹⁴⁵ Untuk hobi membaca R.A. Kartini sangat tekun dengan penuh pada saat dirinya dipingit. Karena itu, hanya buku yang menjadi sahabatnya yang dapat menghibur dan sebagai pintu dunia keilmuan untuk terus berjuang kepada rakyat. Selain itu pula R.A. Kartini senang membatik, berlayar dan sangat suka menaiki kapal, serta melihat pacuan kuda namun terkhususkan untuk perlombaan bendi wanita. Ditegaskan oleh Pramoedya bahwasanya R.A. Kartini sangat pandai membatik. R.A. Kartini sejak umur 12 tahun sudah mempelajari seni membatik dan saat itu pula beliau dipingit oleh seorang pribumi yang bernama Mbok Dullah. Dari pada hasil belajarnya beliau

R.A. Kartini kepada Mbok Dullah ini, R.A. Kartini pernah membuat beberapa studi, membuat beberapa catatan, menulis bermacam-macam dimensi dan seni membatik yang ada pada Kadipaten serta beberapa orang yang ada di dalam Kadipaten. Hasil dari studi R.A. Kartini ini dijadikan sebagai bahan untuk menulis karang tentang seni membatik. Karyanya ini dapat menarik perhatian Pemerintah Netherland pada saat ada pameran nasional untuk karya wanita. Maka dari itu, karya R.A. Kartini diberi judul “Handschrift Jepara”. Mendapatkan pendidikan adalah satu keinginan yang sangat kuat selain dari beberapa hobi beliau, dimana hal tersebut sangat bertolak belakang dengan peraturan ataupun adat kebiasaan yang ada pada zaman itu. Apalagi pada saat melihat kakak R.A. Kartini Sosrokartono yang mendapatkan kebebasan dalam mendapat pendidikan. Namun ayah R.A. Kartini akhirnya luluh juga untuk

mengabulkan permintaan R.A. Kartini karena melihat kegigihan seorang gadis kecil yang masih berumur enam tahun. Hati nurani dari ayah R.A. Kartini membenarkan samangat kuat R.A. Kartini untuk dapat memajukan bangsa, semangat yang muncuk dari darah dagingnya sendiri.¹⁴⁶Dengan tekad kuat dan jerih payah akhirnya R.A. Kartini dapat mengenyam bangku pendidikan dimana tempat belajar R.A. Kartini mendapatkan banyak teman dari anak-anak Belanda, dikarenakan memang hanya anak Belanda dan anak dari keturunan Bangsawan saja yang diperbolehkan mendapat pendidikan. Selain itu juga R.A. Kartini belajar membaca Al-Qur'an kepada seorang santri.¹⁴⁷

Pada waktu R.A. Kartini mendapat sebuah pertanyaan "Hendak kemana nanti setelah mendapat surat tamat belajar?" itulah yang menyalakan api semangat emansipasi dikarenakan R.A. Kartini tidak tahu

akan jawaban dari pertanyaan sahabatnya itu, namun apa daya pertanyaan itu uterus menerus menjalar di fikiran R.A. Kartini. Setibanya di rumah ditanyakanlah pertanyaan dari sahabatnya itu kepada ayahnya, tetapi dengan segera dijawab oleh saudara R.A. Kartini "Apalagi jika tidak menjadi Raden Ayu". Mendapatkan jawaban seperti itu membuat hati R.A. Kartini menjadi girang, namun sebenarnya R.A. Kartini belum mengetahui apa maksud dari gelar "Raden Ayu" tersebut. Dengan rasa ingin tahu, maka dicarilah apa yang dimaksud gelar "Raden Ayu" tersebut dan ternyata merupakan gelar dengan banyak tatanan dan aturan yang mengekang. Maka

tidaklah R.A. Kartini menyukai gelar “Raden Ayu” dan bersikukuh untuk tidak mau menikah.¹⁴⁸

Setelah menamatkan bangku pendidikan sekolah, pertanyaan tersebut terus menghantui pikiran R.A. Kartini. Tekad dari hati R.A. Kartini untuk selalu mendapatkan pendidikan yang seluas-luasnya walaupun beliau seorang wanita. Dicurahkanlah maksud tersebut kepada Sosroningrat tetapi meskipun pemikiran ayah dari R.A. Kartini yang luas apakah daya untuk menyalahi aturan dan adat kebiasaan yang telah turun temurun kalau anak perempuan tidaklah patut mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Dengan sangat berat hati sang ayah menolak permintaan dari R.A. Kartini sebagai pemangku adat yang terjadi di keluarga. R.A. Kartini tidak mampu menundukkan pandangan Sosroningrat terhadap adat kebiasaan dan aturan Negeri tentang perempuan.¹⁴⁹

2. Masa Muda

Pada saat R.A. Kartini berusia 12 tahun dimulai lah masa pingitan. Pada waktu itulah R.A. Kartini tidak menyia-nyiaikan yang ada di sekeliling segala sesuatuberlalu secara percuma. Dengan kebebasan yang dirampas dari kehidupan bocah yang bebas merdeka menjadi hukuman dengan banyaknya peraturan yang mengekang dan memaksa menjadi dewasa sebelum waktunya Selama waktu pingitan R.A. Kartini merasa sedih dan kesepian. Pada masa awal pingitan masih banyak teman-teman R.A. Kartini yang datang untuk berkunjung tetapi dengan

berjalannya waktu para teman R.A. Kartini telah pulang ke negeri asal. R.A. Kartini sangat beruntung dikarenakan selama masa pingitan beliau masih diperbolehkan membaca majalah atau pun buku-buku berbahasa Belanda serta saling surat-menyurat dengan teman-teman dari Eropa. Ayah dan juga saudara Sosrokartono sangat mendukung dengan seringnya memberikan buku-buku bacaan. Salah satu yang memberikan hiburan yaitu tetap bisa saling mengirim surat dengan Nyonya Oviensk Soer, pelindung maupun juga ibu bagi R.A. Kartini. Selang empat tahun setelah itu, tepatnya pada tahun 1896 R.A. Kartini kembali mendapat kebebasan, yaitu kebebasan yang tidak didapatkan seusai meninggalkan bangku pendidikan sekolah.¹⁵⁰ Dan akhirnya pada tahun 1899, Nyonya Ovink-Soer pindah ke Jombang untuk mengikuti tugas suami, dan ketika itu R.A. Kartini mulai saling kirim mengirim surat dengan Nona Estelle Zeehandelaar di negeri Belanda.¹⁵¹

3. Masa Dewasa

Semakin dewasa usia R.A. Kartini maka semakin pula kematangan pemikiran dan juga semakin luas pula bacaannya. Ayah R.A. Kartini selalu memberikan buku bacaan tidak hanya berupa buku-buku berbahasa Belanda namun juga buku-buku yang berbahasa Jerman dan Perancis. Sehingga memperluas pemikiran dan pandangan R.A. Kartini terhadap permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM), pandangan dunia atau pun keadilan bagi sesama. Bertambahnya usia R.A. Kartini maka bertambah

pula teman-teman dari berbagai Negara. Pada tahun 1902, R.A. Kartini berkenalan dengan Nyonya Nellie dan Tuan Van Kol yang sangat setuju akan keinginan R.A. Kartini melanjutkan studinya ke Negeri Belanda. Bertepatan pada tanggal 26 November 1902 van Kol mendapat sebuah janji dari Menteri jajahan, bahwasannya R.A. Kartini dan Rukmini mendapatkan beasiswa untuk meneruskan belajar ke Negeri Belanda. Akan tetapi pada tanggal 25 Januari 1903 Mr. Abendanon mendatangi Jepara untuk menasehati R.A. Kartini agar jangan sampai pergi ke Negara Belanda dikarenakan dapat merugikan cita-cita dan keinginan R.A. Kartini.¹⁵²

Awal mula R.A. Kartini bertemu dengan K.H. Sholeh Darat, pada saat R.A. Kartini beranjangsana ke tempat tinggal pamannya (Bupati Demak) pada saat itu pula sedang diadakannya pengajian bulanan yang dikhususkan kepada anggota keluarga, R.A. Kartini ikut menghadiri pengajian bebarengan dengan para Raden Ayu lainnya tetapi hanya bisa hadir dari balik tirai. K.H. Sholeh Darat memberikan ceramah tentang Tafsir Surat Al-Fatihah, R.A. Kartini menjadi terheran-heran sepanjang pengajian berlangsung sehingga tidak sempat memalingkan matanya dari tokoh K.H. Sholeh Darat dan telinganya mendengar setiap kata yang disampaikan oleh K.H. Sholeh Darat karena selama ini R.A. Kartini hanya bisa membaca Surat Al-Fatihah tanpa mengetahui makna dari tiap-tiap ayatnya. R.A. Kartini merasa mendapat pencerahan karena K.H. Sholeh Darat bisa menerjemahkan sekaligus menafsirkan Surat

Al-Fatihah secara detail sehingga masyarakat awam mudah memahaminya. Karena R.A. Kartini hanya belajar mengeja dan membaca tanpa dapat menyerap isi dari kandungan Al-Qur'an, karena itu pula R.A. Kartini menjadi berontak akan belum sempurnanya ajaran Agama Islam yang dipeluknya jika beliau belum mengetahui isi Al-Qur'an. Setelah mempelajari cara menerjemahkan Al-Qur'an, R.A. Kartini mendapatkan pencerahan kemudian muncul lah pemikiran tentang "Door Duisternis Tot Licht" yang diartikan "Habis Gelap Terbitlah Terang" pada salah satu ayat Al-Qur'an

Yang artinya :

"Allah pelindung orang-orang yang beriman : Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir. Pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka dari pada cahaya kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah penghuni neraka : mereka kekal di dalamnya".

Kemudian muncul lah gagasan R.A. Kartini tentang mendirikan sekolah khusus perempuan dan keinginan ini sangat didukung oleh ayah R.A. Kartini. Akan tetapi ketika keinginan itu hampir terwujud ayah R.A. Kartini sakit parah sehingga gagasan untuk mendirikan sekolah perempuan ditolak oleh para Bupati-bupati yang lain. Tetapi walaupun keinginan untuk mendirikan sekolah perempuan tidak disetujui, R.A. Kartini tetap mendirikan sekolah perempuan dengan usaha

sendiri dan dibantu oleh adik-adik R.A. Kartini. Namun kegigihan R.A. Kartini tidak hanya terhenti sampai di situ, R.A. Kartini mempunyai tekad untuk menjadi seorang dokter. Cita-cita tersebut disetujui oleh ibu R.A. Kartini dan disetujui pula oleh Sosroningrat sehingga memberi izin untuk melanjutkan belajar ke Betawi. Karena terhambat oleh biaya yang menjadi kendala cita-cita R.A. Kartini, akhirnya dilakukan pengajuan beasiswa kepada Pemerintah Belanda. Walau pada akhirnya beasiswa itu disetujui oleh Pemerintah Belanda, tetapi justru R.A. Kartini menolak dikarenakan tanggal pernikahannya sudah dekat. Tidak ada kata menyesal dalam hati R.A. Kartini kemudian diberikanlah beasiswa itu untuk orang yang lebih membutuhkan yaitu Salim atau lebih dikenal dengan Haji Agus Salim.¹⁵³

Tepat pada tanggal 8 November 1903, R.A. Kartini resmi menjadi istri dari Bupati Rembang. Pernikahan ini disetujui oleh R.A. Kartini karena calon suami R.M. Joyohadiningrat pernah belajar ke Negeri Belanda dan juga sangat mendukung cita-cita R.A. Kartini untuk mendirikan sekolah khusus perempuan. Maka dari pada itu didirikanlah sekolah perempuan di Rembang seperti yang pernah didirikan oleh R.A. Kartini di Jepara. Sekolah perempuan yang ada di Jepara dipasrahkan oleh R.A. Kartini kepada adik-adiknya. Kebahagiaannya R.A. Kartini semakin bertambah di saat R.A. Kartini mengandung. Dan bertepatan pada tanggal 13 September 1904 R.A. Kartini melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Susalit yang

kemudian diasuh oleh ibu R.A. Kartini, Ngasirah dan Bapak Mangunwikromo. Empat hari setelah melahirkan anak pertama dan terakhirnya tepat pada tanggal 17 September 1904 R.A. Kartini yang berusia 25 tahun R.A. Kartini meninggal dunia.

C. Pemikiran R.A. Kartini Terhadap Wanita dari Aspek Kesetaraan Gender.

Pada abad ke-19 di Indonesia gerakan kaum wanita fokus menuntut hak persamaan dalam bidang pendidikan, pada saat itu wanita terkekang oleh budaya setempat yang melarang kaum wanita menempuh pendidikan yang tinggi seperti halnya kaum laki-laki. Tugas dari perempuan adalah menurut pada suami dan hanya mengurus pekerjaan rumah tangga, wanita sebagai The

Second Sex bahkan terlihat pada ungkapan-ungkapan yang lebih mendahulukan kaum laki-laki. Pepatah “Suwargo Nunut Neroko Katut” yang artinya kebahagiaan atau penderitaan seorang istri hanya bergantung kepada sang suami seperti contoh di mana perempuan dianggap tidak ikut andil dalam kehidupan. Karena adanya suatu semangat kuat untuk mengadakan pembaharuan ke arah yang lebih baik dan menuju keadilan maka muncul lah suatu pergerakan dikarenakan juga tatanan masyarakat yang dianggap tumpang tindih.

Begitu juga gerakan perempuan, kalau ditelisik lebih jauh dari sisi sejarah gerakan perempuan di berbagai belahan dunia pada umumnya disebabkan oleh kondisi sosial politik di

Negara. Pada intinya gerakan perempuan dalam rangka untuk memperbaiki sistem pemerintah sekaligus norma masyarakat yang cukup mendukung terciptanya fenomena ketimpangan terhadap perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Kondisi kebudayaan dengan semangat yang terlihat dalam pepatah “Suwargo Nunut Neroko Katut” sangat dominan hingga akhir abad ke-19 sampai masuk abad ke-20. Sejarah mencatat bahwa hal itu harus berakhir dikarenakan adanya kebudayaan modern yang datang, seperti kilas balik dari para pemuda Jawa yang berpendidikan sudah tidak tahan dengan kondisi saat itu kemudian pemuda-pemuda Jawa tersebut mendirikan gerakan Budi Utomo lalu yang terjadi yaitu pemberontakan kebudayaan. Pemberontakan tersebut sangatlah penting terhadap sejarah di Indonesia, karena menjadi patokan kemunduran budaya Jawa dan sekaligus bangkitnya gerakan Nasionalisme. ketidakadilan sosial kepada perempuan merupakan ketidakadilan sosial yang paling tua di dalam sejarah manusia, masih sering terdengar cerita lama di dalam masyarakat yaitu perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki sehingga memberi gambaran buruk terhadap perempuan dan mengedepankan laki-laki.¹⁵⁴

R.A. Kartini merasa antara perempuan dan laki-laki selalu dibedakan mulai dari menerima pendidikan hingga perlakuan kesehariannya. Perasaan itu datang pada waktu R.A. Kartini berusia 13 tahun dan sedang menempuh masa pingitan, R.A. Kartini merasakan beberapa kejadian yang bertentangan dengan hati dan pikirannya. Tradisi kolot yang mewajibkan

perempuan-perempuan berdiam diri di rumah menunggu lamaran datang dan harus bersiap untuk dimadu (poligami). Mengutip dari buku Siti Soemandari Soeroto, salah satu ide-ide R.A. Kartini :

“Kaum wanita harus diberi pendidikan supaya dapat mengejar ketinggalannya. Tidak hanya di Sekolah Rendah, tetapi harus juga dapat meneruskannya ke Sekolah yang lebih tinggi, supaya sejajar dengan saudara-saudaranya yang laki-laki. Wanita yang terpelajar dapat bekerja sendiri mencari nafkah sendiri dan hidupnya tidak tergantung dari suaminya. Ia juga tidak dipaksa kawin dan dimadu. Anak laki-laki perlu juga diberi tambahan pendidikan moral supaya bersikap sopan santun terhadap wanita, dan tidak memandang wanita itu sebagai makhluk dari tingkat rendah”¹⁵⁵

Para kaum perempuan hanya menerima nasibnya begitu saja dengan pasrah tanpa melakukan perubahan karena kaum perempuan tidak pernah dididik untuk berusaha mencari kerja, maka daripada itu kaum perempuan tidak dapat berdiri sendiri dan terus bergantung pada suami. Sedangkan kaum laki-laki, diberi waktu untuk melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi. Yang pintar semakin pintar, yang bodoh tetaplah bodoh, dalam posisi seperti itu kaum laki-laki memandang rendah kaum perempuan.

D. Karya-karya Tulis R.A. Kartini

1. Karya-karya Tulis R.A. Kartini

buku Habis Gelap Terbitlah Terang ada kalimat fenomenal “Salah satu dari pada cita-cita yang hendak kusebarkan ialah: Hormatilah segala yang hidup, hak-haknya, perasaannya, baik tidak terpaksa baikpun karena terpaksa, haruslah juga segan menyakiti makhluk lain, sedikitpun jangan sampai menyakitinya. Segenap cita-citanya kita hendaklah menjaga sedapat-dapat yang kita usahakan, supaya semasa makhluk itu terhindar dari penderitaan, dan dengan jalan demikian menolong memperbagus hidupnya: dan lagi ada pula suatu kewajiban yang tinggi murni, yaitu "terima kasih" namanya“. Buku ini diterbitkan pertama kali oleh Commissie Voor de Volkslectuur yang kini bernama alai Pustaka berbahasa Melayu diberi judul “Habis Gelap Terbitlah Terang”, Surat-surat R.A. Kartini juga pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Sebelumnya pada tahun 1922 oleh Empat Saudara yang berjudul “Door Duisternis Tot Licht”, ada seorang sastrawan pendiri Pujangga Baru yaitu Armijn Pane yang menerjemahkan surat-surat R.A. Kartini ke dalam “Habis Gelap Terbitlah Terang”, beliau juga disebut sebagai Empat Saudara. Buku “Habis Gelap Terbitlah Terang” diterbitkan kembali pada tahun 1938 dalam format yang berbeda dengan beberapa buku terjemahan dari “Door Duisternis Tot Licht”, Kemudian buku ini dicetak sebanyak sebelas kali.

Terjemahan dalam bahasa Jawa dilakukan oleh Ki Satra Suganda berjudul “Mboekak Pepeteng” yang artinya Membuka Kegelapan, sementara pada terjemahan bahasa Sunda yang diterjemahkan oleh R. Satjadibrata diberi judul “Ti Noe Poek Ka Noe Tjaang” diterbitkan oleh Balai Pustaka tahun 1930. Surat-surat R.A. Kartini disajikan oleh Armijn Pane dalam format berbeda dengan buku-buku sebelumnya kemudian beliau membaginya dalam lima bab pembahasan yang dilakukan untuk menunjukkan adanya tahapan atau perubahan sikap dan pemikiran R.A. Kartini selama melakukan surat-menyurat. Armijn Pane memencutkan jumlah surat R.A. Kartini dalam buku versi baru itu yaitu hanya ada 87 surat R.A. Kartini di dalam buku “Habis Gelap Terbitlah Terang” dikarenakan surat yang ada di dalam buku “Door Duisternis Tot Licht” ada kemiripan pada beberapa surat, ada pula disebabkan untuk menjaga jalannya cerita agar menjadi seperti cerita roman. Walaupun R.A. Kartini telah mempublikasikan tulisan-tulisannya dalam majalah-majalah Belanda dan Hindia Belanda kemudian terkenal sampai ke Negara Belanda, namun setelah beliau wafat justru terkenal dikarenakan kumpulan surat R.A. Kartini dipublikasikan oleh Mr. J. H. Abendanon. Dalam buku ini tidak semua mempublikasikan Surat-surat R.A. Kartini secara utuh tetapi hanya “Bagian-bagian yang dirasanya penting dan dirasanya cocok buat diterbitkan oleh Kartini, yang disuruhnya salin.”¹⁵⁶

2. Surat-surat Kartini, Renungan Tentang Bangsaanya

Pada surat R.A. Kartini yang berbunyi "Saya ingin sekali berkenalan dengan seorang 'gadis modern', yang berani, yang mandiri, yang menarik hati saya sepenuhnya. Yang menempuh jalan hidupnya dengan langkah cepat, tegap, riang, dan gembira, penuh semangat dan keceriaan." "Gadis yang selalu bekerja tidak hanya untuk kebahagiaan dirinya saja, tetapi jugaberjuang untuk masyarakat luas, bekerja demi kebahagiaan banyak sesama manusia". Kalimat ini menggambarkan bahwa beliau gigih memperjuangkan cita-citanya. Surat-surat R.A. Kartini diterjemahkan pula oleh Sulastin Sutrisno, pada awalnya Sulastin sewaktu di Universitas Leiden, Belanda, beliau melanjutkan pendidikannya di bidang sastra pada tahun 1972 dan menerjemahkan "Door Duisternis Tot Licht" dari permintaan salah satu dosen di Leiden yang bertujuan untuk Sulastin dapat menguasai bahasa Belanda dengan cukup sempurna. pada tahun 1979 buku berisi hasil terjemahan Sulstin Sutrisno versi lengkap dari buku "Door Duisternis Tot Licht" diterbitkan dengan judul "Surat-surat Kartini, Renungan Tentang dan Untuk Bangsaanya". Menurut beliau judul tersebut terjemahan dari bahasa Belanda seharusnya yaitu "Surat-surat Kartini,

Renungan Tentang dan Untuk Bangsa Jawa". Yang dinilai oleh Sulastin walau pun tertulis Jawa, yang didambakan oleh R.A. Kartini sesungguhnya yaitu kemajuan seluruh Bangsa Indonesia. Buku yang diterjemahkan oleh Sulastin sebenarnya

ingin menyajikan secara lengkap dari surat-surat R. A. Kartini yang ada di dalam buku “Door Duisternis Tot Licht”. Selain itu, buku yang diterjemahkan dalam buku “Surat-surat Kartini, Renungan Tentang dan Untuk Bangsaanya” dipakai juga dalam buku “Kartini, Surat-surat kepada Ny RM Abedanon-Mandri dan Suaminya”.

3. Letters From Kartini, An Indonesian Feminist 1900-1904

Buku lain yang berisi tentang terjemahan surat-surat R.A. Kartini adalah “Letters From Kartini, An Indonesian Feminist 1900-1904” Diterjemahkan oleh Joost Cote yang tidak hanya menerjemahkan buku “Door Duisternis Tot Licht” versi milik Abendanon-Mandri tetapi menerjemahkan juga surat-surat R.A Kartini pada Nyonya Abendanon-Mandri hasil temuan terakhir. Di dalam buku terjemahan Joost Cote dapat ditemukan surat-surat yang tergolong sensitif dan tidak ada di dalam buku “Door Duisternis Tot Licht” Versi Abendanon. Seluruh pergulatan R.A. Kartini dan penghalangan pada diri R.A. Kartini sudah saatnya untuk diungkap, itulah yang dikatakan oleh Joost Cote. Pada buku “Letters From Kartini, An Indonesian Feminist 1900-1904” memuat surat-surat R.A. Kartini kepada Nyonya Rosa Manuela Abendanon-Mandri dan suaminya sebanyak 108 surat termasuk di dalamnya ada 46 surat

yang ditulis oleh Rukmini, Kartinah, Kardinah dan Soesmatrice kepada R.A. Kartini.

4. *Kartini Surat-Surat Kepada Ny. R.M. Abendanon-Mandri dan Suaminya.*

Pada buku ini R.A. Kartini dihadirkan sebagai seorang pejuang emansipasi yang sangat maju pemikirannya dibanding Perempuan-perempuan Jawa pada waktu itu. Di akhir tahun 1987 Sulastin Sutrisno menggambarkan mengenai sosok R.A. Kartini melalui buku “Kartini Surat-Surat Kepada Ny.R.M. Abendanon-Mandri dan Suaminya” karena gambaran sebelumnya lebih banyak ditulis dari surat-surat R.A. Kartini kepada Abendanon. Pada tanggal 27 Oktober 1902 dikutip bahwa R.A. Kartini menulis surat kepada Nyonya Abendanon bertuliskan kalau R.A. Kartini mulai pantangan memakan daging, bahkan sejak beberapa tahun sebelum surat itu datang, surat itu membuktikan bahwa R.A. Kartini merupakan seorang vegetarian. Di dalam kumpulan surat-surat R.A. Kartini itu selalu dipotong awal dan akhir, padahal pada bagian itu menunjukkan kemesraan R.A. Kartini kepada Abendanon.

5. *Buku Aku Mau ... Feminisme dan Nasionalisme. Surat-surat Kartini Kepada Stella Zeehandelaar 1899-1903.*

Dalam buku ini ada kalimat “Aku juga musuh formalitas. Apa peduliku soal peraturan-peraturan adat Jawa yang konyol itu saat berbincang denganmu dalam tulisanku ini” kalimat

tersebut merupakan penggalan surat R.A. Kartini di dalam buku ini. Mohamad Goenawan dalam pengantar buku ini sebagai surat-menyurat yang berada di antara media massa dan catatan harian. Dari bentuk surat-menyurat yang ada di tengah, Goenawan Mohamad menuju pemikiran utamanya yaitu R.A. Kartini merupakan seorang figur. "Aku Mau ..." yaitu moto R.A. Kartini merupakan penggalan ungkapan mewakili sosok yang selama ini tidak pernah dilihat dan dijadikan bahan perbincangan. R.A. Kartini mengulas tentang hal-hal Agama, budaya, sosial dan korupsi. Buku ini merupakan kumpulan surat-surat kepada Stella Zeehandelaar pada tahun 1899-1903 diterbitkan untuk memperingati wafatnya R.A. Kartini yang ke-100 tahun, di dalam buku ini berisi memperlihatkan wajah lain dari R.A. Kartini. Dr. Joost Cote mengumpulkan koleksi surat-surat R.A. Kartini kemudian diterjemahkan dan diberi judul "Aku Mau ... Femisnisme dan Nasionalisme. Surat-surat Kartiini kepada Zeehandelaar 1899-1903".





BAB VII

PERGERAKAN KEBANGSAAN DAN POLITIK KEMERDEKAAN

A. Latar Belakang Masalah

Awal abad 20 ditandai dengan perubahan yang sangat mendalam dari strata sosial dan konfigurasi politik pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Vlekke menyatakan sebab terpenting adalah dibukanya terusan Suez yang menjadikan hubungan antara Eropa dengan Asia timur menjadi lebih lancar. Secara langsung ini berdampak pada perubahan arah ekonomi, dan semangat penanaman modal bagi para pengusaha swasta Eropa di Indonesia.¹⁵⁷ Perjalanan Haji menjadi lebih mudah dan jumlah para jama'ah yang berangkat ke tanah suci yang semakin meningkat menjelang awal abad 20.¹⁵⁸ Arus perubahan ini, menjadi satu perubahan yang sangat mendalam pada sistem struktur sosial, dan susunan politik kolonial Belanda. Kebutuhan akan tenaga administrasi lokal, pertumbuhan perpindahan penduduk, terbentuknya serikat pekerja, serta perkembangan gairah keagamaan merupakan faktor-faktor yang mendukung pergerakan yang mengarah pada perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan politik.¹⁵⁹ Dari sebab kebijakan politik pemerintah Hindia Belanda, faktor

utama sebagaimana disebutkan oleh Ricklefs adalah kebijakan politik Etis Belanda yang diterapkan pada tahun 1901 yang sangat mengubah pola pergerakan dan kebangkitan pada rakyat Indonesia.¹⁶⁰ Prinsip-prinsip yang dijalankan pada kebijakan ini adalah penekanan pada pembangunan pendidikan, perpindahan penduduk dan pengairan, yang segera merubah wajah ekonomi dan sosial politik penduduk pribumi.¹⁶¹

Awal abad 20 merupakan awal timbulnya pergerakan-pergerakan yang sangat menentukan corak Indonesia pada masa yang akan datang, sebagaimana dicatat oleh Ricklefs. Mereka berawal dari kalangan priyayi yang telah mendapatkan pendidikan barat lebih dahulu, yang gencar mengobarkan semangat kebangkitan Indonesia melalui pendidikan modern. Organisasi yang pertama muncul adalah Budi Utomo pada Mei 1908 yang bergerak lebih utama dalam budaya dan pendidikan secara khusus bagi penduduk Jawa dan Madura. Pada bulan September 1912 partai yang betul-betul berhaluan politik yang bertujuan kemerdekaan dan nasionalisme berdiri, Indische Partij. Didirikan oleh DOWES DEKKER, dengan para pemimpinnya yang lain, Suwardi Suryaningrat, dan Cipto Mangunkusumo. Perkembangan politik etis dan menguatnya hubungan dengan berbagai pemikiran dunia Islam secara global, menguatnya kesadaran sebagai satu bangsa, satu tanah air serta menguatnya semangat kemerdekaan bagi komunitas Jawi (Melayu) karena persamaan agama, melahirkan para tokoh Islam yang dengan berbagai corak pandangan dan ideologi bisa membuat

gambaran bagaimana hubungan Islam dan politik di Indonesia pada masa itu.

Pengerakan Nasional merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut satu fase dalam sejarah Indonesia yakni masa perjuangan mencapai kemerdekaan pada kurun waktu 1908-1945. Mengapa 1908 dijadikan sebagai tahun awal?, alasannya karena pada masa inilah perjuangan yang dilakukan rakyat termasuk dalam kategori bervisi nasional. Artinya pergerakan yang dilakukan untuk menentang kaum penjajah sebelum tahun ini, masih bersifat kedaerahan atau sebatas masing-masing memperjuangkan kelompoknya masing-masing. Timbulnya kesadaran baru dengan cita-cita nasional disertai lahirnya organisasi modern sejak 1908, menandai lahirnya satu kebangkitan dengan semangat yang berbeda. Dengan demikian, masa awal perjuangan bangsa periode ini dikenal pula dengan sebutan kebangkitan nasional. Istilah pergerakan nasional lainnya juga digunakan untuk melukiskan proses perjuangan bangsa Indonesia dalam fase mempertahankan kemerdekaan (masa revolusi fisik). Pergerakan masa ini merupakan upaya untuk membendung hasrat kaum kolonial yang ingin menanamkan kembali kekuasaannya di Indonesia.

Istilah pergerakan identik dengan istilah movement dalam bahasa Inggris. Alasan mengapa disebut pergerakan nasional, karena orientasi perjuangan yang dilakukan melalui wadah organisasi modern menyangkut arah perbaikan hajat hidup bangsa Indonesia. pergerakan tersebut merupakan

refleksi rasa ketidakpuasan dan ketidaksetujuan terhadap keadaan masyarakat yang sangat memperhatikan ketika itu. Mencapai kemerdekaan bersama sebagai bangsa, merupakan cita-cita nasional dan usaha terorganisir ini adalah sebuah pergerakan nasional. Untuk memaknai lebih lanjut, menarik dikemukakan pandangan Henry A. Lansberger dan Yu.G. Alexandrov tentang empat dimensi penting dari sebuah gerakan, yakni: (1) tingkat adanya kesadaran bersama tentang nasib yang dialami, (2) tingkat di mana aksi itu bersifat kolektif, baik dalam lingkup orang yang terlibat maupun tingkat koordinasi dan organisasi aksi, (3) lingkup di mana aksi itu bersifat instrumental yang dirancang untuk mencapai sasaran di luar aksi itu sendiri, dan (4) tingkat di mana reaksi itu didasarkan secara eksklusif atas kerendahan status sosial, ekonomi, dan politik.

Kaitannya dengan pergerakan nasional, yakni kesadaran bersama tentang nasib merupakan se bentuk identifikasi diri atas sejumlah penderitaan yang diakibatkan oleh kaum kolonial yang pada gilirannya mencipta sikap anti-penjajah. Pada tingkat aksi kolektif berhubungan dengan perjuangan yang dilakukan secara terorganisir melalui organisasi modern. Kemudian sifat instrumental yakni menjadikan organisasi modern sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama yakni merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Begitu pula dengan tingkat reaksi berkaitan dengan kondisi memperhatikan yang dialami oleh rakyat di Nusantara selama bertahun-tahun. Arti

pergerakan nasional lebih lanjut, dapat dilihat pada uraian berikut ini:

Untuk menunjukkan sifat yang lebih aktif dan penuh menanggung risiko dalam perjuangan, maka banyak para pelaku sejarah menggunakan perkataan “pergerakan nasional” daripada “kebangkitan nasional”. Walaupun sebenarnya hal itu sama tujuannya. Bahkan apabila ditinjau dari awal perjuangan untuk mencapai cita-cita nasional, organisasi pergerakan nasional pada waktu itu menggunakan istilah “insulinde” (negeri yang cantik molek bangun dari tidurnya). Oleh karena itu, digunakan perkataan “kebangunan nasional”. Yang dimaksudkan dengan negeri cantik molek adalah Indonesia (Hindia Belanda waktu itu). Berhubung Indonesia masih dalam cengkraman penjajah, maka dikatakan masih tidur. Setelah ada organisasi pergerakan nasional, maka dikatakan “bangun dari tidurnya”. Jadi rakyatnya mulai berjuang untuk membebaskan diri dari penjajahan.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa ada tiga istilah yang melekat pada eksistensi perjuangan mencapai kemerdekaan di Indonesia tersebut, yakni pergerakan nasional, kebangkitan nasional, dan kebangunan nasional. Dua istilah terakhir cenderung berkonotasi penggambaran atas satu situasi awal atau hanya melukiskan sebuah momentum penting, sedangkan istilah pertama lebih bersifat dinamis serta menunjukkan suatu aksi. Istilah kebangkitan dan kebangunan, lebih tepat untuk menggambarkan pergerakan modern awal.

Dengan demikian, istilah pergerakan sepertinya lebih pas untuk melukiskan proses dan arah perjuangan bangsa dalam kurun 1908-1945 ini. Sartono Kartodirjo menggunakan istilah “Kebangunan Nasional”, tatkala melukiskan dimulainya fase baru dalam sejarah perjuangan bangsa yakni berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 di Batavia (Jakarta). Menurutnya, kelahiran organisasi ini didasarkan atas pengalaman-pengalaman masa lampau dengan model perlawanan bersifat lokal tidak efektif. Karena itu, dalam fase ini timbul kesadaran mendalam akan persatuan dengan menghimpun secara terorganisir segenap potensi perjuangan yang ada. Moedjanto menguraikan ciri perjuangan atau perlawanan dari rakyat terhadap kolonialisme dan imperialisme di Nusantara sebelum dan setelah 1900, sebagai berikut: (1) Sebelum 1900; perjuangan rakyat berciri perlawanan atau perjuangan bersifat kedaerahan atau lokal, menggantungkan pada tokoh kharismatik, dan belum ada tujuan yang jelas; (2) Setelah 1900; perjuangan rakyat berciri perjuangan bersifat nasional, diplomasi, dan perjuangan dengan organisasi modern.

B. Penyebab Munculnya Pergerakan Nasional

Pergerakan nasional yang mewujud sebagai buah protes atas sejumlah penindasan kaum kolonial pada rakyat di Nusantara selama bertahun-tahun, bukanlah peristiwa yang terjadi tiba-tiba dalam fase sesaat. Akan tetapi, melewati serangkaian proses mulai dari bentuknya yang relatif sederhana

(tradisional) dengan semangat kedaerahan, hingga pergerakan dalam kategori modern dengan rasa sebangsa sebagai energi penggerakannya. Dengan demikian, untuk menjelaskan penyebab timbulnya harus dihubungkan bersama sejumlah prakondisi baik penyebab langsung maupun tidak langsung. Dalam banyak literatur, penyebab langsung disebut faktor dalam negeri (internal), sedangkan penyebab tidak langsung dinamakan faktor luar negeri (eksternal). Beberapa faktor penyebab timbulnya pergerakan nasional yang bersumber dari dalam negeri (internal), antara lain digambarkan sebagai berikut:

4. Adanya tekanan dan penderitaan yang terus menerus, sehingga rakyat Indonesia harus bangkit melawan penjajah;
5. Adanya rasa senasib-sepenanggungan yang hidup dalam cengkraman penjajah, sehingga timbul semangat bersatu membentuk Negara;
6. Adanya rasa kesadaran nasional dan harga diri, menyebabkan kehendak untuk memiliki tanah air dan hak menentukan nasib sendiri.¹⁶²

Tekanan dan penderitaan terus menerus yang dimaksud merupakan akumulasi dari sejumlah tindakan kaum penjajah, mulai dari Bangsa Portugis, Belanda, Inggris, Perancis, dan Jepang. Belanda merupakan penjajah terlama menanamkan pengaruhnya di Nusantara, sehingga berbagai bentuk penindasan yang membuat rakyat menjadi miskin, menderita, dan tertinggal telah menjadi catatan hitam dalam sejarah

perjalanan bangsa Indonesia. Perlakuan sejenis yang dialami bersama itulah menimbulkan perasaan senasib dan akhirnya menjelma menjadi semangat untuk membentuk sebuah negara. Kesadaran akan pentingnya kebersatuan untuk mewujudkan impian bersama (membebaskan diri dari belenggu penjajah), pada gilirannya membentuk kesadaran nasional.

Mengenai pembentukan nation⁶ dapat dijelaskan dengan mengacu pada beberapa teori. Pertama, teori kebudayaan (cultuur) yang menyebut suatu bangsa atas dasar persamaan kebudayaan pada sekelompok manusia. Kedua, teori negara (staat) yang menentukan terbentuknya suatu Negara lebih dahulu adalah penduduk yang ada di dalamnya disebut bangsa. Ketiga, teori kemauan (wils) bersama dari kelompok manusia untuk hidup bersama dalam ikatan suatu bangsa, tanpa memandang perbedaan kebudayaan, suku, dan agama. Kemauan sebagai buah dari kesadaran subyektif rakyat untuk menentang penjajah dan membebaskan diri dari belenggu penderitaan, tereproduksi dari sentimen kelompok sederaah menjadi rasa sebangsa dan setanah air. Rasa ini mewujud dalam kerangka kepentingan (citacita) yang sama sebagai pihak yang menderita bersama di bawah tekanan hegemoni kaum kolonial selama betahun-tahun lamanya. Artinya, mereka berjuang bukan lagi berbasis solidaritas sesuku/seetnik, tetapi sebagai rasa sebangsa yang terjajah.

Merujuk pada teori keinginan (wils) yang dianggap sebagai motor penggerak timbulnya nasionalisme, maka

semangat kebangsaan sesungguhnya merupakan gejala psikologis yang disebut *psychological state of mind*. Dalam banyak hal nasionalisme di Indonesia seperti halnya negara-negara Asia Tenggara lainnya, mempunyai basis historis pada kolonialisme dan munculnya anti-kolonialisme sebagai imbangannya.⁸ Ignas Kleden menguraikan bahwa nasionalisme dalam konteks internasional, adalah kebangkitan negara-negara di dunia ketiga pada paroh pertama abad ke-20, baik untuk melepaskan diri dari penguasaan kolonial maupun untuk memiliki kedaulatan nasionalnya sendiri. Bahkan menu rutny, secara positif nasionalisme adalah semacam *national self assertion*, yakni pencarian bentuk program *national-building* melalui integrasi nasional; perumusan tujuan-tujuan nasional yang akan menggerakkan dan mengerahkan kehidupan politik nasional; dan penguasaan berbagai sumber daya nasional.¹⁶³

Pada tingkat nasional, nasionalisme dapat didefinisikan sebagai peralihan dari pandangan sosial yang ahistoris kepada sikap yang lebih historis. Kehidupan sosial-politik bukanlah sesuatu yang ada dengan sendirinya secara alamiah, melainkan sesuatu yang dibangun dengan keputusan dan tindakan sendiri. Bahkan pada tingkat ini pula nasionalisme dapat didefinisikan sebagai peralihan dari provinsialisme yang partikularistik kepada sikap dan kesadaran nasional yang lebih terbuka, dan terjadilah pergantian *closed society* oleh *open society*.¹⁰ Dalam konteks perubahan seperti inilah kesadaran nasional dan dinamika pergerakan nasional di Indonesia sejak kelahiran Budi

Utomo 1908 hingga menjelang masa proklamasi kemerdekaan akan menjadi inti kajian.

Satu hal yang tidak boleh diabaikan bahwa ketiga prakondisi atau faktor internal penyebab timbulnya gerakan nasional, tidak terkonstruksi secara tunggal. Akan tetapi merupakan bagian integral tak terceraiakan dari sejumlah kondisi lainnya. Maksudnya, sebab-sebab internal tersebut berproses secara regular, sedangkan sejumlah faktor eksternal merupakan momentum mewujudkan pergerakan nasional. Menurut Sudiyo, faktor luar negeri yang turut mempercepat proses timbulnya pergerakan nasional, antara lain:

7. 1. Adanya faham baru, yakni liberalisme dan human rights, akibat dari Perang Kemerdekaan Amerika (1774-1783) dan Revolusi Perancis (1789), yang sudah mulai dikenal oleh para elit intelektual.
8. 2. Diterapkannya pendidikan sistem Barat dalam pelaksanaan Politik Etis (1902), yang menimbulkan wawasan secara luas bagi pelajar Indonesia, walaupun jumlahnya sangat sedikit.
9. 3. Kemenangan Jepang terhadap Rusia tahun 1905, yang membangkitkan rasa percaya diri bagi rakyat Asia-Afrika dan bangkit melawan bangsa penjajah (bangsa berkulit putih).
10. 4. Gerakan Turki Muda (1896-1918), yang bertujuan menanamkan dan mengembangkan nasionalisme Turki,

sehingga terbentuk negara kebangsaan yang bulat, dengan ikatan satu negara, satu bangsa, satu bahasa, ialah Turki.

11. 5. Gerakan Pan-Islamisme, yang ditumbuhkan oleh Djamiluddin al-Afgani bertujuan mematahkan dan menenyapkan imperialisme Barat untuk membentuk persatuan semua umat Islam di bawah satu pemerintahan Islam pusat. Gerakan ini menimbulkan nasionalisme di Negara terjajah dan antiimperialis.
12. 6. Pergerakan nasional di Asia, seperti gerakan Nasionalisme di India, Tiongkok, dan Philipina.¹⁶⁴

Munculnya faham-faham baru berupa liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme pasca Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis, tidak terlepas dari terjalannya hubungan antara Eropa dengan Asia terutama sejak pembukaan terusan Suez. Di mana komunikasi lintas benua ini, menjadi media penyebaran isme-isme termasuk semangat nasionalisme di kalangan bangsabangsa Asia tak terkecuali Indonesia. Demikian pula penerapan sistem pendidikan Barat di Hindia Belanda menciptakan kaum terpelajar dan elit baru yang berpikiran modern serta kemenangan Jepang atas Rusia memicu lahirnya rasa percaya diri di kalangan kaum pribumi untuk berjuang menentang penjajah. Bahkan gerakan Turki Muda dan Gerakan Pan-Islamisme, memberi andil penting atas proses perwujudan semangat kebangsaan di kalangan kaum pribumi. Berbagai gerakan bervisi menjalin persatuan dan kesatuan sebagai satu

bangsa itulah yang menciptakan sikap anti-penjahaj dan pada gilirannya menjadikan organisasi-organisasi pergerakan dalam berbagai bentuknya sebagai alat untuk meraih kemerdekaan.

C. Politik Kemerdekaan

Kondisi politik dan ekonomi Indonesia pada awal masa kemerdekaan merupakan salah satu yang tersulit dalam sejarah berdirinya republik ini. Kekacauan internal pemerintahan Indonesia, inflasi, hingga agresi militer Belanda ke tanah air merupakan beberapa contoh pemicu masalah politik dan ekonomi pada masa tersebut. Kekalahan Jepang dari Sekutu dalam Perang Dunia II segera disikapi oleh sejumlah elite Indonesia dengan memproklamasikan kemerdekaan RI. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia saat itu segera dilaksanakan demi memanfaatkan situasi kekosongan kekuasaan di tanah air. Tepat pada hari Jumat, 17 Agustus 1945, pukul 10.00 WIB, Soekarno dan Mohammad Hatta berdiri bersama sejumlah orang di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta untuk membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maka, sejak saat itu lahirlah negara baru bernama Republik Indonesia. Proklamasi tersebut dilakukan hampir tanpa persiapan matang. Menurut M. Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 (2011), sebelum terdesak dalam Perang Dunia II, Jepang sejatinya telah merencanakan pemberian kemerdekaan Indonesia pada bulan November. Namun, pemberian kemerdekaan itu hanya untuk wilayah Jawa.

Keputusan tersebut didasarkan pada penilaian Dai Nippon kala itu, yang menyebut bahwa gerakan kemerdekaan Indonesia belum cukup siap mengatur wilayah bekas Hindia Belanda. Kekalahan Dai Nippon dalam Perang Dunia II membuat rencana tersebut otomatis batal. Pembacaan proklamasi 17 Agustus dilakukan tak lama setelah pernyataan resmi kekalahan Jepang pada 14 Agustus 1945. Pada tanggal tersebut, Soekarno dan Hatta baru saja tiba di Indonesia dari pertemuan dengan pemimpin militer Dai Nippon untuk Asia Tenggara, Marsekal Terauchi, di Dalat, Vietnam.

Soekarno-Hatta bertemu Marsekal Terauchi di Dalat guna membahas kemerdekaan Indonesia, dan hasilnya adalah Jepang menjanjikan wilayah bekas Hindia-Belanda, kecuali Malaya dan Kalimantan. Alasannya, dua wilayah terakhir dikuasai Inggris. Pada 16 Agustus, terjadi peristiwa Rengasdengklok. Kamis pagi hari tersebut Soekarno-Hatta tidak dapat ditemukan. Keduanya "diculik" oleh sejumlah pemuda militan. Kedua tokoh pemimpin pergerakan rakyat tersebut ternyata dibawa secara sepihak oleh pemimpin gerakan pemuda pada malam hari tanggal 15 Agustus ke Rengasdengklok. Dengan dalih menyelamatkan Soekarno-Hatta dari kemungkinan pemberontakan pasukan Heiho dan Peta, para pemuda itu sejatinya hendak mendesak "golongan tua" segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Aksi tersebut berhasil membuat Soekarno-Hatta bersedia memenuhi keinginan para pemuda yang meyakini Indonesia mampu

merdeka tanpa bantuan Jepang. Maka, pada Kamis malam, 16 Agustus 1945, dirumuskanlah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di rumah Laksamana Maeda.

1. *Kondisi Politik Indonesia pada Awal Kemerdekaan*

Proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945 yang dilaksanakan dengan mendadak membuat perubahan besar pada kondisi politik di Indonesia. Namun, perubahan itu tidak berjalan mulus. Kondisi politik Indonesia pascaproklamasi diwarnai dengan krisis, perang, serta kekacauan. Dalam Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, M. C. Ricklefs menyebut kekuatan-kekuatan politik di Indonesia pada masa awal kemerdekaan juga tidak sepenuhnya bersatu. Hal itu, tulis Ricklefs, ditandai dengan "Sistem perhubungan yang buruk, perpecahan-perpecahan internal, lemahnya kepemimpinan pusat, dan perbedaan kesukuan." Berikut ini gambaran umum kondisi politik Indonesia di masa awal kemerdekaan, dinukil dari buku Sejarah Indonesia Modern 1200-2004.¹⁶⁵

a. Sistem Perhubungan yang buruk

Proklamasi kemerdekaan yang dilangsungkan dengan mendadak memang berhasil memanfaatkan situasi kekosongan kekuasaan. Karena itu, teks proklamasi dapat dibacakan dalam situasi damai dan tertib pada 17 Agustus 1945. Namun, di sisi lain, mendadaknya proklamasi itu membuat informasi atas kemerdekaan Indonesia tidak tersebar secara luas dan merata di penjuru daerah Indonesia. Minimnya sarana persebaran

informasi yang dapat menjangkau secara luas membuat kabar kemerdekaan Indonesia tersebar di kota-kota besar Jawa saja pada 17 Agustus. Kesenjangan informasi ini menghambat proses pembentukan pemerintahan Republik Indonesia yang waktu itu masih lemah dan baru dibentuk.

b. Perbedaan Kesukuan

Meski Indonesia telah dinyatakan sebagai negara merdeka, tidak semua elemen masyarakat tanah air setuju. Sebagian pihak bahkan masih bersimpati pada Pemerintah Kolonial Belanda. Menurut Ricklefs, pada umumnya orang-orang itu merupakan bangsawan lokal yang pada masa penjajahan Belanda mendapat kekayaan dan kedudukan istimewa. Gerakan kemerdekaan yang menganut semangat nasionalisme yang egaliter dipandang miring oleh kelompok bangsawan yang kontra dengan kemerdekaan RI. Bagi mereka, kemerdekaan Indonesia berjalan secara radikal dan dengan cara yang tidak ningrat.

c. Lemahnya Kepemimpinan Pusat

Pemerintahan Republik Indonesia tidak lahir dengan stabilitas yang instan. Gerakan kemerdekaan Indonesia sebenarnya merupakan kumpulan dari berbagai golongan pemikiran yang tidak jarang saling berseberangan. Perbedaan tersebut semula membuat pembentukan pemerintahan Republik Indonesia tak berjalan lancar. Di tingkat pemerintah pusat (Jakarta), sistem pemerintahan pun kerap berganti. Misalnya,

dari sistem presidensial beralih ke parlementer, dan sebaliknya. Pertentangan di tingkat pimpinan pusat dan elite gerakan kemerdekaan Indonesia pada masa itu pun kerap terjadi. Salah satu dampak terberat adalah Peristiwa PKI Madiun 1948 yang melibatkan eks perdana menteri RI, Amir Sjarifuddin. Di tingkat desa, belum kuatnya kedudukan Pemerintah Republik Indonesia berdampak terjadinya aksi-aksi sepihak yang dilakukan oleh laskar-laskar militer "ilegal." Mereka yang terlibat sebagian merupakan eks anggota Heiho, Peta, atau para jagoan lokal.

Aksi-aksi kekerasan misalnya terjadi di Tegal, Brebes, dan Pemalang. Menurut Anton Lucas, dalam buku *Peristiwa Tiga Daerah* (1989), aksi kekerasan di 3 daerah itu melibatkan massa yang dendam pada penindasan saat penjajahan Belanda. Informasi kemerdekaan ditanggapi dengan melakukan kekerasan dan intimidasi ke orang Belanda dan pegawai pemerintahan yang dianggap korup. Masalahnya, aksi di Tegal, Brebes, dan Pemalang tersebut dilakukan secara sepihak, mengabaikan proses hukum, dan tanpa seizin pemerintah RI di Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia bahkan sampai harus menerjunkan pasukan militer untuk menangani aksi-aksi kekerasan di tiga daerah tersebut.

d. Perpecahan Internal dan Kedatangan Kembali Belanda

Gerakan kemerdekaan Indonesia sejatinya terdiri dari berbagai macam aliran ideologi yang tidak jarang saling

bertentangan. Menurut Ricklefs, gerakan kemerdekaan yang paling dominan terdiri dari tiga kekuatan politik yakni nasionalis, komunis, dan Islam. Ketiganya tak jarang menunjukkan ketidaksepatannya antara satu pemikiran dengan pemikiran yang lain. Hal tersebut juga terlihat pada masa-masa awal kemerdekaan Indonesia.

Saat konsolidasi nasional masih rapuh, dan pergolakan di internal gerakan kemerdekaan Indonesia belum tuntas, militer Belanda datang untuk merebut kembali kekuasaan di Indonesia. Dua kali agresi militer Belanda ke Indonesia pada 1947 dan 1948 benar-benar menambah runyam permasalahan politik maupun keamanan. Agresi militer Belanda 2 bahkan nyaris membikin negara Republik Indonesia bubar karena sebagian elite pemerintahan RI ditangkap, termasuk Soekarno-Hatta. Berkat keberhasilan strategi diplomasi dan perjuangan militer selama masa revolusi kemerdekaan, ambisi Belanda berkuasa lagi gagal total. Dukungan internasional bahkan mengalir ke Indonesia. Akhirnya, memasuki tahun 1950, situasi politik di Indonesia mulai beranjak stabil. Stabilitas politik dan pemerintahan mulai terbangun, terutama setelah Republik Indonesia Serikat resmi dibubarkan pada 17 Agustus 1950 dan digantikan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁶⁶





BAB VIII

SAREKAT DAGANG ISLAM

A. Latar Belakang Munculnya Sarekat Dagang Islam

Penjajahan mempunyai dua sisi, yaitu kesengsaraan pada pihak yang terjajah dan kemakmuran pada pihak yang menjajah. Kedua pihak tersebut berhadap-hadapan sebagai lawan. Pihak yang pertama berusaha ingin membebaskan diri dari penjajah ditandai dengan munculnya orang-orang yang usaha untuk melenyapkan penjajahan sedangkan pihak kedua berusaha untuk mempertahankan koloninya sebagai sumber devisa.¹⁶⁷ Pemerintah Hindia Belanda memasuki daerah Indonesia berlangsung mulai abad ke-17 sampai dengan abad ke-19. Perlakuan diskriminatif pada bangsa-bangsa India, Arab dan Cina terhadap pribumi juga berlangsung pada masa ini. Politik “rasionalisme” menyebabkan manusia digolong-golongkan menjadi beberapa golongan dan penduduk asli (Indonesia) ditempatkan sebagai ras terbawah dalam status sosial masyarakat.¹⁶⁸

Pemerintah Hindia Belanda semakin memperluas kekuasaannya Mencakup berbagai segi kehidupan baik politik, ekonomi dan sosial budaya. Dalam bidang politik, pemerintah Hindia Belanda ikut campur secara intensif dalam persoalan-

persoalan intern Indonesia seperti ikut menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan politik rakyat. Dalam bidang ekonomi pemerintah Belanda membuat suatu kebijakan “memberi kebebasan berdagang bagi orang-orang Cina”¹⁶⁹ Kedudukan Cina dalam struktur ekonomi pada waktu itu adalah sebagai pedagang perantara antara Belanda dan Pribumi dengan fasilitas istimewa, sehingga tidak mengherankan jika Cina berhasil menguasai hampir seluruh ekonomi rakyat, seperti memonopoli bahan-bahan batik. Posisi ini membuat Cina dirasuki kesombongan luar biasa. Kesombongan ini bertambah menjadi jadi setelah revolusi Cina.¹⁷⁰ Melihat keadaan tersebut akhirnya menimbulkan perlawanan melenyapkan penjajahan dari bumi Indonesia. Perlawanan-perlawanan itu sifatnya sporadis dan berakhir dengan kegagalan.

Muncul kesadaran di antara para pejuang Indonesia, bahwa dengan mengandalkan fisik belaka, kebebasan tidak mungkin dapat dicapai. Maka, muncullah perkumpulan-perkumpulan atau organisasi-organisasi untuk melawan penjajahan baik secara politik, ekonomi maupun sosial budaya. Salah satu perkumpulan tersebut adalah Sarekat Islam (SI) bermula dari Sarekat Dagang Islam (SDI). Sarekat Islam lahir tahun 1912 di Solo yang dipelopori oleh H. Samanhudi, bergerak di bidang sosial ekonomi rakyat, dan juga pada bidang politik. Sarekat Islam bertujuan untuk memajukan perdagangan, memberikan pertolongan kepada anggota-anggota yang kesusahan, baik jasmani maupun rohani, memajukan kehidupan

agama Islam, dan berjuang menuntut pemerintahan sendiri. Dalam perjuangannya, Sarekat Islam mendapat tempat di hati rakyat. Anggota Sarekat Islam telah meluas sampai ke pelosok tanah air, sehingga Sarekat Islam dinamakan organisasi massa rakyat yang pertama di Indonesia. Pergerakan Sarekat Islam lebih mementingkan rakyat banyak dari pada kepentingan golongan. Sarekat Islam dalam pergerakannya senantiasa menentang imperialisme dan kapitalisme dalam segala bentuk, karena itu Sarekat Islam berusaha mencegah timbulnya kapitalisme dan imperialisme. Untuk mempercepat tercapainya tujuan Indonesia merdeka, Sarekat Islam bergabung dengan partai-partai politik lainnya. Dengan kondisi yang demikian itu, Sarekat Islam turut ambil bagian dalam percaturan politik, ekonomi dan sosial budaya yang sangat besar di dalam pergerakan nasional Indonesia.¹⁷¹

Sistem kapitalis yang diterapkan pada masa penjajahan Pemerintah Kolonial Belanda membuat masyarakat Indonesia mengalami keterpurukan. Bahkan dalam bidang ekonomi, masyarakat mengalami kemunduran. Maka muncul perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang secara parsial dan mampu melemahkan perekonomian Pemerintah Kolonial Belanda. Seiring berjalannya Pemerintah Kolonial Belanda dalam menjajah Indonesia dengan sistemnya yang tidak berperikemanusiaan, akhirnya terjadi permasalahan di dalam sistem itu sendiri. Terjadi korupsi besar-besaran dilakukan oleh pejabat Pemerintah Kolonial Belanda.¹⁷²

Terbukanya wacana politik bagi rakyat pribumi pada awal penerapan politik etis, direalisasikan dengan keluarnya Desentralisatie Wetoeving atau Undang-undang Desentralisasi (1903). Hal ini memungkinkan terjadinya wewenang secara otonomi yang disertai pembentukan beberapa dewan daerah. Terlebih setelah Indonesia oleh pemerintah kolonial Belanda diakui sebagai *Eigen Rechpersoonlijkheid* (status badan hukum) pada tahun 1912. Karena memiliki status badan hukum sendiri, otomatis berhak mengatur urusan finansial, pendapatan dan pengeluarannya. Sejak Indonesia berada di tangan Belanda, maka berbagai pendatang dari negeri asing datang ke Indonesia. Kehadiran mereka mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Penjahah Belanda mempunyai tindakan politik untuk melindungi kepentingan ekonominya, jadi motif ekonomi di dalam situasi kolonial menjadi faktor dominan bagi penentuan hubungan sosial.¹⁷³

B. Sejarah berdirinya Sarekat Dagang Islam

Pada awal abad XX kita menyaksikan suatu perkembangan penting dalam perjalanan sejarah masyarakat Indonesia, ketika daerah perkotaan menggeser peranan komunitas pedesaan sebagai tempat berlangsungnya perubahan. Jika tuntutan akan lahan dan tenaga kerja dari kaum penjajah telah mengubah peranan masyarakat di abad XX, maka pertumbuhan usaha perdagangan dan industri di abad XX telah merangsang pembangunan di bidang kehidupan sosial di pusat-

pusat kegiatan tersebut. Di kota-kota, terjadi kebangkitan golongan borjuis pribumi. Kelas baru ini terdiri atas pengusaha dan cendekiawan kehidupan kota. Kaum bangsawan dan pangreh praja yang disebut golongan priyayi, tersisih. Hanya di kota-kota yang kuat sifat kejawennya, seperti di Surakarta dan Yogyakarta, kaum bangsawan tua masih menikmati kedudukan tinggi dalam pandangan masyarakat. Tapi hanya mereka yang siap memainkan peranan baru yang didiktekan oleh kelas menengah baru, bertahan dalam kedudukan itu, selebihnya yang tak siap, kehilangan pamor dan hilang dari peredaran. Akhirnya banyak ningrat yang bergabung dengan golongan menengah memprakarsai dan ikut berkecimpung dalam banyak usaha bersama yang tumbuh selama dasawarsa pertama dan kedua abad XX.

Kolonial Belanda beserta sistem eksploitasinya telah menimbulkan keresahan. Ketimpangan yang diraskan sangat menyinggung rasa harga diri pribumi. Pribumi tidak boleh memakai bahasa tinggi terhadap atasan, pribumi dilarang memakai pakaian modern (barat), pribumi diharuskan bersial di lantai.¹⁷⁴ Sikap diskriminatif yang dilaksanakan kolonial Belanda terhadap pribumi akhirnya menimbulkan pergolakan dalam masyarakat. Ketidakadilan yang diterima oleh Pribumi telah membangkitkan kesadaran yang akhirnya menimbulkan pergerakan nasional. Pergerakan nasional adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh rakyat untuk melepaskan diri dari penjajah. Salah satu pergerakan nasional itu adalah Sarekat Islam. Sarekat

Islam didirikan atas pertimbangan komersil ekonomis dengan azas nasionalisme yang sepenuhnya merupakan haluan politik Sarekat Islam. Guna memperoleh gambaran awal dirasa perlu mengemukakan kondisi perdagangan yang berkembang pada awal abad 20 yang mana keadaan social ekonomi masyarakat Indonesia memperlihatkan gambaran yang menyedihkan. Prinsip ekonomi liberal yang dijalankan mulai tahun 1870 dan berlangsung selama lebih kurang 20 tahun, telah memberikan keuntungan yang besar kepada para pengusaha swasta Belanda dan Eropa lainnya.¹⁷⁵

Sistem ekonomi liberal yang telah memberikan keuntungan kepada pengusaha-pengusaha swasta mengalami kehancuran. Hal ini disebabkan dalam tahun 1885 terjadi krisis ekonomi yang disebabkan menurunnya harga tanaman di pasaran dunia. Akibatnya pada awal abad 19 terjadi kebijakan baru dalam pengaturan ekonomi Hindia Belanda, yaitu liberal yang mengutamakan usaha swasta dan persaingan bebas akhirnya ditinggalkan dan diganti dengan tata ekonomi baru yang lebih bersifat terpimpin¹⁷⁶ Perubahan tata ekonomi tersebut tetap tidak membawa perbaikan terhadap sosial ekonomi penduduk Indonesia bahkan sebaliknya semakin merosot dan perusahaan pribumi semakin mundur, kepentingan pribumi baik materil maupun spiritual tidak diperhatikan pemerintah Belanda. Keadaan bertambah buruk ketika awal abad 20 panen gagal akhirnya menyebabkan paceklik. Kenyataan ini terlihat dari penurunan jumlah barang-barang import, seperti tekstil,

bahan makanan dan sebagainya. Dalam situasi ekonomi rakyat yang semakin merosot pada awal abad 20 orang-orang Cina telah dapat menguasai hampir seluruh ekonomi masyarakat Jawa.

Adapun beberapa hal yang mendorong keberhasilan orang-orang Cina tersebut yakni selain kebijakan yang diberikan pemerintah Hindia Belanda juga karena kelebihan orang-orang Cina tersebut sebelum bermigrasi ke Indonesia atau ke luar jangkauan daerahnya, orang-orang Cina kompak dan memiliki satu kerjasama secara gotong-royong dalam bidang ekonomi, serta kegiatan dagang mereka didasarkan kepada kelompok-kelompok kekerabatan juga bahasa¹⁷⁷

Dalam pemerintah Hindia Belanda perdagangan yang berskala besar ditangani oleh pemerintah Belanda sendiri, sedangkan yang berskala menengah ada di tangan para pedagang Cina. Mereka mendapat kepercayaan dari pemerintah Belanda untuk menangani segala kebutuhan pemerintah Hindia Belanda, karena itu perlu kiranya diadakan identifikasi unsur Cina yang terbukti telah sanggup merangsang kekuatan-kekuatan tersembunyi pada awal abad 20.¹⁷⁸

Politik pemerintah kolonial Belanda, khususnya bidang sosial budaya, yakni membuat klasifikasi status sosial di masyarakat yang membagi-bagi penduduk Indonesia menjadi beberapa golongan penduduk pribumi. Dari perkembangan kelas yang berlaku ini telah menunjukkan dengan jelas akan rendahnya kedudukan penduduk pribumi yang statusnya di

bawah Belanda maupun orang-orang asing timur. Kelas-kelas yang ada di atas Inlanders (pribumi) adalah merupakan kaum bangsawan yang harus dihormati, sedangkan rakyat Inlanders harus tunduk serta membungkuk-bungkuk sebagai realisasi penghormatan terhadap bangsawan tersebut. Adapun yang berhubungan dengan bidang keagamaan, Belanda berusaha untuk melemahkan kekuatan Islam disatu sisi, sementara disisi lain Belanda berusaha menjalankan usaha Zending (kristenisasi). Usaha-usaha ini adalah merupakan politik pemerintahan Belanda di bidang agama, karena Islam dipandang oleh Belanda sebagai suatu kekuatan dan momok bagi kelanggengan kekuasaan kolonialisme mereka di Indonesia. Melalui penyebaran pendidikan dan media massa, maka akibat langsung yang dihasilkan adalah munculnya kesadaran Nasionalisme, yang berdampak pada kesadaran baru sebagai masyarakat yang berada di tingkat nasional. Hal ini akhirnya direspon oleh organisasi Islam yaitu Sarekat Islam, sebagai motivasi untuk berkembang dalam kancah nasional untuk mewujudkan kemerdekaan.

Munculnya pergerakan perlawanan pada awal abad XX tidak lain berpangkal pada dibukanya kesempatan Bumiputera dalam memperoleh pendidikan. Elit-elit baru yang dilahirkan oleh kebijakan politik etis-lah yang kemudian memegang peranan penting dalam massa pergerakan. Terbentuknya organisasi pergerakan mulai Boedi Oetomo (BO), kemudian Sarekat Dagang Islam (SDI) merupakan salah satu imbas dari

kebijakan tersebut. Jika BO dapat menghasilkan suatu mekanisme koordinasi kekuatan antar primordial, maka dalam perkembangan massa pergerakan kekuatan seperti inilah yang diteruskan menjadi pergerakan bernuansa politik.

Sarekat Dagang Islam sangat mudah diterima oleh masyarakat pedesaan dan mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan menggunakan ideologi Islam yang dibawanya. Pada perkembangannya, Sarekat Dagang Islam sebagai organisasi yang memilih basis massa mayoritas dari masyarakat mampu mengangkat masalah-masalah tentang kegelisahan masyarakat atas berbagai kebijakan pemerintah kolonial. Orang pribumi menganggap Sarekat Dagang Islam sebagai alat bela diri terhadap kekuasaan kolonial yang terlihat monolitik dan tidak sanggup mereka hadapi sendiri. Oleh karena itulah Sarekat Dagang Islam dalam perkembangannya nampak sebagai lambang solidaritas kelompok yang dipersatukan dan didorong oleh perasaan tidak suka kepada orang Cina, bangsawan, pejabat, mereka yang tidak menjadi anggota Sarekat dagang Islam, dan khususnya pada Belanda. Kondisi politik yang terintervensi keberadaan pemerintah kolonial dengan kegiatan eksploitasinya juga menjadi latar belakang terjadinya sentimen masyarakat kepada golongan pemerintah kolonial.

Lahirnya Sarekat Dagang Islam berawal dari persaingan dagang antara penduduk pribumi dengan penduduk Cina (Tionghoa) peranakan. Kemajuan yang sangat pesat dapat di

capai oleh orang-orang Cina dalam hal perdagangan kain dan sikap superioritas orang-orang Cina terhadap kalangan pribumi, sehubungan dengan revolusi Sun Yat Sen tahun 1911 yang menimbulkan perasaan tinggi hati mereka, dan tak lupa, keahlian mereka dalam memonopoli harga kain batik, semakin menambah kejengkelan para pedagang pribumi, sehingga merasa sangat dirugikan sekali dengan adanya peristiwa tersebut. Keberhasilan kalangan Cina dalam menguasai dunia perdagangan, yang selanjutnya mendapat dukungan dari Belanda dalam melancarkan usaha-usaha mereka sehingga mereka dapat mendirikan perkumpulan Tionghoa Hwee Koan pada tahun 1900 di Jakarta yang bergerak dibidang pendidikan serta membentuk kamar-kamar dagang dikota-kota besar di Indonesia. Aktifitas mereka menjadi semakin meningkat setelah adanya gerakan pembebasan yang terjadi di Cina pada tahun 1901.³ Keberhasilan tersebut telah menjadikan sikap angkuh penduduk Cina dengan memandang rendah terhadap kedudukan rakyat Indonesia. Kenyataan ini kemudian mendorong didirikannya Sarekat Dagang Islam. Sarekat Dagang Islam adalah organisasi yang didirikan di Solo oleh seorang saudagar batik dari desa Laweyan, kabupaten Solo yang bernama H. Samanhoedi, pada tahun 1911 dengan nama awal Sarekat Dagang Islam. Laweyan adalah salah satu pusat terpenting kerajinan batik Indonesia, suatu industri yang dalam abad kesembilan belas berhasil menyaingi kerajinan tekstil Eropa. Suatu sebab penting keberhasilan ini adalah

ditemukannya metode cap, dengan metode ini dapat tercapai banyak sekali peningkatan hasil produksi. Selain itu, berdasarkan selera, rakyat Indonesia tetap lebih menyukai batik pribumi daripada hasil-hasil tiruan dari Eropa.⁴ Setelah menggunakan metode cap terjadi pula perubahan dalam sifat perusahaan batik. Sebelumnya, usaha ini merupakan kerajinan rumah dengan para usahawan yang memberikan bahan baku kepada produsen yang bekerja di rumah dan menerima hasil akhir dengan pembayaran upah untuk setiap potong batik. Sesudah dipergunakan cara baru, orang beralih kepada pemusatan proses produksi di tempat-tempat kerja dekat rumah si pengusaha, sedangkan tenaga-tenaga pekerja wanita digantikan oleh lakilaki. Hanyalah jenis batik yang mahal-mahal tetap dilukis dengan tangan dan pekerjaan ini tetap dilakukan oleh pekerja-pekerja wanita.

Sarekat Dagang Islam merupakan gagasan dari R.M. Tirtoadisoerjo, pelopor lahirnya perkumpulan pedagang Sarekat Dagang Islamiyah yang berdiri sekitar tahun 1909 di Bogor, dengan cara ini telah diusahakannya mempraktekkan pendapatnya bahwa rakyat Indonesia pun harus beremansipasi dalam segi ekonomi. Sebenarnya mengenai kapan berdirinya Sarekat Dagang Islam ini masih terjadi interpretasi yang berbeda-beda. Pada mulanya dalam tahun 1909 atas usaha Raden Mas Tirtoadisoerjo, di Bogor didirikan sebuah perkumpulan bernama Sarekat Dagang Islamiyah (SDI).⁷ Ketika pembentukan Sarekat Dagang Islam Solo, Raden Mas

Tirtoadisoerjo memainkan peranan penting. Tirtoadisoerjo adalah pemimpin redaksi harian Medan Prijaji yang berbahasa melayu, sebuah harian yang agak kritis sikapnya terhadap pemerintah HindiaBelanda. Di samping itu, ia aktif pula sebagai pengusaha.

Dapat dimungkinkan dalam salah satu upayanya menjual saham usaha barunya kepada para pengusaha Indonesia yang mampu, Tirtoadisoerjo pun berkenalan dengan H. Samanhoedi. H. Samanhoedi memintanya agar menjadi pemimpin redaksi harian Sarotomo yang segera akan diterbitkan oleh perkumpulan baru itu di Semarang. Tirtoadisoerjo menyetujui hal ini. Barangkali sempat pula ia memberi nasihat-nasihat cara menangani perkumpulan Samanhoedi yang baru, mungkin dengan menggunakan cara ini ia mengharapkan dapat memperoleh modal baru untuk usahanya sendiri di Bogor, yang pada awal 1911 berada dalam keadaan pailit. Nama Sarekat Dagang Islam mungkin sekali diambil oleh Samanhoedi dari nama usaha dagang Tirtoadisoerjo. Kerja sama antara Samanhoedi dan Tirtoadisoerjo hanya berlaku singkat. Baru dalam nomor keempat Sarotomo, diumumkan bahwa Tirtoadisoerjo berhalangan bertindak sebagai pemimpin redaksi, tidak diberikan alasan khusus untuk ini. Menurut beberapa orang, berakhirnya kerjasama dengan Tirtoadisoerjo adalah karena Tirtoadisoerjo menipu pengurus Sarekat Dagang Islam.

Adapun Sarekat Dagang Islam didirikan dengan tujuan sebagai berikut:

33. Mengutamakan sosial ekonomi.
34. Mempersatukan pedagang-pedagang batik.
35. Mempertinggi derajat bumiputera.
36. Memajukan sekolah-sekolah Islam.

Adapun yang menjadi dasar dalam perkumpulan Sarekat Dagang Islam adalah sebagai berikut:

37. Dasar agama, yaitu agama Islam.
38. Dasar ekonomi.

Sebab musabab yang sebenarnya mengenai berdirinya Sarekat Dagang Islam mungkin selalu akan tetap sedikit misterius. Inti persoalannya terletak dalam hubungan antara orang Jawa dan Cina. De Kat Angelino menulis, hampir dua dasawarsa sesudah berdirinya Sarekat Dagang Islam, bahwa bertentangan kontras dengan daerah lain di Jawa Tengah, hubungan antara majikan Cina dan pekerja Jawa dalam perusahaan batik di Surakarta (dan Yogyakarta) pada umumnya baik sekali. Orang keturunan Cina di Vorstenlanden terkenal "alus" (halus). Mereka tak pelak lagi menerima banyak unsur Jawa, barangkali disebabkan oleh darah Jawa yang mengalir dalam tubuh mereka.

Walaupun asal mula pendirian Sarekat Dagang Islam masih agak kurang jelas, alasan-alasan utama rupanya ekonomis dan etnosentris, dan faktor terakhir inilah yang jauh lebih penting. Beberapa pakar berpendapat bahwa gerakan ini berpangkal pada saingan berat antara majikan Indonesia dan Cina di bidang perusahaan batik. J.S Furnivall, umpamanya, menulis bahwa pada tahun 1892 penggantian kain pribumi dengan bahan impor yang dibeli oleh pengrajin batik melalui perantara Tionghoa, mengakibatkan pemegang kekuasaan dalam perdagangan ini beralih ke tangan Cina. Akhirnya, pada tahun 1911, untuk melawan praktek curang dari pengusaha Cina maka pedagang batik Jawa di Surakarta membentuk Sarekat Dagang Islam. Robert Van Niel pun memberi tekanan kepada faktor ekonomi, tetapi ia juga mencatat pentingnya faktor-faktor lain. Ia menulis sebagai berikut:

“Industri batik pada waktu ini (kira-kira 1910) merupakan perusahaan rumah tangga dan sanggar kecil-kecilan. Pedagang besar dan perantara (orang arab, Sumatra, dan beberapa orang Jawa) menyalurkan kain, bahan celupan warna, dan lilinnya, dan pada waktu tertentu mengumpulkan dan memasarkan hasil yang sudah selesai. Kain katun yang halus yang dikenal sebagai kain batik yang dipakai yang dipakai sebagai dasar untuk seluruh proses membatik disediakan oleh pabrik Eropa yang telah menggeser tenunan pribumi pada abad yang lampau. Kain batik ini tiba ketangan pedagang kecil melalui perantara Cina. Pada awal abad XX bahan celupan kimia mulai menggantikan nila dan bahan

celupan asli lainnya. Sekarang celupan ini pun menjadi bahan impor dan ditangani oleh orang Cina. Dirasakan bahwa orang Tionghoa makin lama makin kuat menguasai Industri batik yang memberi kepadanya kesempatan besar untuk menarik keuntungan karena dapat mengendalikan barang impor yang sangat diperlukan.”

Sementara itu orang Indonesia yang kesadaran dirinya mulai terangsang karena sering berhubungan dengan Barat, mulai menentang hak-hak tradisional istimewa dari bangsawan lokal di Vorstenlanden terhadap manusia dan barang-barangnya. Berdasarkan sebab-sebab ekonomis dan sosial maka pedagang Indonesia di Surakarta memutuskan untuk berorganisasi. Haji Samanhoedi memprakarsainya dengan membentuk suatu organisasi yang pada dasarnya bersifat amal dan protektif. Pada tahun 1911 R.M Tirtoadisoerjo diminta oleh Haji Samanhoedi untuk datang ke Surakarta (Solo) untuk membentuk sebuah organisasi perdagangan Indonesia di kalangan pedagang batik disana.

C. Cabang-Cabang Sarekat Islam di Indonesia.

Pada perkembangan selanjutnya tumbuhlah cabang-cabang SI di berbagai daerah, seperti SI Semarang, SI Yogyakarta, SI Surakarta serta SI Surabaya dan tidak lupa dibentuk pula semacam SI pusat atau CSI dengan struktur modern. Selain itu Sarekat Islam dapat berkembang pesat di daerah Jawa Barat pada tahun belasan, organisasi Sarekat Islam didirikan pada tanggal 16 Oktober 1906 sebagai kelanjutan dari

Sarekat Dagang Islam, dan pada tanggal 10 September 1912 Sarekat Islam telah diakui sebagai badan hukum oleh Belanda. Haji Samanhudi dan Haji Umar Said Tjokroaminoto bertindak sebagai pendiri dan pemimpin organisasi tersebut. Sarekat Islam dengan latar belakang faktor ekonomi dan Agama Islam pembentukan organisasi ini sebagai reaksi atas monopoli dagang antara oleh orang Cina dan rencana kristenisasi yang keduanya dilindungi dan di tunjang oleh pemerintah kolonial. Walaupun dalam anggaran dasarnya Sarekat Islam tidak menyatakan sebagai organisasi politik melainkan bergerak dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan agama. Tetapi prakteknya Sarekat Islam melakukan kegiatan yang bersifat politik . dalam waktu yang relatif singkat Sarekat Islam berhasil menarik anggotanya dari segala lapisan masyarakat dan segala kelompok etnis di Indonesia.

Pada tahun 1918 telah berhasil melebarkan sayapnya bukan saja di kota-kota kabupaten, tetapi juga sampai ke kota-kota kecamatan, bahkan ke desa-desa di Jawa Barat. Pada tahun 1912 telah terbentuk Sarekat Islam cabang Bandung . enam tahun kemudian Sarekat Islam cabang ini telah membentuk rantingrantungnya di desa-desa, antara lain di kecemasan Majalaya, Paseh, Ujungberung, Ciparay. Dalam tahun 1912 di daerah kabupaten Majalengka didirikan Sarekat Islam di kota Majalengka, Karangsembung, Maja, dan Talaga. Hampir semua anggota dan pengurus perserikatan Ulama di Kuningan menjadi anggota Sarekat Islam tahun 1912. Di daerah Subang Sarekat

Islam dibentuk pada tahun 1917, yaitu di Kota Subang, Sagala Herang, dan Parung. Sarekat Islam Cabang Garut telah mempunyai sepuluh ranting, Sarekat Islam cabang Garut berdiri tahun 1920, yaitu di Cilawu, Taragong, Bayongbong, Samarang, Bojongsalam, Leles, Cimurah, Sodong, wanaraja, dan Malangbong. Di keresidenan Banten Sarekat Islam telah pula sampai ke desa-desa pedalaman seperti di distrik Koletet (Pandeglang), Rangks Bitung dan Menes (Banten Selatan), Labuan, Jamlang (Banten Barat), Serang (Banten Utara). Selain itu Sarekat Islam telah berdiri pula di Cirebon pada tahun 1921, dan Sarekat Islam berdiri pula di kota Tasikmalaya pada tahun 1918.

Pemimpin-pemimpin Sarekat Islam di Jawa Barat dapat dikemukakan di sini, diantaranya yaitu: Abdul Muis Wignyadisastra, dan Suwardi Suryaningrat (cabang Bandung tahun 1912), Muhammad Jaid, Sastrosuwiryo, dan Bartanata (cabang Cirebon tahun 1921), Haji Abdul Halim, pendiri Perserikatan Ulama (cabang Majalengka tahun 1921), Raden Karyo dan Moh. Sujai (cabang Kuningan tahun 1920), Natawijaya (cabang Garut tahun 1920), Haji Islam (ranting Manonjaya, Tasikmalaya, 1918), R. Hasan Jayadiningrat (pengurus pusat dan cabang Serang tanggal 1918), Tubagus Haji Ahmad Hatib (ranting Labuan tanggal 1918), Entol Haji Yadin (ranting Menes tanggal 1918), Mas Astrawijaya, Pensiunan Patih Rangkasbitung (cabang Rangkasbitung tanggal 1918).

Faktor agama dan sikap organisasi yang memungkinkan Sarekat Islam dapat tersebar luas di Jawa Barat. Sejak dulu penduduk Jawa Barat terkenal sebagai penganut Agama yang taat. Keadaan sejak abad ke-19 mendorong umat Islam di Indonesia makin menggiatkan kegiatan keagamaannya. Dan Sarekat Islam selalu bersikap membela rakyat dari penghinaan, penindasan, dan tinsakan sewenangwenang pejabat pemerintah. Dengan sikap ini rakyat yang telah lama di tindas oleh pejabat-pejabat pemerintah kolonial merasa ada yang melindungi dan membela nasibnya. Kasus yang menimpa Sarekat Islam ranting Majalaya, Ciparay dan Paseh, Kepala Desa Cibodas (Majalaya) dan Mantri guru Cangkring (Ciparay) di tahan oleh penguasa setempat, karena dituduh memaksa penduduk untuk menjadi anggota Sarekat Islam. Dengan adanya kejadian ini HOS Tjokroaminoto pengurus Sarekat Islam, memerlukan datang ke tempat kejadian (Majalaya) untuk menyelesaikan kasus itu dan membela anggota-anggotanya. Pada tanggal 21 September 1918, HOS Tjokroaminoto berpidato di hadapan anggota-anggotana di suatu lapangan terbuka di Majalaya dengan disaksikan oleh penguasa setempat (Asisten Residen Bandung, Wedana Ciparay, Camat Majalaya, Kontrolur Cicalngka)

D. Timbulnya Konflik Dalam Tubuh SI

Dalam menjalankan perjuangan di bidang politik, sebagai gerakan nasional yang melepaskan bangsa dari

penjajahan belanda, maka tidaklah aneh bila ada kelompok lain yang menyusup kedalam tubuh Sarekat Islam untuk mengacaukan dari dalam. Tahun 1916 semaun dan kawan-kawan melakukan infiltrasi komunisme kedalam tubuh Sarekat Islam. Semaun sendiri sebenarnya pengurus Sarekat Islam cabang Semarang akan tetapi pada tahun 1920 ia menjadi ketua Partai Komunis Indonesia (PKI) cabang Semarang tentu saja perilaku busuk Semaun sangat mengganggu eksistensi Sarekat Islam. Sebenarnya gerakan komunisme ini telah dirancang sejak tahun 1913 pada saat pertama kalinya Sneevliet datang ke Indonesia.¹⁷⁹

Faham komunisme ini masuk ke Indonesia di bawa oleh Sneevliet pada tahun 1913, pada saat ia pertama kali datang ke Jawa, kemudian ia mendirikan Indische Social Democratische Vereeniging (ISDV) dengan tujuan sebagai alatan. Pada awalnya Sneevliet (1883-1942) tiba di Indonesia sebagai seorang penganut mistik katolik kemudian beralih ke ide-ide sosial demokratis yang revolusioner. Karir selanjutnya bertindak sebagai agen Komintern di Cina dengan nama samaran G. Maring. Pada tahun 1914 kelompok Marxis ini mendirikan ISDV (Indische Social Democratische Vereeniging). Organisasi Sosial Demokrat Hindia Belanda, di Surabaya. Duduk sebagai pengurus besar ISDV adalah Semaun yang pada saat itu juga sebagai ketua cabang Sarekat Islam di Semarang. Faham ini disebutnya sebagai faham „Revolusioner Socialitis“. Lewat organisasi inilah kemudian gagasan-gagasan dan slogan-slogan Marxis diekspor

di dalam tubuh SI. Dengan menginfiltrasi SI diharapkan ISDV dapat menguasai massa. Infiltrasi ini secara formal dibicarakan pada kongres Nasional IV SI tahun 1919 yang sempat menciptakan firiksi dan perpecahan.

Tetapi beberapa cabang telah amat terpengaruh oleh kader radikal sosialisme yang sebenarnya ialah Marxis-leninisme atau komunisme. Fraksi sosialisme ini di pimpin oleh Semaun. Keadaan politik bertambah keruh. Pemerintah Belanda menahan Sneevlite dan ia di buang keluar Indonesia. Ia berangkat ke Moskow 1918. Dalam kongres ke-IV Sarekat Islam, timbul perpecahan secara terang-terangan (tahun 1919). Pada tanggal 23 Mei 1920 sayap kiri Sarekat Islam dibawah pimpinan Semaun berubah menjadi PKI (Partai Komunis Indonesia), dengan Sarekat Islam cabang Semarang sebagai pusatnya. Semaun dipilih sebagai ketuanya yang pertama, sekalipun pada waktu itu masih tetap sebagai anggota Sarekat Islam. Strategi dasar PKI ialah bagaimana menghancurkan pengaruh tokoh-tokoh Sarekat Islam yang lain dan membawa Sarekat Islam secara keseluruhan melalui infiltrasi kedalam kamp komunis. Pada mulanya anggota PKI juga tetap menjadi anggota Sarekat Islam.

Setelah terbaca gelagat Semaun, segeralah pengurus Sarekat Islam melakukan berbagai langkah untuk menggulangi infiltrasi faham komunisme itu. Faham komunisme yang banyak dipropagandakan di kalangan kaum buruh, mendorong para pengurus Sareka Islam untuk melakukan konsolidasi di

kalangan kaum buruh dengan membentuk Sarekat-Sarekat sekerja yang berazaskan Islam sebagai perwujudan dari usaha tersebut, pada tahun 1920 dibentuk Vaksentral yang berkedudukan di Yogyakarta, dengan Suryopranoto dan Haji Agus Salim sebagai pimpinannya. Vaksentral tersebut beranggotakan :Sarekat pekerja pabrik gula, Sarekat Pekerja Pegadaian, Sarekat pekerja guru, dan Sarekat pekerjapekerja umum.¹⁸⁰

Sejak itu tokoh-tokoh Sarekat Islam mulai kritis dan waspada terhadap adanya infiltrasi faham komunisme. Kemudian Sarekat Islam dengan tegas melakukan disiplin partai. Keputusan ini diambil atas usul Agus Salim dan Abdul Muis dalam kongres Central Sarekat Islam kelima di Surabaya pada tahun 1921. Dengan demikian Sarekat Islam sebagai organisasi berhadapan langsung dengan komunisme dan menolak secara tegas faham tersebut. Ketika Sarekat Islam pada tahun 1921 meberlakukan peraturan baru dalam rangka melaksanakan disiplin organisasi tidak lagi memperbolehkan adanya keanggotaan yang ganda. Akhirnya terjadilah perpecahan yang nyata dalam Sarekat Islam yang selanjutnya mempertegas wajah ke Islamannya. SI kemudian terpecah menjadi dua, yaitu SI Putih (dengan gerakan Pan-Islamisme di bawah pimpinan H. Agus Salim serta Abdul Muis dan dukungan Tjokroaminoto).¹⁸¹

Sedangkan SI Merah berada di bawah pimpinan Semaoen sejak 1922, setelah ia pulang mengasingkan diri ke Uni

Soviet dan mulai membangun kembali serikat-serikat kerja PKI serta meningkatkan pengaruhnya pada cabang-cabang dan sekolah-sekolah SI. Pada tahun 1923, diadakan kongres Sarekat Islam di Madiun. Hasil kongres ini memberikan arah baru Sarekat Islam dengan mengadakan beberapa perubahan. Central Sarekat Islam diputuskan untuk di ubah menjadi Partai Sarekat Islam. Resmilah kini golongan Islam mempunyai wadah, yang berupa partai sebagai alat perjuangannya. Kongres itu juga telah menegaskan pelaksanaan dari disiplin partai terhadap PKI.

Sebagai akibat pelaksanaan dari disiplin partai terhadap PKI itu, maka PKI pun mengambil tindakan balasan. Pada 4 Maret 1923 PKI mengadakan pula kongresnya di Bandung. Kongres itu dihadiri oleh 16 buah cabang PKI dan 14 cabang Sarekat Islam merah. Dalam kongres ini serangan-serangan tajam kepada Partai Sarekat Islam (nama baru Sarekat Islam) dilancarkan terutama oleh Semaun. Gerakan PKI pada saat itu memiliki jalinan dekat dengan Moskow, sehingga kader-kader mereka memiliki hubungan langsung dengan Stalin hubungan erat antara Semaun dengan Stalin semakin kelihatan kuat tatkala konsekuensi politik ditanggungnya. Tatkala Semaun membuat konvensi pergerakan.



BAB XI

BUDI UTOMO

A. Latar Belakang Lahirnya Budi Utomo

Awal abad 20 negara Indonesia terjadi suatu perubahan bagi sistem kebijakan pemerintah Belanda dengan diterapkannya aturan politik etnis tahun 1899. Munculnya kebijakan ini mengakibatkan perubahan yang mendasar sedemikian rupa di lingkungan daerah jajahan. Dalam kebijakan-kebijakan Politik Etnis sebenarnya terdapat lebih banyak janjinya dari pada penampilmannya, dari fakta-fakta penting eksploitasi dan penaklukan dalam kenyataannya tidak berubah.¹⁸² Politik etnis berakar baik pada masalah kemanusiaan dan keuntungan ekonomi yang menimbulkan ketidakpuasan itu banyak diungkapkan oleh orang Belanda, sehingga dapat mengurangi penderitaan rakyat yang tertindas di Indonesia. Salah seorang Belanda yang peduli adalah Van Deventer, ahli hukum yang pernah tinggal di Indonesia dan menerbitkan sebuah artikel yang berjudul “Hen Eerechuld” atau “Suatu Hutang Kehormatan Dia mengatakan bahwa negeri Belanda berhutang kepada bangsa Indonesia. Hutang ini sebaiknya dinayarkan kembali dengan jalan memberi prioritas utama kepada kepentingan rakyat Indonesia di dalam kebijakan colonial.¹⁸³

Pada awal kedatangan pihak Belanda melakukan penjajahan dengan memonopoli seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga membuat kepedihan dan rasa sakit yang amat besar bagi rakyat Indonesia. Perlawanan penjajah telah dimulai sejak awal mula kedatangan bangsa Belanda yaitu fase yang kita kenal dengan masa ratu adil, pada fase ini perjuangan rakyat dilakukan dengan berperang secara frontal dan dipimpin oleh seorang panglima perang, maka dari perlawanan ini muncul sejumlah perlawanan di berbagai wilayah, seperti Perang Aceh, Perang Diponegoro di daerah Banten, Perang Paderi di Sumatera Barat dan lainnya. Usaha untuk melawan penjajah melalui jalur ini tidak memberikan efek yang signifikan karena perjuangan hanya terbatas terhadap daerah-daerah tertentu saja di tambah lagi dengan fakta bahwa pihak Belanda memiliki senjata yang canggih untuk berperang, berbanding terbalik dengan rakyat Indonesia dengan hanya menggunakan alat perang yang tradisional dan seadannya, ditambah lagi dengan Sumber Daya Manusia yang tidak memiliki ketrampilan perang dibandingkan dengan pasukan Belanda.¹⁸⁴

Sejarah pergerakan Indonesia mulai dengan terbentuknya organisasi-organisasi yang bersifat nasional. Organisasi-organisasi tersebut sudah tidak lagi bernafaskan kedaerahan yang mana sifat perjuangannya masih sebatas untuk membela atau melindungi daerahnya masing-masing saja, namun juga organisasi-organisasi yang bersifat nasional tersebut

sudah mulai memiliki konsep perjuangan untuk melepaskan seluruh tanah air Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Zaman kebangkitan nasional adalah masa dimana kebangkitan semangat dan persatuan, kesatuan dan nasionalisme untuk menuju dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Semangat nasionalisme ini lahir atas respon terhadap kolonialisme dan imperialisme Belanda yang berlangsung selama tiga setengah abad. Pada masa inilah mulai munculnya kelompok masyarakat Indonesia yang menginginkan adanya perubahan karena penindasan dan penjajahan yang teramat lama.¹⁸⁵

Tanda-tanda lahirnya suatu gerakan yang bersifat modern atau nasional yang teratur mulai nampak di Jawa antara tahun 1906-1909. Di mana ketika diadakannya bermacam-macam rapat yang kemudian melahirkan "Budi Utomo" pada tahun 1908. Perkumpulan tersebut terdiri dari kaum cendekiawan Indonesia, pegawai negeri dan mahasiswa-mahasiswa sekolah tinggi kedokteran dan sebagainya yang berasal dari kaum bangsawan. Di mana golongan-golongan tersebut yang nantinya mendorong lahirnya pergerakan nasional Indonesia. Kemudian selain itu adanya perhimpunan lain yang membentuk organisasi yang bergerak dalam bidangnya masing-masing, antara lain seperti Sarekat Islam yang kemudian menjadi Partai Sarekat Islam, Partai Komunis Indonesia (PKI), Perserikatan Nasional Indonesia yang kemudian menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI), dan lain-

lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa organisasi organisasi yang bersifat nasional tersebut telah menjadi bukti lahirnya sikap nasionalisme dari kalangan cendekiawan Indonesia. Hal tersebut juga telah membangkitkan semangat warga daerah untuk ikut bergerak membela Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Di mana mereka tidak lagi hanya mementingkan atau mendahulukan daerahnya masing-masing saja, tetapi mulai memiliki rasa nasionalisme untuk membela seluruh tanah air Indonesia. Pergerakan Nasional memiliki sebuah arti yang luas dan besarnya aspek yang meliputinya, tidak saja pada pergerakan yang bersifat perbaikan derajat dari sisi politik, akan tetapi juga menuju perbaikan aspek-aspek lain seperti perekonomian, pendidikan, keagamaan, dan sebagainya.

Sejarah panjang Indonesia pada masa pergerakan nasional juga banyak peristiwa penting yang terjadi. Di antaranya adalah penangkapan para tokoh yang dianggap sebagai pemberontak atau membahayakan bagi pemerintahan kolonial. Para tokoh tersebut kebanyakan merupakan kaum terpelajar atau cendekiawan Indonesia yang berkecimpung dalam organisasi organisasi nasional, ataupun tokoh-tokoh yang berbasis agama dan perpolitikan Indonesia pada saat itu. Penangkapan para tokoh terjadi karena keputusan dari pemerintahan kolonial Belanda. Mereka diasingkan ke berbagai tempat seperti penjara ataupun tempat pengasingan lainnya terutama yang jauh dari Pulau Jawa. Salah satu tempat

pengasingan yang digunakan untuk mengasingkan para tokoh pada masa pergerakan nasional ialah di Boven Digoel.¹⁸⁶

Pada mulanya pendirian kamp Digoel ini di latar belakang untuk suatu tempat di mana para tokoh yang dianggap pemberontak oleh pemerintahan kolonial Belanda dapat diasingkan. Para tokoh terutama pemimpin yang menjadi sorotan setelah seringkali terjadinya pemberontakan-pemberontakan tersebut telah berhasil membuat pemerintah kolonial merasa resah. Di mana pemerintah colonial juga mau tidak mau harus memikirkan bagaimana strategi yang tepat untuk menangani dan meredakan pemberontakan tersebut. Maka salah satu kebijakan yang diwujudkan sebagai respon dari banyaknya pemberontakan ialah membuang atau mengasingkan para tokoh yang dituduh tidak pro kepada pemerintah colonial dan memberontak. Sebagaimana yang dituliskan oleh Shiraishi mengenai pendirian kamp pengasingan Digoel sebagai salah satu jalan keluar yang diambil oleh pemerintah kolonial sebagai tanggapan atas banyaknya pemberontakan yang terjadi.

Seorang Gubernur Jenderal yang memerintah pada saat itu yaitu De Graeff berpendapat bahwa dalam pandangannya bagaimanapun juga jika penahana diterapkan kepada orang-orang yang dianggap memberontak dan melakukan pemberontakan, maka usaha tersebut hanya akan memberikan efek yan sementara saja. Pendapatnya juga didasarkan karena apabila dalam pengasinga juga kehidupan orang-orang yang

memberontak akan mengalami dinamika seperti misalnya mereka akan memperbarui lagi aktivitas politik mereka. Kemudian Gubernur Jenderal De Graeff mengusulkan ide bahwa penangkapan para pemimpin pemberontakan dapat menjadi solusi yang digunakan untuk

mengurangi pemberontakan yang seringkali terjadi. Gubernur Jenderal De Graeff melanjutkan bahwa penangkapan tersebut harus diberlakukan hanya kepada para tokoh yang dianggap sebagai pemimpin utama saja. Kemudian untuk pengikutnya yang lain yang dianggap terlibat dalam pemberontakan maka akan dijadikan sebagai tahanan politik juga menyusul para pemimpin mereka. Selanjutnya mereka dibawa untuk diasingkan ke tempat yang sama sejauh mungkin. Setelah adanya usulan dari Gubernur Jenderal De Graeff tersebut, maka Dewan pemerintahan kolonial Belanda mendukungnya, dan kemudian mengambil keputusan bahwa pengasingan akan dimulai dengan para pemberontak yang ditangkap di Jawa Barat. Selain itu yang ditangkap di luar Jawa Barat akan diasingkan juga menyusul secepatnya. Setelah melalui berbagai pertimbangan, beberapa prosedur juga diajukan di mana pada pokoknya bahwa pengasingan akan dilakukan dengan skala besar terhadap para pemimpin komunis seluruh Hindia Belanda. Hal tersebut berkaitan dengan pemberontakan yang terjadi dan kerusuhan yang ditimbulkannya.

Kebangkitan nasional adalah masa dimana bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan dan nasionalisme serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan republik Indonesia. Bangkitnya nasionalisme di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari bangkitnya nasionalisme di Asia yang ditandai adanya kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Sebab-sebab bangkitnya nasionalisme di Indonesia dan tumbuhnya pergerakan nasional Indonesia itu, tidak hanya dipengaruhi adanya pengaruh dari luar Indonesia saja. Namun reaksi pada masa sebelum tahun 1905 yang pernah dicetuskan dengan adanya perlawanan senjata di berbagai daerah, seperti perlawanan Pattimura, Diponegoro, Si Singamangaraja serta Hassanudin. Hal ini telah membuktikan nyata adanya semangat nasionalisme telah islam bergejolak pada adda bangsa Indonesia sebagai reaksi terhadap penderitaan lahir dan batin akibat kolonialisme. Penderitaan lahir batin yang tak tertahankan lagi ditambah pengaruh kejadian-kejadian didalam maupun diluar tanah air yang merupakan dorongan yang mempercepat lahirnya pergerakan nasional dan titik berangkat lahirnya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 sebagai organisasi pelajar guna memajukan kepentingan-kepentingan priyayi rendah, dimana jangkauan geraknya terbatas pada penduduk Pulau Jawa dan Madura.

Situasi sosial ekonomi di Jawa pada abad ke 19 semakin memburuk setelah berganti-ganti dilaksanakan eksploitasi kolonial dari cara tradisional sampai eksploitasi liberalisasi,

politik etnis dan semakin derasnya westernisasi yang dilakukan pemerintah kolonial. Dengan demikian perubahan sosial ekonomi masyarakat tidak dapat dielakkan lagi dan keuntungan ekonomi Indonesia mengalir ke negeri Belanda. Akibatnya kemelaratan dan kesengsaraan semakin melekat dihati masyarakat. Dalam bidang pendidikan seperti janji pemerintah tidak terpenuhi, karena banyak anak Indonesia yang belum dapat pendidikan dikarenakan kurangnya dana. Hal itu menimbulkan keprihatinan Dokter Wahidin Sudirohusodo dari Yogyakarta.

Tahun 1906 Wahidin mendirikan Yayasan Bea Siswa (Studie-fonds) untuk membiayai pemuda-pemuda yang pandai tapi miskin yang ingin melanjutkan pelajaran ke sekolah lebih tinggi. Untuk menghimpun dana, Wahidin melakukan propaganda keliling Jawa dan ketika sampai di Jakarta bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa STOVIA. Bersama-sama mereka kemudian mendirikan organisasi Budi Utomo atau “Budi Ingkang Utami”. Budi Utomo adalah “kesadaran lokal”¹⁸⁷ yang diformulasikan dalam wadah organisasi moderen. Dalam hal ini organisasi itu mempunyai pemimpin, ideologi yang jelas dan punya anggota.

Kelahiran Budi Utomo kemudian diikuti organisasi lain dan saat itulah perubahan sosial politik Indonesia dimulai. Berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 menandai perkembangan baru dalam ejarah bangsa Indonesia. Van Deventer berkomentar “ India, negeri cantik jelita yang selama

ini tidur nyenyak, kini telah bangkit". Pers Belanda juga berkomentar tentang berdirinya Budi Utomo dengan kata-kata "Java vooruit" (Jawa Maju) dan "Java onwaakt" (Jawa Bangkit).¹⁸⁸ Sebaliknya, pemerintah tidak senang dengan kelahiran "si molek", orang Jawa semakin banyak "cingcong". Kelompok etisi justru mendukung dan menganggap sebagai renaissance atau kebangkitan di Timur (Oostensche Renaissance) yaitu kebangkitan budaya Timur. "Priyayi gede" yang mapan juga tidak senang terhadap kelahiran Budi Utomo, bupati membentuk perkumpulan Regenten Bond Setia Mulia pada tahun 1908 di Semarang. Para bupati menganggap bahwa Budi Utomo mengganggu stabilitas sosial mereka, sebaliknya bupati progresif seperti Tirtokusumo dari Karanganyar justru mendukung.

Tanggal berdirinya Budi Utomo dikemudian hari selalu diperingati bangsa Indonesia sebagai Hari Kebangkitan Nasional,¹⁸⁹ karena merupakan organisasi pergerakan pertama sekalipun waktu didirikan masih bersifat kedaerahan. Kata Nasional Indonesia belum dipakai waktu itu, nama Indonesia sebelum 1922 belum dipakai, sebelumnya masih istilah Hindia Belanda . Namun demikian Budi Utomo mempelopori berdirinya perkumpulan moderen yang lain. Arah perkembangan pergerakan Budi Utomo adalah nasional. Jadi Budi Utomo dapat dipandang secara simbolis sebagai pergerakan nasional menentang penjajahan. Pengertian kebangkitan nasional dalam kaitannya dengan berdirinya Budi

Utomo mengandung unsur simbolis, karena Budi Utomo juga melambangkan bangkitnya nasionalisme. Mahasiswa maupun pelajar sebagai pelopor pergerakan seperti terjadi di luar negeri, misalnya di Jerman setelah kongres Wina.

Sifat Budi Utomo dapat dijelaskan berikut ini:

pertama, pada mulanya keanggotaannya terbatas pada golongan elite Jawa yaitu terdiri dari kaum intelektual (terpelajar) dan pegawai pangreh praja (white collar) serta bangsawan. Terbatasnya anggota karena adanya perasaan ketakutan mendapat saingan rakyat jelata.

Kedua, sifat tersebut baru lenyap sesudah 1927 karena pengaruh pergerakan lain, terutama Perhimpunan Indonesia dan PNI.

Ketiga, pada mulanya Budi Utomo hanyalah pergerakan sosial kultural yang bertujuan membangun masyarakat Jawa-Madura harmonis. Sebagai organisasi pergerakan perintis, sifat sosial kultural terpaksa dimiliki karena pasal 111 Regerings Reglemen (RR) yang melarang berdirinya perkumpulan-perkumpulan politik.

Keempat, Budi Utomo juga bersifat loyal-kooperasi terhadap pemerintah. Hal itu dapat dipahami karena pemuka-pemuka dan pendukungnya kebanyakan orang-orang yang erat dengan masyarakat Belanda bahkan diantaranya pegawai pemerintah. Etno nasionalisme semakin membesar, dibuktikan dalam kongres tanggal 3-5 Oktober 1908 yaitu adanya perubahan orientasi pada kalangan priyayi.

Berdasar edaran dalam *Bataviasche Nieuwslad* 23 Juli 1908, Budi Utomo cabang Jakarta menekankan bagaimana memperbaiki kehidupan rakyat. Prinsip perjuangan Budi Utomo telah memecah organisasi tersebut dalam dua kelompok.¹⁹⁰ Pertama, Golongan muda lebih menekankan perjuangan politik dalam menghadapi pemerintah kolonial dan untuk memberi imbalan politik pemerintah. Mereka kemudian mencari organisasi yang sesuai yaitu dengan mendirikan Sarekat Islam dan *Indische Partij* sebagai wadahnya. Kedua, golongan tua, mereka ingin tetap pada cara lama yaitu sosio-kultural.

Meskipun ada kelompok muda yang sifatnya radikal, golongan tua masih meneruskan cita-cita Budi Utomo yang mulai disesuaikan dengan perkembangan politik. Ikhtisar perkembangan Budi Utomo dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁹¹

- a. 1916 menjadi anggota *Comite Indie Weebar* (Komite Pertahanan India) yang memperjuangkan diadakannya milisi bagi pemuda-pemuda Indonesia.
- b. 1918 mengirimkan wakilnya ke *Volksraad* (Dewan Rakyat) dan pemerintah tidak curiga karena sifat Budi Utomo yang moderat
- c. 1918 menjadi anggota *Konsentrasi Radikal*
- d. 1927 menjadi anggota *PPPKI* hingga terpengaruh sifat kenasionalannya
- e. 1931 Kongres Budi Utomo di Jakarta memutuskan bahwa Budi Utomo terbuka untuk seluruh bangsa Indonesia

- f. 1932 dalam konggresnya di Solo memutuskan tujuan Budi Utomo secara tegas adalah Indonesia Merdeka
- g. 1935 bersama partai Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) dan berbagai perkumpulan pemuda dan daerah, Budi Utomo mengadakan fusi dan membentuk suatu wadah yang lebih besar yaitu Parindra (Partai Indonesia Raya).

Budi Utomo telah mewakili aspirasi rakyat Jawa ke arah kebangkitan dan juga aspirasi rakyat Indonesia sendiri. Hampir semua pemimpin pergerakan nasionalis Indonesia telah mempunyai kontak dengan organisasi ini. Budi Utomo sebagai organisasi pergerakan pertama di Indonesia yang mempunyai sifat lunak dan tenang. Organisasi ini juga merupakan organisasi yang terpanjang usianya dengan jumlah anggota 10.000 orang. Dari Budi Utomo inilah kesadaran akan identitas bangsa Jawa (Indonesia) dimulai.

Budi Utomo merupakan sebuah organisasi pelajar yang didirikan oleh Dr.Sutomo dan para mahasiswa STOVIA (School tot Opleiding voor Inlandsche Arsten) yaitu Goenawan, Dr.Cipto Mangoenkeosoemo dan Soeraji serta R.T Ario Tirtokusumo, yang didirikan di Jakarta pada 20 Mei 1908. Organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, kebudayaan serta tidak bersifat politik. Berdirinya Budi Utomo tak bisa lepas dari peran Dr. Wahidin Sudirohusodo. Walaupun bukan pendiri Budi Utomo, namun beliau adalah yang telah menginspirasi Dr.Sutomo dan kawan-kawan untuk mendirikan organisasi pergerakan

nasional ini. Dr. Wahidin Sudirohusodo sendiri adalah seorang alumni STOVIA yang sering berkeliling di kota-kota besar di Pulau Jawa untuk mengkampanyekan gagasannya mengenai bantuan dana bagi pelajar-pelajar pribumi berprestasi yang tidak mampu melanjutkan sekolah. Gagasan ini akhirnya beliau kemukakan kepada pelajar-pelajar STOVIA di Jakarta, dan ternyata mereka menyambut baik gagasan mengenai organisasi tersebut dan dari sinilah awal perkembangan menuju keharmonisan bagi orang Jawa dan Madura.

B. Lahirnya Budi Utomo

Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang ada di Indonesia dan disusun dengan bentuk modern. Namun demikian keberadaan Budi Utomo bukan hanya berdasarkan kejadian-kejadian di luar negeri yang akan Menyadarkan tentang keadaan bangsanya akan tetapi berhubungan juga dengan organisasi yang ada sebelum tahun 1908. Dalam majalah *Retno Doemilah* yang terbit tahun 1895 dan *Pewartu Priyayi*, telah tercermin kenyataan tentang adanya pertumbuhan di kalangan elite pribumi untuk memperjuangkan kepentingan mereka sendiri¹⁹² semangat nasionalisme telah berkecambah pada bangsa Indonesia sebagai reaksi terhadap penderitaan lahir dan batin akibat kolonialisme.

Retno Doemilah Dalam pidatonya mengungkapkan kepada seluruh Pulau Jawa tentang kebangkitan masyarakat Jawa bahwa tidak akan dilepaskan dengan kefasihan bahasa Belanda

karena bahasa Belanda merupakan bahasa yang dipakai dalam sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi menurut pendapatnya pendidikan merupakan kunci kemajuan. Dr Wahidin dalam doktrinya menguraikan perlunya Pendidikan secukupnya bagi kalangan luas masyarakat pribumi dan mempertinggi Kesadaran kebangsaan di kalangan orang Jawa. Perjuangan hidup-mati yang terhampar di kalangan orang Jawa ialah memilih satu di antara dua yaitu berjuang atau hancur”¹⁹³

Dr. Wahidin mulai melancarkan propaganda besar-besaran tentang pemberian beasiswa bagi anak-anak muda pribumi yang pandai. Dalam sosialisasinya didampingi Pangeran Arya Nata Dirodjo yang dikenal aktif mendukung pendidikan Barat. Namun, semangat kedua tokoh ini tidak bisa sama sekali gerakan kampanye karena banyaknya para Bupati yang tidak mendukungnya dan hanya dianggap hendak mengacaukan ketentraman dan ketertiban sistem yang berlaku. Kendati demikian perjalanan kampanye tidak selalu gagal. Mereka selalu mendapat simpati dari orang yang dijumpainya dan pertemuan yang paling penting adalah dengan murid-murid STOVIA. Seperti yang diungkapkan oleh Soetomo:

“Dr. Wahidin yang berwajah tenang tetapi tajam dan kepandaiannya mengutarakan pikirannya sangat berkesan pada saya. Suaranya yang jelas dan terang membuka pikiran dan hati saya, membawa gagasangagasan baru dan mebuca dunia baru yang meliputi jiwa saya yang terluka dan sakit”¹⁹⁴

Para siswa STOVIA, yang kebanyakannya berasal dari kota-kota kecil itu juga memperoleh dorongan intelektual dari kota besar dan modern. Sekolah itu terletak di Weltevreden di jantung Batavia, sebagai kota terbesar, menjadi pusat kegiatan politik, perekonomian dan kebudayaan serta merupakan pintu gerbang paling penting ke dunia luar. Di Batavia ini menjadi kediaman kelompok intelektual non politik pribumi yang kecil namun sedang tumbuh. Oleh karena STOVIA pada hakekatnya merupakan satu-satunya lembaga pendidikan menengah di Batavia, maka wajarlah bila siswasiswanya bergaul dengan kelompok intelektual dan terpengaruh oleh ide-ide mereka. Dipengaruhi oleh gagasan Dr. Wahidin, Soepomo segera larut dalam kegiatan mendirikan suatu perkumpulan di dalam STOVIA.¹⁹⁵

Kata Budi agaknya sangat penting bagi orang Jawa, budi adalah sifat yang memberikan keseimbangan dan keutuhan pada pengetahuan yang sesungguhnya berkeping-keping, budi akan dipandang seolah-olah berada di puncak kegiatan mental manusia dan akan dipandang mengendalikan akal dan watak seseorang, etos Jawa menganggap bahwa seseorang berbudi luhur akan hidup rukun dengan masyarakatnya. Sementara itu batasan-batasan etnis dan geografis dalam kelompok menjadi tegas. Jika Budi Utomo dibandingkan dengan perhimpunan Indonesia perbedaan antara kedua organisasi itu kelihatan jelas di mana perhimpunan Indonesia tidak membedakan antara Jawa dan bukan Jawa sedangkan Budi Utomo mengkhususkan

pada masyarakat Jawa dan Madura. Batasan-batasan ini tidak hanya mencerminkan kurangnya kesadaran akan persatuan nasional pada penduduk Indonesia Secara menyeluruh, tetapi juga karena antipati yang berkepanjangan antara golongan pendidik Jawa dan non Jawa. Kebanggaan orang Jawa terhadap keunggulan budaya lain begitu meluas, sehingga tidaklah mengherankan apabila siswa-siswa Jawa di STOVIA merasa ragu mengundang siswa-siswa non Jawa agar ikut gerakan mereka.

Organisasi untuk kaum muda Jawa ini didirikan oleh Soetomo pada hari Minggu tanggal 20 Mei 1908 pukul sembilan pagi. Para hadirin yang berkumpul di aula STOVIA tidak hanya para siswanya saja, tetapi juga siswasiswa dari sekolah pertanian dan kehewanan di Bogor, sekolah pamong praja di Magelang dan Probolinggo, siswa sekolah petang di Surabaya, sekolah pendidikan guru di Bandung dan Yogyakarta. Seruan kelompok STOVIA dengan cepat tersebar di seluruh Jawa. Walaupun tanggal 20 Mei selalu dirayakan sebagai hari kebangkitan nasional, tidak banyak informasi yang terungkap mengenai apa yang sebenarnya telah terjadi di aula. Di dalam Budi Utomo, Soetomo akan dibantu oleh Goenawan, Soemarmo, Mohammad Soleh dan Soelaeman yang rata-rata berusia 20-22 tahun.

Budi utomo yatu organisasi nasional pertama di indonesia, dikarenakan ada nilai-nilai yang sudah dipandang sebagai bibit pergerakan nasional ini yaitu adanya penyadaran tentang pendidikan dan budaya. Dr. Wahidin Sudirohusodo

(1857-1917) merupakan pembangkit semangat organisasi Budi Utomo. Sebagai lulusan sekolah dokter Jawa di Weltvreden (sesudah tahun 1900 dinamakan STOVIA), ia merupakan salah satu tokoh intelektual yang berusaha memperjuangkan nasib bangsanya.¹⁹⁶

C. Perkembangan Budi Utomo

Budi Utomo yang dilahirkan tanggal 20 Mei 1908 di STOVIA mulai menata diri sistem organisasinya dengan melakukan kongres pertama yang dilakukan tanggal 3-5 Oktober 1908, bertempat di sekolah pendidikan guru Yogyakarta. Karena Budi Utomo merupakan organisasi orang Jawa pribumi yang pertama, maka kongres akan menarik perhatian luar biasa di kalangan pers dan tokoh masyarakat Jawa dalam kongres Budi Utomo ini Dr. Wahidin terpilih menjadi ketua kongres tetapi pada hari kedua digantikan oleh Panji Broto Atmojo, karena kesehatannya terganggu. Dalam pidatonya, Dr. Wahidin menekankan pada masalah tradisi Jawa masa lampau dari pada modernisasi Jawa pada masa depan.

Para siswa STOVIA dan sebahagian hadirin lainnya tentu saja tidak keberatan terhadap pendapat Dr Wahidin yang mementingkan pendidikan Barat. Tetapi timbul sikap pesimis dari peserta kongres dimana pendidikan Barat itu hanya bagi priyayi sedangkan para peserta menghendaki pendidikan untuk seluruh penduduk di Hindia Timur Belanda. Jadi kongres tersebut dibagi dalam dua kelompok yaitu kelompok pertama

yang diwakili Wahidin, Radjiman dan Swidjosewoyo yang berpendapat “apabila elite masyarakat Jawa telah berpendidikan, maka rakyat jelata akan segera mengikutinya atau pendekatan pendidikan dari atas”. Kelompok kedua yang mewakili Tjipto, Goenawan dan Soetomo lebih mementingkan kebutuhan akan pendidikan desa. Banyak di kalangan utusan, termasuk sementara STOVIA sangat tidak berminat terhadap pendirian dari bawah. Mayoritas peserta kongres berasal dari priyayi kecil yang tentu saja menginginkan kedudukan yang lebih tinggi. Mengingat situasi sosial saat itu dan gagasan “pendidikan dari atas” yang diterima secara luas, maka sangat tidak realistis kiranya apabila mengharapkan Budi Utomo dipimpin oleh seorang yang lebih progresif sejak awal. Sebaiknya organisasi ini dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita yang lebih bercorak tradisional. Nampaknya akan terjadi suatu argumentasi tentang bentuk organisasi Budi Utomo apakah bentuk organisasi politik atau organisasi sosial. Kalau menjadi organisasi politik tidak memungkinkan karena masih berlakunya peraturan Belanda, *Regeering Rglement* pasal 111 yang melarang mendirikan perkumpulan politik atau yang serupa dengan perkumpulan yang mengganggu ketentraman umum. Oleh karena itu Budi Utomo mengutamakan dergerak dalam bidang Pendidikan.

Hal penting lainnya dalam kongres Budi Utomo adalah dengan terpilihnya R. A. A. Tirtikoesoemo, Bupati Karanganyar sebagai ketua umum.

Beliau salah seorang yang giat dalam memajukan pendidikan Barat, dengan prakarsa sendiri sebelum tahun 1908 ia mendirikan sekolah gadis dan itu merupakan salah satu dari jasa-jasa Tirtokoesoemo di mata sidang Budi Utomo. Terpilihnya Tirtokoesoemo merupakan penyerahan tidak langsung kepemimpinan dari tangan siswa STOVIA kepada anggota-anggota yang lebih dewasa. Pemerintah kolonial Belanda akan sangat setuju atas terpilihnya Tirtokoesoemo karena diharapkan ia mampu memberikan jaminan kerjasama antara pemerintah dengan pengurus Budi Utomo. Sikap pemerintah kolonial terhadap Budi Utomo tercantunm dalam sebuah artikel tanpa nama dalam Indische Gids, yaitu:

“Banyak orang menggantungkan sikap mereka pada sikap pemerintah terhadap organisasi baru itu, dan pemerintah menghadapi pilihan yang sulit, apakah bertentangan dengan kehendaknya, harus menolak pejabat-pejabat tua yang kurang maju tetapi setia dan tanpa cacat dipandang dari sudut adat ataukah harus berpaling kepada generasi muda yang lebih maju”¹⁹⁷

Telah terjadi keriauan di kalangan pejabat Hindia Belanda terhadap perkembangan Budi Utomo. Pengangkatan Tirtokoesoemo aka dipandang sebagai pertanda baik, tetap secara resmi pemerintah Hindia Beland bersikap hati-hati dengan tidak memberikan pendapa tentan organisasi Budi Utomo. Pemerintah Hindia Belanda tidak tergesa-gesa

memberikan pengakuan yang sah terhadap Budi Utomo. Dalam tubuh Budi Utomo akan terjadi perbedaan pendapat di antara pimpinan Budi Utomo Kelompok yang satu menganjurkan agar Budi Utomo menjadi partai politik dan kelompok lainnya lagi menghendaki agar Budi Utomo memperluas perhatiannya sehingga meliputi seluruh Hindia. Lebih tepatnya dua kelompok ini adalah orang-orang yang cenderung berpihak kepada cita-cita Hindia daripada citacita Jawa yang sempit, tidak bisa lagi menerima homogenitas etnis dan kultur sebagai basis persatuan. Terpaksalah mereka berbicara dalam bahasa politik dengan tidak memandang masa lampau, tetapi cenderung mengutamakan masa kini.

D. Tujuan Berdirinya Budi Utomo

Budi utomo sebagai organisasi pelajar yang baru muncul ini, secara samar-samar merumuskan tujuannya untuk kemajuan Hindia, dimana yang jangkauan gerak semulanya hanya terbatas pada Pulau Jawa dan Madura yang kemudian diperluas untuk penduduk Hindia seluruhnya dengan tidak memperhatikan perbedaan keturunan, jenis kelamin dan agama. Namun dalam perkembangannya terdapat perdebatan mengenai tujuan Budi Utomo, dimana Dr.Cipto Mangunkusumo yang bercorak politik dan radikal, Dr.Radjiman Wedyodiningrat yang cenderung kurang memperhatikan keduniawian serta Tirtokusumo (Bupati Karanganyar) yang lebih banyak memperhatikan reaksi dari pemerintah kolonial

dari pada memperhatikan reaksi dari penduduk pribumi. Setelah perdebatan yang panjang, maka diputuskan bahwa jangkauan gerak Budi Utomo hanya terbatas pada penduduk Jawa dan Madura dan tidak akan melibatkan diri dalam kegiatan politik. Bidang kegiatan yang dipilihnya pendidikan dan budaya. Pengetahuan bahasa Belanda mendapat prioritas utama, karena tanpa bahasa itu seseorang tidak dapat mengharapkan kedudukan yang layak dalam jenjang kepegawaian kolonial. Dengan demikian Budi Utomo cenderung untuk memajukan pendidikan bagi golongan priyayi dari pada bagi penduduk pribumi pada umumnya. Slogan Budi Utomo berubah dari perjuangan untuk mempertahankan penghidupan menjadi kemajuan secara serasi. Hal ini menunjukkan pengaruh golongan tua yang moderat dan golongan priyayi yang lebih mengutamakan jabatannya.

E. Reaksi Belanda terhadap berdirinya Budi Utomo

Kehadiran Budi Utomo di Indonesia mengundang reaksi yang kurang enak dari orang Belanda yang tidak senang dengan kehadiran “si Molek “ dan mengatakan bahwa orang Jawa makin banyak “cincong”. Halnya menurut M.C.Ricklefs dalam bukunya Sejarah Indonesia Modern yang menyebutkan bahwa Gubernur Jenderal van Heutsz yang menyambut baik Budi Utomo, sebagai tanda keberhasilan politik etnis yang menghendaki adanya suatu organisasi pribumi yang progresif-moderat yang dikendalikan oleh para pejabat yang

maju. Namun pejabat-pejabat Belanda lainnya mencurigai Budi Utomo yang dianggap sebagai gangguan yang potensial. Pancaran eksistensi Budi Utomo di Indonesia dibuktikan dengan diadakannya konggresnya yang pertama di Yogyakarta pada tanggal 3-5 Oktober 1908. Dalam waktu singkat Budi Utomo mengalami perubahan orientasi. Kalau semula orientasinya terbatas pada kalangan priyayi maka menurut edaran yang dimuat dalam *Bataviaasch. Nieuwsblad* tanggal 23 Juli 1908, Budi Utomo cabang Jakarta menekankan cara baru bagaimana memperbaiki kehidupan rakyat.

Di dalam kongres tersebut menghasilkan beberapa keputusan, sebagai berikut :

- a. Tidak mengadakan kegiatan politik
- b. Bidang utama adalah pendidikan dan kebudayaan
- c. Terbatas wilayah Jawa dan Madura
- d. Mengangkat Raden Adipati Tirtokusumo (Bupati Karanganyar) sebagai ketua Budi Utomo.

Semenjak dipimpin oleh Raden Adipati Tirtokoesoemo, banyak anggota baru BU yang bergabung dari kalangan bangsawan dan pejabat kolonial, sehingga banyak anggota muda yang memilih untuk menyingkir. Dibawah kepemimpinan generasi tua, kegiatan Budi Utomo yang awalnya terpusat di bidang pendidikan, sosial, dan budaya, akhirnya mulai bergeser di bidang politik. Strategi perjuangan BU juga ikut berubah dari yang awalnya sangat menonjolkan sifat protonasionalisme menjadi lebih kooperatif dengan pemerintah kolonial belanda.

Perkembangan selanjutnya merupakan periode yang paling lamban bagi Budi Utomo. Aktivitasnya hanya terbatas pada penerbitan majalah bulanan Goeroe Desa dan beberapa petisi, yang di buatnya kepada pemerintah berhubung dengan usaha meninggikan mutu sekolah menengah pertama. Tatkala kepemimpinan pengurus pusat makin melemah, maka cabang-cabang BU melakukan aktivitas sendiri yang tidak banyak hasilnya. Pemerintah yang mengawasi perkembangan BU sejak berdirinya, dengan penuh perhatian dan harapan akhirnya menarik kesimpulan bahwa pengaruh BU terhadap penduduk pribumi tidak begitu besar. Pada tahun 1912 terjadi pergantian pemimpin dari Tirtokusumo ke tangan Pangeran Noto Dirodjo yang berusaha dengan sepenuh tenaga mengejar ketinggalan. Dengan ketua yang baru itu, perkembangan Budi Utomo tidak begitu pesat lagi. Hasil-hasil yang pertama di capainya yaitu perbaikan pengajaran di daerah kesultanan dan kasunanan. Budi utomo mendirikan organisasi darmoworo. Tetapi hasilnya tidak begitu pesat. Dalam masa kepemimpinannya terdapat dua organisasi nasional lainnya yaitu syarekat Islam dan Indische Partij. Kedua partai tersebut merupakan unsur-unsur yang tidak puas terhadap Budi Utomo.

Kekuatan Budi Utomo kembali bangkit sejak mulai pecahnya Perang Dunia I pada tahun 1914. Berdasarkan adanya kemungkinan intervensi kekuasaan asing maka Budi Utomo melancarkan isu pentingnya pertahanan sendiri dan yang pertama mengajukam gagasan wajib militer pribumi. Diskusi

yang terjadi berturut-turut dalam pertemuan-pertemuan setempat justru menggeser perhatian rakyat dari soal wajib militer ke arah soal perwakilan rakyat, sehingga dikirimlah sebuah misi kenegri Belanda oleh komite" Indie Weerbaar " untuk pertahanan India dalam tahun 1916-1917 yang merupakan pertanda masa yang amat berhasil bagi Budi Utomo. Dwidjosewoyo sebagai wakil Budi Utomo dalam misi tersebut berhasil mengadakan pendekatan dengan pemimpin-pemimpin Belanda terkemuka keterangan menteri urusan jajahan tentang pembentukan Volksraad (Dewan Rakyat) yang waktu itu dibicarakan didalam dewan perwakilan rakyat Belanda, dimana ia menekankan badan itu akan dijadikan Dewan Perwakilan Rakyat yang nantinya akan menggembirakan anggota misi Budi Utomo.

Undang-undang wajib militer gagal sebaliknya undang-undang pembentukan Volksraad disahkan pada bulan November 1914. Di dalam sidang Volksraad wakil-wakil Budi Utomo masih tetap berhati-hati dalam melancarkan kritik terhadap kebijaksanaan politik pemerintah. Sebaliknya para anggota pribumi yang lebih radikal dan juga anggota sosialis Belanda di dalam Volksraad melaukan kritik terhadap pemerintah dengan memakai kesempatan adanya krisis bulan November 1918 di negeri Belanda mereka menuntut perubahan bagi Volksraad dan kebijakan politik negeri Belanda umumnya sampai akhirnya dibentuk sebuah komisi pada tahun 1919. Mengapa Budi Utomo tidak langsung terjun ke lapangan politik

seperti organisasi yang kemudian lahir? Rupanya Budi Utomo menempuh cara dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pada waktu itu sehingga wajar jika Budi Utomo berorientasi pada kultural. Tindakan yang tepat ini berarti Budi Utomo tanggap terhadap politik kolonial yang sedang berlaku. Contohnya ialah bahwa pemerintah sudah memasang rambu Regeerings Reglement (RR) pasal 111 yang bertujuan membatasi hak untuk rapat dan berbicara, dengan perkataan lain adanya pembatasan hak berpolitik. Selama RR masih berlaku maka kegiatan Budi Utomo hanya terbatas pada bidang sosio-kultural. Ini merupakan bukti bahwa Budi Utomo selalu menyesuaikan diri dengan keadaan sehingga gerakan kultural lebih mewarnai kegiatan Budi Utomo pada fase awal. Kebudayaan sendiri dijunjung tinggi guna menghargai harkat diri agar mampu menghadapi kultur asing yang masuk.

F. berakhirnya Organisasi Budi Utomo

Pada dekade ketiga abad XX kondisi-kondisi sosio-politik makin matang dan Budi Utomo mulai mencari orientasi politik yang mantap dan mencari massa yang lebih luas. Kebijakan politik yang dilakukan oleh pemerintah kolonial, khususnya tekanan terhadap pergerakan nasional maka Budi Utomo mulai kehilangan wibawa, sehingga terjadilah perpisahan kelompok moderat dan radikal dalam Budi Utomo. Selain itu juga, karena Budi Utomo tidak pernah mendapat dukungan massa, kedudukannya secara politik kurang begitu

penting, sehingga pada tahun 1935 organisasi ini resmi dibubarkan.

Tujuan organisasi Budi Utomo tidak maksimal karena banyak hal, yaitu :

- a. Adanya kesulitan finansial.
- b. Adanya sikap Raden Adipati Tirtokusumo yang lebih memperhatikan kepentingan pemerintah kolonial dari pada rakyat.
- c. Lebih memajukan pendidikan kaum priyayi dibanding rakyat jelata.
- d. Keluarnya anggota dari golongan mahasiswa.

PENUTUP

Budi Utomo merupakan sebuah organisasi pelajar yang didirikan oleh Dr.Sutomo dan para mahasiswa STOVIA (School tot Opleiding voor Inlandsche Arsten) yaitu Goenawan, Dr.Cipto Mangoenkeosoemo dan Soeraji seta R.T Ario Tirtokusumo. Berdirinya Budi Utomo tak bisa lepas dari peran Dr. Wahidin Sudirohusodo. Jangkauan gerak Budi Utomo hanya terbatas pada penduduk Jawa dan Madura dan tidak akan melibatkan diri dalam kegiatan politik. Bidang kegiatan yang dipilihnya pendidikan dan budaya.

Kehadiran Budi Utomo di Indonesia mengundang reaksi yang baik. Budi Utomo dianggap sebagai tanda keberhasilan politik ethis yang menghendakaki adanya suatu organisasi

pribumi yang progresif-moderat yang dikendalikan oleh para pejabat yang maju. Namun pejabat –pejabat Belanda lainnya mencurigai Budi Utomo yang dianggap sebagai gangguan yang potensial. Dalam perkembangannya Budi Utomo mengalami fluktuasi. Budi Utomo menempuh cara dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pada waktu itu sehingga wajar jika Budi Utomo berorientasi pada kultural. Tindakan yang tepat ini berarti Budi Utomo tanggap terhadap politik kolonial yang sedang berlaku.

Pada dekade ketiga abad XX kondisi-kondisi sosio-politik makin matang dan Budi Utomo mulai mencari orientasi politik yang mantap dan mencari massa yang lebih luas. Kebijakan politik yang dilakukan oleh pemerintah kolonial, khususnya tekanan terhadap pergerakan nasional maka Budi Utomo mulai kehilangan wibawa, sehingga terjadilah perpisahan kelompok moderat dan radikal dalam Budi Utomo. Selain itu juga, karena Budi Utomo tidak pernah mendapat dukungan massa, kedudukannya secara politik kurang begitu penting, sehingga pada tahun 1935 organisasi ini resmi dibubarkan.





BAB IX

GERAKAN MUHAMMADIYAH

A. Latar Belakang Berdirinya Muhammadiyah

Muhammadiyah lahir pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H. atau tanggal 18 Nopember 1912 M. yakni pada saat dunia Islam sedang semangat untuk bangkit dari keterpurukan. Hampir seluruh negara-negara Islam di dunia sedang mengalami ketertindasan dalam penjajahan, termasuk Indonesia pada saat itu dijajah oleh Belanda. Ada dua faktor utama pendorong geliat ummat Islam Indonesia, yakni keinginan untuk merdeka, dan keinginan meningkatkan kualitas ummat Islam Indonesia sebagaimana kebangkitan Islam di dunia yang sedang membahana.

Islam merupakan komponen penting yang turut membentuk dan mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu. Perjuangan umat Islam merupakan suatu proses ke arah pembentukan pola tatanan baru dalam dinamika kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Dalam kurun waktu permulaan abad 20 hingga abad 21 sekarang ini, pergerakan Islam memberikan peran tersendiri di negeri ini. Perjalanan sejarah umat Islam di Indonesia memperlihatkan peranan yang amat dominan dalam menyuarakan dan menegakkan kemerdekaan dalam segala aspeknya; menentang

penjajahan, mengupayakan kemerdekaan politik untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan, perjuangan bersenjata dalam perang kemerdekaan, perjuangan di alam pembangunan dalam mengisi kemerdekaan, hingga menyuarakan kemerdekaan berpikir, umat Islam tampil paling depan dengan segala konsekwensinya.¹⁹⁸

B. Zaman Kolonial Belanda

Bangsa Indonesia sejak abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20 berada di bawah kekuasaan imperialisme Barat (Belanda yang paling lama yang menguasai segala aspek kehidupan dan mencoba melumpuhkan kekuatan umat dan bangsa ini. Sejak zaman VOC¹⁹⁹ masa awal penjajahan Belanda, berganti ke zaman Cultuur Stelsel (tanam paksa) terus ke priode Etische Politiek (polotik etis), hingga zaman Volksraad (Dewan Rakyat tempat berbagai diplomasi politik berkembang, dan berakhir pada zaman Exorbitante Rechten (hak luar biasa di tangan Gubernur Jenderal), kekayaan dan kemakmuran bangsa Indonesia dihisap oleh penjajah Belanda dan hanya meninggalkan ampasnya. masa awal penjajahan Belanda, berganti ke zaman Cultuur Stelsel (tanam paksa) terus ke priode Etische Politie (polotik etis), hingga zaman Volksraad (Dewan Rakyat) tempat berbagai diplomasi politik berkembang, dan berakhir pada zaman Exorbitante Rechten (hak luar biasa di tanga Gubernur Jenderal), kekayaan dan kemakmuran bangsa Indonesia dihisap oleh penjajah Belanda.

Kemerdekaan berpikir dan bertindak dirampas oleh kekuatan politik kolonial. Akibat dari lima periode penjajahan Belanda tersebut bangsa Indonesia menanggung penderitaan yang tiada tara. Umat Islam pun bangkit melawan. Umat Islam menjadi barisan terdepan dalam menghadapi penjajahan Belanda, karena Islam pada dasarnya anti imperialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Sebut saja Sultan Hasanudin, Sultan Ageng Tirtayasa, Imam Bonjol, Pengeran Dipenogoro, Teuku Umar, Tjut Nyak Dien, dan masih banyak pemimpin-pemimpin Islam lainnya sebagai gardan terdepan dalam membangkit dan mengobarkan perlawanan untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Pemerintah Belanda pun memahami, jika kesadaran persatuan umat Islam yang bersumber kepada ajaran Islam tergalang, maka bahaya dan bencana besar bagi kekuatan kolonial Belanda akan mengancam. Pada akhirnya mereka pun menggunakan politik *divide et impera*; memecah belah untuk kemudian menguasai.

Pada permulan abad 20 adalah tampilnya berbagai organisasi Islam yang di satu pihak memberikan pembaruan ke dalam pola pemikiran Islam dengan melakukan pemurnian akidah dari unsur-unsur pra Islam, dan di pihak lain melahirkan kelompok yang berpegang teguh pada paham dan anggapan lama serta madzhab yang dianutnya. Kelompok pertama yang membawa arus gerakan pembaruan mendirikan organisasi-organisasi untuk menggalang persatuan umat Islam dan mendidik mereka agar sejalan dengan tuntutan masa. Di

antaranya dengan mendirikan lembaga Pendidikan (pesantren) yang memasukkan berbagai mata pelajaran umum ke dalam kurikulumnya. Organisasi-organisasi pembaru itu antara lain Muhammadiyah yang didirikan tahun 1912 di Yogyakarta, al-Irsyad yang berdiri di Jakarta tahun 1914, Persatuan Islam (Persis) di Bandung pada tahun 1923, dan berbagai organisasi lain yang sejenis.²⁰⁰

Perkembangan selanjutnya, perbedaan-perbedaan yang awalnya timbul di kalangan kelompok modernis dan tradisional yang lebih merupakan perbedaan-perbedaan dalam masalah furu' (cabang) dan bukan dalam masalah ushul (pokok) sehingga menimbulkan saling pengertian. Persatuan di antara umat Islam pun semakin terasa di kala berhadapan dengan kekuatan politik yang menghambatnya. Ketika tahun 1935 berdiri Majelis Islam A"la Indonesia

(MIAI) tempat berhimpunnya berbagai organisasi Islam yang telah banyak bermunculan pada awal abad ke-20 guna merespon perilaku politik pemerintah kolonial. Pertemuan-pertemuan antar ulama dari berbagai organisasi melakukan dialog dan kerjasama untuk memecahkan masalah atau mencari solusi bersama untuk melepaskan diri dari hegemoni penjajahan. Demikian pula, hubungan antara organisasi-organisasi Islam dan kalangan nasionalis (netral agama) yang berbeda pandangan sejak pertengahan tahun 1920-an hingga permulaan tahun 1930-an, mulai membaik dengan adanya GAPI (Gabungan Politik Indonesia) yang didirikan tahu 1939, serta

Majelis Rakyat Indonesia (MRI) yang didirikan pada tahun 1941. Dimana MRI merupakan pertemuan antara GAPI, MIAI, dan Persatuan Vakbonden Pegawai Negeri (federasi pekerja dalam jabatan pemerintahan). Salah satu contoh dari hubungan yang membaik itu dapat dilihat dari dukungan umat Islam terhadap memorandum tuntutan Indonesia berparlemen pada tahun 1939 yang disokong sepenuhnya oleh golongan nasionalis, termasuk kalangan Islam, demikian pula tentang perubahan konstitusi Indonesia yang dituntut oleh pergerakan nasional pada tahun 1941.

C. Zaman Kolonial Jepang

Masa selanjutnya, ketika Jepang menjajah bangsa Indonesia, kolonial baru tersebut berusaha menerapkan pola nipponisasi terhadap bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Bangsa Jepang memerintahkan rakyat Indonesia, termasuk para ulamanya, melakukan saikerei (memberi hormat dengan cara membungkukkan badan ke arah matahari terbit). Cara penghormatan yang hampir sama dengan ruku' ini membuat marah kalangan umat Islam. Selain itu, umat Islam tidak dapat menerima kepercayaan Jepang yang meyakini bahwa mereka bangsa terpilih di dunia dan bahwa kaisar mereka merupakan turunan dewa. Menurut kalangan Islam anggapan seperti itu jelas menjurus ke arah kemusyrikan.

Kesalahan yang dapat menyinggung perasaan umat Islam itu berusaha dihapus oleh pihak Jepang; mereka berusaha

menarik kaum muslimin dan mengangkatnya dengan cara memberikan kebebasan bergerak dalam organisasi Islam dengan mendirikan kembali MIAI pada 5 September 1942, dan kemudian berubah menjadi Majelis Shuro Muslimin Indonesia (Mashumi) bukan Masyumi pimpinan Mohammad Natsir. Cara lain yang ditempuh oleh pihak Jepang untuk menarik simpati kaum muslimin, yang di kemudian hari memberikan keuntungan bagi bangsa Indonesia adalah diselenggarakannya latihan-latihan kemiliteran bagi para santri, ulama, dan umumnya umat Islam. Latihan kemiliteran itu lamanya satu bulan berturut-turut mulai pertengahan tahun 1943 dan diikuti oleh sekitar 60 orang ulama dari berbagai kabupaten di Jawa. Kemudian suatu latihan yang lamanya tiga bulan diadakan untuk 80 orang guru agama dalam tahun 1944.

Pada masa Jepang inilah, umat Islam mendirikan lascar perjuangan Hizbullah pada 1944, yang dalam Revolusi Fisik, laskar ini turut ambil bagian mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Di samping itu, sebagian besar para pemuda muslim banyak yang tergabung dalam barisan tentara Pembela Tanah Air (PETA) yang telah didirikan pada bulan Oktober 1943. Selain itu, perlawanan fisik juga dilakukan oleh umat Islam terhadap Jepang yang melakukan penindasan. Romusha atau kerja paksa yang diterapkan bagi rakyat Indonesia telah mengundang kemarahan, di samping paksaan ideologi nipponisasi.

Bangsa Indonesia dan ummat Islam pada khususnya sebagai bangsa dan ummat yang terjajah, dan pemahaman keagamaannya juga tergolong rendah, tetapi telah muncul era kesadaran dari ummat Islam sendiri akan perlunya peningkatan kualitas ummat Islam. Peningkatan kualitas itu kongkrit riilnya adalah adanya upaya-upaya mendirikan lembaga pendidikan yang berusaha mencerdaskan kehidupan penduduk pribumi. Selain itu muncul pula kesadaran bahwa keterpurukan dan keterbelakangan yang dialami penduduk bumi putera ini adalah akibat adanya penjajahan. Oleh karenanya penjajahan harus diakhiri, dengan cara ummat Islam harus membakar semangat diri untuk lepas dari penjajahan, baik dengan cara-cara yang kooperatif maupun dengan cara-cara yang konfrontatif.

Salah satu upaya menumbuhkan kesadaran baik dalam upaya meningkatkan kualitas ummat Islam, maupun upaya penyadaran betapa pentingnya persaudaraan, kerjasama, dan menjaga harkat dan martabat sebagai komunitas yang mandiri, adalah Ahmad Dahlan seorang ulama intelektual pada waktu itu berhasil menggerakkan ummat Islam dan bangsa pribumi ini untuk bersama-sama menjadi bangsa yang mandiri, terlepas dari penjajah, serta memiliki kemampuan pemahaman terhadap Islam yang benar, dengan mendirikan persyarikatan Muhammadiyah.

D. Sejarah Terbentuknya Muhammadiyah

Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman Yogyakarta, pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H/18 Nopember 1912 oleh seorang yang bernama Muhammad Darwis, kemudian dikenal dengan KH Ahmad Dahlan, Beliau adalah pegawai kesultanan Kraton Yogyakarta sebagai seorang Khatib dan sebagai pedagang. Melihat keadaan umat Islam pada waktu itu dalam keadaan jumud, beku dan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik, beliau tergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan Qur`an dan Hadist. Oleh karena itu beliau memberikan pengertian keagamaan dirumahnya ditengah kesibukannya sebagai Khatib dan para pedagang.²⁰¹

Mula-mula ajaran ini ditolak, namun berkat ketekunan dan kesa barannya, akhirnya mendapat sambutan dari keluarga dan teman dekatnya. Profesinya sebagai pedagang sangat mendukung ajakan beliau, sehingga dalam waktu singkat ajakannya menyebar ke luar kampung Kauman bahkan sampai ke luar daerah dan ke luar pulau Jawa. Untuk mengorganisir kegiatan tersebut maka didirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Dan kini Muhammadiyah telah ada diseluruh pelosok tanah air. Disamping memberikan pelajaran/pengetahuannya kepada laki-laki, beliau juga memberi pelajaran kepada kaum Ibu muda dalam forum pengajian yang disebut "Sidratul Muntaha". Pada siang hari

pelajaran untuk anak-anak laki-laki dan perempuan. Pada malam hari untuk anak-anak yang telah dewasa.

Pada awalnya Nama “Muhammadiyah” adalah usulan dari kerabat, murid, sekaligus sahabat Ahmad Dahlan yang bernama Muhammad Sangidu, seorang Ketib Anom Kraton Yogyakarta dan tokoh pembaruan yang kemudian menjadi penghulu Kraton Yogyakarta, lewat keputusan Ahmad Dahlan setelah melalui shalat istikhārah.²⁰² Keinginan dari KH. Akhmad Dahlan untuk mendirikan organisasi yang dapat dijadikan sebagai alat perjuangan dan da’wah untuk menegakan amar ma’ruf nahi munkar yang bersumber pada Al-Qur’an, surat Al-Imron:104 dan surat Al-ma’un sebagai sumber dari gerakan sosial praktis untuk mewujudkan gerakan tauhid. Pemberian nama Muhammadiyah oleh Ahmad Dahlan diharapkan warga Muhammadiyah dapat mengikuti Nabi Muhammad saw dalam segala tindakannya. Sedangkan organisasi itu merupakan alat atau wadah dalam usaha melancarkan kegiatan sesuai tujuan. Hal ini dijelaskan Ahmad Dahlan yang terkenal dengan wasiatnya kepada organisasi Muhammadiyah yaitu bahwa:

*“Hidup-hiduplah Muhammadi-yah dan Tidak mencari penghidupan dalam Muhammadiyah”.*²⁰³

Ketidakmurnian ajaran Islam yang dipahami oleh sebagian umat islam Indonesia, sebagai bentuk adaptasi tidak tuntas antara tradisi Islam dan tradisi lokal nusantara dalam awal bermuatan paham animisme dan dinamisme. Sehingga

dalam prakteknya umat Islam di Indonesia memperlihatkan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, terutama yang berhubungan dengan prinsip akidah Islam yang menolak segala bentuk kemusyrikan, taqlid, bid'ah, dan khurafat. Sehingga pemurnian ajaran menjadi pilihan mutlak bagi umat Islam Indonesia. Artinya ideologi Muhammadiyah yang Beramar Ma'ruf Nahi Mungkar harus murni dilakukan.

Keterbelakangan umat Islam Indonesia dalam segi kehidupan menjadi sumber keprihatinan untuk mencari solusi agar dapat keluar menjadi keterbelakangan. Keterbelakangan umat Islam dalam dunia pendidikan menjadi sumber utama keterbelakangan dalam peradaban. Pesantren tidak bisa selamanya dianggap menjadi sumber lahirnya generasi baru muda Islam yang berpikir modern. Kesejahteraan umat Islam akan tetap berada dibawah garis kemiskinan jika kebodohan masih melengkupi umat Islam Indonesia. Maraknya Kristenisasi di Indonesia sebagai efek domino dari imperialisme Eropa ke dunia timur yang mayoritas beragama Islam. Proyek Kristenisasi satu paket dengan proyek imperialisme dan modernisasi bangsa Eropa, selain keinginan untuk memperluas daerah koloni untuk memasarkan produk-produk hasil revolusi industri yang melanda Eropa. Imperialisme Eropa tidak hanya membonceng gerilya gerejawan dan para penginjil untuk menyampaikan 'ajaran jesus' untuk menyapa umat manusia diseluruh dunia untuk 'mengikuti'

ajaran jesus. Tetapi juga membawa angin modernisasi yang sedang melanda Eropa.

Modernisasi yang terhembus melalui model pendidikan barat (Belanda) di Indonesia mengusung paham-paham yang melahirkan modernisasi Eropa, seperti sekularisme, individualisme, liberalisme dan rasionalisme. Jika penetrasi itu tidak dihentikan maka akan terlahir generasi baru Islam yang rasional tetapi liberal dan sekuler. Komitmen gerakan muhammadiyah yang mengemban misi dakwah dan tajdid berasas Islam, bersumber pada Al-Qur,an dan As-Sunnah. Menuju masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah sesuai jati dirinya senantiasa untuk menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menunjukkan kehidupan Umat, Bangsa dan dunia kemanusiaan.

Muhammadiyah dalam Usianya jelang satu abad telah banyak mendirikan tanam Kanak-kanak, Sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, balai pengobatan, rumah yatim piatu, usaha ekonomi, penerbitan dan badan usaha lainnya. Muhammadiyah juga membangun Masjid, Musallah, melakukan langkah-langkah Dakwah dalam bentuk kegiatan pembinaan umat yang luas di seluruh pelosok tanah air. Peran kesejahteraan yang di lakukan Muhammadiyah tersebut berlangsung dalam dinamika yang beragam.

Kiprah dan langkah muhammadiyah yang penuh dinamika itu belum mencapai puncak keberhasilan dalam mencapai tujuan dan cita-citanya, hinglah muhammadiyah

semakin di tuntut untuk merevitalisasi gerakannya keseluruhan lapangan kehidupan. Sehingga muhammadiyah akan melaksanakan tajdid (pembaruan) dalam gerakannya hingga di era kehidupan modern abad ke 21 yang kompleks ini sesuai dengan keyakinannya dapat tampil sebagai pilar kekuatan Gerakan pencerahan peradaban diberbagai lingkungan kehidupan.²⁰⁴

E. Muhammadiyah Sebagai Organisasi Pergerakan

1. *Majelis Tarjih: Pemegang Otoritas Ijtihad dalam Muhamma-diyah*

Majelis Tarjih didirikan memang tidak bersamaan dengan kelahiran Muhammadiyah yang dideklarasikan pada tahun 1330 H bertepatan dengan tahun 1918 M. Keberadaan Majelis Tarjih dalam Muhammadiyah merupakan hasil keputusan Kongres Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan pada tahun 1927, yang saat itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah di bawah kepemimpinan KH. Ibrahim (1878-1934).²⁰⁵ Pada Kongres itu diusulkan perlunya Muhammadiyah memiliki Majelis yang memayungi persoalan-persoalan hukum. Melalui Majelis ini, persoalan-persoalan hukum yang dihadapi warga Muhammadiyah dapat diputuskan oleh Majelis ini sehingga warga Muhammadiyah tidak terbelah ke dalam berbagai pendapat dalam mengamalkan ajaran Islam, khususnya terkait dengan masalah khilafiyah.

KH. Mas Mansur, ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur selaku peserta Kongres mengusulkan kepada Kongres Muhammadiyah ke-16, agar di Muhammadiyah dibentuk tiga Majelis, yaitu Majelis Tasyrî`, Tanfîz dan Taftîsyî. Gerakan tajdîd dalam Muhammadiyah memiliki dua makna, yaitu tajrîd yang bermakna purifikasi dan tajdîd sendiri yang bermakna pembaharuan.

a. Pengertian Tajdîd

Tajdîd berasal dari bahasa Arab yakni dari kata Jaddada Yujaddidu-Tajdîdan, bermakna memperbaharui sesuatu sehingga menjadi baru.²⁰⁶ Dengan kata lain, tajdid berarti pembaharuan terhadap segala usaha yang telah dilakukan masa lampau untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan sesuai dengan tujuan yang telah dicita-citakan. Dalam hal ini, Muhammadiyah berusaha memberikan yang terbaik bagi warga Muhammadiyah secara khusus dan warga masyarakat secara umum demi terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridai Allah SWT. Sedangkan tajdîd secara istilah terdapat beberapa para cendekiawan muslim yang mendefinisikan sebagai berikut: 1) Syamsul Anwar, tajdîd dibagi menjadi dua pengertian, yaitu:²⁰⁷

tajdîd dalam masalah akidah dan ibadah dimaknai pemurnian. Artinya mengembalikan akidah dan ibadah kepada kemurnian sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tajdîd dalam hal ibadah berarti menggali tuntunannya sedemikian rupa dari

sunnah Nabi SAW untuk menemukan bentuk yang paling sesuai atau paling mendekati sunnah beliau dengan tidak mengurangi adanya tanawwu' dalam masalah ibadah, sepanjang memang mempunyai landasannya yang jelas dalam sunnah. Misalnya, variasi bacaan do'a iftitah dalam salat yang menunjukkan bahwa Nabi SAW sendiri melakukan secara bervariasi. Varian ibadah yang tidak didukung oleh sunnah menurut Majelis Tarjih tidak dapat dipandang praktik ibadah yang bisa diamalkan. Sedangkan tajdīd di bidang akidah adalah pemurnian, berarti melakukan pengkajian untuk membebaskan akidah dari unsur-unsur khurafat dan takhayul.

Kedua, tajdid dalam bidang muamalat duniawiyah memiliki arti mendinamisasikan segi kehidupan masyarakat dengan semangat kreatif sesuai tuntutan zaman. Dalam bahasa sederhana, tajdīd adalah mendinamisakan kehidupan masyarakat sesuai dengan capaian kebudayaan yang dicapai manusia di bawah semangat dan ruh Aquran dan sunnah. Bahkan dalam aspek ini beberapa norma di masa lalu bisa berubah bila ada keperluan dan tuntutan untuk berubah. Misalnya, pada zaman dahulu untuk menentukan masuknya bulan kamariah baru, khususnya Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah, digunakan rukyat sesuai dengan hadis-hadis rukyat di mana Nabi SAW memerintahkan untuk melakukan rukyat. Namun pada zaman sekarang rukyat tidak lagi digunakan melainkan menggunakan metode hisab, sebagaimana dipraktekkan Muhammadiyah. Contoh lain, di masa lalu

perempuan tidak boleh menjadi pemimpin karena hadis Abu Bakrah yang melarang. Pada zaman sekarang terjadi perubahan ijtihad hukum yang mana perempuan boleh menjadi pemimpin seperti yang ditegaskan dalam Putusan Tarjih tentang Adab al-Mar'ah fi al-Islam.

2). Din Syamsuddin. Tajdid dimaknai sebagai penafsiran, pengamalan dan perwujudan ajaran Islam, dan dalam arti pemurnian berarti pemeliharaan matan ajaran Islam yang bersumber kepada Alquran dan sunnah al-Shahihah (al-Maqbūlah). Untuk melaksanakan dari kedua pengertian tersebut, diperlukan aktualisasi akal pikiran yang cerdas dan fitri, serta akal budi yang bersih yang dijiwai oleh ajaran Islam.

3). Haedar Nashir. Tajdid dimaknai pembaharuan. artinya memperbaharui alam pikiran sesuai zaman modern, melembagakan pendidikan Islam modern dan bahkan melawan misi zending dengan langkah-langkah modern sehingga disebut sebagai gerakan Islam modernis.

4). Model Tajrīd dan Tajdīd Muhammadiyah

Ada beberapa model atau karakteristik tajrīd dan tajdīd Muhammadiyah adalah sebagai berikut:

- a. Konkrit dan produktif, yaitu melalui amal usaha yang didirikan, diharapkan hasilnya konkrit dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh umat Islam, bangsa Indonesia dan umat manusia di seluruh dunia. Suburnya amal salih di lingkungan para aktivis Muhammadiyah ditujukan pada komunitas Muhammadiyah, bangsa dan kepada

seluruh umat manusia di dunia dalam rangka rahmatan lil Alamin.

- b. Tajdid bersifat terbuka, yaitu Muhammadiyah mampu mengantisipasi perubahan dan kemajuan di sekitarnya dengan amal usahanya yang dimasuki dan dimanfaatkan oleh siapa pun, seperti sekolah-sekolah, kampus, lembaga ekonomi, dan usaha atau jasa.
- c. Tajdid sangat fungsional dan selaras dengan cita-cita Muhammadiyah untuk menghadirkan Islam sebagai agama yang berkemajuan, dan juga berkebijakan yang senantiasa hadir sebagai pemecah segala problem yang dihadapi umat, seperti masalah kesehatan, pendidikan, sosial dan ekonomi.

Atas dasar demikian tajdid dalam bidang muamalah berbasis pada upaya dinamisasi, elaborasi, berbasis pada perubahan menuju capaian prestasi yang berkualitas. Pada akhirnya apa yang diusahakan Muhammadiyah hendaknya tampil menjadi pusat-pusat keunggulan, seperti sekolah, rumah sakit, perguruan tinggi, lembaga-lembaga ekonomi. Sementara itu, tajdid dalam bidang akidah dan ibadah mahdhah bukan bermakna dinamisasi, tetapi tajdid berwajah tajrid, yaitu purifikasi atau pemurnian ajaran Islam. Artinya, masalah akidah dan ibadah mahdhah hanya mencukupkan pada apa yang ada dalam Alquran dan hadis Nabi SAW.

F. Muhammadiyah Sebagai Gerakan Pendidikan

2. *Faktor yang Melatarbelakangi Muhammadiyah Bergerak di Bidang Pendidikan*

Faktor yang melatarbelakangi gerakan Muhammadiyah di bidang pendidikan adalah faktor internal dalam diri K.H. Dahlan sendiri yang sangat prihatin dengan melihat kondisi riil yang dialami umat Islam pada saat itu. Ada tiga penyakit kronis umat Islam pada saat itu, yakni kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Pertanyaannya apa yang menyebabkan mereka mengalami masalah kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan?²⁰⁸

Salah satu upaya dalam rangka memutuskan lingkaran syetan tersebut adalah dengan pencerdasan. Pencerdasan bisa terwujud melalui jalur pendidikan. Akibat ketidacerdasan dengan arti seluas-luasnya, sikap dan perilaku keberagamaan umat Islam saat itu belum rasional. Akibatnya keberagamaan menjadi tidak rasional tersebut yang menyebabkan banyak ajaran Islam dicampuradukkan dengan takhayul, bidah dan khurafat serta tumbuh suburnya sikap taklid. Semua itu telah menggiring umat Islam kepada kondisi kehilangan elan vital dan semangat hidup.

Kondisi social umat Islam seperti ini dimanfaatkan oleh penjajah kolonial Belanda dan fasisme Jepang agar nusantara tetap berada dalam cengkramannya. Kondisi yang sangat memerhatikan di atas dijawab oleh KH. Ahmad Dahlan

dengan mendirikan sekolah sebelum mendirikan organisasi Muhammadiyah. Pada tahun 1911, K.H. Ahmad Dahlan mendirikan sekolah dengan muridnya yang hanya sepuluh orang. Saat itu Ahmad Dahlan sendiri sebagai pengajar Ilmu agama dan Sumarsono Mestoko dan teman-temannya pemerintah bersedia membantu mengajarkan beberapa ilmu umum tahun 1986. Atas dasar semangat kontribusi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, Muhammadiyah sebagai organisasi pun didirikan setahun kemudian.²⁰⁹ Sekolah tersebut bernama “Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah” yang berada di rumah beliau sendiri dalam ruang tamunya yang hanya berukuran 2,5 X 6 M.²¹⁰

3. Cita-Cita Pendidikan Muhammadiyah

Berbicara Cita-cita pendidikan Muhammadiyah berarti menjelaskan Visi dan Misi Pendidikan Muhammadiyah. Bagi Muhammadiyah pendidikan merupakan suatu hal sangat penting dan memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam mencapai suatu maksud dan tujuan Muhammadiyah, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tujuan itu bisa dicapai dengan melaksanakan dakwah, salah satunya melalui pendidikan. Cita-cita pendidikan adalah terbentuk karakter pribadi muslim yang memiliki akhlak, kemandirian individu dan berjiwa sosial, sebagaimana K.H. Ahmad Dahlan pernah mengatakan bahwa suatu nilai dasar pendidikan yang

perlu dipertegas dan dilaksanakan untuk membangun bangsa yang besar adalah:

- a. Pendidikan Akhlak, yaitu sebagai usaha menanamkan karakter manusia yang baik berdasarkan Alquran dan Sunnah.
- b. Pendidikan individu yaitu usaha untuk menumbuhkan kesadaran individu yang utuh, yang berkeimbangan antara perkembangan mental dan jasmani, keyakinan dan intelek, perasaan dan akal, dunia dan akhirat.
- c. Pendidikan sosial yaitu usaha untuk menumbuhkan kesediaan dan keinginan hidup bermasyarakat.

4. Bentuk-Bentuk dan Model Pendidikan Muhammadiyah.

Menurut KH. Ahmad Dahlan, Pendidikan adalah upaya strategis untuk menyelamatkan umat Islam dari pola berpikir yang statis menuju pola pemikiran yang dinamis.²¹¹ Dalam hal ini tampak pemikiran KH. Ahmad Dahlan yang mencoba melakukan pembaharuan pendidikan agar tidak statis, namun harus berfikir kritis dan dinamis sehingga umat Islam bisa keluar dari pembedahan yang dilakukan oleh kolonial belanda dan Jepang. KH. Ahmad Dahlan melakukan pembaharuan dengan cara menggabungkan sistem pendidikan Islam yakni sistem pondok pesantren dengan pendidikan Barat yang keduanya mempunyai kelebihan dan kekurangan sehingga baik. Dua model pendidikan tersebut, diharapkan melahirkan

anak didik yang berkepribadian utuh, berakhlak mulia dan berguna bagi masyarakat. Semua itu tercermin dalam Cita-cita pendidikan yang dikembangkan.

KH. Ahmad Dahlan yaitu terbentuknya manusia muslim yang baik (alim dalam ilmu-ilmu agama), luas pandangan (alim dalam ilmu-ilmu dunia atau umum) bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakatnya. KH. Ahmad Dahlan menerapkan sistem penggabungan tersebut ke dalam sekolah dan madrasah, seperti sarana fisik, bangku, meja dan papan tulis di samping administrasi dan organisasi lebih tertib sebagaimana yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pemerintah. Murid-muridnya tidak lagi duduk di lantai seperti halnya kebiasaan di pesantren. Demikian pula penjenjangan durasi waktu belajar, bimbingan siswa di luar jam pelajaran dan penilaian dengan sistem ulangan atau ujian yang dilaksanakan secara periodik kepada murid-murid yang telah menamatkan masa pendidikan diberikan ijazah atau diploma. Sebagai proyek percontohan madrasah model ini ialah Pondok Muhammadiyah yang dikembangkan oleh KH. Ahmad Dahlan sendiri pada tahun 1920 di Yogyakarta. Pondok ini merupakan perguruan tingkat menengah pertama kali di kota itu yang memberikan ilmu umum dan agama bersama-sama. Organisasi sekolah dan penyelenggaraannya diatur secara modern yang sebelumnya tidak pernah sama sekali dilakukan oleh perguruan-perguruan agama. Untuk memahami lebih jauh perbandingan

penyelenggaraan pendidikan madrasah dan pondok pesantren adalah sebagai berikut:

- a. Cara mengajar dan belajar, di pondok pesantren masih menggunakan sistem lama dan masih dipakai cara belajar sorogan dan weton, akan tetapi di pondok Muhammadiyah dengan sistem baru dan digunakan sistem klasikal dengan memakai cara-cara Barat.
- b. Bahan pelajaran, di pondok pesantren lama semata-mata hanya bahan pelajaran agama. Kitab karangan pembaharu belum dipakai, di pondok Muhammadiyah bahan pelajaran yang digunakan tidak hanya bahan pelajaran agama, tetapi ilmu pengetahuan umum. Kitab-kitab agama dipergunakan secara luas baik oleh ulama lama maupun ulama baru.
- c. Rencana pelajaran, di pondok pesantren tempo lama belum memiliki planing atau rencana pelajaran yang teratur dan integral, sedang di pondok Muhammadiyah sudah teratur dengan rencana kurikulum sehingga terwujudnya efisiensi belajar lebih terjamin.
- d. Pendidikan di luar jam belajar, di pondok pesantren lama, pendidikan di luar jam belajar kurang mendapat perhatian. Di pondok Muhammadiyah bahwa pendidikan di luar jam belajar diselenggarakan di asrama dan dipimpin secara teratur.
- e. Pengasuhan dan guru, di pondok pesantren lama, para pengasuh terdiri dari para guru yang berpengalaman

agama, tetapi di pondok Muhammadiyah pengasuh terdiri dari ahli agama dan guru-guru ilmu pengetahuan umum. Di pondok Muhammadiyah para pengasuh ilmu agama seperti KH. Hajid, KH. Ibrahim, KH. Hanad dan KH. Ahmad Dahlan, sedangkan yang ahli di bidang ilmu pengetahuan umum adalah R. Ng Djojosedugito ahli sejarah, Sosrosugondo ahli bahasa Melayu, Darmowinto ahli dalam menggambar dan Pringgonoto ahli dalam bahasa Inggris.

5. Pemikiran dan Praksis Pendidikan Muhammadiyah

Pendidikan KH. Ahmad Dahlan adalah penyadaran fungsi dan peran manusia dalam hal menerapkan Islam yang sebenar benarnya, terintegrasinya antara ilmu agama dengan ilmu pengetahuan, mengembangkan sikap toleran dan terbuka kepada hal kemodernan. Hal ini sebagaimana disampaikan KH. Ahmad Dahlan melalui KH. Ibrahim:

“Agama Islam itu kami misalkan laksana gayung yang sudah rusak pegangannya dan rusak pula kalengnya, sudah sama bocor dimakan karat, sehingga tidak dapat digunakan pula sebagai gayung. Oleh karena itu, kita umat Islam, perlu menggunakan gayung tersebut, tetapi tidak bisa dipakai karena gayung itu sudah sangat rusak. Sedang kami tidak memiliki alat memperbaikinya, tetapi tetangga dan kaum di sekitarku hanya yang memegang dan mempunyai alat tersebut, mereka tidak mengetahui dan tidak menggunakan dan tidak bisa

memperbaiki gayung yang kami butuhkan itu. Maka, perlulah kami mesti berani meminjam untuk memperbaikinya. Siapakah tetangga dan kawan-kawan di sekitar kami itu? Ialah mereka kaum cerdik pandai dan mereka terpelajar yang mereka itu tidak memahami agama Islam. Padahal mereka pada dasarnya merasa dan mengakui bahwa pribadinya itu muslim juga. Karena banyak mereka itu memang daripada keturunan kaum muslimin malah ada yang keturunan Pengulu dan Kyai terkemuka. Tetapi, karena mereka melihat umat Islam pada umumnya dalam keadaan krisis dalam segalagalanya, mereka tidak ingin menjadi umat yang bobrok. Oleh karena itu dekatilah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya, sehingga mereka mengenal kita dan kita mengenal mereka. Sehingga, perkenalan kita timbal balik sama-sama memberi dan sama-sama menerima.²¹²

KH. Ahmad Dahlan juga menekankan penyempurnaan pendidikan akal sebagai berikut:

“Setinggi-tingginya pendidikan akal ialah pendidikan dengan Ilmu Mantiq ialah suatu ilmu yang membicarakan suatu yang cocok dengan kenyataan sesuatu itu. Dan ilmu tersebut harus dipelajari. Sebab tidak ada manusia yang mengetahui berbagai nama dan bahasa jika tidak ada yang mengajarnya, demikian juga orang yang mengajar itu mendapatkan ilmu dari guru mereka dan seterusnya.”²¹³

Paparan di atas menunjukkan bahwa pendidikan Islam yang ditawarkan KH. Ahmad Dahlan memiliki beberapa tujuan,

yaitu: pertama, mewujudkan generasi yang baik budi. Kedua, alim dalam ilmu agama dan luas pandangan dengan menguasai ilmu pengetahuan umum. Ketiga, berkomitmen untuk berjuang demi kepentingan masyarakat dan umat Islam.²¹⁴ Aktivitas pendidikan yang dilakukan KH. Ahmad Dahlan adalah mengajarkan agama Islam kepada para siswa Kweekschool serta merintis kelompok pengajian di Kauman dan sekitarnya. Kelompok pengajian yang cukup terkenal adalah Fathul Asrar wa Miftahus Sa'adah (FAMS), Sapa Tresna, dan wa al-Aşri.²¹⁵ KH. Ahmad Dahlan merintis Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah tahun 1911, setahun sebelum Muhammadiyah berdiri. Sekolah itu dilaksanakan di sebuah rumah K.H. Ahmad Dahlan. Media pembelajaran yang dipakai adalah dengan mengadopsi model pendidikan Barat, di mana proses pembelajaran itu dilengkapi dengan fasilitas meja, kursi, papan tulis dan alat peraga. Muatan materi ilmu agama seperti bahasa Arab, Adab, Tarikh Anbiya dan Islam, khusnul Khat, Fiqh, Tauhid, Al-Qur'an al-Karim, Tafsir Alquran, dan Hadis. Sedangkan ilmu umum seperti ilmu hitung, ilmu hayat, berhitung, menulis dan menggambar.²¹⁶ KH. Ahmad Dahlan juga banyak memberikan materi tentang keimanan, akhlak, semangat berjuang untuk agama Islam. Pendekatan pendidikan yang digunakan KH. Ahmad Dahlan adalah dengan pendekatan kontekstual dan menyesuaikan taraf berfikir peserta didik dan praktik.²¹⁷



BAB X

GERAKAN NAHDLATUL ULAMA

A. Latar belakang berdirinya NU

Nahdlatul Ulama (NU) sejak kelahirannya merupakan wadah perjuangan untuk menentang segala bentuk penjajahan dan merebut kemerdekaan Negara Republik Indonesia dari penjajah Belanda dan Jepang, sekaligus aktif melakukan dakwah untuk senantiasa menjaga kesatuan Negara Republik Indonesia dalam wadah NKRI. Bagaimana NU dalam peranannya yang begitu besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Paling tidak ada tiga alasan besar yang melatarbelakangi lahirnya Nahdlatul Ulama 31 Januari 1926, yaitu Pertama, motif agama. Kedua, motif mempertahankan paham Ahlu al-Sunnah wal-Jamā'ah, dan ketiga, motif nasionalisme.²¹⁸ Motif nasionalisme adalah diantara tiga motif lahirnya NU, Pertama, Motif agama karena Nahdlatul Ulama lahir atas semangat menegakkan dan mempertahankan Agama Allah SWT di Nusantara, meneruskan perjuangan Walisongo. Terlebih Belanda-Portugal tidak hanya menjajah Nusantara, tapi juga menyebarkan agama Kristen-Katolik dengan sangat gencarnya. Mereka membawa para misionaris-misionaris Kristiani ke

berbagai wilayah. Kedua, motif mempertahankan paham Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah, karena NU lahir untuk membentengi umat Islam khususnya di Indonesia agar tetap teguh pada ajaran Islam Ahlu al-sunnah wa al-Jamā'ah (Para Pengikut Sunnah Nabi, Sahabat dan Ulama Salaf Pengikut Nabi-Sahabat), sehingga tidak tergiur dengan ajaran-ajaran baru atau ajaran ahli bid'ah.²¹⁹

Motif nasionalisme timbul karena NU lahir dengan niatan kuat untuk menyatukan para ulama dan tokoh-tokoh agama dalam melawan penjajahan. Semangat nasionalisme itu pun terlihat juga dari nama Nahdlatul Ulama itu sendiri yakni “Kebangkitan Para Ulama”. NU pimpinan Hadhratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari sangat nasionalis. Sebelum RI merdeka, para pemuda di berbagai daerah mendirikan organisasi bersifat kedaerahan, seperti Jong Cilebes, Pemuda Betawi, Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatera, dan sebagainya, akan tetapi kiai-kiai NU justru mendirikan organisasi pemuda bersifat nasionalis. Pada tahun 1924 para pemuda pesantren mendirikan Shubban al-Waṭān (Pemuda Tanah Air). Organisasi pemuda itu kemudian menjadi Ansor Nahdlatul Ulama (ANO) yang salah satu tokohnya adalah Kiai Muhammad Yusuf Hasyim. Selain itu dari rahim Nahdlatul Ulama (NU) lahir laskar-laskar perjuangan fisik, di kalangan pemuda muncul laskar-laskar Hizbullah (Tentara Allah) dengan panglimanya KH. Zainul Arifin seorang pemuda kelahiran Barus Sumatera Utara tahun 1909, dan di kalangan orang tua Sabilillah (Jalan menuju Allah) yang di

komandoi KH. Masykur, laskar-laskar NU di atas siap berjuang jihad menegakkan agama dan bangsa, mengusir para penjajah Belanda dan Jepang untuk merebut kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia.²²⁰

Nahdlatul Ulama (NU) adalah salah satu organisasi Islam terbesar dengan jumlah anggota terbanyak di Indonesia, dan merupakan suatu organisasi yang berbasis massa di bawah kepemimpinan ulama.²²¹ Keyakinan yang mendalam terhadap berbagai pemikiran, gagasan, konsep di segala hal, serta metode-metode yang diusung NU diyakini sebagai kunci utama NU untuk dapat eksis dan terus bertahan hingga hari ini.²²² Untuk memahami NU sebagai jam'iyah diniyah (organisasi keagamaan) secara tepat, belumlah cukup dengan melihat dari sudut formal sejak ia lahir. Sebab jauh sebelum NU lahir dalam bentuk jam'iyah (organisasi), ia terlebih dahulu ada dan berwujud jama'ah (community) yang terikat kuat oleh aktivitas sosial keagamaan yang mempunyai karakteristik tersendiri.²²³ Lahirnya jam'iyah NU tidak ubahnya seperti mawadahi suatu barang yang sudah ada. Dengan kata lain, wujud NU sebagai organisasi keagamaan itu, hanyalah sekedar penegasan formal dari mekanisme informal para ulama sepaham, pemegang teguh salah satu dari empat mazhab: Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali yang sudah berjalan dan sudah ada jauh sebelum lahirnya jam'iyah NU.²²⁴

Nahdlatul Ulama adalah merupakan organisasi kemasyarakatan sekaligus sebagai organisasi keagamaan yang

lebih dikenal dengan istilah jam“iyah, yang berprinsip moderat terhadap adat istiadat dengan toleransinya terhadap masyarakat dan sesuai dengan prinsip Nahdlatul Ulama. Nahdhatul Ulama (NU) menjadi salah satu organisasi sosial keagamaan di Indonesia yang pembentukannya merupakan kelanjutan perjuangan kalangan pesantren dalam melawan kolonialisme di Indonesia. NU didirikan pada tanggal 31 januari 1926 di Surabaya oleh sejumlah ulama tradisional yang diprakarsai oleh KH. Hasyim Asy“ari. NU lahir untuk membentengi umat Islam khususnya di Indonesia agar tetap teguh pada ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama‘ah (Para Pengikut Sunnah Nabi, Sahabat dan Ulama Salaf Pengikut Nabi-Sahabat), sehingga tidak tergiur dengan ajaran-ajaran baru. Pembawa ajaran-ajaran bid'ah yang sesat (bid'ah madzmumah) menurut ulama Ahlussunnah wal Jama‘ah.²²⁵

Nahdhatul Ulama bisa diartikan kebangkitan ulama. Kata Al-Nahdlah secara etimologis seperti dikemukakan oleh Ibrahi Anis dalam al Mu‘jam al Wasih berarti “kemampuan kekuatan dan loncatan atau trobosan dalam mengupayakan kemajuan masyarakat atau lainnya” dan secara epistimologi dapat didefinisikan “menerima segala aktivitas kemajuan ummat yang berperadaban lama dari sisi yang lebih baru disertai kemampuan melakukan rekonstruksi dan reformasi, seperti dikutip oleh Said Aqiel Siradj dalam Ahl assunnah wal jama“ah dalam lintasan sejarah, dengan mengutip dari Abdurrahman Badawai dalam al-insan al kamil fi al-islam.”

didirikan di Surabaya bertepatan dengan tanggal 26 rajab 1344 H. Dengan tokoh-tokoh pendirinya antara lain: KH. Hasyim Asy‘ari, Tebuireng Jombang; KH. A. Wahab Hasbullah, Surabaya; KH. Bisri Syamsuri, Denpasar, Jombang; KH. R. Asnawi, Kudus; KH. Ridwan, Semarang; KH. R. Hambali, Kudus; KH. Nachrowi, Malang; KH. Ngoro Muntaha, Madura; dan KH. Nawawi, Pasuruan.²²⁶

Pembentukan NU merupakan reaksi satu sisi terhadap berbagai aktivitas kelompok reformis, Muhammadiyah dan kelompok modernis moderat yang aktif dalam gerakan politik, Syarekat Islam (SI), sisi lain terhadap perkembangan politik dan paham keagamaan internasional.²²⁷ Maksud Nahdlatul Ulama berdiri memang mempunyai motivasi keagamaan, yaitu mempertahankan Islam ahlussunnah wal jamaah. Dengan latar belakang keagamaan yang telah mendarah daging ajaran ahlussunnah waljamaah (pendukung madzhab Syafi‘i) pada masa pergerakan nasional. Sebagai lanjutan, organisasi ini bertujuan sesuai motivasi berdirinya yaitu mencapai izzatul Islam wal muslimin atau dengan kata lain membentuk masyarakat Islam Ahlussunnah wal-Jama‘ah. Sedangkan Ahlussunnah wal-Jama‘ah sendiri memiliki pengertian dalam orang-orang yang meniti jalan yang ditempuh oleh Nabi dan para sahabatnya yang bersumber dari Al-Qur‘an dan As-Sunnah.²²⁸

B. Pemahaman keagamaan NU

Sejak awal berdirinya, NU telah menentukan pilihan keagamaan yang akan dianut, dikembangkan, dan dijadikan sebagai rujukan dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Paham keagamaannya adalah Ahlussunah wal Jama'ah. Pengertian dari Ahlussunah wal Jama'ah adalah golongan umat Islam yang dalam bidang tauhid mengikuti ajaran Imam Al-Asy'ari, sedangkan dalam bidang fiqh mengikuti salah satu mazhab empat. Dalam kata pengantar Anggaran Dasar NU tahun 1947. KH. Hasyim

Asy'ari menegaskan paham keagamaan NU, yaitu:

Wahai para ulama dan para sahabat sekalian yang takut kepada Allah dari golongan Ahlussunah wal Jama'ah, yah! Dari golongan yang menganut mazhab imam yang empat. Engkau sekalian orang-orang yang telah menuntut ilmu pengetahuan agama dari orang-orang yang hidup sebelum kalian dan begitu juga seterusnya dengan tidak gegabah dengan memilih seorang guru dan dengan penuh ketelitian pula kalian memandang seorang guru di mana kalian menuntut ilmu pengetahuan daripadanya. Maka oleh karena menuntut ilmu pengetahuan dengan cara demikian itulah, maka sebenarnya, kalian yang memegang kunci bahkan juga menjadi pintunya ilmu pengetahuan agama Islam. Oleh karenanya, apabila kalian memasuki suatu rumah, hendaknya melalui pintunya, maka barangsiapa memasuki suatu rumah tidak melalui pintunya, maka ia dikatakan pencuri.²²⁹

NU adalah organisasi sosial keagamaan atau jam'iyah diniyah Islamiyah yang didirikan oleh para ulama, merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia selain Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 oleh K.H. Wahab Chasbullah dan K.H. Hasyim Asy'ari bersama ulama-ulama lainnya. pemegang teguh salah satu dari empat madzhab berhaluan Ahlusunnah wal jam'ah, yang bertujuan tidak saja mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam tetapi juga memperhatikan masalah sosial ekonomi, dan sebagainya, dalam rangka pengabdian kepada umat manusia. Pada dasarnya NU tidak mencampuri urusan politik dan dalam kongresnya pada bulan Oktober 1928 di Surabaya diambil keputusan untuk menentukan reformasi kaum modernis dan perubahan-perubahan yang dilakukan Wahabid Hijaz. Gerakan yang dilakukan oleh NU (Nahdlatul Ulama) adalah menegakkan ajaran Islam sesuai dengan paham ahlussunnah wal jama'ah di tengah-tengah kehidupan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Gerakan Yang Dilakukan Oleh NU dan Program Prioritasnya.
NU atau Nahdhatul Ulama adalah :

- a. Bidang keagamaan.
- b. Bidang pendidikan.
- c. Bidang sosial-budaya.
- d. Bidang ekonomi.

- e. Bidang lain yang bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan awal didirikannya Nahdhatul Ulama adalah menegakkan ajaran Islam sesuai dengan paham ahlussunnah wal jama'ah di tengah masyarakat yang pada saat itu sudah jauh dari ajaran Islam yang benar karena pengaruh penjajahan kolonial Belanda. Dalam perkembangannya NU pernah berubah menjadi partai politik di awal kemerdekaan Indonesia. Akibatnya NU semakin jauh menyimpang dari tujuan awal didirikan. Maka pada tahun 1984 dalam munasnya, digagas sebuah gerakan yaitu kembali ke khittah (tujuan awal). Gerakan ini berisi tiga hal penting, yaitu :

- a. Menafsirkan dan mensosialisasikan kembali ajaran ahlussunnah wal jama'ah di tengah-tengah masyarakat.
- b. Merumuskan kembali metode berpikir, baik dalam bidang fikih maupun sosial.
- c. Merumuskan kembali hubungan NU dengan negara. Dikutip dari situs resmi Nahdhatul Ulama, untuk mewujudkan gerakan tersebut di atas maka beberapa program prioritas, antara lain:
- d. Di bidang agama : melaksanakan dakwah Islamiyah dan meningkatkan rasa persaudaraan yang berpijak pada semangat persatuan dalam perbedaan.
- e. Di bidang pendidikan: menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, untuk

- membentuk muslim yang bertakwa, berbudi luhur, dan berpengetahuan luas.
- f. Di bidang sosial-budaya : mengusahakan kesejahteraan rakyat serta kebudayaan yang sesuai dengan nilai ke-Islaman dan kemanusiaan.
 - g. Di bidang ekonomi: mengusahakan pemerataan kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan, dengan mengutamakan berkembangnya ekonomi rakyat.
 - h. Mengembangkan usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
 - i. Demikian penjelasan dan penyelesaian soal tersebut di atas. Pelajari lebih

C. Dasar dan Peran Nahdlatul Ulama dalam Mewujudkan Kemerdekaan

Nahdlatul Ulama (NU) dalam setiap langkahnya selalu mengutamakan ke-pentingan bangsa, negara dan senantiasa dilandasi oleh dasar shari'at Islam dan nilai-nilai ke-Islaman, juga didasari atas nilai-nilai ke-Indonesia-an dan semangat nasionalisme yang tinggi, hal ini dapat kita lihat bagaimana latar belakang Nahdlatul Ulama ini lahir, bagaimana peranannya yang begitu besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan mempertahankan keutuhan NKRI. NU pimpinan KH. Hasyim Asy'ari sangat menjunjung tinggi nilai nilai

kebangsaan, nasionalisme yang berdasarkan atas syari'at Islam 'alā Ahl alSunnah wal al-Jamā'ah.²³⁰

Peranan Nahdlatul Ulama pada masa penjajahan Belanda dapat dilihat pada keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-2 di Banjarmasin pada tahun 1936, yang memutuskan bahwa kedudukan Hindia Belanda (Indonesia) sebagai Dār al-Salām, yang menegaskan keterikatan Nahdlatul Ulama dengan nusa-bangsa. Meskipun disadari peraturan yang berlaku tidak menggunakan Islam sebagai dasarnya, akan tetapi Nahdlatul Ulama tidak mempersoalkan, karena yang terpenting adalah umat Islam dapat melaksanakan syariat agamanya dengan bebas dan aman. Pandangan Nahdlatul Ulama bahwa perjuangan jihad ulama dalam mengusir penjajah Belanda sebenarnya adalah tuntunan ajaran agama Islam yang harus dilaksanakan setiap umat-Nya sebagai bentuk manifestasi rasa syukur terhadap Allah yang Mahakuasa. Jihad yang dilakukan oleh ulama dan santrinya ialah jihad membela tanah air, sebagai bentuk cinta tanah air (ḥubb al-waṭan) yang dimaknai sebagai jihād fi sabīlillāh. Karena upaya mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia dalam pandangan hukum Islam merupakan Bagian dari kewajiban Agama yang harus dijalankan umat Islam.²³¹

Menurut KH. Hasyim Asy'ari, jihad merupakan satu amalan besar dan penting dalam Islam dengan keutamaannya yang sangat banyak sekali, tentunya menjadi kewajiban seorang muslim untuk melaksanakannya bila suatu saat diserang oleh

orang kafir. Oleh karena itu menurut KH. Hasyim Asy'ari dalam konteks melawan penjajah Belanda, memberikan fatwa jihad mempertahankan tanah air Indonesia hukumnya wajib atas seluruh orang yang berada di wilayah Negara Indonesia yang diserang musuh penjajah kafir Belanda, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah:

1. Keterlibatan Ulama NU dalam Mengusir Penjajah Belanda

Belanda sebagai bangsa yang paling lama menguasai bangsa Indonesia sudah melakukan banyak kebijakan-kebijakan yang sangat merugikan rakyat Indonesia.²³² Sikap kolonial Belanda telah menumbuhkan benih-benih ketidakpuasan bangsa Indonesia sehingga para pemuka agama menghimpun kekuatan melalui dunia pesantren diantaranya adalah Nahdlatul Ulama (NU). Ditambah adanya beberapa program kristenisasi yang digalakkan oleh penjajah Belanda di bumi nusantara ini menjadikan Nahdlatul Ulama bangkit menghimpun laskar-laskar kekuatan (hizbullāh) untuk melawan penjajahan Belanda yang dianggap kafir dan dhalim. NU dengan segala kekuatan yang ada pada tingkat komunitas masyarakatnya secara menyeluruh memberikan pengaruh yang mengakibatkan munculnya kelompok baru yang disebut ulama dan santri, yang kemudian karena kekuatan NU ini semakin lama semakin kuat, maka oleh penjajah Belanda ingin dijauhkan dari pengaruh politiknya.²³³

2. Keterlibatan NU sebagai Panitia Persiapan Kemerdekaan RI

Keterlibatan Nahdlatul Ulama (NU) mempunyai arti penting dalam pe-rumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam Panitia Sembilan dalam BPUPKI (Badan Penyelidik UsahaUsaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) tahun 1945 yang menghasilkan dokumen sejarah penting, yaitu “Piagam Jakarta”. tanggal 18 Agustus 1945. Bung Hatta mengaku, ia mendapat telepon dari seorang perwir Jepang yang mengaku menyampaikan aspirasi kaum Kristen Indonesia Timur, bahwa mereka tidak mau bergabung dengan NKRI jika “tujuh kata” itu tidak dihapus Hingga kini, peristiwa seputar pencoretan “tujuh kata” itu masih misterius, sebab sampai meninggalnya Bung Hatta tidak membuka siapa sebenarnya perwira Jepang yang meneleponnya tersebut.



BAB XII

PIAGAM JAKARTA

A. Sejarah Piagam Jakarta

Konstitusional negara Indonesia pertama kali lahir pada 18 Agustus 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). UUD 1945 pada intinya memiliki 2 unsur pokok yakni Pembukaan dan Batang Tubuh. Sebelum menjadi sebuah konstitusi, perumusan dan penyesuaiannya melewati sejarah yang cukup panjang, yakni sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI).

BPUPKI atau *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* (BPUPKI) dibentuk pada 1 Maret 1945 oleh pemerintahan pendudukan Jepang. Badan ini terdiri dari 60 orang ditambah anggota tambahan sebanyak 6 orang. Jepang menunjuk Dr. Radjiman Widyodiningrat sebagai Ketua. Sebagai Wakil Ketuaanya, ditunjuk 2 orang yaitu dari kalangan Jepang bernama Ichibangase Yoshio sedangkan dari kalangan Indonesia bernama R. P Soeroso. Seluruh anggota BPUPKI dibagi habis dalam beberapa bunkakai (kelompok kerja) dan satu Panitia Hukum Dasar. Panitia Hukum Dasar mempunyai 19 anggota di

bawah pimpinan Ir. Soekarno. Nama panitia ini kemudian diganti menjadi panitia Undang-Undang Dasar. Sebagai panitia ditugaskan untuk duduk dalam panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar dibawah pimpinan Prof. Mr. Soepomo.²³⁴ Sedangkan menurut Sobirin Malian, bahwa anggota BPUPKI berjumlah 21 orang yang diketuai Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta, sebagai Wakil Ketua dengan 19 anggota yang terdiri dari 11 orang wakil dari Jawa, 3 orang dari Sumatra, dan masing-masing 1 orang dari Kalimantan, Maluku, dan Sunda Kecil. Badan tersebut ditetapkan berdasarkan maklumat Gunseikan Nomor 23 bersamaan dengan ulang tahun Tenno Heika pada 29 April 1945.²³⁵

BPUPKI kemudian menetapkan tim Khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia merdeka yang kemudian dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45). Para tokoh perumus itu antara lain dr. Radjiman Widyodiningrat, Ki Bagoes Hadikusuma, Oto Iskandardinata, Pangeran Purboyo, Pangeran Soerjohamidjojo, Soetardjo Kartohamidjojo, Prof. Dr. Mr. Soepomo, Abdul Kadir, Drs. Yap Tjwan Bing, Dr. Moh Amir (Sumatra), Mr. Abdul Abbas (Sumatra), Dr. Ratulangi, Andi Pangerang (keduanya dari sulawesi), Mr. Latuhary, Mr. Pudja (Bali), A.H. Hamidan (Kalimantan), R.P. Soeroso, Wahid Hasyim dan Mr. Muh. Hassan (Sumatra).²³⁶ Ada juga tokoh-tokoh perumus yang lain seperti Mr. Muh. Yamin, Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno.²³⁷

Latar belakang terbentuknya konstitusi (UUD 45) bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bangsa Indonesia dikemudian hari. Namun, janji hanyalah janji. Penjajah Jepang ingin lebih lama dan menguras kekayaan bangsa Indonesia. Setelah Jepang dipukul mundur Tentara Sekutu, Jepang tidak ingat lagi akan janjinya, rakyat Indonesia lebih bebas dan leluasa untuk berbuat dan tidak bergantung kepada Jepang sampai saat kemerdekaan tiba. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali yaitu pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Agenda pokok yang dibicarakannya adalah pembahasan tentang dasar negara, sedangkan pada sidang kedua yang berlangsung pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945 membahas tentang negara.²³⁸

Pembahasan dasar negara dalam persidangan itu mengalami proses diskusi yang sangat alot dan sangat panjang. Bahkan, konsekuensi politis-ideologis dari keputusan persidangan itu sampai sekarang masih terasa. Sekalipun sudah final keputusannya tetapi pemikiran-pemikiran yang bersifat wacana masih tetap terdengar. Dua golongan besar muncul pada persidangan pembentukan dasar negara yakni, golongan kebangsaan (nasionalisme) dan golongan Islam. Golongan Nasionalisme mengusulkan bahwa dasar negara harus bersifat netral, tidak dihubungkan sama sekali dengan salah satu agama mana pun. Ide dasar golongan nasionalisme adalah memisahkan secara tegas antara urusan negara dan urusan agama.

Sebaliknya, golongan Islam mengusulkan agar negara Indonesia Merdeka harus diletakkan di atas dasar Islam.

Salah seorang anggota BPUPKI, Bung Karno, memperoleh kesempatan untuk menyampaikan usulannya pada 1 Juni 1945. Dalam usulannya, ia berusaha mengkompromikan kedua pendapat di atas, dengan jalan memadukan antara ideologi Marhaenisme sebagai paham kenegaraan dan kebangsaan sejak 1927, dengan dasar Islam. Inti sari yang diambil dari ajaran Islam adalah Tauhid, Keesaan Allah untuk ditambahkan ke dalam ideologi Marhaenisme yang terdiri dari internasionalisme (peri kemanusiaan), nasionalisme (peri kebangsaan), Demokrasi dan Keadilan (kesejahteraan) sosial. Akhirnya, lahirlah konsep dasar negara yang diusulkan Bung Karno, yang terdiri dari :

- a. Peri Kemanusiaan
- b. Peri Kebangsaan
- c. Demokrasi
- d. Keadilan Sosial
- e. Ketuhanan Maha Esa.²³⁹

Bung Karno menamakan lima asasnya itu dengan Pancasila kemudian ia menyampaikan teori perasaan, lima sila itu di perasnya menjadi tiga sila (tri sila), yakni: Sosio nasiolisme (yang mencukupi kebangsaan Indonesia dan peri kemanusiaan), sosio demokrasi (yang mencukupi demokrasi dan kesejahteraan sosial), dan keutuhan. Tri sila Soekarno ini pun pada gilirannya

diperas menjadi satu sila (eka sila). Dalam pidatonya itu, Bung Karno menyatakan :

Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan “Gotong royong”. Negara yang kita dirikan haruslah negara yang gotong royong! Alangkah hebatnya! Negara gotong-royong!

Ketika pidato ini diterbitkan pertama kali sebagai buku kecil pada 1947, Dr. Radjiman Widyodiningrat, yang memberinya kata pengantar, menemaninya sebagai lahirnya Pancasila.²⁴⁰ Ada yang meragukan keautentikan rumusan lima sila Bung Karno itu murni gagasannya, sebab, tiga hari sebelum Soekarno menyampaikan pidatonya yang terkenal itu, pada 29 Mei 1945, Moh. Yamin telah menyampaikan didepan sidang Badan Penyelidik lima asas sebagai dasar bagi Indonesia merdeka, yakni peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Tetapi, yang biasa memberikan keterangan yang autentik hanyalah orang yang bertanggung jawab atas lahirnya Pancasila dan orang itu adalah Bung Karno. Oleh karena itu, ketika Soekarno mencapai puncak kekuasaannya, dia dengan jelas menganggap dialah penafsir yang otoritatif Pancasila itu. Bung Karno menegaskan dalam bukunya *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, bahwa penegrtian pancasila seperti yang saya gariskan dalam buku ini, haruslah dipakai sebagai dasar untuk

mempertumbuhkan ideologi nasional progresif dari bangsa Indonesia.²⁴¹

Setelah Bung Karno menyampaikan usulannya, maka berakhir pula sidang pleno pertama BPUPKI. Setelah itu, 38 orang melanjutkan pertemuan untuk membentuk panitia kecil untuk merumuskan usulan Bung Karno dengan tetap memperhatikan semua usulan yang berkembang dalam sidang. Kemudian tim perumus dibentuk sebanyak 9 orang, terdiri dari Bung Karno (Ketua) dan 8 orang anggota, yakni Moh. Hatta, Moh. Yamin, Soebarjo, AA Maramis, Agus Salim, Abi Kusuno Tjopkrosujoso, Kahar Muzakir, dan Wahid Hasyim. Setelah mencapai modus vivendi antara golongan nasionalis netral agama dan golongan nasionalis muslim, maka muncullah kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah Piagam, yang oleh Muh. Yamin di namakan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 (*Jakarta Charter*).

B. Perumusan dan Penetapan isi Piagam Jakarta

Pada tanggal 28 Mei 1945, diadakan upacara pelantikan dan sekaligus seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKI, badan tersebut menggelar dua kali sidang. Sidang Pertama dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Jun 1945, dan Sidang Kedua dari tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945. Keesokan hari setelah pelantikan barulah dimulai sidang pertama dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 selama empat hari dengan tujuan untuk membahas bentuk negara

Indonesia, filsafat negara “Indonesia Merdeka” serta merumuskan dasar negara Indonesia. Sebelumnya agenda sidang diawali dengan membahas pandangan mengenai bentuk negara Indonesia, yakni disepakati berbentuk “Negara Kesatuan Republik Indonesia” (NKRI), kemudian agenda sidang dilanjutkan dengan merumuskan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk hal ini, BPUPKI harus merumuskan dasar negara Republik Indonesia terlebih dahulu yang akan menjiwai isi dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri, sebab Undang-Undang Dasar adalah merupakan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Guna mendapatkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar benar tepat, maka agenda acara dalam masa persidangan BPUPKI yang pertama ini adalah mendengarkan pidato dari tiga orang tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Republik Indonesia itu adalah sebagai berikut:

Muh. Yamin pada 29 Mei 1945 menyebutkan bahwa Dasar Negara ada lima, yaitu: 1. Peri Kebangsaan; 2. Peri Kemanusiaan; 3. Peri Ketuhanan; 4. Peri Kerakyatan; 5. Kesejahteraan Sosial.²⁴²

Soepomo dengan pidatonya di depan sidang pada 31 Mei 1945, yang isinya menyebut tentang Panca Dharma: 1. Persatuan; 2. Kekeluargaan; 3. Keseimbangan Lahir Batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat.

Soekarno dengan usulannya pada 1 Jun 1945 menyebutkan bahwa Dasar Negara ada lima, yaitu: 1. Kebangsaan Indonesia; 2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan; 3. Mufakat atau Demokrasi; 4. Kesejahteraan Sosial; 5. Ketuhanan.²⁴³

Hal ini di pertegas oleh seorang sejarawan dari kalangan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), Prof. Dr. Nugroho Notokusanto pernah mengajukan tesis dengan kesimpulan bahwasanya pencetus Pancasila tidak hanya Ir. Soekarno, melainkan juga Prof. Mr. Muhammad Yamin dan Soepomo. Berdasarkan fakta dan data yang terungkap di atas, maka diketahui bahwa secara substantif, Prof. Mr. Yamin adalah orang pertama yang mengurai isi kandungan Pancasila dengan istilah Lima Dasar Negara, walaupun beliau tidak menyebut secara jelas istilah Pancasila. Sedangkan secara formalistis, Ir. Soekarno adalah orang yang pertama kali menyebut secara jelas istilah Pancasila sebagai Dasar Negara.²⁴⁴

Setelah itu, BPUPKI mengalami masa reses persidangan (periode jeda atau istirahat) selama satu bulan lebih. Sebelum dimulainya masa reses persidangan, dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggotakan 9 orang, yang dinamakan "Panitia Sembilan" dengan diketuai oleh Ir. Soekarno, yang bertugas untuk mengolah usul dari konsep para anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia dan mencari penyelesaian penyelesaian terbaik dari berbagai pertikaian sikap dan pendapat yang terjadi sepanjang Sidang Pertama BPUPKI.

Kesembilan-sembilan anggota Panitia Kecil tersebut terdiri dari kelompok Islam dan kelompok Kebangsaan, mereka di antaranya adalah:²⁴⁵

- a. KH. A. Wahid Hasyim Nasionalis Islami dari Nahdhotul Ulama (NU).
- b. Haji Agus Salim Nasionalis Islami dari Syarikat Islam (SI).
- c. Abikoesno Tjokrosoejoso Nasionalis Islami dari Syarikat Islam (SI)
- d. Abdul Kahar Muzakkir Nasionalis Islami dari Muhammadiyah
- e. Soekarno Nasionalis muslim sekuler.
- f. Muhammad Hatta Nasionalis muslim sekuler.
- g. Muhammad Yamin Nasionalis muslim sekuler.
- h. Ahmad Soebardjo Nasionalis muslim sekuler.
- i. A. A. Maramis Nasionalis kristian sekuler.

Setelah melalui sidang-sidang alot dan perdebatan sengit, akhirnya Panitia Kecil yang disebut juga Panitia Sembilan, melahirkan suatu kesepakatan antara kelompok Islam dan kelompok Kebangsaan. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia Sembilan pada 22 Jun 1945, dan dituliskan dala suatu piagam yang disebut oleh Mr. Muhammad Yamin dengan nama The Djakarta Charter, dan diistilahkan oleh Sukiman dengan nama Gentleman's Agreement. Kini lebih dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Selanjutnya, Piagam Jakarta tersebut melalu Sidang Kedua

BPUPKI yang dilaksanakan dari 10 sampai dengan 16 Juli 1945, diterima oleh seluruh anggota BPUPKI, bahkan disepakati untuk dijadikan sebagai (Pembukaan) Undang-Undang Dasar 1945 atau Pernyataan Kemerdekaan Indonesia.²⁴⁶ Adapun agenda lain yang dibahas yaitu tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta pendidikan dan pengajaran.²⁴⁷

Isi kandungan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 sebagaimana berikut:²⁴⁸

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia mesti dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa membawa rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, usaha berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia Merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam

suatu susunan negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Inilah Rumusan Piagam Jakarta yang menjadi keputusan rasmi Sidang Kedua BPUPKI yang dilaksanakan dari 10 sampai dengan 16 Julai 1945, dan diterima secara aklamasi oleh seluruh anggota BPUPKI, bahkan disepakati untuk dijadikan sebagai Preambul (Pembukaan) Undang-Undang Dasar 1945 atau Pernyataan Kemerdekaan Indonesia. Rumusan Piagam Jakarta tersebut bukan saja sebagai keputusan rasmi Sidang Kedua BPUPKI, tapi juga merupakan Konsensus Nasiona yang disepakati oleh para Founding Father Negara Indonesia, inilah Rumusan Piagam Jakarta yang paling tulen.²⁴⁹

Konsep proklamasi kemerdekaan negara Indonesia baru rencananya akan disusun dengan mengambil tiga alenia pertama "Piagam Jakarta", sedangkan konsep Undang-Undang Dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat "Piagam Jakarta". Sementara itu, perdebatan terus berlanjut di antara peserta sidang BPUPKI mengenai penerapan aturan Islam, Syariat Islam, dalam negara Indonesia baru. "Piagam Jakarta" atau "Jakarta Charter" pada akhirnya disetujui untuk dibacakan

saat proklamasi kemerdekaan.²⁵⁰ Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menyusun rancangan Undang Undang Dasar bagi negara Indonesia Merdeka, Dan digantikan dengan dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia" ("PPKI") atau dalam bahasa Jepang: Dokuritsu Junbi Inkai dengan Ir. Soekarno sebagai ketuanya.²⁵¹

Tugas "PPKI" ini yang pertama adalah meresmikan pembukaan (bahasa Belanda: preambule) serta batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Tugasnya yang kedua adalah melanjutkan hasil kerja BPUPKI, mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah pendudukan militer Jepang kepada bangsa Indonesia, dan mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah ketatanegaraan bagi negara Indonesia baru. Pada tanggal 6 Agustus dan tanggal 9 Agustus AS menjatuhkan bom atom uranium di Hiroshima dan Nagasaki hingga menewaskan 90.000–146.000 orang di Hiroshima dan 39.000-80.000 di Nagasaki, kejadian tersebut berdampak pada kelemahan dan kekosongan kekuasaan dari pihak Jepang hingga desakan kemerdekaan semakin kuat.²⁵²

Dalam tinjauan atau penafsiran historis, rumusan dalam alenia keempat bagian akhir pembukaan UUD Negara republic Indonesia tahun 1945 yang disahkan dan ditetapkan oleh PPKI yang berupa sila-sila yang kemudian sila itu di namakan pancasila. Perumusan defenitifnya merupakan hasil

perumusan ulang dan pemantapan perumusan sistematis, hirarkis, dan sinergis oleh para pendiri Negara Indonesia yang di disesuaikan dengan kedudukan pancasila sebagai filsafat Negara dan sebagai dasar Negara Indonesia merdeka yang menganut kedaulatan rakyat dan kerakyatan sebagai konsekuensi keberadaan Negara Indonesia sebagai isi Negara Indonesia yang serba pluralistic atau bhinneka.²⁵³

Isi Piagam Jakarta

Adapun bunyi dari Piagam Jakarta itu adalah: PIAGAM JAKARTA 22 JUNI 1945 (JAKARTA CHARTER)

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia Merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jakarta 22-6-1945

*Ir. Soekarno Drs. Mohammad Hatta Mr. A.A. Maramis
Abikoeno Tjokrosujoso Abdulkahar Muzakir*

*H. Agus Salim Mr. Achmad Subardjo KH. Wachid
Hasjim Mr. Muhammad Yamin*

Perumusan Piagam Jakarta menunjukkan sedemikian rupa bahwa umat Islam Indonesia perlu dijamin identitasnya. Kewajiban mereka melaksanakan syariat Islam perlu dijamin secara konstitusional. Menurut Anwar Harjono, hal ini bukan berarti umat Islam menghendaki pemisahan, melainkan karena posisinya yang mayoritas sehingga memerlukan jaminan konstitusional dalam menyelesaikan syariat agamanya, dan melaksanakan syariat itu merupakan kewajiban umat Islam. Lagi pula, dengan memberikan jaminan konstitusional kepada penduduk mayoritas, stabilitas negara yang akan dilahirkan pasti menjadi sangat lebih terjamin.²⁵⁴

C. Proses Perubahan Piagam Jakarta

Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, Piagam Jakarta yang telah ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945 itu dibicarakan kembali. Perjalanan sejarah telah mengubah hasil gentlemen agreement itu setelah PPKI dalam persidangannya pada tanggal 18 Agustus 1945 mengubah rumusan “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta menjadi rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa” seperti yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yang dikenal sekarang ini. Perubahan tersebut didesakkan oleh Bung Hatta yang secara “manipulatif” menginformasikan adanya ancaman dari kalangan Kristen di Indonesia Bagian Timur yang disampaikan seorang opsir Jepang yang akan memisahkan diri bila rumusan “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta itu tetap dipertahankan. Golongan Islam pada waktu itu

dapat menerima perubahan Piagam Jakarta mengingat situasi genting pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 serta janji yang dikemukakan oleh Bung Karno yang akan membahas kembali setelah Perang Asia Timur Raya selesai atau enam bulan kemudian setelah Proklamasi Kemerdekaan. Selama revolusi kemerdekaan, umat Islam praktis tidak mempersoalkan perubahan Piagam Jakarta itu. Tetapi setelah revolusi selesai dan terbentuk Konstituante yang bertugas menyusun UUD baru, maka umat Islam memiliki kesempatan untuk mempersoalkan kembali Piagam Jakarta.²⁵⁵

Mohammad Hatta masuk ke dalam ruang sidang "PPKI" saat tanggal 1 Agustus 1945 dan membacakan empat perubahan dari hasil kesepakatan dan kompromi atas lobi-lobi politik tersebut:²⁵⁶

- a. Kata "Muqaddimah" diganti dengan kata "Pembukaan";
- b. Dalam Preambul UUD 1945, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Piagam
- c. Jakarta, anak kalimat: "berdasarkan Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diubah menjadi "berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
- d. Pasal 6 ayat 1 yang berbunyi: "Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam" diubah menjadi "Presiden ialah orang Indonesia asli";
- e. Pasal 29 ayat 1 yang berbunyi: "Negara berdasarkan atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam

bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Inilah Rumusan Piagam Jakarta yang menjadi keputusan kontroversial Sidang PPKI yang dilaksanakan. Piagam Jakarta yang didapat dengan susah payah, melalui sidang-sidang alot dan perdebatan sengit, dalam suasana musyawarah kekeluargaan yang penuh saling pengertian, lintas sektoral tanpa campurtangan asing, melibatkan berbagai komponen bangsa secara representatif, lahir sebagai Konsensus Nasional antara Pihak Islam dan Pihak Kebangsaan dari segenap Para Penuh Negara Indonesia, akhirnya diubah melalui suatu proses sidang yang terburu-buru, singkat dan kilat, serta tidak representatif. Karenanya, amat tepat istilah yang dinyatakan Ketua Umum Masyumi, Prawoto Mangkusaswito, bahwasanya peristiwa perubahan Piagam Jakarta tersebut telah melahirkan *Historische Vraag* yaitu *Pertanyaan Sejarah*.²⁵⁷

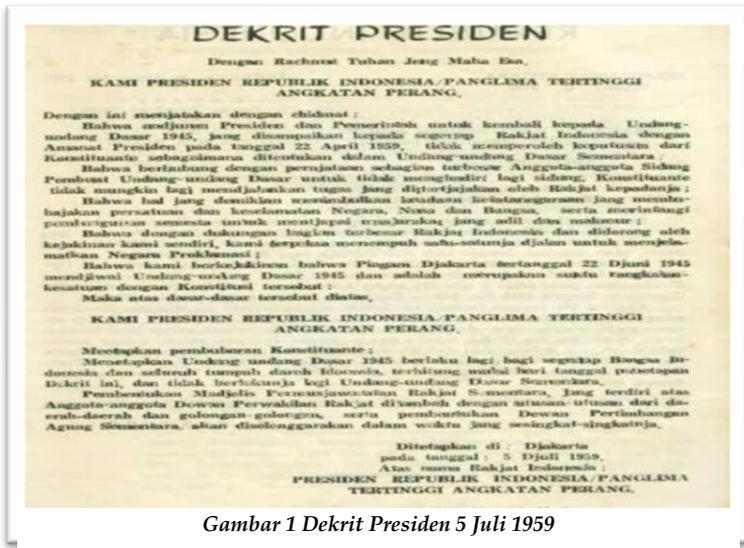
Pernyataan Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 mengundang kemarahan pemerintah Belanda, karena selepas kekalahan Jepang oleh Tentara Bersekutu, maka pemerintah Belanda merasa paling berhak mengambil alih Indonesia dari tangan pemerintah Jepang. Untuk tujuan mengembalikan kekuasaannya atas Indonesia, Belanda melancarkan dua kali tindakan ketenteraan terhadap Republik Indonesia, pertama pada 21 Juli 1947, dan kedua pada 18 Desember 1948. Ketika itu keadaan Republik Indonesia kacau

balau, karena disamping menghadapi tekanan-tekanan pihak Belanda, masih ditambah dengan pemberontak PKI (Partai Komunis Indonesia) di Surakarta dan Madiun pada September 1948. Pada peristiwa tersebut banyak daerah yang dikuasai oleh Belanda bahkan para pemimpin Republik Indonesia ditangkap, antara lain: Soekarno, M. Hatta, Syahrir, Agus Salim, dan lainnya. Akibatnya, karena Presiden dan wakil Presiden beserta hampir semua anggota kabinet Republik Indonesia ditangkap oleh Belanda, maka dibentuklah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dengan Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai Presidennya.

Tekanan Belanda yang amat kuat berhasil memaksa Republik Indonesia maju ke meja perundingan. Melalui statemen Room, Van Royen pada 7 Mei 1949, Belanda mengembalikan Soekarno-Hatta dan kawan-kawan ke Yogyakarta dari pembuangannya di Bangka. Selanjutnya, Republik Indonesia (RI) dan Bijeenkomst voor Federale Overleg (BFO) ikut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag dari 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949 menyepakati terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS). Republik Indonesia Serikat (RIS) yang didirikan pada 29 Oktober 1949 melalui Konferensi Meja Bunder, ternyata tidak bertahan lama, bahkan kurang dari setahun. Pada 3 April 1950, M. Natsir dan kawan-kawan di Dewan Perwakilan Rakyat Federal tampil mengajukan usul yang kemudian dikenal dengan Usul Integral Natsir. Pada hari yang sama usul tersebut dikabulkan oleh DPR

Federal. Selanjutnya, pada 19 Mei 1950 digelar Konferensi RIS - RI yang menyepakati untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada 20 Juli 1950, disetujui Undang-Undang Dasar Sementara NKRI 1950 yang baru dibuat kuasa pada 14 Agustus 1950.²⁵⁸

Sesuai amanat UUDS 1950 bab V pasal 134 yang menyatakan: "Konstituante (Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar) bersama-sama dengan Pemerintah secepat-lekasnya menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara ini." Dengan demikian, pada 15 Desember 1955 untuk pertama kalinya digelar Pemilihan Umum untuk membentuk Majelis Konstituante. Selanjutnya, Majelis Konstituante yang terbentuk melakukan sidang-sidang guna membuat Undang Undang Dasar. Dalam proses perumusan Pancasila kali ini, sikap Majelis Konstituante terbelah dua dari Islam dan sekuler. Kenyataan itulah yang mendorong Presiden Soekarno, selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia, mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang isinya sebagai berikut:



Gambar 1 Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Sekalipun secara formal Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memberlakukan kembali UUD 1945, tetapi secara substansial Dekrit tersebut mengakui berlakunya Piagam Jakarta 22 Juni 1945 sebagai sumber hukum positif di Indonesia. Hal itu ditunjukkan dengan adanya konsideran dalam Dekrit Presiden yang menyatakan:

‘Kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.’

Berdasarkan rumusan Dekrit dan keterangan PM Juanda itu, maka penetapan Piagam Jakarta dalam Dekrit mengandung akibat hukum yang sangat fundamental:

Pertama, secara yuridis Piagam Jakarta merupakan sumber hukum positif di Indonesia. Kalimat “menjiwai UUD 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut” tidak dapat ditafsirkan lain kecuali keberadaan UUD 1945 tidak dapat dilepaskan dari Piagam Jakarta. Dengan demikian, UUD 1945 harus dilaksanakan berdasarkan substansi yang terkandung dalam Piagam Jakarta. Demikian pula seluruh peraturan perundang-undangan nasional secara substansial harus dilaksanakan berdasarkan muatan yang terkandung dalam Piagam Jakarta.²⁵⁹

Kedua, karena kedudukan yang bersifat “menjiwai” maka secara teoretis kedudukan Piagam Jakarta itu adalah sebagai Groundnorm. Menurut Hans Kelsen yang dimaksud dengan Groundnorm dalam suatu tatanan hukum positif nasional adalah “the historically first constitution as the highest legal authority.” Secara historis Piagam Jakarta lebih tua dibandingkan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehingga dengan kedudukan seperti yang ditetapkan Dekrit Presiden maka Piagam Jakarta adalah “the historically first constitution” yang merupakan Groundnorm bagi tata hukum positif Indonesia.²⁶⁰

Piagam Jakarta memiliki kedudukan konstitusional yang kuat karena telah ditetapkan oleh Kepres No. 150 tahun 1959 tentang Dekrit Presiden tertanggal 5 Juli 1959 dan dimuat dalam Lembaran Negara RI No. 75 Tahun 1959 serta diperkuat lagi dengan penetapan MPR-RI tentang Perubahan Keempat UUD 1945 pada tanggal 10 Agustus 2002. Dengan kedudukan konstitusional yang kuat itu, terdapat kewajiban bagi umat Islam dan negara untuk menjalankan syariat Islam di Indonesia sebagaimana dikehendaki oleh Piagam Jakarta.

D. Hubungan Piagam Jakarta dan UUD 1945

Hubungan Piagam Jakarta dengan Pembukaan UUD 1945 adalah dalam Piagam Jakarta yang terbentuk tanggal 22 Juni 1945 ini, memuat jiwa Pancasila dan rumusan awal Pancasila yang nantinya akan menjadi landasan ideologi negara Indonesia dan termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945. Piagam Jakarta atau yang disebut juga Jakarta Charter adalah hasil dari kinerja Panitia Sembilan yang dilakukan pada tanggal 22 Juni 1945. Di dalam Piagam Jakarta mengandung jiwa-jiwa Pancasila serta rumusan awal Pancasila Pembukaan UUD 1945 yang akan mendatang. Rumusan Pancasila yang tertuang dalam Piagam Jakarta tersebut antara lain :

- a. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

- c. Persatuan Indonesia.
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

E. Perbedaan Piagam Jakarta dan Pancasila

Dasar negara yang dipilih bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pancasila dijadikan pedoman pokok dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan negara yang mencakup bidang kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya serta pertahanan keamanan negara. Dasar negara Republik Indonesia termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV, yakni Pancasila. Hal ini ditegaskan kembali pada era reformasi ini, yaitu di dalam ketetapan MPR-RI No XVIII/MPR/1998.

Pancasila merupakan landasan yuridis konstitsional dan dapat disebut juga sebagai ideologi negara atau filsafat negara.¹⁰ Sedangkan jakarta charter ialah cikal bakal dari rumusan pancasila tersebut dan Perbedaan Pancasila dan Piagam Jakarta adalah terletak pada isinya yakni sila pertama apabila piagam jakarta pada sila pertamanya ialah Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya Sedangkan pada pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.





BAB XIII

PEMBERONTAKAN PKI

A. Berdirinya Partai Komunis Indonesia (PKI)

Komunisme pertama kali masuk di Indonesia padatahun 1913 dibawa oleh H .J .F .M. Sneevliet seorang bangsa Belanda yang menjabat sebagai sekretaris suatu perkumpulan dagang di kota Semarang. Sejak Kedatangannya di Indonesia ia giat mempropagandakan paham-paham sosialis, terutama di kalangan serikat pekerja VSTP (Vereniging van Spoor en Traweg Personeel) yang didirikan pada tahun 1908. kemudian pada bulan Mei 1914 dengan teman-temannya bangsa Belanda yang sepaham ia mendirikan ISDV (De Indische Sociaal Demokratische Vereniging) yang berusaha menyebarkan paham Marxis. Dalam usaha memperluas pengaruhnya, mereka berusaha mempengaruhi perkumpulan-perkumpulan lain yang telah ada.²⁶¹

Salah satu organisasi yang pada waktu itu berpengaruh besar ialah Serikat Islam (SI) yang merupakan organisasi massa rakyat Indonesia. Di dalam Serikat Islam kumpul kaum tani, buruh, pedagang, ulama, cendekiawan dan borjuis nasional. Suatu keuntungan bagi ISDV ialah adanya tokoh-tokoh muda

dalam Serikat Islam yang berjiwa militan yang dapat dipengaruhinya, antara lain Semaun dan Darsono. Melalui tokoh-tokoh tersebut, paham Marxis sedikit demi sedikit dapat memasuki massa Serikat Islam. Semaun dan Darsono merupakan propagandis-propagandis yang utama dari ISDV guna menyebarkan paham komunis dalam tubuh Serikat Islam. Sementara itu di kalangan ISDV sendiri timbul pertentangan sesama pimpinannya. Pertentangan tersebut terutama berkisar pada masalah taktik dan strategi di satu pihak menghendaki agar ISDV berfungsi sebagai pemberi petunjuk saja kepada organisasi pergerakan nasional dengan cara yang revolusioner. Sedangkan di lain pihak agar organisasi tersebut memimpin pergerakan dengan perjuangan yang revolusioner, sesuai dengan cara-cara perjuangan kaum Sosialis-Marxis.²⁶²

Pertentangan tersebut semakin tajam sesudah Partai Komunis Rusia mendapat kemenangan dalam Revolusi Oktober 1917, sehingga paham komunis mendapat kemajuan di seluruh dunia. Paham ini di tiap-tiap negara ditandai dengan berdirinya Partai Komunis di negara yang bersangkutan.²⁶³ Pengaruh revolusi Rusia sampai juga di Indonesia. Dimana pada tanggal 23 Mei 1920 ISDV diubah menjadi PKI (Perserikatan Komunis India)²⁶⁴ yang dipimpin oleh Semaun. Setelah terbentuknya PKI, organisasi tersebut segera mengadakan Kongres Istimewa pada tanggal 24 Desember 1920. Dalam kongres tersebut diambil keputusan akan memasukkan PKI dalam Komunis Internasional

(Komintern) sebagai satu seksi.²⁶⁵ Sesudah kongres tersebut serangan golongan komunis terhadap pemerintah Belanda semakin tajam, bahkan haluan perjuangan Serikat Islam -pun telah berusaha mereka ubah. Melihat gelagat yang kurang baik ini, maka kongres Serikat Islam bulan Oktober 1921 di Surabaya diambil keputusan akan dijalankan disiplin partai. Selanjutnya pada bulan Februari 1923 mengadakan kongres di Madiun; kongres itu mengambil dua keputusan penting ialah:

- a. Merubah Central Serikat Islam, diganti Partai Serikat Islam. Jadi Istilah “Partai” untuk Serikat Islam baru dimulai bulan Februari 1923.
- b. Mempertahankan disiplin partai. Hal ini disebabkan karena pihak Semaun berusaha Menghapus disiplin Partai, maka kongres tersebut memutuskan untuk mempertahankan disiplin partai.²⁶⁶

Dengan adanya keputusan ini kemudian anggota-anggota PKI yang juga menjadi anggota Serikat Islam dikeluarkan dari Serikat Islam. Sebagai reaksi dari keputusan Partai Sarikat Islam kemudian pada bulan Maret 1923 PKI mengadakan kongres di Bandung yang memutuskan bahwa anggota Serikat Islam Lokal yang berhaluan Komunis (Serikat Islam Merah) dijadikan cabang PKI, tetapi diberi nama tersendiri ialah Serikat Rakyat. Untuk mendapatkan simpati dari rakyat Indonesia, PKI mengorganisasikan kaum buruh yang tergabung dalam VSTP di seluruh Jawa guna melancarkan pemogokan dan

mengadakan tuntutan perbaikan nasib kaum buruh. Pemogokan itu dilancarkan pada tanggal 8 Mei 1923, tetapi semua tuntutan mereka ditolak oleh Pemerintah Belanda. Untuk mengatasi pemogokan tersebut, Pemerintah Belanda mengadakan penangkapan terhadap para pelaku dan pimpinan PKI. Semaun ditangkap dan diasingkan ke negeri Belanda,²⁶⁷ Pimpinan PKI selanjutnya dipegang oleh Darsono.

Sementara itu dalam pucuk pimpinan komunis di Rusia, antara Stalin dan Trotsky timbul perbedaan paham tentang pelaksanaan garis revolusi Komunis; dimana Stalin mempunyai pandangan, bahwa untuk mencapai Revolusi Dunia Komunis sangat diperlukan syarat-syarat. Pertama memperkuat negara Rusia terlebih dahulu supaya dapat memimpin revolusi yang kuat, baru kemudian diadakan revolusi dunia yang dipimpin oleh Rusia. Dalam pertentangan ini Stalin ada di pihak yang menang, sehingga kedudukan Trotsky menjadi terancam.²⁶⁸ Pertentangan antara Stalin dan Trotsky berpengaruh juga di Indonesia, dimana tokoh-tokoh PKI Alimin dan Muso telah memilih aliran Stalin, sedangkan Tan Malaka lebih bersimpati terhadap cara perjuangan yang dianut oleh Trotsky. Menurut Tan Malaka, Komintern hanya akan dapat membantu pergerakan di suatu negara jajahan dengan "Semangat Revolusi Komunis". Jadi bukan dengan perbuatan-perbuatan atau bantuan materi, tetapi sekadar batuan moril. Karena itu Tan Malaka dianggap oleh pengikut-pengikut Stalin di Indonesia sebagai Trotsynya Indonesia dan dimusuhi.

Kegiatan pimpinan PKI dalam melakukan perlawanan terhadap Pemerintah Belanda memuncak dengan timbulnya pemberontakan 1923, yang merupakan pemberontakan massa rakyat yang digerakkan oleh pemimpin-pemimpin komunis seperti Musso dan lain-lain. Tanggal 12-14 November 1926 terjadi di Jakarta dan Jatinegara (waktu itu Jatinegara masih terpisah dengan Jakarta) dan Tangerang, pada tanggal 12 November 5 Desember di Karesidenan Banten (SIC), 12-18 November di Priangan, 17-23 November di Surakarta, 12-15 Desember di Tanah Kediri, direncanakan juga mengadakan pemberontakan di Banyumas, Pekalongan dan Kedu. Pemberontakan timbul karena waktu itu pimpinan PKI seperti Semaun dan Darsono yang selalu menghalang-halangi timbulnya pemberontakan sedang berada di luar negeri. Dengan timbulnya pemberontakan ini Pemerintah Belanda segera melakukan penangkapan dan penahanan terhadap para pelaku. Orang-orang Komunis yang tidak melakukan pemberontakan pun ditangkap dan kemudian diasingkan ke Boven Digul,²⁶⁹ dan melarang segala kegiatan PKI. Karena adanya larangan tersebut, Tan Malaka kemudian pada tahun 1927 mendirikan organisasi PARI (Partai Republik Indonesia) di Bangkok.²⁷⁰ sedangkan PKI sendiri kemudian mengadakan gerakan secara ilegal. Dengan berdirinya PARI Tan Malaka ini pertentangan dasar antara cara-cara perjuangan PKI dan PARI semakin meruncing, bahkan kemudian PKI berusaha menghancurkan Tan Malaka dengan PARI-nya

Untuk membangkitkan kembali perjuangan PKI yang telah parah akibat adanya tekanan dari pemerintah Belanda, Musso mendapat tugas khusus dari Moskow untuk membina kembali kader-kader PKI yang harus bergerak sebagai organisasi bayangan di Indonesia. Pada tahun 1935 Musso tiba di Surabaya bersama Djokosujono, Pamudji, dan Achmad Sumadi mendirikan organisasi Partai Komunis Muda (PEM) di Jawa Timur. Pihak Komunis meyakinkan sepenuhnya, dengan lahirnya kader-kader Komunis Muda organisasi Komunis Indonesia kelak akan bangun kembali.²⁷¹ Menjelang mendaratnya tentara Jepang di Indonesia, pemerintah Kolonial Belanda telah mengambil siasat membebaskan semua interniran Digul dan selanjutnya dibawa ke Australia. Kegiatan pembebasan ini dikoordinir oleh Vander Plas dan Esten. Para Ex Digulis diajak kerjasama oleh Pemerintah Belanda untuk menentang kekuasaan Jepang. Untuk melaksanakan kerja sama tersebut Pemerintah Belanda mendirikan perkumpulan yang diberi nama "Serikat Indonesia Baru". Kemudian dikenal dengan nama PKI/Sibar.²⁷²

Pada masa Pemerintahan Jepang, sikap Jepang terhadap organisasi PKI yang (waktu itu) dipimpin oleh Sardjono dan terhadap Komunisme Tan Malaka dapat dikatakan berlainan. Terhadap PKI Sardjono sama sekali dilarang mengadakan kegiatannya, sedang terhadap Tan Malaka agak lunak. Untuk melanjutkan perjuangannya, kemudian PKI mengadakan kegiatan secara ilegal sampai diproklamasikannya

kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. etapi sikap Jepang terhadap Tan Malaka pun kemudian berubah pula, karena kemudian Pemerintah Jepang melarang semua kegiatan kepartaian di Indonesia. Hanya organisasi-organisasi bentukan Jepang saja yang boleh berdiri.

B. Pemberontakan Pki Muso Di Madiun

Pada tanggal 18 September 1948 telah tersiar berita bahwa kaum komunis di Madiun telah melakukan perebutan kekuasaan. Berita tentang terjadinya tersebut mula-mula disiarkan oleh Harian Murba di Surakarta, malahan jauh sebelumnya harian ini telah mensinyalir bahwa PKI akan segera mengadakan pemberontakan. Tetapi karena pemerintah tidak mengadakan reaksi atas berita tersebut, rakyat masih ragu-ragu menerima kebenaran berita itu. Barulah keragu-raguan rakyat lenyap ketika ada pengumuman resmi dari pemerintah, yang mengumumkan bahwa di kota Madiun oleh dan di bawah pimpinan PKI dengan memakai tenaga salah satu kesatuan brigade TNI di Jawa Timur telah dilakukan penyerangan atas alat-alat kekuasaan negara dan penggantian pemerintah daerah secara tidak sah.²⁷³ Sebenarnya bagian intelijen dari Divisi Siliwangi sebelumnya telah mendapat keterangan tentang adanya Gerakan yang bersifat melawan pemerintah bahkan Amir Sjarifuddin pernah pula membujuk seorang Kapten dari Divisi Siliwangi yang secara pribadi dekat dengannya agar

menarik Panglima Divisi Siliwangi Nasution untuk bekerjasama dengan PKI guna menyelamatkan perjuangan.²⁷⁴

Jauh sebelum terjadinya pemberontakan di Madiun, PKI telah mempersiapkan kekuatannya berupa formasi-formasi Biro Perjuangan dan organisasi teritorial yang rapi, lengkap dengan inspektorat-inspektorat serta bagian-bagiannya yang tersebar di pelosok desa. Penyusunan dan penempatan ini adalah dengan menggunakan wewenang Menteri Pertahanan Amir Sjarifuddin, dimana biayanya diambil dari anggaran belanja Kementerian Pertahanan²⁷⁵ Adapun kesatuan-kesatuan yang telah dipersiapkan untuk melakukan pemberontakan tersebut antara lain: kesatuan yang dipimpin oleh Sumartono (Pesindo). Pasukan Divisi VI Jawa Timur dibawah pimpinan Kolonel Djokosujono dan Letkol Dahlan yang waktu Panglima Divisinya ialah Kolonel Sungkono.²⁷⁶ Juga dari sebagian Divisi Panembahan Senopati yang dipimpin oleh Letkol Suadi dan Letkol Sujoto. Pemberontakan PKI di Madiun tersebut dimulai pada jam 03.00 setelah terdengar tembakan pistol tiga kali sebagai tanda dimulainya gerakan non parlementer oleh kesatuan komunis yang disusul dengan gerakan perlucutan senjata, kemudian kesatuan PKI menduduki tempat-tempat penting di kota Madiun, seperti Kantor Pos, Gedung Bank, Kantor Telepon, dan Kantor Polisi dalam gerakan ini kesatuan PKI telah melakukan pembunuhan terhadap dua orang pegawai pemerintah dan menangkap empat orang militer. Perebutan kekuasaan ini berjalan lancar, kemudian mereka mengibarkan bendera merah

di depan Balai Kota. Melalui Radio Madiun, pimpinan pemberontak mengadakan pidato-pidato penyerangan terhadap pemerintah, antara lain dikatakan:

Madiun telah bangkit, saat berevolusi telah dimulai. Pemimpin-pemimpin Republik telah menjual Bangsa Indonesia kepada penjajah Belanda, kaum kolaborator seperti Hatta telah mempergunakan kekuasaan untuk menekan kaum buruh dan tani. Kini Madiun telah bangkit dan rakyat telah melakukan perlucutan senjata terhadap polisi dan tentara. Kaum buruh dan tani telah membentuk pemerintahan baru, kepada kaum buruh dan tani jangan meletakkan senjata sebelum seluruh Indonesia dapat merdeka.²⁷⁷

Pasukan-pasukan komunis yang dipimpin oleh Sumarsono, Dahlan dan Djokosujono dengan cepat telah bergerak menguasai seluruh kota Madiun, karena sebagian besar tentara di kota itu tidak mengadakan perlawanan. Disamping itu pertahanan kota Madiun sebelumnya praktis sudah dikuasai oleh Pasukan Brigade 29²⁷⁸ Perebutan kekuasaan tersebut pada jam 07.00 pagi telah berhasil sepenuhnya menguasai madiun pada pagi itu pasukan komunis dengan tanda merah mondar mandir sepanjang jalan. Madiun dijadikan kubu pertahanan dan titik tolak untuk menguasai seluruh wilayah RI. Sudah lama kota Madiun dijadikan pusat gerakan pemuda; terutama yang tergabung dalam Pesindo Wikana dari Badan Kongres Pemuda sewaktu Kabinet Amir turut aktif dalam

perebutan kekuasaan ini.²⁷⁹ Setelah menguasai Madiun, Karesidenan Madiun dan tempat-tempat lain; dengan melalui Radio Madiun yang ke mudian disebut Radio Gelora Pemuda, PKI Musso telah menyatakan dirinya sebagai pemerintah dan melakukan serangan dan fitnahan terhadap pemimpin-pemimpin negara RI, antara lain dikatakan Soekarno telah memakai revolusi kita sebagai kudakudaan untuk menguntungkan diri sendiri mereka sewaktu pendudukan Jepang telah menjadi quisling-quisling, budak-budak Jepang, tukang jual romush dan propagandis heiho,. Lebih dari dua juta wanit Indonesia telah menjadi janda, lantaran laki-lakinya menjadi romusha. Lupakah Soekarno, bahwa ia di Solo telah memakai pengkhianat Trotskyist untuk melakukan pembunuhan dan tero terhadap orang-orang komunis. Lupakah Soekarno Cs, bahwa ia telah membantu dan mensyahkan kejahatan-kejahatan Siliwangi dan kaum teroris itu? Apakah maksud Soekarno Cs ex pedagang romusha, telah melepaskan penjahat-penjahat Trotsky Malaka Cs yang telah mencoba merobohkan kepresidenannya? Dalam tiga tahun ini teranglah bahwa Soekarno-Hatta ex romush verkopers quisling telah menjalankan politik kapitulasi terhadap Belanda Inggris dan Sekaran juga akan menjual rakyat Indonesia kepada Imperiali Amerika. Bolehkah orang-orang semacam itu bilang bahwa mereka mempunyai hak yang syah untuk memerintah Republik kita.²⁸⁰

Sejak dimulainya pemberontakan, kaum komunis telah melakukan pembunuhan-pembunuhan terhadap para tawanan dan lawan politiknya; terhadap komandan-komandan, kepala-kepala kesatuan yang mereka anggap sebagai lawannya. Dari sejumlah komandan atau kepala-kepala kesatuan yang telah mereka bunuh, hanya Kepala Seksi III Letnan Kolonel Kartidjo yang selamat, lainnya mereka bunuh. Menurut berita Antara, setelah pasukan komunis menguasai Madiun kemudian diadakan penanda tanganan serah terima jabatan pemerintahan, antara lain oleh Letkol Sumantri, Wakil Presiden Indarto, Walikota Purbo, Ketua SOBSI Madiun, Ketua partai Sosialis Madiun Surodarnodjo, Ketua Komisariat Daerah Pesindo dan Serikat Rakyat Singementolo. Residen Samadikun telah pergi ke Yogyakarta. rupanya telah mengetahui adanya gelagat yang tidak baik telah meninggalkan posnya dan pergi ke Yogyakarta. Jabatan yang lowong itu kemudian diisi oleh orang-orang PKI Musso setelah berhasil merebut kekuasaan di Madiun.²⁸¹

Sebagai bukti bahwa pemberontakan tersebut telah sejak lama, ialah dari dokumen yang dapat diketemukan dari kamar Amir Sjarifuddin. Dimana dalam dokumen tersebut FDR/PKI antara lain merencanakan:

- a. Pasukan yang ada dibawah pengaruh atau pro PKI Musso ditarik mundur dari medan pertempuran dan ditempatkan di daerah strategis bagi mereka.
- b. Daerah Madiun dijadikan daerah gerilya sektor yang kuat, untuk melanjutkan perjuangan “op lang termijn”

- c. Daerah Solo dijadikan “Wild West” agar perhatian umum tertuju ke sana.
- d. Di samping tentara resmi, didirikan tentara illegal.
- e. Diadakan demonstrasi besar-besaran, kalau perlu dengan kekerasan.

Jelas dari isi dokumen tersebut, bahwa kejadian di Surakarta yang berupa demonstrasi, pemogokan dan adanya penyerbuan Markas Siliwangi di Srambatan dengan Madiun kemudian timbul, tidaklah berdiri sendiri. Tetapi merupakan suatu rangkaian gerakan PKI dalam menjatuhkan pemerintahan Soekarno-Hatta. Madiun dijadikan pusat pemerintahan dengan mengadakan penangkapan-penangkapan dan pembunuhan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan orang-orang yang mereka anggap sebagai lawan politiknya. Di Ngawi pada umumnya rakyat tidak mengerti apa yang terjadi, rentetan tembakan bagi rakyat di sana merupakan hal yang biasa, Karena sebelumnya sering diadakan latihan oleh tentara. Di pojok alun-alun di sebelah Timur, dimana biasanya ditempatkan pengumuman-pengumuman pemerintah pada waktu itu telah ditempelkan Pengumuman baru yang antara lain berbunyi:

“Tentara Merah telah mengambil kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat, supaya kegiatan berjalan seperti biasa. Siapa yang tidak mematuhi akan dihukum”. Tiap-tiap persimpangan dijaga oleh Tentara Merah, yang berbaju merah atau berbaju hijau dengan memakai pita merah di lengan.

Mereka kelihatan hilir mudik di mana-mana. Setelah mendengar bahwa PKI Musso telah mengambil alih kekuasaan, masyarakat gempar. Lebih-lebih setelah mendengar berita bahwa Komandan Distrik Militer dibunuh, tangsi-tangsi Polisi Negara diserbu dan diduduki PKI Musso, telah dilakukan penangkapan-penangkapan terhadap Kepala-kepala Jawatan Pemerintah setempat dan terhadap tokoh-tokoh partai politik lawannya ²⁸²

berkat taktik yang dilakukan oleh pasukan yang dipimpin oleh Mayor Sukowati; kerusuhan dan pembunuhan tidak terjadi sekejam di kota-kota lain di mana PKI Musso sempat berkuasa. Sewaktu pimpinan Tentara Merah meminta kepada anak buah Mayor Sukowati agar mengadakan perlawanan kepada TNI yang datang dari Utara, dengan berpura-pura tunduk serta menerima instruksi dari pucuk pimpinan Tentara Merah (PKI), mereka menerima senjata-senjata yang kemudian dibagi-bagikan kepada rakyat untuk turut bersama TNI membela dan menegakan Negara Kaum pemberontak dapat menguasai jalan kereta api jurusan Kaliyoso-Purwodadi dan mengadakan pemeriksaan secara ketat terhadap penumpang-penumpang kereta api, orang-orang yang dicurigai ditahan, bahan makanan yang akan diangkut ke Surakarta dilarang. Pemberontak berhasil menguasai daerah Sukoharjo dan Wonogiri. Musso-Amir sendiri pada tanggal 21 telah mengatakan, bahwa daerah-daerah tersebut sebagai Daerah Front Nasional. Sejak terjadi pertempuran di Surakarta

antara Pasukan Siliwangi dan Pasukan Panembahan Senopati yang dipimpin oleh Letkol Suadi dan Letkol Sujoto yang merupakan awal pertempuran terjadinya pemberontakan, dimana pasukan Letko Suai dan Sujoto dapat dipukul mundur ke daerah Wonogiri dan sekitar Surakarta; Panglima Besar Sudirman menugaskan Letnan I S. Surjosukanto untuk memanggil Letkol Suadi agar menghadap di Yogyakarta. Mendapat tugas ini kemudian Letnan I S. Surjosukanto menemui Letkol Suadi di Wonogiri, dan disana sempat mengikuti rapat yang diadakan oleh tokoh-tokoh PKI. Oleh Letkol Suadi Letnan I S. Surjosukanto diperintahkan untuk berangkat terlebih dahulu guna menyampaikan berita kepada Panglima Besar Sudirman, bahwa Letkol Suadi sedang mencari jalan untuk meloloskan diri dari kejaran Pasukan Siliwangi. Dalam perjalanan ke Yogyakarta Letnan I S. Surjosukanto sempat ditahan oleh pasukan PKI di Wuryantoro dan Pracimantoro yang berbatasan dengan Yogyakarta, tetapi dapat lolos. Ketika sampai Wonosari ditahan oleh KDM setempat yang waktu itu dipimpin oleh Mayor Seloadi. Sebagai utusan dari Panglima Besar Sudirman, kemudian Letnan I S. Surjosukanto diantar ke Markas Panglima Besar di Yogyakarta yang waktu itu diterima oleh Kapten Supardjo dan kemudian melaporkan kedatangannya kepada Letkol Suharto di rumahnya, kemudian terus kembali ke Surakarta.

Selama tanggal 18-25 September pasukan PKI Musso dapat menduduki Kabupaten Sukoharjo, yang dipimpin oleh

Mayor Digdo, Letkol Iskandar dan Letkol Jadau sebagai bezeting komandannya ialah Suwitojo. Pada tanggal 23 September 1948 PKI Musso telah mengadakan pemecatan kepala-kepala desa dan mengadakan pemeriksaan uang kas, berpuluh-puluh ton minyak dan bahan makanan telah diangkat ke jurusan Timur, juga uang sebanyak Rp 336.304,01 dari suatu jawatan dapat dirampas dan dibawa lari Pasukan komunis tidak lama menduduki daerah-daerah tersebut, karena tak lama kemudian pasukan TNI telah dapat merebut kembali daerah-daerah yang diduduki. Selama PKI berkuasa di daerah-daerah tersebut., PKI telah melakukan penangkapan dan pembunuhan terhadap rakyat yang menentanginya. Di daerah-daerah Madiun, Ngawi, Ponorogo, Purwodadi dan lain-lain, PKI juga melakukan penangkapan dan pembunuhan kejam. Dari kalangan agama maupun pengiku TNI anyak yang dibunuh. Kepada rakyat di daerah-daerah PKI menyiarkan berita bohong, dikatakan bahwa yang ditahan adalah Belanda. Sehingga pemuda yang tidak tahu-menahu duduk persoalannya, telah ikut terseret dan membantu kaum pemberontak. Oleh karena itu pemuda-pemuda yang tergabung dengan PKI Musso kalau berhadapan dengan pasukan-pasukan TNI tidak langsung menyerang, tetapi mengajukan pertanyaan terlebih dahulu: "Pundi Landane Mas?" ("Mana Belandanya Bung?"). Jelaslah banyak pemuda-pemuda dan rakyat setempat yang sebenarnya tidak mengetahui untuk apa dan untuk siapa mereka mempertaruhkan jiwanya. PKI Musso telah menyalah gunakan kepercayaan rakyat yang

diberikan kepadanya. Tindakan yang penuh tipu muslihat dan pembunuhan keji telah menimbulkan kebencian dan amarah rakyat, sehingga hilanglah simpati rakyat terhadap PKI.

Pada hari-hari pertama pemberontakan sangat agresif dalam berpropaganda, akan tetap pada hari-hari berikutnya ketika menyadari bahwa pemberontakan mereka tidak mendapat dukungan dari rakyat ditambah pasukan-pasukannya terdesak disegala front, pemberontak mulai menyiarkan suara lunak, malah kemudian mereka mengatakan bahwa aksi Madiun itu bukan pemberontakan tetap hanya koreksi saja dan mereka masih menghormati bendera Merah Putih dan menjunjung Undang-Undang Dasar RI. Namun, pembelaan itu tidak menolong karena ucapan berlainan sekali dengan perbuatan. Perbuatan mereka sejak tanggal 18 September dan hari-hari berikutnya adalah suatu perbuatan teror dan pemberontakan, mereka telah memproklamasikan berdirinya pemerintahan baru dengan bendera Merah dan mengganti semua pegawai-pegawai yang menentanginya.

C. Timbulnya Reaksi Terhadap Pemberontakan PKI

1. Reaksi Pemerintah

Ketika terdengar berita di Madiun terjadi perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh PKI Musso, maka dengan segera pemerintah mengadakan Sidang Kabinet Lengkap pada tanggal 19 September 1948 yang diketuai oleh Presiden Soekarno. Hasil

sidang tersebut mengambil keputusan antara lain bahwa Peristiwa Madiun yang digerakan oleh FDR/PKI adalah suatu pemberontakan terhadap Pemerintah dan mengadakan instruksi kepada alat-alat Negara dan Angkatan Perang untuk memulihkan keamanan Negara. Memberikan kuasa penuh kepada Jendral Sudirman untuk melaksanakan tugas pemulihan keamanan dan ketertiban kepada keadaan biasa di Madiun dan daerah-daerah lainnya. Kemudian pada malam harinya tanggal 19 September 1948, Presiden, Menteri Dalam Negeri Dr. Sukiman, Menteri Hamengku Buwono IX dan Panglima Besar Sudirman, mengucapkan pidato kepada seluruh rakyat Indonesia. Dalam pidato tersebut antara lain Presiden mengatakan bahwa Di kota Madiun pada tanggal 18 September oleh dan dibawah pimpinan PKI, bekas FDR dengan memakai tenaga kesatuan dari salah satu brigade di Jawa Timur telah melakukan penyerangan terhadap alat-alat Negara dan penggantian pemerintah daerah secara tidak sah dengan kekerasan senjata.²⁸³ bahwa tentara yang sejak dulu berada di pedalaman, oleh PKI telah diadu domba dengan tentara hijrah istimewa terhadap tentara Siliwangi. Dan dengan tegas disini dikatakan, bahwa Jadau dan Sujoto telah dipecat dari tentara. Di mana dalam usahanya untuk merebut kekuasaan pemerintah R digunakannya kesatuan dari Brigade 29 bekas kelaskaran yang dipimpin oleh Letkol Dahlan. Karena Dahlan telah mengkhianati Negara dan melanggar sumpah tentara, maka Dahlan pun dipecat dari tentara

Sedang Menteri Negara Hamengku Buwono dalam pidatonya antara lain mengatakan :

...kepada pemimpin dari semua partai dan badan-badan perjuangan supaya menghentikan permusuhan, dan membasmi pengacau-pengacau Negara Rakyat kita membutuhkan pimpinan yang sehat dan bijaksana. Diharap kepada rakyat supaya membantu segala usaha dan tindakan pemerintah untuk menyelamatkan Negara dan memberantas pengacau-pengacau yang diperalat oleh musuh untuk menghancurkan negara kita.²⁸⁴

Dengan adanya berita tentang terjadinya pemberontakan PKI di Madiun tersebut, van mook segera datang ke Jakarta dan mengatakan kepada pers bahwa Pemerintah Belanda bersedia dan sanggup membantu Republik untuk menindas pemberontakan PKI. Tetapi oleh Hatta dikatakan bahwa pemerintah RI tidak mengizinkan campur tangan dari pihak asing dalam urusan yang terjadi dalam daerah Republik. Tentang pemberontakan Madiun dikatakannya bahwa itu adalah urusan dalam negeri dan akan diselesaikan oleh Angkatan Perang RI sendiri karena dalam setiap pertempuran yang terjadi antara pasukan pemberontak dan pasukan TNI yang kemudian timbul, pasukan pemberontak selalu mengalami kekalahan. Pada tanggal 22 September 1948 jam 19.00, Djokosujono menyampaikan seruan melalui Radio Gelora Pemuda, mengajak komandan-komandan teritorial Jawa Timur untuk mengadakan perundingan. Tetapi ditegaskan, bahwa Djokosujono telah

dipecat oleh Presiden dan dianggap sebagai pemberontak. Pembersihan dalam tubuh Angkatan Perang dari anasir-anasir yang membahayakan dilakukan. Juga pemerintah telah memecat Kolonel Djokosujono, Kolonel Ir. Sakirman, Letkol Martono Brotokusumo, Mayor Anas, Mayor Pramudji, Mayor Usman dan Kapten Musbah, sedangkan dalam usaha untuk mengembalikan keamanan di Madiun, Presiden telah menyatakan Jawa Timur sebagai daerah Militer Istimewa dan telah mengangkat Kolonel Sungkono sebagai Gubernur Militer Jawa Timur.

Di Yogyakarta yang menjadi Ibu Kota RI tidak sampai terjadi suatu insiden, karena sebelum Presiden mengucapkan pidatonya; pemerintah telah melakukan tindakan preventif terlebih dahulu sehingga pemberontakan tidak sampai menjalar ke Yogyakarta. Pemimpin-pemimpin PKI di daerah Yogya telah ditangkap. Dalam operasi penangkapan tersebut berhasil ditangkap: Tan Ling Djiw (Sekretaris Jendral PKI) di rumahnya di Jalan Dieng No.1 Yogyakarta, Abdul Madjid, dan Ngadiman. Tidak berhasilnya pemberontakan Madiun meluas ke Yogyakarta juga disebabkan karena sikap Komandan Brigade 10 yang tegas tidak dapat dipengaruhi oleh PKI untuk mengadakan aksi terhadap Divisi III/Siliwangi, sehingga aksi memecah belah anggauta tentara di daerah Yogyakarta tidak berhasil.

2. Reaksi Para Pemuda dan Pelajar

Dengan adanya seruan presiden yang dilakukan melalui radio tentang timbulnya Pemberontakan PKI di Madiun dan anjuran agar rakyat ikut membantu pemerintah dalam usaha pengembalian keamanan dan pembersihan terhadap kaum pemberontak telah mendapat sambutan dari rakyat. Keraguan yang selama ini timbul di kalangan rakyat dapat dihilangkan dan dengan serentak rakyat yang belum terikat oleh PKI telah membantu pemerintah dalam usaha pengamanan tersebut. Ditinjau dari segi psikologis memang sukar bagi kaum pemberontak untuk mencari pengikut baru di luar kalangan FDR; karena koreksi Musso dilaksanakan tidak konsekuen. Orang-orang yang dianggap menjalankan politik yang salah tidak segera disingkirkan, malahan sesudah diadakan koreksi mereka menduduki jabatan yang lebih tinggi. Sedangkan kebanyakan rakyat terutama pengikut PNI, Masyumi dan Kaum Komunis Tan Malaka menginginkan orang-orang FDR yang bersalah itu disingkirkan. Koreksi Musso terhadap kesalahan FDR/PKI pada hakekatnya melindungi mereka yang salah. Inilah kelemahan koreksi Musso, sehingga pemberontakan di Madiun tidak mendapat sambutan dari segenap rakyat, malah menimbulkan berbagai kebencian dari berbagai pihak. Sebab seolah olah reaksi tersebut hanya dipakai untuk menolong prestise pemimpin-pemimpin FDR saja.²⁸⁵ Demi mendengar bahwa di Madiun telah terjadi pemberontakan yang dipimpin dan dilakukan oleh PKI,

makapada malam harinya telah dilakukan penangkapan serentak diberbagai daerah; termasuk di daerah Yogyakarta terhadap pemimpin-pemimpin FDR/PKI. Kesatuan-kesatuan yang seja semula menjadi pengikut Amir telah dilucuti, sehingga pemberontakan PKI Musso di Madiun tidak menjaral ke semua daerah Republik tetap hanya di daerah yang memang sudah sejak lama berada di bawah pengaruh FDR. Daerah-daerah tersebut antara lain: Cepu, Blora, Purwodari, Ngawi Ponorogo dan lain-lain. Perlucutan senjata terhadap pengikut-pengikut PKI di Yogyakarta dapat berjalan lancar. Pasukan-pasukan PKI yang berada di daerah Yogyakarta telah dapat dilucuti, yang terakhi adalah pasukan Latief dari Padokan. Kemudian para pengikut PKI yang ditangkap tersebut diserahkan kepada KMK yang dipimpin oleh Pranoto.

Pada tanggal 19 September 1948 Dr. Sukiman Pimpinan Partai Masyumi menyerukan kepada para pemuda dan semua Umat Islam supaya berdiri Di belakang pemerintah dan membantu pemerintah dalam membasmi kaum pemberontak. Dari Partai Sosialis Sjahrir juga telah mengeluarkan maklumat yang menentang pemberontakan PKI Musso tersebut, da menegaskan bahwa Peristiwa Madiun adalah suatu geraka kontra-revolus Tindakan Ketua Partai Masyumi yang tegas itu men dapat sambutan dari cabang-cabang Partai Masyumi di daerah-daerah, seperti yang terjadi di Purwodari. Oleh Ketua Cabang Partai Masyumi setempat segera diadakan rapa yang mengambil suatu keputusan; bahwa Partai Masyum berdiri di

belakang pemerintah dan menentang pihak yang akan menjatuhkan Republik.

Di Madiun sendiri pemberontakan PKI tidak mendapat dukungan dari seluruh rakyat, hal ini terbukti dengan adanya reaksi spontan dari para pemuda pelajar yang tergabung dalam TRIP (Tentara Republik Indonesia Pelajar), TGP (Tentara Geni Pelajar) ataupun TP (Tentara Pelajar), serta pelajar-pelajar lainnya baik yang tergabung dalam suatu organisasi maupun yang tidak. Mengetahui bahwa pemuda pelajar menentang politiknya, maka pada tanggal 15 September 1948 jam 15.00 asrama TRIP diserbu oleh satu peleton anggota Pesindo dengan maksud untuk melucuti para pemuda anggota TRIP. Dalam peristiwa perlucutan senjata tersebut seorang pemuda pelajar bernama Muljadi telah diserang dan ditusuk dengan bayonet hingga tewas. TRIP berhasil dilucuti sedang para pemimpinnya sebanyak 4 orang ditangkap. Kejadian ini ternyata tidak lain hanya sampai disini. Kekejaman anggota-anggota Pesindo yang di luar batas perikemanusiaan itu menyebabkan amarah para pemuda. Sejak peristiwa itu para pelajar mendirikan organisasi yang diberi nama Patriot Anti Musso (PAM) yang bertujuan merobohkan pemerintahan Musso. Dengan berbagai jalan mereka berusaha menjaga jangan sampai terjadi pengrusakan terhadap bangunan-bangunan penting oleh kaum pemberontak. Karena itu PKI Musso berusaha mempengaruhi para pemuda pelajar agar memihak kepadanya. Akan tetapi usaha PKI tersebut gagal, sehingga keadaan bertambah

meruncing. Dengan terang-terangan para pemuda menyatakan dirinya tetap taat kepada pemerintah RI. Tanpa menghiraukan bahaya yang mengancam jiwanya, para pemuda pelajar itu dengan penuh keberanian menempelkan plakat-plakat di setiap pelosok kota yang bertemakan anti Musso. Karena dianggap membahayakan, sekali lagi pihak pemberonta berusaha menar simpati para pelajar dengan menyelenggarakan rapat pada tangga 27 September 1948. dalam rapat tersebut Residen PK Abdul Mutalib memberi janji-janji muluk kepada kurang lebi 6000 pelajar yang hadir pada waktu itu. Ia menjanjikan aka membebaskan uang sekolah bagi pelajar Sekolah Rakyat da Sekolah lanjutan Pertama. Sedangkan para murid yang putus hubungan dengan orang tuanya akan mendapat jamina penuh serta janji-janji lainnya. Tetapi semua janji tersebut dengan spontan ditolak oleh para pemuda pelajar, bahwa mereka tidak membtuhkan semua itu bahkan mereka menuntut aga Muljadi diganti Karen rapa tidak mencapai hasil yang diharapkan serta melihat suasana semaki runcing maka rapat kemudian dibubarkan

Selesai rapat para pemuda beramai-ramai pergi ke makam Muljadi dan di sana bersama-sama bernyanyi “Teman Pahlawan”. Dalam perjalanan Pulang jika berpapasan dengan mobil mereka meneriakan “...Dum...Dum”, kata sindiran untuk pembagian yang tidak adil oleh PKI Musso. Seorang pengendara mobil setelah dekat dengan Markas Ten tara Pesindo kemudian menghentikan mobilnya dan memberi aba-aba kepada Markas

Pesindo tersebut, sehingga segerombola pemuda bersenjata senapan mesinda senjata-senjata lain ke luar dari armada mengarahkan laras senapannya ke ara para pelajar Tetapi para pelajar tidak gentar menghadap ancama tersebut bahkan dengan penuh keberanian serta dengan nada mengejek menantang mereka kalau berani satu lawan satu". Pasukan pemberontak itu ternyata tidak berani berbuat apa-apa. Tidak semua pelajar di Madiun menentang pemberontakan Musso tersebut, ada pula beberapa anggota TRIP Madiun seperti Alex Legowo, Sunarjo dan Surjo telah dapat dipengaruhi oleh propaganda PKI. Sehingga ketika PKI berkuasa mereka berkhianat pada perjuangan para kawan-kawannya Ale Legow dan Sunarj kemudian ditangkap oleh anak buah mayor Sukowati oleh Mayor Sukowati yang waktu itu menjabat sebagai Komandan ST Madiun kedua Pemuda tersebut diserahkan Kepada pimpinan TRIP Madiun Sudarto Setelah diadakan pemeriksaan, terbukti bahwa kedua pemuda tersebut selain melarikan diri dari kesatuannya, juga membawa lari beberapa pucuk senjata untuk dibawa bergabung dengan pasukan PKI. Kedua tawanan tersebut oleh pimpinan TRIP di Madiun dijatuhi hukuman mati, sedangkan pelaksanaan hukuman itu dilakukan oleh kawan-kawannya sendiri dari kesatuan TRIP di desa Kretek Dungus, di lua kota Madiun.²⁸⁶

D. Gerakan Operasi Militer Terhadap PKI Musso

Setelah presiden memberi perintah kepada Angkatan Perang untuk segera mengembalikan keamanan dengan segera diadakan penangkapan terhadap orang-orang yang membahayakan negara dan diadakan penggerebekan tempat-tempat yang dianggap perlu. Supaya dapat melaksanakan tugas dengan baik Markas Besa Angkatan Perang segera menetapkan dan mengangkat Kolonel Sungkon Panglima Divisi VI Jawa Timur sebagai Panglima Pertahanan Jawa Timur yang mendapat tugas menggerakkan pasukan dari arah timur. Keresidenan Madiun untuk menumpas Pemberontakan PKI Musso dan mengamankan kembali seluruh Jawa Timur dari anasir pemberontak. Setelah mendapat perintah tersebut Kolonel Sungkono segera memerintahkan Brigade Surachmad bergerak menuju Madiun. Pasukan tersebut dipimpin oleh Mayor Jonosewojo yang terdiri atas Batalyon Sabirin Muchtar bergerak menuju Trenggalek Terus ke Ponorogo, Batalyon Gabungan Pimpinan Mayor Sabaruddin bergerak melalui Sawahan menuju Dungus dan Madiun, Batalyon Sunarjadi bergerak melalui Tawangmangu, Sarangan, Plaosan bergerak Divisi Siliwangi yang dipimpin oleh Letnan Kolonel. Di samping itu juga Pasukan Panembahan Senopati yang dipimpin oleh Letkol Slamet Ryadi, Pasukan Tentara Pelajar yang dipimpin oleh Mayor Achmadi dan Pasukan-pasukan dari Banyumas yang dipimpin oleh Mayor Surono

Batalyon Kemal Idris dan Batalyon A. Kosasih yang didatangkan dari Yogyakarta bergerak ke Utara dengan tujuan Pati. Batalyon Daeng bergerak ke Utara dengan tujuan Cepu, Blora, Batalyon Nasuhi dan Batalyon Achmad Wiranata kusumah bergerak ke Selatan dengan tujuan Wonogiri dan Pacitan. Batalyon Darsono dan Batalyon Lukas bergerak ke Madiun. Sedangkan Pasukan Panembahan Senopati bergerak ke Utara, Pasukan Tentara Pelajar yang dipimpin oleh Mayor Achmadi bergerak ke Timur menuju Madiun melalui Sarangan.²⁸⁷



BAB XIV PENUTUP

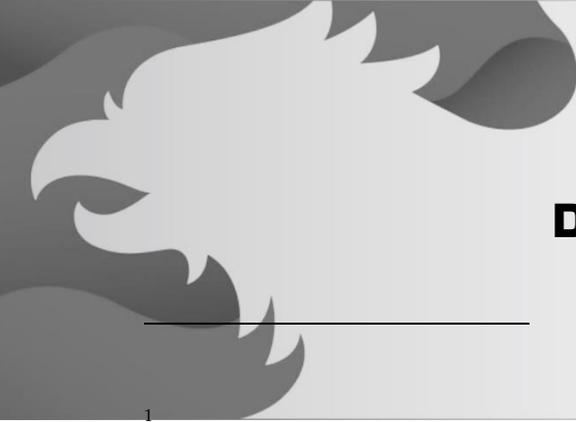
A. Kesimpulan

Menyoal sejarah Pergerakan Nasional Indonesia disini meliputi segala macam aksi dengan menggunakan “organisasi” dan peperangan untuk menentang penjajahan dan mencapai kemerdekaan. Dengan lahirnya organisasi ini menunjuk bahwa aksi tersebut disusun secara teratur, dalam arti ada pemimpinnnya sebagai penggerak, anggota, dasar, dan tujuan yang ingin dicapai. lahirnya organisasi-organisasi pergerakan seperti Budi Utomo dan organisasi-organisasi lainnya memberi efek yang luar biasa terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia. dalam urain buku ini diawali dengan memperbincangkan perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme sehingga lahirlah perang diponegoro, perang paderi, Aceh, makassar, maluku, Kalimantan dan sebagainya menyusul lahirnya organisasi-organisasi Islam seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, Nahdatu Ulama dan ormas-oramas lainnya. Aksi dan pergerakan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sehingga mencapai kemerdekaan yaitu aksi yang mencakup

semua aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, dan kultural.

B. Implikasi

Buku Sejarah Pergerakan Nasional ini hadir untuk membuka cakrawala berpikir atau cara pandang generasi muda ataupun masyarakat pada umumnya supaya sadar akan pentingnya sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah, karena merdekanya Bangsa Indonesia bukan lahir dengan sendirinya melainkan dengan semangat perjuangan dan tumpah darah, dari perang diponegoro, paderi, aceh Makassar sampai perang Maluku. Hingga lahirnya organisasi-organisasi Budi Utomo, Sarikat Dagang Islam, Emansipasi Wanita, Muhammadiyah dan juga NU menjadi basic atau wadah perlawanan terhadap bangsa asing



DAFTAR PUSTAKA

Zuhdi, U., Hermawan, P., Putro, U. S., Utomo, D. S., & Alamanda, D. T. (2017). Aplikasi GMCR Untuk Resolusi Konflik (Studi Kasus: Perang Diponegoro (The Java War/De Java Oorlog)). *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 1(2), 20-37.

²Dewi, Vira Maulisa. (2020). Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa 1825-1830.

³SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Kajian Sejarah, 2(2), 147–158.

⁴Becker, Annette. (2015). The Great War: World war, total war. *Internation*

⁴Becker, Annette. (2015). The Great War: World war, total war. *International Review of the Red Cross*, 97(900), 1029–1045.

⁵Louw, Java-oorlog, I, Bab XIV dan III, hal. 370-400; Carey, Power of Prophecy, hal. 642-43.

⁶Lihat juga Arsip Keluarga De Stuers, Stichting Landgoed de Wiersse, Vorden, Belanda, Box 68, benda 337, Kapten

(pasca-1826, Mayor) Johan Baptist Theunissen, (1794-1827), 'Memorie over de Java Oorlog', 1825-27

⁷Peter Carey, 'Waiting for the "Just King". The Agrarian World of South-Central Java from Giyanti (1755) to the Java War (1825-30)', *Modern Asian Studies*, vol.20 no.1 (1986), hal. 62; dan A(rsip) N(asional), 'Dj(okja) Br(ieven)' (mulai dari sini: 'AN, Dj.Br. '), 9B (18, 443, 466),

⁸A.S.H. Booms, *Eenige Bladzijden uit de Nederlandsch-Indische Krijgsgeschiedenis, 1820-1840* (Amsterdam: Engelhard & Van Embden, 1911), h. 34.

⁹Daftar nama lengkap para santri ini dapat ditemukan di Carey, *Power of Prophecy*, h. 786-94, Lampiran VIIa; dan lokasi pesantren mereka bisa ditemukan di Peta 8 pada halaman 785.

¹⁰Carey (peny. dan pen.), *Babad Dipanagara*, h. 242-243

¹¹8 Louw, *Java-oorlog, III*, h. 293.

¹²Djoko Surjo, *Kepemimpinan Pangeran Diponegoro Dalam Perspektif Sejarah*, 2013, h. 48.

¹³3 Carey (peny. dan pen.), *Babad Dipanagara*, h. 242-243

¹⁴Carey, P. *Kesatria dan Santri. Beberapa Catatan Tentang Hubungan Antara Keraton Diponegoro dan Pendukung Agamawinya Pada Masa Perang Jawa (1825-1830)*.

-
- ¹⁵De Klerck, *Java-oorlog*, V, hal. 744; dan Peter Carey, *The Cultural Ecology of Early Nineteenth Century Java. Pangeran Dipanagara; A Case Study*. (Singapore: ISEAS, 1974), h. 17
- ¹⁶Carey, *Cultural Ecology*, hal. 17; dan Rusche (peny.), *Babad Diponegoro*, I, h. 106-107
- ¹⁷Peter Carey, 'Javanese Histories of Dipanagara. The Buku *Kedhung Kebo*. Its Authorship and Historical Importance', *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* (henceforth: BKI), (Leiden), vol.130 (1974), h. 288.
- ¹⁸Mustarom, *Negara Islam Tanah Jawa: Cita-Cita Jihadis Diponegoro*, 2017
- ¹⁹Mustarom, *Negara Islam Tanah Jawa: Cita-Cita Jihadis Diponegoro*, 2017.
- ²⁰Perdana, R. V. *PERANG DIPONEGORO 1825-1830: BENTUK MANIFESTASI DARI SIKAP PERTENTANGAN KEKUATAN LOKAL TERHADAP KEKUASAAN KOLONIAL*.
- ²¹Carey, *Asal-Usul Perang Jawa: Pemberontakan Sepoy dan Lukisan Raden Saleh*, Yogyakarta, PT LKiS Pelangi Aksara, 2001.

-
- ²²De Jong, P.E de Josselin (1960). *Minangkabau and Negeri Sembilan: Socio-Political Structure in Indonesia*. Jakarta: Bhartara.
- ²³Kamus Indonesia - Minangkabau | Glosbe". *glosbe.com*. Diakses tanggal 2023-01-09.
- ²⁴Kingsbury, D.; Aveling, H. (2003). *Autonomy and Disintegration in Indonesia*. Routledge. ISBN 0-415-29737-0.
- ²⁵Navis, A.A. (1984). *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti Pers.
- ²⁶Batuah, A. Dt.; Madjoindo, A. Dt. (1959). *Tambo Minangkabau dan Adatnya*. Jakarta: Balai Pustaka
- ²⁷Reid, Anthony (2001). "Understanding Melayu (Malay) as a Source of Diverse Modern Identities". *Journal of Southeast Asian Studies*. 32 (3): 295–313.
- ²⁸Evers, Hans Dieter; Korff, Rüdiger (2000). *Southeast Asian Urbanism*. LIT Verlag Münster: Ed.2nd. h. 188.
- ²⁹ones, Gavin W.; Chee, Heng Leng; Mohamad, Maznah (2009). "Not Muslim, Not Minangkabau, Interreligious Marriage and its Culture Impact in Minangkabau Society by Mina Elvira". *Muslim-Non-Muslim Marriage: Political and Cultural Contestations in Southeast Asia*. Institute of Southeast Asian Studies. h. 51.
- ³⁰Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sumatera Barat. H. 50

-
- ³¹Jumaroh, J. (2021). *Peranan Tuanku Tambusai Dalam Melawan Penjajah Belanda Di Minangkabau Tahun 1823-1838* (Doctoral dissertation, UIN SMH BANTEN).
- ³²Yuliandre Darwis, *Sejarah Perkembangan Pers Minangkabau 1859-1945*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h.10-11
- ³³Wonsela, N. (2017). *Kontribusi Kaum Paderi dalam modernisasi pendidikan di of Shout Minangkabau abad XVII–awal abad XX* (Master's thesis, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- ³⁴Hamka, *Muhammadiyah di Minangkabau* (Jakarta: Yayasan Nurul Islam, tanpa tahun) h. 7-8.
- ³⁵Akmal, M. P. I. *Alam Minangkabau: Islamisasi dalam Empat Babak*.
- ³⁶Azra, A. (2004). *The Origins of Islamic Reformism In Southeast Asia: Networks of Middle Eastern and Malay-Indonesian 'Ulama' In The Seventeenth and Eighteenth Centuries*.
- ³⁷Jumaroh, J. (2021). *Peranan Tuanku Tambusai Dalam Melawan Penjajah Belanda Di Minangkabau Tahun 1823-1838* (Doctoral dissertation, UIN SMH BANTEN).
- ³⁸Sartono Kartodirdjo, ed, *Sejarah Perlawanan-Perlawanan Terhadap Kolonialisme* (Jakarta: Pusat Sejarah ABRI, Departemen Pertahanan Keamanan, 1973) h. 89

-
- ³⁹Radjab, M. (1954). Perang Paderi di Sumatera Barat. *Jakarta: Perpustakaan Perguruan KPPK.*
- ⁴⁰Jones, G. W., Leng, C. H., & Mohamad, M. (Eds.). (2009). *Muslim-non-Muslim marriage: Political and cultural contestations in Southeast Asia.* Institute of Southeast Asian Studies.
- ⁴¹Arifian, A. (2016). Redefinisi Kaum Paderi Melalui Metodologi Genealogis Foucauldian sebagai Rekonsiliasi Etnis Minangkabau-Batak. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, 18*(1), 13-19.
- ⁴²Jafnir Aboe Nain Datuk Kando Marajo. (2008). *Tuaniku Imam Bonjol: Sejarah Intelektual Islam di Minangkabau (1784-1832).* Padang: Penerbit Padang.
- ⁴³Kahin, A. (2008). *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatra Barat dan Politik Indonesia (1926-1998).* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- ⁴⁴Graves, E. (2007). *Asal Usul Elite Minangkabau Modern.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- ⁴⁵Amran, R. (1988). *Sumatera Barat, Pemberontakan Pajak 1908 (Bag. I Perang Kamang).* Jakarta: Gita Karya.
- ⁴⁶Lionar, U., Mulyana, A., & Yulifar, L. (2020). Plakat Panjang Hingga Perang Kamang: Gerakan Rakyat Minangkabau Menentang Pajak Kolonial Belanda. *Historis: Jurnal*

Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah, 5(2), 113-122.

- ⁴⁷Chamsah, Bachtiar, dkk. 2009. "Gerakan Paderi, Pahlawan dan Dendam Sejarah". Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- ⁴⁸Dobbin, Christine. 2008. *Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam, dan Gerakan Paderi*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- ⁴⁹Hadi, Wisran. 2002. *Empat Lakon Perang Paderi*. Bandung: Angkasa.
- ⁵⁰Hadler, Jeffrey. 2010. *Sengketa Tiada Putus (Matriakat, Reformisme Islam dan Kolonialisme di Minangkabau)*. Jakarta: Freedom.
- ⁵¹Nain, Sjafnir Aboe. 2008. *Tuanku Imam Bonjol (Sejarah Intelektual Islam 1784-1832)*. Padang: Penerbit Padang
- ⁵²Mhd Nur, dkk, *Perjuangan Sultan Alam Bagagar Syah Dalam Melawan Penjajah Belanda...*,p. 74.
- ⁵³Anis, M. (2022). PENGARUH HIKAYAT PERANG SABIL TERHADAP SEMANGAT PERJUANGAN RAKYAT ACEH DALAM PERANG ACEH MELAWAN BELANDA (1873-1903). *SEUNEUBOK LADA: Jurnal ilmu-ilmu Sejarah, Sosial, Budaya dan Kependidikan*, 9(1), 76-85.
- ⁵⁴Siahaan, S., Hendra, A., & Midhio, I. W. (2021). Strategi Perang Semesta Dalam Perang Aceh (1873-1912). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(11), 2537-2548.

-
- ⁵⁵Anis, M. (2022). PENGARUH HIKAYAT PERANG SABIL TERHADAP SEMANGAT PERJUANGAN RAKYAT ACEH DALAM PERANG ACEH MELAWAN BELANDA (1873-1903). *SEUNEUBOK LADA: Jurnal ilmu-ilmu Sejarah, Sosial, Budaya dan Kependidikan*, 9(1), 76-85.
- ⁵⁶Daerah kekuasaan aalah daerah daya di aceh barat, Zakariah Ahmad Sekitar *Kerajaan Aceh dalam tahun 1520-1675* (Medan: Monora 1972. H. 85
- ⁵⁷D. G. E. Hall, *A. History of South East Asia* (London: Macmillan & co Ltd, 1960)h. 257
- ⁵⁸Mohammad Said, Aceh sepanjang Abad jilid 1..., 480-482
- ⁵⁹Mohammad Said, Aceh sepanjang Abad jilid 1..., 532
- ⁶⁰Fitriyah, L. (2019). *Perang Aceh 1873-1903 surutnya hubungan diplomasi Kesultanan Aceh dan Turki Utsmani* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- ⁶¹Edward L. Poelinggomang, Makassar Abad XIX: Studi tentang Kebijakan Perdagangan Maritim, h. 29
- ⁶²Baca QS al-Isrā'/17: 70&QS al-Jāsiyah/45: 12
- ⁶³Yani, A. (2018). Dampak Perang Makassar terhadap Umat Islam Sulawesi Selatan Abad XVII-XVIII M. *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan*, 6(1), 107-131.

⁶⁴Kamaruddin dkk. Pengkajian Transliterasi dan terjemahan Lontarak Bilang Raja Gowa-Tallok (Naskah Makassar), h.88

⁶⁵Henri Chabert Lior & Siti Maryam (ed.), *Bo' Sangaji Kai*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), h. xviii. Dalam Lontarak Bilang Gowa Tallok disebutkan bahwa penaklukan Bima dipimpin oleh Lo'mo' Mandallé, ia tiba di Bima bulan April 1617 M. dan menaklukkannya. Kamaruddin dkk. Pengkajian Transliterasi dan terjemahan Lontarak Bilang Raja Gowa-Tallok (Naskah Makassar), h. 9.

⁶⁶Abd. Razak Daéng Patunru, *Sejarah Gowa*, h. 41.

⁶⁷Lontarak Boné, h. 9. Diartikan secara bebas oleh penulis

⁶⁸Lontarak Boné, h. 7-8. Diartikan secara bebas oleh penulis

⁶⁹Setelah berperang selama tiga tahun baru pada pada bulan Juni 1669 M. VOC menduduki dan menghancurkan Benteng Somba Opu, benteng terkuat Kesultanan Makassar dan berhasil memaksa penguasa Makassar menerima dan patuh terhadap Perjanjian Bungaya. Anthony Reid, *Charting the shape of early modern Southeast Asia*, terj. Sori Siregar dkk.,: *Sejarah Modern Awal Asia Tenggara: Sebuah Pemetaan*, h. 164; Leonard Y. Andaya, *The Heritage of Arung Palakka: A History of South Sulawesi (Celebes) In the Seventeenth Century*, terj.

Nurhady Simorok, Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke17, h. 163.

⁷⁰ Muchlis Paeni, “Membedah Perjanjian Bongaya” (Makalah yang disajikan pada Seminar Membedah Perjanjian Bongaya 1667 oleh Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumberdaya Republik Indonesia, Makassar, 21 Desember 2015), h. 2.

⁷⁰ Dias Pradadimara & Muslimin A.R. Effendy (ed.), Kontinuitas & Perubahan dalam sejarah Sulawesi Selatan,(Yogyakarta: Ombak, 2004), h. 43.

⁷¹Dias Pradadimara & Muslimin A.R. Effendy (ed.), Kontinuitas & Perubahan dalam sejarah Sulawesi Selatan,(Yogyakarta: Ombak, 2004), h. 43.

⁷²Pada abad ke XVIII semua kerajaan besar di Nusantara menghadapi kekuatan Belanda (VOC) berada dalam suasana membangun pandangan hidup yang didasarkan pada ajaran Islam. Mattulada, Menyusuri Jejak Makassar Dalam Sejarah, h. 119. Bahkan, di Sulawesi Selatan sejak penerimaan Islam pada awal abad XVII M., maka Islam menjadi penghubung para pemimpin dan struktur hierarchis dalam masyarakat, batas-batas kewarganegaraan kelompok kaum dan kekerabatan serta pelapisan masyarakat menjadi semakin lunak

⁷³Abd. Razak Daéng Patunru, Sejarah Gowa, h. 50-55; Suriadi Mappangara (ed.), Ensilokpedia Tokoh dan Peristiwa Sejarah Sulawesi Selatan, (Makassar: Bidang Sejarah dan

Purbakala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sul-Sel, 2012), h. 355-357.

⁷⁴Muchlis Paeni, "Membedah Perjanjian Bongaya" (Makalah yang disajikan pada Seminar Membedah Perjanjian Bongaya 1667 oleh Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumberdaya Republik Indonesia, Makassar, 21 Desember 2015), h. 6.

⁷⁵Mattulada, Sejarah, Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan, (Cet. I, Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1998), h. 299.

⁷⁶ Leonard Y. Andaya, *The Heritage of Arung Palakka: A History of South Sulawesi (Celebes) in the Seventeenth Century*, terj. Nurhady Simorok, *Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17*, h. 162.

⁷⁷ Lontarak Wajo (Tawang Matellué), h. 338. Diartikan secara bebas oleh penulis

⁷⁸Abu Haif, *Ritual Dalam Tradisi Mappanre Tasi Nelayan Bugis di Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan: Akulturasi Islam dan Budaya Lokal, "Disertasi"*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018), h. 51.

⁷⁹Opu adalah gelar kebangsawanan bagi bangsawan dari Luwu di Sulawesi Selatan. Itulah sebabnya Buya Hamka menyebut kelima opu tersebut sebagai anak raja Luwu. A. Moein MG., *Bunga Rampai; Menggali Nilai Sejarah dan Kebudayaan SULSELRA*; Siri & Paccé,

(Ujung Pandang: SKU Makassar Press, 1977), h. 85. Adapun Kitab Tuhfat al-Nafis menyebut kelima opu tersebut adalah bangsawan tinggi Bugis dari Luwu (Sulawesi Selatan). Raja Ali Haji, Tuhfat al-Nafis, (Singapura: Malaysia Publications LTD, 1965), h. 18.

⁸⁰ Raja Ali Haji, Tuhfat al-Nafis, h. 19; A. Moein MG., Bunga Rampai; Menggali Nilai Sejarah dan Kebudayaan SULSELRA; Siri & Paccé, (Ujung Pandang: SKU Makassar Press, 1977), h. 85.

⁸¹ Maswadi Rauf, Konsensus dan Konflik Politik (Jakarta: Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas, 2000), h. 9.

⁸² Pelras. Sulawesi Selatan Sebelum Datangnya Islam Berdasarkan, Kesaksian Bangsa Asing Dalam Citra Masyarakat Indonesia (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), h. 253.

⁸³ Abdul Masjid dan restu gunawan, makasar sebagai kota maritim (Jakarta: cv putra prima, 2000), h. 52.

⁸⁴ M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern (Jakarta: Gajah Mada University pres, 1992), h. 37.

⁸⁵ Onghokham, Bentuk Nrgara di Indonesia dan Aspek Internasional (Jakarta: LP3ES, 1984), h.26.

-
- ⁸⁶Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiah II* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), h. 235.
- ⁸⁷Tim Penulis PUSPINDO, *Sejarah Pelayaran Niaga Di Indonesia jilid I: "Pra Sejarah Hingga 17 Agustus 1945"*, (Jakarta: Yayasan PUSPINDO, 1990), h. 62.
- ⁸⁸Anwar Thosibo, "Peranan Suku Bugis-Makassar dalam Aktivitas Perdagangan di Kerajaan Gowa-Tallo Abad XVII" (Jakarta: Depdikbud, 1991), h. 274.
- ⁸⁹Antonio Galvao, *Historia das Moluccas*, tr. Herbert M. Yacobs SJ. Rome: Jesuit Historical Institute, 1971, p. 36
- ⁹⁰P.H. van der Kemp, *Het Ned. Indische Bestuur van 1817 op 1818*. Martinus Nyhoff s'Gravenhage, 1917, p. 323 f.
- ⁹¹Naidah, *Sejarah Ternate*, (1878), p. 382.
- ⁹²Leirissa, R.Z., et al.1999.*Sejarah Kebudayaan Maluku*.Jakarta: DepDikBud.RI.
- ⁹³Suaedy, A. (2000). *Luka Maluku: militer terlibat*. Institut Studi Arus Informasi.
- ⁹⁴Safi, J. (2017). Konflik Komunal: Maluku 1999-2000. *ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah*, 13(1).
- ⁹⁵Erman, Erwiza (pengantar) dalam Nordholt, Henk Schulte 2002. *Kriminalitas Modernitas dan Identitas dalam Sejarah Indonesia*. (Pengantar) Erwiza Erman, Peneliti

pada Pusat Studi Sumberdaya Regional, LIPI.
Yogyakarta: Pustaka Pelajara.

⁹⁶Mansyur, S. (2006). Sistem Pertahanan Di Maluku Abad XVII-XIX (Kajian terhadap pola sebaran benteng). *Kapata Arkeologi*, 47-63.

⁹⁷Hanna, W.A, 1983, Kepulauan Banda Kolonialisasi dan Akibatnya di Kepulauan Pala, Jakarta: PT. Gramedia.

⁹⁸Kustoro, L. P., & Rumere, Y. (2004). Rempah Timur dalam Kuliner Barat: Upaya Penyediaan dan Penggunaannya. *Makalah dalam Berkala Arkeologi Sangkhakala, Medan: Balai Arkeologi Medan.*

⁹⁹Suantika, I. W. (2005). Peran dan Fungsi Benteng Peninggalan Masa Kolonial bagi Pembangunan Daerah Maluku”, Dalam Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi (EHPA).

¹⁰⁰Suantika, I Wayan, 2005 Peran dan Fungsi Benteng Peninggalan Masa Kolonial bagi Pembangunan Daerah Maluku”, Dalam Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi (EHPA) Yogyakarta 2005 Belum Terbit

¹⁰¹Hanna, W.A, 1983 Kepulauan Banda Kolonialisasi dan Akibatnya di Kepulauan Pala, Jakarta: PT. Gramedia.

¹⁰²Bosworth Cliffor Edmund (2007) *Historic Cities of The Islamic Word Brill.* h. 317

¹⁰³Andaya, BW; Andaya, LY (2017). *‘A New World is Created’, 1819–74.* London: Macmillan Education UK. h. 122–164

-
- ¹⁰⁴Hermentrude (1887-11-19). ""Way" in Shakspeare". *Notes and Queries*. s7-IV (99): 405–405
- ¹⁰⁵Momann, Imke (2018-02-06). IV. *Les cités HLM – lieux de flâneurs ?*. Hermann. h. 139–144.
- ¹⁰⁶Frank, Gisela (1990). *Netzwerküberwachungsprogramme*. Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag. h. 86–87
- ¹⁰⁷Marconot, Jean-Marie (1990). "Le français parlé dans un quartier HLM". *Langue française*. 85 (1): 68–81
- ¹⁰⁸Sejarah perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme di daerah maluku
- ¹⁰⁹Fraassen, Bas C. van (1980-12-11). *Arguments Concerning Scientific Realism*. Oxford University Press. h. 6–40.
- ¹¹⁰Raditya, Iswara N. "Keruwetan Perang Ternate-Portugis vs Tidore-Spanyol
- ¹¹¹Marconot, Jean-Marie (1990). "Le français parlé dans un quartier HLM". *Langue française*. 85 (1): 68–81
- ¹¹²Devide et impera yaitu politik adu domba, lihat: *devide et impera*.
<http://serbasejarah.wordpress.com/2022/012/13>".
Diakses 13 Desember 2022.
- ¹¹³H.G. Manyur, *Perang Banjar*, (Banjarmasin: CV Rapi, 1979) h. 7.

-
- ¹¹⁴Sartono Kartodirjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900 dari Emporium sampai Imperium, (Jakarta: Gramedia, 1987) h. 384.
- ¹¹⁵W.A, van Rees, 1865, De Bandjermasinsche Krijg 1859-1863, (Arnhem: D.A. Thieme) h. 12.
- ¹¹⁶Terjemah oleh H.G, Mayur, dari buku W.A, van Rees, 1865. De Bandjermasinsche Krijg 1859-1863, (Arnhem: D.A. Thieme) h.12.
- ¹¹⁷Suyono, Peperangan di Kerajaan di Nusantara “Penelusuran Kepustakaan Sejarah”, (Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2003) h. 207.
- ¹¹⁸Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 221.
- ¹¹⁹Marwati Djoened Poesponegoro, Sejarah Nasional IndonesiaIV(Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 52.
- ¹²⁰Idwar Saleh,Sejarah Daerah Kalimantan Selatan (Kalimantan Selatan: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Kalimanta Selatan, 1977), 32.
- ¹²¹Akhwan Mukarrom, Kerajaan-Kerajaan Islam Indonesia(Jakarta: Jauhar Surabaya,2010), 92.
- ¹²²dwar Saleh, Sekilas Mengenai Daerah Banjar Dan Kebudayaan Sungainya Sampai Dengan Akhir(Kalimantan Selatan: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1983), 14

-
- ¹²³Poesponegoro, Sejarah Nasional Indonesia IV, 218
- ¹²⁴Saleh, Sekilas Mengenai Daerah Banjar Dan Kebudayaan Sungainya Sampai Dengan Akhir, 15
- ¹²⁵Saleh, Sekilas Mengenai Daerah Banjar Dan Kebudayaan Sungainya Sampai Dengan Akhir , 15.
- ¹²⁶Wikipedia, Demang Lehman, http://id.wikipedia.org/wiki/Demang_Lehman. Diakses 17 Desember 2023.
- ¹²⁷A. Gazali Usman, Kerajaan Banjar Sejarah Perkembangan Politik, Ekonomi, Perdagangan dan Agama Islam, (Banjarmasin: Lambung Mangkurat University Press, 1998) h. 247.
- ¹²⁸M. Idwar Saleh, Lukisan Perang Banjar, (Banjarmasin: Museum Kalimantan Selatan, 1993) h. 20.
- ¹²⁹A. Gazali Usman, Kerajaan Banjar Sejarah Perkembangan Politik, Ekonomi, Perdagangan dan Agama Islam, (Banjarmasin: Lambung Mangkurat University Press, 1998) h. 247.
- ¹³⁰John Saliba, Understanding New Religious...,h. 146-148
- ¹³¹Lorne L Dawson (ed), Cults and New Religious Movement (Malden MA; Balckwell Publishing ltd2003), h. 5
- ¹³²Donatella Della Porta & Mario Diani, Social movements; An Introduction (Malden MA;Balckwell Publishing 2006) h. 30

-
- ¹³³Plotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, diterjemahkan oleh Alimandan(Jakarta;Prenada. 2007), h. 325
- ¹³⁴Amin, M., Marjuni, A., & Azharia, D. (2018). Gerakan Sosial Keagamaan Masyarakat Perspektif Pendidikan Islam: Majelis Taklim Al-Mu'Minat. *Jurnal Aqidah-Ta*, 4 (2), h. 149-159.
- ¹³⁵Widayati, H. W. (2009). Dialog Pemikiran tentang Islam dan Negara di Indonesia Masa Awal Kemerdekaan. *Jurnal Dakwah: Media Komunikasi dan Dakwah*, 10(2), h. 213-228.
- ¹³⁶Endojowatiningsih, Dr. Maria Hanie, *Missio Ecclediae*, Jawa Timur: Institut Injil Indonesia, 2013. h. 108
- ¹³⁷Mustikawati, C. (2015). Pemahaman emansipasi wanita. *Jurnal kajian komunikasi*, 3 (1), h.65-70.
- ¹³⁸Kusdiana, A. (2011). Emansipasi wanita, kesadaran nasional, dan kesetaraan gender di pentas sejarah nasional indonesia. *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah*, 1(1),h. 18-31.
- ¹³⁹Amirul Ulum, Kartini Nyantri, (Yogyakarta: Pustaka Ulama, 2015), h. 47.
- ¹⁴⁰Sumarthana, Tuhan dan Agama dalam Pergulatan Batin Kartini, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993), h.7.
- ¹⁴¹Sumarthana, Tuhan dan Agama dalam Pergulatan Batin Kartini, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993), h. 7.

-
- ¹⁴²Armijn Pane, Habis Gelap Terbitlah Terang,(Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 8.
- ¹⁴³Amirul Ulum, Kartini Nyantri,(Yogyakarta: Pustaka Ulama, 2015),h. 48.
- ¹⁴⁴Jonk Tondowidjojo, Mengenang R.A. Kartini dan Tiga Saudara dari Jepara,(Surabaya: Yayasan Sanggar Bina Tama, 1991), h. 3.
- ¹⁴⁵ Amirul Ulum, Kartini Nyantri,(Yogyakarta: Pustaka Ulama, 2015), h. 54.
- ¹⁴⁶ Idjah Chodijah, Rintihan Kartini, (Jakarta : Ikhwan, 1986).
- ¹⁴⁷ Jonk Tondowidjojo, Mengenang R.A. Kartini dan Tiga Saudara Dari Jaepara, (Surabaya : Yayasan Sanggar Bina Tama, 1991), h. 6.
- ¹⁴⁸ Armijn Pane, Habis Gelap Terbitlah Terang,(Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 6.
- ¹⁴⁹Pramoedya Ananta Toer, Panggil Aku Kartini Saja, (Jakarta Timur : Lentera Dipantara, 2000), h. 44
- ¹⁵⁰Pramoedya Ananta Toer, Panggil Aku Kartini Saja, (Jakarta Timur : Lentera Dipantara, 2000), h. 55.
- ¹⁵¹ Armijn Pane, Habis Gelap Terbitlah Terang,(Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 12
- ¹⁵²Armijn Pane, Habis Gelap Terbitlah Terang,(Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 12

-
- ¹⁵³ Idjah Chodijah, Rintihan Kartini, (Jakarta : Ikhwan, 1986).
- ¹⁵⁴ Ahmad Fudhailidi L, Perempuan Lembah Suci : Kritik Atas Hadits-hadits Shahih, (Yogyakarta : PiarMdiq, 2002), h. 150.
- ¹⁵⁵ Sitisoesmandari Soeroto, Kartini, Sebuah Biografi, (Jakarta : PT. Gunung Agung, 1979).
- ¹⁵⁶ Muhammad Rifai, Biography Singkat 1925-2006 Pramoedya Ananta Toer, (Yogyakarta : Garasi House of Book, 2010), h. 232.
- ¹⁵⁷ B.H.M. Vlekke, Nusantara: sejarah Indonesia, 1 ed. (Jakarta: KPG, 2008), 348
- ¹⁵⁸ Harun Nasution, "The Islamic State in Indonesia: The Rise of the Ideology, the Movement for its Creation and the Theory of the Masjumi" (PhD Thesis, McGill University Libraries, 1965), 4.
- ¹⁵⁹ Chiara Formichi, Islam and the Making of the Nation: Kartosuwiryo and Political Islam in 20th Century Indonesia (Brill, 2012), 1.
- ¹⁶⁰ Merle Calvin Ricklefs, A History of Modern Indonesia since c. 1200 (Macmillan International Higher Education, 2008), 193-94. Politik Etis adalah politik "balas budi" pemerintah
- ¹⁶¹ Merle Calvin Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004, III (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007), 320.

¹⁶²Sazalil Kirom, 'Buruh Dan Kekuasaan: Dinamika Perkembangan Gerakan Serikat Pekerja Di Indonesia (Masa Kolonial - Orde Lama)', *Journal Pendidikan Sejarah*, 1.1 (2013).

¹⁶³Kleden, Ignas, *Apresiasi Kesenian Tradisional*. Semarang: IKIP Semarang, Nasional, Balai Pustaka.2019.

¹⁶⁴Jeanne Francoise, 'Pemikiran Politik Islam Modern: Peran Majelis Ulama Indonesia', *The 1st UICIHSS (International Conference on Islamic Humanities and Social Sciences)*, 10.2 (2017).

¹⁶⁵Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004*, 344.

¹⁶⁶Jeanne Francoise, 'Pemikiran Politik Islam Modern: Peran Majelis Ulama Indonesia', *The 1st UICIHSS (International Conference on Islamic Humanities and Social Sciences)*, 10.2 (2017).

¹⁶⁷Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Pergerakan Nasional dan Kolonialisme sampai Nasionalisme Jilid 2* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 1993), h. 6

¹⁶⁸Abu Hanifah, *Renungan Perjuangan Bangsa Dulu dan Sekarang* (Jakarta: Yayasan Idayu, 1978), h. 8- 10

¹⁶⁹Oespoprodjo W, *Jejak-jejak Sejarah 1908- 1928. Terbentuknya Suatu Pola* (Bandung: Remaja Karya, 1986), h. 8

¹⁷⁰A. K. Pringgodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia* (Jakarta: Dian Rakyat, 1980), h. 4

-
- ¹⁷¹Yasmis, Y. (2009). Sarikat Islam Dalam Pergerakan Nasional Indonesia (1912-1927). *Jurnal Sejarah Lontar*, 6(1), 21-31
- ¹⁷²Rozabi, I., & Hoetoro, A. (2016). Sarekat Dagang Islam: Kemandirian Ekonomi Islam Dibawah Tekanan Pemerintah Kolonial Belanda. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3(2)
- ¹⁷³Yasmis, Y. (2009). Sarikat Islam Dalam Pergerakan Nasional Indonesia (1912-1927). *Jurnal Sejarah Lontar*, 6(1), 21-31
- ¹⁷⁴Sartono Kartodirdjo, Sejarah Pergerakan Nasional dan Kolonialisme sampai Nasionalisme Jilid 2 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 1993), h. 108
- ¹⁷⁵Yasmis, Y. (2009). Sarikat Islam Dalam Pergerakan Nasional Indonesia (1912-1927). *Jurnal Sejarah Lontar*, 6(1), 21-31
- ¹⁷⁶Ugroho Notosusanto, Djoned Poespoprodjo, Marwari. Sejarah nasional Indonesia Jilid V (Jakarta: Balai Pustaka, 1966), h..90
- ¹⁷⁷Leirissa, R. Z. Terwujudnya Suatu Gagasan Sejarah Masyarakat Indonesia 1990-1950. (Jakarta: Akademi Presindo, 1985), h. 37
- ¹⁷⁸Abu Hanifah, Renungan Perjuangan Bangsa Dulu dan Sekarang (Jakarta: Yayasan Idayu, 1978), h. 17
- ¹⁷⁹Yasmis, Y. (2009). Sarikat Islam Dalam Pergerakan Nasional Indonesia (1912-1927). *Jurnal Sejarah Lontar*, 6(1), 21-31.

-
- ¹⁸⁰Haji Agus Salim. *Kelompok Politik Dalam Sarekat Islam*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), h. 27.
- ¹⁸¹Abu Hanifah. *Renungan Perjuangan Bangsa Dulu dan Sekarang* (Jakarta: Idayu, 1978), h. 79
- ¹⁸²MC. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), h. 227
- ¹⁸³MC. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), h. 228
- ¹⁸⁴Yasmis, Y. (2008). PERANAN BUDI UTOMO DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT. *Jurnal Sejarah Lontar*, 5(1), 29-38
- ¹⁸⁵Husda, H. (2020). Rekonstruksi Sejarah Kebangkitan Nasional. *Jurnal Adabiya*, 21(2), h. 31-45
- ¹⁸⁶Boven Digoel terletak di pulau Papua yang merupakan suatu wilayah yang masih terasingkan pada saat itu. Sebuah daerah hutan lebat yang terletak di sebelah Timur sungai Digul Hilir, Irian Jaya. Daerah yang luasnya hampir 10.000 hektar ini merupakan tempat yang terkenal sebagai tempat pembuangan para tokoh pergerakan nasional Indonesia.
- ¹⁸⁷Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1994), h. 30

-
- ¹⁸⁸Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1994), h. 30
- ¹⁸⁹G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke-20 Dari Kebangkitan Nasional sampai Linggarjati*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), h. 28.
- ¹⁹⁰Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1994), h. 30
- ¹⁹¹G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke-20 Dari Kebangkitan Nasional sampai Linggarjati*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), h. 28-29
- ¹⁹²MC. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), h. 248
- ¹⁹³Akira Nagazumi. *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia* (Jakarta: Grafiti Press, 1989), h. 50
- ¹⁹⁴Akira Nagazumi. *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia* (Jakarta: Grafiti Press, 1989), h. 53
- ¹⁹⁵Yasmis, Y. (2008). PERANAN BUDI UTOMO DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT. *Jurnal Sejarah Lontar*, 5(1), 29-38
- ¹⁹⁶Vickers, Adrian. 2005. *A History of Modern Indonesia*, Cambridge, UK: Cambridge University Press, h. 73

-
- ¹⁹⁷Akira Nagazumi. *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia* (Jakarta: Grafiti Press, 1989),h. 89
- ¹⁹⁸St. Nurhayati Dkk, *MUHAMMADIYAH dalam Perspektif Sejarah, Organisasi, dan Sistem Nilai* (Yogyakarta: Cet. 1. Trust Media Publihing). h. 26
- ¹⁹⁹Verenigde Oost Indische Compagnie, merupakan sarikat dagang Hindia Belanda.
- ²⁰⁰St. Nurhayati Dkk, *MUHAMMADIYAH dalam Perspektif Sejarah, Organisasi, dan Sistem Nilai* (Yogyakarta: Cet. 1. Trust Media Publihing). h. 28
- ²⁰¹(Muhammadiyah, CS, *Sejarah Singkat* <http://m.muhammadiyah.or.id/id/content-178-det-sejarahsingkat.html> di akses pada 12 Oktober 2022 pada pukul 11.27 WITA)
- ²⁰²Ahmad Adaby Darban, *Sejarah Kauman: Menguak Identitas Kampung Muhammadiyah* (Tangerang: Tarawang, 2000), h. 34
- ²⁰³Daoed Sampoerno. *Membina Sumber Daya Manusia Muhammadiyah Yang Berkualitas*. dalam Edy Suandi Hamid (ed.). *Rekontruksi Gerakan Muhammadiyah Pada Era Multi Peradaban*, (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2001), h. 176
- ²⁰⁴Imron Nasir dkk, *manhaj gerakan muhammadiyah*. (Suara muhammadiyah:Cet IV, Yogyakarta,2017), h. 240-242

-
- ²⁰⁵Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Buku Agenda Musyawarah Nasional Ke-27 Tarjih Muhammadiyah*, pada Tanggal 1-4 April 2010 di Universitas Muhammadiyah, h. 49
- ²⁰⁶Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir al-Razi, *Mulkhtar al-Shihah* (Kairo: Dar al-Hadis, 2008), 59
- ²⁰⁷Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih dan Metode Penetapan Hukum dalam Tarjih Muhammadiyah*, Makalah disampaikan pada Acara Pelatihan Kader Tarjih Tingkat Nasional Tanggal 26 Safar 1433 H / 20 Januari 2012 di Universitas Muhammadiyah Magelang, 2-3
- ²⁰⁸Hamdan, *Paradigma Baru Pendidikan Muhammadiyah* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 11
- ²⁰⁹Hamdan, *Paradigma Baru Pendidikan Muhammadiyah* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 12
- ²¹⁰zuhairin, dkk., *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1986), h. 201
- ²¹¹Syamsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 100
- ²¹²Kyai Syuja*, *Islam Berkemajuan: Kisah Perjuangan K.H. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah Masa Awal* (Banten: Al-Wasath, 2009), h. 192-193

-
- ²¹³Abdul Munir Mul Khan, *Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 227
- ²¹⁴Abdul Mut'i, *Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Tokoh Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 204
- ²¹⁵AR. Fakhruddin, *Akhlaq Pemimpin Muhammadiyah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005), h. 17
- ²¹⁶Mu'arif, *Modernisasi Pendidikan Islam: Sejarah dan Perkembangan Kwekschool Moehammadiyah 1923-1932* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012), h. 109
- ²¹⁷Yunan Yusuf, *Pemikiran Kalam Ulama Modern: K.H. Ahmad Dahlan dalam Alam Pikiran Islam Pemikiran Kalam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 226-227
- ²¹⁸Farih, A. (2016). Nahdlatul Ulama (NU) dan Kontribusinya dalam Memperjuangkan Kemerdekaan dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 24(2), 251-284.
- ²¹⁹Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU* (Surabaya: Bisma Satu Press, 1998), h. 36
- ²²⁰Lukman Hakim, dkk. 2004. *Perlawanan Islam Kultural: Relasi Asosiatif Pertumbuhan Civil Society dan Doktrin Aswaja NU* (Surabaya: Pustaka Eureka Berger, Peter L. 1991), h. 97.

-
- ²²¹Abdul Halim, *Sejarah Perjuangan KH. Abdul Wahab* (Bandung: Baru, 1970), h. 12-15
- ²²²Slamet Effendi Yusuf, *Mengukuhkan Tradisi Memodemisasi Organisasi* (t.t.: tp., t.th.), h. 19
- ²²³Chairul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama* (Surabaya: Duta Aksara Mulia, 2010), h. 3
- ²²⁴Masdar Farid Mas'udi, *Membangun NU Berbasis Masjid dan Umat* (Jakarta: LTMI-NU, 2007), h. 1
- ²²⁵Sya'roni As-Samfuriy. *Latar Belakang Lahirnya Nahdlatul Ulama NU*
- ²²⁶Siregar, S. (2011). *Nahdlatul Ulama (NU) di Medan (Studi Tentang Sejarah dan Peran Sosial Keagamaan Dari 1950-2010)*" (Doctoral dissertation, Pascasarja IAIN Sumatera Utara).
- ²²⁷Sudarno Shobron, *Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Dalam Pentas Politik Nasional* (Yogyakarta: Muhammadiyah University Press, 2003). 38
- ²²⁸Said Al-Qahtani dan Nasir bin Abdul Karim Al-„Aql, *Aqidah Ahlul Sunnah Wal Jamaah dan Kewajiban Mengikutinya* (Surabaya: Pustaka As-Sunnah, 2003), h. 12
- ²²⁹Shobron, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Dalam Pentas Politik Nasional.h. 53
- ²³⁰Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU* (Surabaya: Bisma Satu Press, 1998), h. 36. Lihat, KH. Achmad Siddiq,

Islam, Pancasila dan Ukhuwah Islamiyyah (Jakarta: Lajnah wa al-Nars PBNU dan Penerbit Sumber Barokah, 1985), h. 18-21

²³¹Zainul Milal Bizawie, *Laskar Ulama dan santrinya & Resolusi Jihad; Garda Depan Menegakkan Indonesia 1945-1949* (Jakarta: Pustaka Compass Tangerang, 1998), h. 208

²³²Syaifuddin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia* (Bandung: Al-Ma'arif, 1979), h. 29

²³³Nurlira Goncing, "Politik Nahdlatul Ulama dan Orde Baru", *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik UNHAS*, Vol. 1, N. 1, 2015, h. 67-68. Lihat juga: Ahmad Mansur Suryanegara, *Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1996) h. 235

²³⁴Anwar Harjono 1997. *Penjalanan Politik Bangsa, Menoleh Ke Belakang Menatap Masa Depan* Gema Insani Press, Jakarta. h.37.

²³⁵Anshari, S. (1997). *Piagam Jakarta, 22 Juni 1945: sebuah konsensus nasional tentang dasar negara Republik Indonesia (1945-1959)*. Gema Insani. 1997

²³⁶Tohari, C. (2015). Fiqh Keindonesiaan: Transformasi hukum Islam dalam sistem tata hukum di Indonesia. *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, 15(2), h. 403-432.

-
- ²³⁷Brata, I. B., & Wartha, I. B. N. (2017). Lahirnya Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia. *Jurnal Santiaji Pendidikan (JSP)*, 7(1).
- ²³⁸Khaeruman, B., & Ghazali, M. (2020). 4 pilar wawasan kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika
- ²³⁹Ardini, a. M. Proses perumusan dan pengesahan pancasila sebagai dasar negara republik indonesia.
- ²⁴⁰Endang saifudin anshari. 1997. Piagam Jakarta, 22 Juni 1945, Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949), insani press, Jakarta. h. 17
- ²⁴¹Endang Saifudin Anshari. 1997. Piagam Jakarta, 22 Juni 1945, Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949). (Jakarta: insani press) h. 18
- ²⁴²Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain Shihab, 'Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam Di Indonesia.h.50.
- ²⁴³Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain Shihab, 'Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam Di Indonesia.h.50

²⁴⁴Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain Shihab, 'Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam Di Indonesia.h.52-53.

²⁴⁵Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain Shihab, 'Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam Di Indonesia.h.63-64

²⁴⁶Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain Shihab, 'Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam Di Indonesia.h.64

²⁴⁷Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas'. di akses 31 Juli 2020.

²⁴⁸Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain Shihab, 'Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam Di Indonesia.h.64-65.

²⁴⁹Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain Shihab, 'Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam Di Indonesia.h.66.

²⁵⁰Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas'. di akses 31 Juli 2020

²⁵¹Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas'. di akses 31 Juli 2020

²⁵²Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas'. di akses 31 Juli 2020

²⁵³Nasution, A. T. Makalah Pancasila sebagai dasar negara.

²⁵⁴HarIshaq, I. (2012). *Aspirasi Partai Politik Islam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Suatu Tinjauan Historis)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

²⁵⁵Aidul Fitriaciada Azhari, 'KEDUDUKAN PIAGAMAN JAKARTA: Tinjauan Hukum Ketatanegaraan.h.9293

²⁵⁶Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain Shihab, 'Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam Di Indonesia.h.70

²⁵⁷Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain Shihab, 'Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam Di Indonesia.h,74.

²⁵⁸Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain Shihab, 'Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam Di Indonesia.h.79-80.

²⁵⁹Idul Fitriaciada Azhari, 'KEDUDUKAN PIAGAMAN JAKARTA: Tinjauan Hukum Ketatanegaraan. h.94.

²⁶⁰idul Fitriaciada Azhari, 'KEDUDUKAN PIAGAMAN JAKARTA: Tinjauan Hukum Ketatanegaraan. h.94

-
- ²⁶¹Mr. A. K. Pringgodigdo, *Sedjarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Pustaka Rakjat, Djakarta, 1950, h. 23-24
- ²⁶²Makmun Salim, *Komunisme dan Kegiatannya di Indonesia*, Dinas Sejarah Militer Angkatan Darat, Bandung, 1972 h. 16.
- ²⁶³Soepeno, *Kamus Populer*, Cetakan ke enam, Ksatria, Surabaya, tidak bertahun, h. 85.
- ²⁶⁴Indonesia. Dimana pada tanggal 23 Mei 1920 ISDV diubah menjadi PKI (Perserikatan Komunis India)
- ²⁶⁵Mr. A. K. Pringgodigdo, *Sedjarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Pustaka, Pustaka Rakjat, Djakarta, 1950, h. 37
- ²⁶⁶Mr. Susanto Tirtoprodjo, *Sedjarah Pergerakan Nasional Indonesia*, PT Pembangunan Djakarta, 1962, hal. 38.
- ²⁶⁷Makmun Salim, *Komunisme dan Kegiatannya di Indonesia*, Dinas Sejarah Militer Angkatan Darat, Bandung, 1972 h. 21
- ²⁶⁸Dinas Sedjarah Meliter Angkatan Darat, *Kontra Revolusi Gestapu PKI*, Bandung, 1966. h. 4
- ²⁶⁹Mr. A. K. Pringgodigdo, *Sedjarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Pustaka Rakjat, Djakarta, 1950, h. 45
- ²⁷⁰Prof. Iwa Kusuma Sumantri SH., *Sedjarah Revolusi Indonesia*, Masa Revolusi Bersenjata, Cetakan II, Grafika, Jakarta, tidak bertahun, h. 12

-
- ²⁷¹Makmun Salim, *Komunisme dan Keegiatannya di Indonesia*, Dinas Sejarah Militer Angkatan Darat, Bandung, 1972 h.25-26.
- ²⁷²Prof. Iwa Kusuma Sumantri SH., *Sedjarah Revolusi Indonesia*, Masa Revolusi Bersenjata, Cetakan II, Grafika, Jakarta, tidak bertahun, h. 36
- ²⁷³Muhammad Dimjati, *Sedjarah Perdjuaan Indonesia*, Penerbit Widjaja, Jakarta, 1951, h, 180
- ²⁷⁴Jendral A.H. Nasution, *Tentara Nasional Indonesia*, Jilid II, Seruling Massa, Jakarta, 1971, h. 235-236.
- ²⁷⁵Jendral A.H. Nasution, *Tentara Nasional Indonesia*, Jilid II, Seruling Massa, Jakarta, 1971, h. 16
- ²⁷⁶Dr. A.H. Nasution, *Sedjarah Perdjuaan Nasional Indonesia*, Mega Book Store, Jakarta, 1966, h. 131-132.
- ²⁷⁷Arnold C Brackman, *Indonesian Comunism*, Third Printing A Praeger Publisher, New York, 1963, page, 93.
- ²⁷⁸Pinardi, *Peristiwa Madiun 1948*, Inkopak-Hazera, Jakarta, 1966, h. 76.
- ²⁷⁹Prof. Dr. Slametmuljana, *Nasionalisme Sebagai Modal Perdjuaan Bangsa Indonesia*, Jilid II, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1969, h. 164-1965.
- ²⁸⁰Dr. A.H. Nasution, *Sedjarah Perdjuaan Nasional Indonesia*, Mega Book Store, Jakarta, 1966, h. 133-134

-
- ²⁸¹Drs. Moela Marboen, Gerakan Operasi Militer I Untuk Menumpas Pemberontakan Madiun, Mega Book Store, Jakarta, 1965, h. 6.
- ²⁸²Drs. Moela Marboen, Gerakan Operasi Militer I Untuk Menumpas Pemberontakan Madiun, Mega Book Store, Jakarta, 1965, h.6-7
- ²⁸³Kementerian Penerangan Republik Indonesia, Republik Indonesia Daerah Istimewa Daerah Djogyakarta, Yogyakarta, 1953, hal. 283.
- ²⁸⁴Kementerian Penerangan Republik Indonesia, Republik Indonesia Daerah Istimewa Daerah Djogyakarta, Yogyakarta, 1953, h. 188
- ²⁸⁵Muhammad Dimjati, Sedjarah Perdjjuangan Indonesia , Penerbit Widjaja, Jakarta, 1951, h 182.
- ²⁸⁶Pinardi, Peristiwa Madiun 1948, Inkopak-Hazera, Jakarta, 1966, h. 101-102
- ²⁸⁷Yayasan Penerbit Diponegoro, Sedjarah TNI Angkatan Darat Kodam VII/Diponegoro, Sirnaning Jaks o Katon Gapuraning Ratu, Semarang, 1966, hSS. 145.